Editor:
KH. Abdurrahman Wahid

ILUSI NEGARA ISLAM

Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia

Prolog:
Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif

Epilog:
KH. A. Mustofa Bisri

ILUSI NEGARA ISLAM

Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia

ILUSI NEGARA ISLAM

Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia

Editor
KH. Abdurrahman Wahid

Prolog
Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif

Epilog
KH. A. Mustofa Bisri

Daftar Isi

Prolog

Masa Depan Islam di Indonesia

Oleh: Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif

Sebenarnya dari segi jumlah, tidak ada yang harus dirisaukan tentang masa depan Islam di Indonesia. Sensus penduduk tahun 2000 mencatat bahwa jumlah umat Islam di negeri ini berada pada angka 88,22%, sebuah persentase yang tinggi sekali. Begitu juga orang lain tidak perlu cemas membaca angka statistik itu, karena dua sayap besar umat Islam, NU dan Muhammadiyah, sudah sejak awal bekerja keras untuk mengembangkan sebuah Islam yang ramah terhadap siapa saja, bahkan terhadap kaum tidak beriman sekalipun, selama semua pihak saling menghormati perbedaan pandangan. Tetapi bencana bisa saja terjadi bila pemeluk agama kehilangan daya nalar, kemudian menghakimi semua orang yang tidak sefaham dengan aliran pemikiran mereka yang monolitik. Contoh dalam berbagai unit peradaban umat manusia tentang sikap memonopoli kebenaran ini tidak sulit untuk dicari. Darah pun sudah banyak tertumpah akibat penghakiman segolongan orang terhadap pihak lain karena perbedaan penafsiran agama atau ideologi.

Dalam sejarah Islam pun, kelompok yang merasa paling sahih dalam keimanannya juga tidak sulit untuk dilacak. Jika sekadar

merasa paling benar tanpa menghukum pihak lain, barangkali tidaklah terlalu berbahaya. Bahaya akan muncul bilamana ada orang yang mengatasnamakan Tuhan, lalu menghukum dan bahkan membinasakan keyakinan yang berbeda. Dalam bacaan saya, dalam banyak kasus, al-Qur'an jauh lebih toleran dibandingkan dengan sikap segelintir Muslim yang intoleran terhadap perbedaan. Fenomena semacam ini dapat dijumpai di berbagai negara, baik di negara maju, mau pun di negara yang belum berkembang, tidak saja di dunia Islam. Apa yang biasa dikategorikan sebagai golongan fundamentalis berada dalam kategori ini. Di Amerika misalnya kita mengenal golongan fundamentalis Kristen yang di era Presiden George W. Bush menjadi pendukung utama rezim neo-imperialis ini. Di dunia Islam, secara sporadis sejak beberapa tahun terakhir gejala fundamentalisme ini sangat dirasakan. Yang paling ekstrem di antara mereka mudah terjatuh ke dalam perangkap terorisme.

Ada beberapa teori yang telah membahas fundamentalisme yang muncul di dunia Islam. Yang paling banyak dikutip adalah kegagalan umat Islam menghadapi arus modernitas yang dinilai telah sangat menyudutkan Islam. Karena ketidakberdayaan menghadapi arus panas itu, golongan fundamentalis mencari dalil-dalil agama untuk "menghibur diri" dalam sebuah dunia yang dibayangkan belum tercemar. Jika sekadar "menghibur," barangkali tidak akan menimbulkan banyak masalah. Tetapi sekali mereka menyusun kekuatan politik untuk melawan modernitas melalui berbagai cara, maka benturan dengan golongan Muslim yang tidak setuju dengan cara-cara mereka tidak dapat dihindari. Ini tidak berarti bahwa umat Islam yang menentang cara-cara mereka itu telah larut dalam modernitas. Golongan penentang ini tidak kurang kritikalnya menghadapi arus modern ini, tetapi cara yang ditempuh dikawal oleh kekuatan nalar dan pertimbangan yang jernih, sekalipun tidak selalu berhasil.

Teori lain mengatakan bahwa membesarnya gelombang fun-

damentalisme di berbagai negara Muslim terutama didorong oleh rasa kesetiakawanan terhadap nasib yang menimpa saudara-saudaranya di Palestina, Kashmir, Afghanistan, dan Iraq. Perasaan solider ini sesungguhnya dimiliki oleh seluruh umat Islam sedunia. Tetapi yang membedakan adalah sikap yang ditunjukkan oleh golongan mayoritas yang sejauh mungkin menghindari kekerasan dan tetap mengibarkan panji-panji perdamaiaan, sekalipun peta penderitaan umat di kawasan konflik itu sering sudah tak tertahankan lagi. Jika dikaitkan dengan kondisi Indonesia yang relatif aman, kemunculan kekuatan fundamentalisme, dari kutub yang lunak sampai ke kutub yang paling ekstrem (terorisme), sesungguhnya berada di luar penalaran. Kita ambil misal praktik bom bunuh diri sambil membunuh manusia lain (kasus Bali, Marriot, dan lain-lain), sama sekali tidak bisa difahami. Indonesia bukan Palestina, bukan Kashmir, bukan Afghanistan, dan bukan Iraq, tetapi mengapa praktik biadab itu dilakukan di sini?

Teori ketiga, khusus untuk Indonesia, maraknya fundamentalisme di Nusantara lebih disebabkan oleh kegagalan negara mewujudkan cita-cita kemerdekaan berupa tegaknya keadilan sosial dan terciptanya kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat. Korupsi yang masih menggurita adalah bukti nyata dari kegaglan itu. Semua orang mengakui kenyataan pahit ini. Namun karena pengetahuan golongan fundamentalis ini sangat miskin tentang peta sosiologis Indonesia yang memang tidak sederhana, maka mereka menempuh jalan pintas bagi tegaknya keadilan: melaksanakan syari'at Islam melalui kekuasaan. Jika secara nasional belum mungkin, maka diupayakan melalui Perda-Perda (Peraturan Daerah). Dibayangkan dengan pelaksanaan syar'ah ini, Tuhan akan meridhai Indonesia. Anehnya, semua kelompok fundamentalis ini anti demokrasi, tetapi mereka memakai lembaga negara yang demokratis untuk menyalurkan cita-cita politiknya. Fakta ini dengan sendirinya membeberkan satu hal: bagi mereka bentrokan antara teori dan praktik tidak menjadi persoalan. Dalam ungkapan lain, yang terbaca di sini

adalah ketidakjujuran dalam berpolitik. Secara teori demokrasi diharamkan, dalam praktik digunakan, demi tercapainya tujuan.

Akhirnya, saya menyertai keprihatinan kelompok-kelompok fundamentalis tentang kondisi Indonesia yang jauh dari keadilan, tetapi cara-cara yang mereka gunakan sama sekali tidak akan semakin mendekatkan negeri ini kepada cita-cita mulia kemerdekaan, malah akan membunuh cita-cita itu di tengah jalan. Masalah Indonesia, bangsa Muslim terbesar di muka bumi, tidak mungkin dipecahkan oleh otak-otak sederhana yang lebih memilih jalan pintas, kadang-kadang dalam bentuk kekerasan. Saya sadar bahwa demokrasi yang sedang dijalankan sekarang ini di Indonesia sama sekali belum sehat, dan jika tidak cepat dibenahi, bisa menjadi sumber malapetaka buat sementara. Tetapi untuk jangka panjang, tidak ada pilihan lain, kecuali melalui sistem demokrasi yang sehat dan kuat, Islam moderat dan inklusif akan tetap membimbing Indonesia untuk mencapai tujuan kemerdekaan.

Jogjakarta, 18 Pebruari 2009

Pengantar Editor

Musuh dalam Selimut

KH. Abdurrahman Wahid

Buku yang sedang Anda baca ini merupakan hasil penelitian yang berlangsung lebih dari dua tahun dan dilakukan oleh LibForAll Foundation, sebuah institusi non-pemerintah yang memperjuangkan terwujudnya kedamaian, kebebasan, dan toleransi di seluruh dunia yang diilhami oleh warisan tradisi dan budaya bangsa Indonesia. Secara formal, kami bersama C. Holland Taylor adalah pendiri-bersama LibForAll Foundation, dan bersama-sama dengan KH. A. Mustofa Bisri, Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif, Prof. Dr. M. Amin Abdullah, Prof. Dr. Azyumardi Azra, Prof. Dr. Nasr Hamid Abu-Zayd, Syeikh Musa Admani, Prof. Dr. Abdul Munir Mulkhan, Dr. Sukardi Rinakit, dan Romo Franz Magnis-Suseno menjadi Penasehat LibForAll Foundation. Dalam kunjungan CEO LibForAll Foundation ke Mesir pada akhir Mei 2008, Syeikh al-Akbar al-Azhar, Muhammad Sayyid Tantawi juga menyatakan kesediaannya untuk menasehati LibForAll Foundation dalam usaha menghadirkan Islam sebagai *rahmatan lil-'âlamîn*. Dan sebenarnya, siapa pun di seluruh dunia yang berhati baik, berkemauan baik, dan punya perhatian kuat pada usaha-usaha mewujudkan keda-

maian, kebebasan, dan toleransi, secara kultural adalah keluarga LibForAll Foundation.

Dalam usaha dimaksud, LibForAll Foundation selalu mengutamakan pendekatan spiritual untuk menumbuhkan kesadaran yang mampu mendorong transformasi individual maupun sosial. Hal ini didasari kenyataan bahwa ketegangan batiniah antara roh dan hawa nafsu berdampak pada aktivitas lahiriah. Bahkan, ketegangan batiniah ini kerap memicu konflik-konflik lahiriah, baik antarindividu maupun sosial. Dalam konteks inilah, sabda Kanjeng Nabi Muhammad saw. kepada para sahabat, "*Raja'nâ min jihâd al-ashghar ilâ jihâd al-akbar*" (Kita pulang dari *jihad* kecil menuju *jihad* besar),[1] sepulang dari perang Badr menjadi sangat penting

1. Hadits ini sangat populer di antara para ulama tradisional dan para sufi, namun dianggap lemah (*dlâ'if*) oleh beberapa pihak dan ditolak oleh sekte Wahabi. Secara *riwâyah* hadits ini memang dinilai lemah. Tapi secara *dirâyah*, hadits ini konsisten dengan pesan utama *jihad* dalam Islam. Ini bisa dilihat dalam hadits lain sekalipun dengan redaksi berbeda namun secara *ma'nâwî* sejalan dengan maksud hadits di atas, seperti riwayat Ahmad ibn Hanbal, dalam hadits nomor 24678, 24692, dan 24465, "*Al-Mujâhid man jâhada nafsahu li-Llâh* atau *fi Allâh 'azz wa jall*" (Mujahid adalah orang yang berjihad terhadap dirinya demi Allah, atau dalam riwayat lain—dalam ('jalan menuju') Allah Yang Mahamulia dan Mahaagung) [baca dalam: Abu 'Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *Masnad Ahmad*, (Cairo: Mauqi' Wizârat al-Auqâf al-Mishriyyah, tt.)]. Bisa dilihat juga hadits yang dikemukakan dalam *Fath al-Qadîr* karya al-Syaukânî, "*Al-Mujâhid man jâhada nafsah fî thâ'at Allâh*" (Mujahid adalah orang yang berjihad terhadap dirinya dalam ketaatan kepada Allah), diriwayatkan oleh Ibn Jarîr, dan al-Hakim meyakininya shahih, diriwayatkan pula oleh Ibn Mardawaih dari 'Aisyah [al-Syukânî, *Fath al-Qadîr* (Cairo: Mauqi' al-Tafâsir, tt.), Vol. 5, h. 142]. Hal penting yang perlu ditekankan adalah bahwa jihad lebih menekankan pada usaha sungguh-sungguh untuk mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu. Al-Razy —misalnya— bahkan menekankan bahwa jihad dalam konteks perang (*qitâl*) pun harus diawali dengan kemenangan pertama dan terutama terhadap diri sendiri, seperti tidak munafik, tidak riya', dan tidak untuk kepentingan sendiri. Semua harus dilakukan secara ikhlas—yang berarti harus diawali dengan usaha mengendalikan diri agar aktivitas apa pun yang akan dilakukan tidak dikendalikan oleh hawa nafsu (baca dalam: Fakhruddin al-Râzî, *Mafâtih al-Ghaib* (Cairo: Mauqi' al-Tafâsir, tt.), vol. 7, h. 474). Kesimpulannya, hadits *Raja'na min*

untuk kita renungkan. Mendengar pernyataan tersebut, para sahabat sangat terkejut. Mereka bertanya-tanya, perang (*qitâl*) apa lagi yang lebih dahsyat. Rasulullah saw. menjelaskan, "Perang melawan hawa nafsu." Para sahabat terdiam, sadar betapa berat dan sulit melawan musuh di dalam diri. Selain sulit diidentifikasi, melawan musuh dalam selimut juga menuntut ketegasan dan ketegaran emosional karena ia merupakan bagian tak terpisahkan dari diri setiap orang.

Hawa nafsu adalah suatu kekuatan yang selalu menyimpan potensi destruktif dan membuat jiwa selalu resah, gelisah, dan tidak pernah tenang. Para ulama kerap membandingkan hawa nafsu dengan binatang liar. Siapa pun yang telah menjinakkan hawa nafsunya, dia akan tenang dan mampu menggunakan nafsunya untuk melakukan aktivitas dan/atau mencapai tujuan-tujuan luhur. Sebaliknya, siapa pun yang masih dikuasai hawa nafsunya, dia akan selalu gelisah dan ditunggangi oleh hawa nafsunya, dia membahayakan dirinya dan orang lain.

Dari perspektif ini ada dua kategori manusia: *Pertama*, orang-orang yang sudah mampu menjinakkan hawa nafsunya sehingga bisa memberi manfaat kepada siapa pun. Mereka adalah pribadi-pribadi yang tenang dan damai (*al-nafs al-muthmainnah*) dan menjadi representasi kehadiran spiritualitas, *khalîfat Allah* yang sebenarnya (dalam konteks *Mahabharata*, para Pandawa). *Kedua*, mereka yang masih dikuasai hawa nafsu sehingga selalu menjadi biang keresahan dan masalah bagi siapa pun. Mereka adalah pribadi-pribadi gelisah dan menjadi biang kegelisahan sosial dan pembuat masalah (*al-nafs al-lawwâmah*) dan menjadi representasi kehadiran hawa nafsu, orang-orang musyrik[2] yang sebenarnya (dalam konteks

---

jihâd al-ashghar ilâ jihâd al-akbar diterima oleh para ulama tradisional dan para sufi karena secara *dirâyah* sejalan dengan hadits-hadits lain yang secara *riwâyah* berada dalam kualitas shahih.

2. "Para ahli tafsir mengatakan, orang musyrik ialah orang yang melakukan ibadah, atau melakukan amal shaleh tidak *li-Llâh*, tidak karena Allah. Jadi, *wa*

Mahabharata, para Kurawa). Kedua kelompok ini hadir dalam berbagai tingkat realitas dan interaksi sosial dengan intensitas yang beragam. Dari tingkat lokal, nasional, hingga internasional; dalam bidang pendidikan dan agama hingga bisnis dan politik; dalam urusan pribadi hingga kelompok, dan sebagainya.

Pada kenyataannya, pertentangan antara jiwa-jiwa yang tenang dengan jiwa-jiwa yang resah ini mewarnai sejarah semua penjuru dunia, antara lain seperti pertentangan Nabi Muhammad saw. dengan kafir-musyrik di Hijaz. Namun satu hal yang unik di Nusantara adalah, sekalipun pertentangan semacam ini terjadi berulang-ulang sejak masa nenek moyang bangsa Indonesia, ajaran spiritual dan nilai-nilai luhur jiwa-jiwa yang tenang tetap dominan di tanah air kita. Prinsip "Bhinneka Tunggal Ika" Mpu Tantular misalnya, telah mengilhami para penguasa Nusantara dari jaman Hindu-Budha hingga dewasa ini; dan Sunan Kalijogo —yang terkenal akomodatif terhadap tradisi lokal— mendidik para penguasa

---

lam yusyrik bi 'ibâdati Rabbihi ahada (dan tidak menyekutukan apa pun dalam ibadah kepada Tuhannya). Jadi dia melakukan sesuatu misalnya, dia berjuang katanya —misalnya— untuk Islam, tapi sebetulnya untuk kepentingan dirinya sendiri, itu sebetulnya sudah menyekutukan Tuhan." "Kamu jangan terjebak godaan dunia... jangan terjebak gebyarnya materi, rayuan perempuan, misalkan, jangan tergoda oleh jabatan, menjadi kita sombong, lupa diri, ...Kamu jangan terjebak oleh jebakan yang kelihatannya untuk Allah, kelihatannya demi rakyat, kelihatannya demi perjuangan, padahal tidak. Itu jebakan yang akan menjerumuskan kita, dikira orang kalau sudah jadi pemimpin, kalau ceramah banyak orang tepuk tangan, orang di mana-mana menghormati, kemudian muncul kesombongan dalam diri kita. Itu jebakan yang akan menjerumuskan kita, itu berarti jebakan dari hawa nafsunya, dan dari kepentingannya. Itu yang disebut *al-syirk al-khafy*, Musyrik yang tersembunyi, sebenarnya." "Lawan syirik adalah ikhlas... Jadi orang yang musyrik adalah orang yang tidak ikhlas, yang dalam berbagai perilakunya ia melibatkan kepentingan egonya, kepentingan dirinya, kepentingan kelompoknya, dan bukan semata-mata karena Allah. Jadi ada dualisme kepasrahan." (Secara berurutan, penjelasan Prof. Jalaluddin Rakhmat, Prof. KH. Said Aqil Siraj, dan KH. Masdar F. Mas'udi dalam: *Lautan Wahyu: Islam sebagai Rahmatan lil-'Âlamîn*, episode 4: "Kaum Beriman," Supervisor Program: KH. A. Mustofa Bisri, ©LibForAll Foundation 2009).

pribumi tentang Islam yang damai, toleran, dan spiritual. Melalui para muridnya, antara lain Sultan Adiwijoyo, Juru Martani, dan Senopati ing Alogo, Sunan Kalijogo berhasil menyelamatkan dan melestarikan nilai-nilai luhur tersebut yang manfaatnya tetap bisa kita nikmati hingga dewasa ini.

Di Indonesia modern pun kita menyaksikan kehadiran jiwa-jiwa yang tenang (*al-nafs al-muthmainnah*) ini —antara lain— dalam proses kelahiran dan tumbuhnya kesadaran kebangsaan kita, khususnya dalam dialog antara Islam dan nasionalisme Indonesia. Memang tidak banyak yang tahu salah satu penggalan sejarah konseptual kebangsaan kita.[3] Sejak tahun 1919, tiga sepupu secara intensif mulai membicarakan hubungan antara Islam sebagai seperangkat ajaran agama dengan nasionalisme. Mereka adalah H. O. S. Tjokroaminoto, KH. Hasjim Asy'ari, dan KH. Wahab Chasbullah. Belakangan, menantu Tjokroaminoto, Soekarno yang ketika itu baru berusia 18 tahun, terlibat aktif dalam pertemuan mingguan yang berlangsung bertahun-tahun tersebut. Kesadaran kebangsaan inilah yang diwarisi oleh generasi berikutnya, seperti Abdul Wahid Hasjim (putra KH. Hasjim Asy'ari), KH. A. Kahar Muzakkir dari Yogyakarta (tokoh Muhammadiyah), dan H. Ahmad Djoyo Sugito (tokoh Ahmadiyah).

Dalam muktamar di Banjarmasin pada tahun 1935, Nahdlatul Ulama memutuskan untuk tidak mendukung terbentuknya Negara Islam melainkan mendorong umat Islam untuk mengamalkan ajaran agamanya demi terbentuknya masyarakat yang Islami dan sekaligus membolehkan pendirian negara bangsa. Sepuluh tahun kemudian, tokoh-tokoh Muslim Nusantara yang terlibat dalam proses kemerdekaan menerima konsep Negara Pancasila yang disampaikan Soekarno, dan kebanyakan pemimpin organisasi-organisasi Islam ketika itu menerima gagasan Soekarno tersebut. Berdasarkan konsep kebangsaan yang kental dengan nilai-nilai kea-

---

3. Benih kesadaran kebangsaan Indonesia bisa dianggap bermula pada 20 Mei 1908 dengan berdirinya Boedi Oetomo.

gamaan dan budaya bangsa inilah, pada tanggal 17 Agustus 1945 —atas nama bangsa Indonesia— Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sebuah negara bangsa yang mengakui dan melindungi keragaman budaya, tradisi, dan keagamaan yang sudah menjadi bagian integral kehidupan bangsa Indonesia.

Gagasan negara bangsa ini adalah buah dari pahit getir pengalaman sejarah Nusantara sendiri. Pada satu sisi, sejarah panjang Nusantara yang pernah melahirkan dan mengalami peradaban-peradaban besar Hindu, Budha, dan Islam selama masa kerajaan Sriwijaya, Sailendra, Mataram I, Kediri, Singosari, Majapahit, Demak, Aceh, Makasar, Goa, Mataram II, dan lain-lain telah memperkuat kesadaran tentang siginifikansi melestarikan kekayaan dan keragaman budaya dan tradisi bangsa. Sementara pada sisi yang lain, dialog terus-menerus antara Islam sebagai seperangkat ajaran agama dengan nasionalisme yang berakar kuat dalam pengalaman bangsa Indonesia, telah menegaskan kesadaran bahwa negara bangsa yang mengakui dan melindungi beragam keyakinan, budaya, dan tradisi bangsa Indonesia merupakan pilihan tepat bagi bangunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pepatah Mpu Tantular, ajaran dan gerakan Sunan Kalijogo, serta keteladanan lain semacamnya, dengan tepat mengungkapkan kesadaran spiritual yang menjadi landasan kokoh Indonesia modern dan melindunginya dari perpecahan sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945.

Dengan segenap hubungan fluktuatif yang terjadi, semua ini bukanlah sebuah proses yang mudah, ini merupakan fakta historis yang harus kita sadari dan pahami. Beberapa periode sejarah Nusantara berlumur darah akibat konflik yang terjadi —antara lain— atas nama agama. Para ulama seperti Abikusno Tjokrosujoso, KH. A. Kahar Muzakkir, H. Agus Salim, KH. A. Wahid Hasjim, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimejo, Teuku Mohammad Hassan, dan tokoh-tokoh penting Pendiri Bangsa lainnya, sadar bahwa negara yang akan mereka perjuangkan dan pertahankan bukanlah

negara yang didasarkan pada dan untuk agama tertentu, melainkan negara bangsa yang mengakui dan melindungi segenap agama, beragam budaya dan tradisi yang telah menjadi bagian integral kehidupan bangsa Indonesia.

Para Pendiri Bangsa sadar bahwa di dalam Pancasila tidak ada prinsip yang bertentangan dengan ajaran agama. Sebaliknya, prinsip-prinsip dalam Pancasila justru merefleksikan pesan-pesan utama semua agama, yang dalam ajaran Islam dikenal sebagai *maqâshid al-syarî'ah*, yaitu kemaslahatan umum (*al-mashlahat al-'âmmah, the common good*). Dengan kesadaran demikian mereka menolak pendirian atau formalisasi agama dan menekankan substansinya. Mereka memposisikan negara sebagai institusi yang mengakui keragaman, mengayomi semua kepentingan, dan melindungi segenap keyakinan, budaya, dan tradisi bangsa Indonesia. Dengan cara demikian, melalui Pancasila mereka menghadirkan agama sebagai wujud kasih sayang Tuhan bagi seluruh makhluk-Nya (*rahmatan lil-'âlamîn*) dalam arti sebenarnya. Dalam konteks ideal Pancasila ini, setiap orang bisa saling membantu untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan duniawi, dan setiap orang bebas beribadah untuk meraih kesejahteraan ukhrawi tanpa mengabaikan yang pertama.

Memang ada relasi fluktuatif antara agama (c.q. Islam) dengan nasionalisme (c.q. Pancasila). Ada kelompok yang ingin mendirikan negara Islam melalui konstitusi (misalnya dalam Majlis Konstituante) dan lainnya melalui kekuatan senjata (seperti dalam kasus DI/TII). Namun selalu ada mayoritas bangsa Indonesia (Muslim dan non-Muslim) yang setuju dengan Pancasila dan memperjuangkan gagasan para Pendiri Bangsa. Semua ini menjadi pelajaran sangat berharga bagi kesadaran tentang pentingnya bangunan negara bangsa. Sikap ormas-ormas keagamaan, seperti NU dan Muhammadiyah misalnya, maupun parpol-parpol berhaluan kebangsaan yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 merupakan bentuk

final dan konsensus nasional bangunan kebangsaan kita, bukanlah sikap oportunisme politik melainkan kesadaran sejati yang didasarkan pada realitas historis, budaya, dan tradisi bangsa kita sendiri serta substansi ajaran agama yang kita yakini kebenarannya.

Sikap nasionalis ini juga merupakan suatu bentuk tanggung jawab untuk menjamin masa depan bangsa agar tetap berjalan sesuai dengan budaya dan tradisi Nusantara, dan sesuai pula dengan nilai-nilai substantif ajaran agama yang sudah menjadi bagian integral kehidupan bangsa Indonesia. Sikap para tokoh nasionalis-religius yang berjuang mempertahankan bangunan kebangsaan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ini bisa disebut sebagai kehadiran jiwa-jiwa yang tenang (*al-nafs al-muthmainnah*), pribadi-pribadi yang terus berusaha untuk memberi manfaat sebanyak mungkin kepada siapa pun tanpa mempermasalahkan perbedaan-perbedaan yang ada. Dan dengan cara demikian mereka berjuang keras mewujudkan kasih-sayang (*rahmat*) bagi semua makhluk.

Sikap serupa tidak tampak pada beberapa ormas maupun parpol yang bermunculan menjelang dan setelah berakhirnya kekuasaan Orde Baru. Mereka mengingatkan kita pada gerakan Darul Islam (DI), karena seperti DI, mereka juga berusaha mengubah negara bangsa menjadi negara agama, mengganti ideologi negara Pancasila dengan Islam versi mereka, atau bahkan menghilangkan NKRI dan menggantinya dengan Khilafah Islamiyah.

Tentang klaim-klaim implisit para aktivis garis keras bahwa mereka sepenuhnya memahami maksud kitab suci, dan karena itu mereka berhak menjadi wakil Allah (*khalîfat Allâh*) dan menguasai dunia ini untuk memaksa siapa pun mengikuti pemahaman 'sempurna' mereka, sama sekali tidak bisa diterima baik secara teologis maupun politis. Mereka benar bahwa kekuasan hanya milik Allah swt. (*lâ hukm illâ li Allâh*), tetapi tak seorang pun yang sepenuhnya memahami kekuasaan Allah swt. Karena itu Nabi bersabda, "[K]alian tidak tahu apa sebenarnya hukum Al-

lah."[4] Ringkasnya, sekalipun didasarkan pada al-Qur'an dan sunnah, *fiqh* —yang lazim digunakan sebagai justifikasi teologis kekuasaan oleh mereka— sebenarnya adalah hasil usaha manusia yang terikat dengan tempat, waktu, dan kemampuan penulis *fiqh* yang bersangkutan.

Tidak sadar atau mengabaikan prinsip-prinsip ini, para aktivis garis keras berjuang mengubah Islam dari agama menjadi ideologi. Pada gilirannya, Islam menjadi dalih dan senjata politik untuk mendiskreditkan dan menyerang siapa pun yang pandangan politik dan pemahaman keagamaannya berbeda dari mereka. Jargon memperjuangkan Islam sebenarnya adalah memperjuangkan suatu agenda politik tertentu dengan menjadikan Islam sebagai kemasan dan senjata. Langkah ini sangat ampuh, karena siapa pun yang melawan mereka akan dituduh melawan Islam. Padahal jelas tidak demikian.

Pada saat yang sama, dengan dalih memperjuangkan dan membela Islam, mereka berusaha keras menolak budaya dan tradisi yang selama ini telah menjadi bagian integral kehidupan bangsa Indonesia, mereka ingin menggantinya dengan budaya dan tradisi asing dari Timur Tengah, terutama kebiasaan Wahabi-Ikhwanul Muslimin, semata karena mereka tidak mampu membedakan agama dari kultur tempat Islam diwahyukan. Mereka selalu bersikap keras dan tak kenal kompromi seolah-olah dalam Islam tidak ada perintah *ishlah*, yang ada hanya paksaan dan kekerasan. Karena sikap seperti itu maka mereka populer disebut sebagai kelompok garis keras.

Kita harus sadar bahwa jika Islam diubah menjadi ideologi politik, ia akan menjadi sempit karena dibingkai dengan batasan-batasan ideologis dan platform politik. Pemahaman apa pun yang berbeda, apalagi bertentangan dengan pemahaman mereka, de-

---

4. Khaled Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan: dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, diterjemahkan dari *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women* (Jakarta: Serambi, 2003), h. 48.

ngan mudah akan dituduh bertentangan dengan Islam itu sendiri, karena watak dasar tafsir ideologi memang bersifat menguasai dan menyeragamkan. Dalam bingkai inilah aksi-aksi pangkafiran maupun pemurtadan sering dan mudah dituduhkan terhadap orang atau pihak lain. Perubahan ini dengan jelas mereduksi, mengamputasi, dan mengebiri pesan-pesan luhur Islam dari agama yang penuh dengan kasih sayang dan toleran menjadi seperangkat batasan ideologis yang sempit dan kaku.

Pada umumnya aspirasi kelompok-kelompok garis keras di Indonesia dipengaruhi oleh gerakan Islam transnasional dari Timur-Tengah, terutama yang berpaham Wahabi atau Ikhwanul Muslimin, atau gabungan keduanya. Kelompok-kelompok garis keras di Indonesia, termasuk partai politiknya, menyimpan agenda yang berbeda dari ormas-ormas Islam moderat seperti Muhammadiyah, NU, dan partai-partai berhaluan kebangsaan. Dalam beberapa tahun terakhir sejak kemunculannya, kelompok-kelompok garis keras telah "berhasil" mengubah wajah Islam Indonesia mulai menjadi agresif, beringas, intoleran, dan penuh kebencian.[5] Padahal, selama ini Islam Indonesia dikenal lembut, toleran dan penuh kedamaian (majalah internasional *Newsweek* pernah menyebut Islam Indonesia sebagai "Islam with a smiling face").

Kelompok-kelompok garis keras berusaha merebut simpati umat Islam dengan jargon memperjuangkan dan membela Islam, dengan dalih tarbiyah dan dakwah *amar ma'rûf nahy munkar*. Jargon ini sering memperdaya banyak orang, bahkan mereka yang berpendidikan tinggi sekalipun, semata karena tidak terbiasa berpikir tentang spiritualitas dan esensi ajaran Islam. Mereka mudah terpancing, terpesona dan tertarik dengan simbol-simbol keagamaan.

---

5. Misalnya, baca Laporan Tahunan the WAHID Institute 2008, *Pluralisme Beragama/Berkeyakinan di Indonesia*, "Menapaki Bangsa yang Kian Retak," dalam http://www.wahidinstitute.org/Dokumen/Detail/?id=22/hl=id/Laporan_Tahunan_The_WAHID_Institute_2008_Pluralisme_Beragama_Berkeyakinan_Di_Indonesia

Sementara kelompok-kelompok garis keras sendiri memahami Islam tanpa mengerti substansi ajaran Islam sebagaimana dipahami oleh para wali, ulama, dan Pendiri Bangsa. Pemahaman mereka tentang Islam yang telah dibingkai oleh batasan-batasan ideologis dan platform politiknya tidak mampu melihat, apalagi memahami, kebenaran yang tidak sesuai dengan batasan-batasan ideologis, tafsir harfiah, atau platform politik mereka. Karena terbatasnya kemampuan memahami inilah maka mereka mudah menuduh kelompok lain yang berbeda dari mereka atau tidak mendukung agenda mereka sebagai kafir atau murtad.

Terkait dengan pengikutnya, ada orang-orang yang bergabung dan mendukung garis keras karena mereka terpesona dan tertarik dengan simbol-simbol kegamaan yang dikampanyekan tokoh-tokoh garis keras. Pada sisi yang lain, ada orang-orang yang memang secara sengaja memperdaya masyarakat dengan meneriakkan simbol-simbol keagamaan demi memuaskan agenda hawa nafsu mereka. Kita harus berusaha mengajak dan mengilhami masyarakat untuk rendah hati, terus belajar dan bersikap terbuka agar bisa memahami spiritualitas dan esensi ajaran Islam, dan menjadi jiwa-jiwa yang tenang. Lebih dari itu, sebagai bangsa kita harus sadar bahwa apa yang para aktivis garis keras lakukan dan perjuangkan sebenarnya bertentangan dengan dan mengancam Pancasila dan UUD 1945, dan bisa menghancurkan NKRI. Aksi-aksi anarkis, pengkafiran, pemurtadan, dan berbagai pembunuhan karakter lainnya yang sering mereka lakukan adalah usaha untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Kami sudah sering dituduh kafir dan murtad, tetapi kami tetap tenang-tenang saja. Kelompok-kelompok garis keras mengukur kebenaran pemahaman agama secara ideologis dan politis, sementara kami mendasarkan pemahaman dan praktik keagamaan kami pada semangat rahmat dan spiritual yang terbuka. Kami berpedoman pada paham *Ahlussunnah wal Jamâ'ah*, sementara mereka mewarisi kebiasaan ekstrem *Khawârij* yang gemar mengkafirkan

dan memurtadkan siapa pun yang berbeda dari mereka, kebiasaan buruk yang dipelihara oleh Wahabi dan kaki tangannya.[6]

Karena kelompok-kelompok garis keras menganggap setiap Muslim lain yang berbeda dari mereka sebagai kurang Islami, atau bahkan kafir dan murtad, maka mereka melakukan infiltrasi ke masjid-masjid, lembaga-lembaga pendidikan, instansi-instansi pemerintah maupun swasta, dan ormas-ormas Islam moderat, terutama Muhammadiyah dan NU, untuk mengubahnya menjadi keras dan kaku juga. Mereka mengklaim memperjuangkan dan membela Islam, padahal yang dibela dan diperjuangkan adalah pemahaman yang sempit dalam bingkai ideologis dan platform politik mereka, bukan Islam itu sendiri. Mereka berusaha keras menguasai Muhammadiyah dan NU karena keduanya merupakan ormas Islam yang kuat dan terbanyak pengikutnya. Selain itu, kelompok-kelompok ini menganggap Muhammadiyah dan NU sebagai penghalang utama pencapaian agenda politik mereka, karena keduanya sudah lama memperjuangkan substansi nilai-nilai Islam, bukan formalisasi Islam dalam bentuk negara maupun penerapan syariat sebagai hukum positif.

Infiltrasi kelompok garis keras ini telah menyebabkan kegaduhan dalam tubuh ormas-ormas Islam besar tersebut. Dalam konteks inilah kami ingat pada pertarungan tanpa henti dalam diri manusia (*insân shaghîr*), yakni pertarungan antara jiwa-jiwa yang tenang (*al-nafs al-muthmainnah*) melawan hawa nafsu (*al-nafs al-lawwâmah*),

---

6. "Lebih dalam lagi, adalah orang yang memahami keimanan secara monopolistik, jadi seakan-akan yang tidak seperti pemahaman dia, itu sudah tidak iman lagi. Ini sebenarnya fenomena lama, tidak hanya sekarang. Dulu pada saat *Sayyidina 'Alî Karram Allâh Wajhah* (semoga Allah memuliakannya) kita kenal sebuah kelompok namanya *Khawarij* yang mengkafirkan semua orang di luar golongannya. Nah ini sampai sekarang reinkarnasinya masih ada, sehingga seperti Azhari datang ke Indonesia *ngebom*, itu dia merasa mendapat pahala," (Penjelasan DR. (HC) KH. Hasyim Muzadi dalam: *Lautan Wahyu: Islam sebagai Rahmatan lil-'Âlamîn*, episode 3: "Umat," Supervisor Program: KH. A. Mustofa Bisri, ©LibForAll Foundation 2009).

atau pertarungan antara Pandawa melawan Kurawa. Sementara yang pertama berusaha mewujudkan kedamaian dan ketenangan, maka yang kedua selalu membuat kegaduhan, keributan, dan kekacauan.

Gerakan garis keras transnasional dan kaki tangannya di Indonesia sebenarnya telah lama melakukan infiltrasi ke Muhammadiyah. Dalam Muktamar Muhammadiyah pada bulan Juli 2005 di Malang, para agen kelompok-kelompok garis keras, termasuk kader-kader PKS dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), mendominasi banyak forum dan berhasil memilih beberapa simpatisan gerakan garis keras menjadi ketua PP. Muhammadiyah. Namun demikian, baru setelah Prof. Dr. Abdul Munir Mulkhan mudik ke desa Sendang Ayu, Lampung, masalah infiltrasi ini menjadi kontroversi besar dan terbuka sampai tingkat internasional.[7]

Masjid Muhammadiyah di desa kecil Sendang Ayu —yang dulunya damai dan tenang— menjadi ribut karena dimasuki PKS yang membawa isu-isu politik ke dalam masjid, gemar mengkafirkan orang lain, dan menghujat kelompok lain, termasuk Muhammadiyah sendiri. Prof. Munir kemudian memberi penjelasan kepada masyarakat tentang cara Muhammadiyah mengatasi perbedaan pendapat, dan karena itu masyarakat tidak lagi membiarkan orang PKS memberi khotbah di masjid mereka. Dia lalu menuliskan keprihatinannya dalam *Suara Muhammadiyah*.[8] Artikel ini menyulut diskusi serius tentang infiltrasi garis keras di lingkungan Muhammadiyah yang sudah terjadi di banyak tempat, dengan cara-cara yang halus maupun kasar hingga pemaksaan.

Artikel Prof. Munir mengilhami Farid Setiawan, Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah

---

7. Baca Bret Stephens, "The Exorcist: Indonesian man seeks to create an Islam that will make people smile'," dalam http://www.opinionjournal.com/columnists/bstephens/?id=110009922

8. Abdul Munir Mulkhan, "Sendang Ayu: Pergulatan Muhammadiyah di Kaki Bukit Barisan," *Suara Muhammadiyah*, 2 Januari 2006.

(DPD IMM) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), membicarakan infiltrasi garis keras ke dalam Muhammadiyah secara lebih luas dalam dua artikel di *Suara Muhammadiyah*. Dalam yang pertama, "Ahmad Dahlan Menangis (Tanggapan terhadap Tulisan Abdul Munir Mulkhan),"[9] Farid mendesak agar Muhammadiyah segera mengamputasi virus kanker yang, menurut dia, sudah masuk kategori stadium empat. Karena jika diam saja, "tidak tertutup kemungkinan ke depan Muhammadiyah hanya memiliki usia sesuai dengan umur para pimpinannya sekarang. Dan juga tidak tertutup kemungkinan jika Alm. KH. Ahmad Dahlan dapat bangkit dari liang kuburnya akan terseok dan menangis meratapi kondisi yang telah menimpa kader dan anggota Muhammadiyah"[10] yang sedang direbut oleh kelompok-kelompok garis keras.

Dalam artikelnya yang kedua, "Tiga Upaya Mu'allimin dan Mu'allimat," Farid mengungkapkan bahwa "produk pola kaderisasi yang dilakukan '*virus tarbiyah*'[11] membentuk diri serta jiwa para kadernya menjadi seorang yang berpemahaman Islam yang

---

9. Baca Farid Setiawan, "Ahmad Dahlan Menangis (Tanggapan terhadap Tulisan Abdul Munir Mulkhan)," *Suara Muhammadiyah*, 20 Februari 2006.
10. Ibid.
11. "Gerakan Tarbiyah pada awal kelahirannya era tahun 1970-an dan 1980-an merupakan gerakan (harakah) dakwah kampus yang menggunakan sistem pembinaan (pendidikan) Tarbiyah Ikhwanul Muslimin di negeri Mesir. Kelompok ini cukup militan dan merupakan gejala baru sebagai gerakan Islam ideologis, yang berbeda dari arus besar Islam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sebagai gerakan Islam yang bercorak moderat dan kultural. Para aktivis gerakan Tarbiyah kemudian melahirkan Partai Keadilan (PK) tahun 1998 yang berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tahun 2004. Di belakang hari PKS menjadikan Tarbiyah *a la* Ikhwanul Muslimin itu sebagai sistem pembinaan dan perekrutan anggota. Maka gerakan Tarbiyah tidak terpisah dari PK/PKS, keduanya memiliki napas inspirasi ideologis dengan Ikhwanul Muslimin, dan sebagai media/instrumen penting dari Partai Keadilan Sejahtera yang dikenal bersayap dakwah dan politik." (Baca sampul belakang: Haedar Nashir, *Manifestasi Gerakan Tarbiyah: Bagaimana Sikap Muhammadiyah?*, cet. Ke-5, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007).

ekstrem dan radikal. Dan pola kaderisasi tersebut sudah menyebar ke berbagai penjuru Muhammadiyah. Hal ini menyebabkan kekecewaan yang cukup tinggi di kalangan warga dan Pimpinan Muhammadiyah. Putra-putri mereka yang diharapkan menjadi kader penggerak Muhammadiyah malah bisa berbalik memusuhi Muhammadiyah."[12]

Menyadari betapa jauh dan dalam infiltrasi *virus tarbiyah* ini, Farid mengusulkan tiga langkah untuk menyelamatkan Muhammadiyah. *Pertama* adalah membubarkan sekolah-sekolah kader Muhammadiyah, karena virus tarbiyah merusaknya sedemikian rupa; *kedua*, merombak sistem, kurikulum dan juga seluruh pengurus, guru, sampai dengan *musyrif* dan *musyrifah* yang terlibat dalam gerakan ideologi non-Muhammadiyah dan kepentingan politik lain; *ketiga*, memberdayakan seluruh organisasi otonom (ortom) di lingkungan Muhammadiyah.[13]

Artikel Munir dan Farid menimbulkan kontroversi dan polemik keras antara pimpinan Muhammadiyah yang setuju dan tidak. Salah satu keprihatinan utama mereka yang setuju adalah bahwa institusi, fasilitas, anggota dan sumber-sumber daya Muhammadiyah telah digunakan kelompok-kelompok garis keras untuk selain kepentingan dan tujuan Muhammadiyah. Di tengah panasnya polemik mengenai gerakan virus tarbiyah, salah seorang Ketua PP. Muhammadiyah, Dr. Haedar Nashir, mengklarifikasi isu-isu dimaksud dalam sebuah buku tipis yang berjudul *Manifestasi Gerakan Tarbiyah: Bagaimana Sikap Muhammadiyah?*[14]

Kurang dari tiga bulan setelah buku tersebut terbit, Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat (SKPP) Muhammadiyah Nomor 149/Kep/I.0/B/2006

---

12. Farid Setiawan, "Tiga Upaya Mu'allimin dan Mu'allimat," *Suara Muhammadiyah*, 3 April 2006.
13. Ibid.
14. Haedar Nashir, *Manifestasi Gerakan Tarbiyah: Bagaimana Sikap Muhammadiyah?* Cet. Ke-5 (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007).

untuk "menyelamatkan Muhammadiyah dari berbagai tindakan yang merugikan Persyarikatan" dan membebaskannya "dari pengaruh, misi, infiltrasi, dan kepentingan partai politik yang selama ini mengusung misi dakwah atau partai politik bersayap dakwah" karena telah memperalat ormas itu untuk tujuan politik mereka yang bertentangan dengan visi-misi luhur Muhammadiyah sebagai organisasi Islam moderat:

> "...Muhammadiyah pun berhak untuk dihormati oleh siapa pun serta memiliki hak serta keabsahan untuk bebas dari segala campur tangan, pengaruh, dan kepentingan pihak manapun yang dapat mengganggu keutuhan serta kelangsungan gerakannya" (Konsideran poin 4). "Segenap anggota Muhammadiyah perlu menyadari, memahami, dan bersikap kritis bahwa seluruh partai politik di negeri ini, termasuk partai politik yang mengklaim diri atau mengembangkan sayap/kegiatan dakwah seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah benar-benar partai politik. Setiap partai politik berorientasi meraih kekuasaan politik. Karena itu, dalam menghadapi partai politik manapun kita harus tetap berpijak pada Khittah Muhammadiyah dan harus membebaskan diri dari, serta tidak menghimpitkan diri dengan misi, kepentingan, kegiatan, dan tujuan partai politik tersebut" (Keputusan poin 3).[15]

---

15. SKPP Muhammadiyah Nomor 149/Kep/I.0/B/2006. Untuk membaca teks lengkap SKPP, lihat dalam lampiran 1.

Keputusan ini dapat dipahami, karena pada kenyataannya PKS tidak hanya "menimbulkan masalah dan konflik dengan sesama dan dalam tubuh umat Islam yang lain, termasuk dalam Muhammadiyah,"[16] tapi menurut para ahli politik juga merupakan ancaman yang lebih besar dibandingkan Jemaah Islamiyah (JI) terhadap Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Menurut seorang ahli politik dan garis keras Indonesia, Sadanand Dhume,

> "Hanya ada pemikiran kecil yang membedakan PKS dari JI. Seperti JI, manifesto pendirian PKS adalah untuk memperjuangkan Khilafah Islamiyah. Seperti JI, PKS menyimpan rahasia sebagai prinsip pengorganisasiannya, yang dilaksanakan dengan sistem sel yang keduanya pinjam dari Ikhwanul Muslimin.... Bedanya, JI bersifat revolusioner sementara PKS bersifat evolusioner. Dengan bom-bom bunuh dirinya, JI menempatkan diri melawan pemerintah, tapi JI tidak mungkin menang. Sebaliknya, PKS menggunakan posisinya di parlemen dan jaringan kadernya yang terus menjalar untuk memperjuangkan tujuan yang sama selangkah demi selangkah dan suara demi suara.... Akhirnya, bangsa Indonesia sendiri yang akan memutuskan apakah masa depannya akan sama dengan negara-negara Asia Tenggara yang lain, atau ikut gerakan yang berorientasi ke masa lalu dengan busana jubah fundamentalisme keagamaan. PKS terus berjalan. Seberapa jauh ia berhasil akan menentukan masa depan Indonesia."[17]

---

16. Ibid, Haedar Nashir, h. 66.
17. Sadanand Dhume, "Indonesian Democracy's Enemy Within: Radical Islamic party threatens Indonesia with ballots more than bullets," dalam *the Far Eastern Economic Reiew*, Mei 2005.

Namun, sebagaimana ditunjukkan oleh studi yang dipaparkan dalam buku ini, sekalipun SKPP tersebut telah diterbitkan pada bulan Desember 2006, hingga kini belum bisa diimplementasikan secara efektif. Gerakan-gerakan Islam transnasional (Wahabi, Ikhwanul Muslimin, dan Hizbut Tahrir) dan kaki tangannya di Indonsia sudah melakukan infiltrasi jauh ke dalam Muhammadiyah dan mematrikan hubungan dengan para ekstremis yang sudah lama ada di dalamnya. Keduanya terus aktif merekrut para anggota dan pemimpin Muhammadiyah lain untuk ikut aliran ekstrem, seperti yang terjadi saat Cabang Nasyiatul Aisyiyah (NA) di Bantul masuk PKS secara serentak (*en masse*). Sementara Farid Setiawan prihatin bahwa mungkin Muhammadiyah hanya akan mempunyai usia sesuai dengan umur para pengurusnya, gerakan garis keras justru terus berusaha merebut Muhammadiyah untuk menggunakannya sebagai kaki tangan mereka berikutnya dengan umur yang panjang. Banyak tokoh moderat Muhammadiyah prihatin bahwa garis keras bisa mendominasi Muktamar Muhammadiyah 2010, karena aktivis garis keras semakin kuat dan banyak.

Persis karena infiltrasi yang semakin kuat inilah, tokoh-tokoh moderat Muhammadiyah menganggap situasi semakin berbahaya, baik bagi Muhammadiyah sendiri maupun bangsa Indonesia. Kita harus bersikap jujur dan terbuka serta berterus terang dalam menghadapi semua masalah yang ada, agar apa pun yang kita lakukan bisa menjadi pelajaran bagi semua umat Islam dan mampu mendewasakan mereka dalam beragama dan berbangsa.

Salah satu temuan yang sangat mengejutkan para peneliti lapangan adalah fenomena rangkap anggota atau *dual membership*, terutama antara Muhammadiyah dan garis keras, bahkan tim peneliti lapangan memperkirakan bahwa sampai 75% pemimpin garis keras yang diwawancarai punya ikatan dengan Muhammadiyah.

Selain terhadap Muhammadiyah, penyusupan juga terjadi secara sistematis terhadap NU. Realitas fungsi strategis masjid men-

dorong kelompok-kelompok garis keras terus berusaha merebut dan menguasai masjid dengan segala cara yang mungkin, termasuk yang tak pernah terpikirkan kecuali oleh penyusup itu sendiri. KH. Mu'adz Thahir, Ketua PCNU Pati, Jawa Tengah, menceritakan tentang kelompok garis keras berhasil masuk ke masjid-masjid NU dengan memberikan *cleaning service* gratis.

Awalnya, sekelompok anak muda datang membersihkan masjid secara suka rela, demikian berulang-ulang. Tertarik dengan kesungguhan mereka, takmir memberinya kesempatan beradzan, lalu melibatkannya sebagai anggota takmir masjid. Dengan pandai dan cekatan mereka melakukan tugas-tugas itu. Tentu saja karena mereka memang agen yang khusus menyusup untuk mengambil alih masjid. Setelah posisinya semakin kuat, mereka mulai mengundang teman-temannya bergabung dalam struktur takmir, dan akhirnya menentukan siapa yang menjadi imam, khatib, dan mengisi pengajian dan yang tidak boleh. Bahkan, menentukan apa yang boleh dan harus disampaikan, dan apa yang tidak boleh. Secara perlahan tapi pasti, masjid jatuh ke tangan kelompok garis keras sehingga tokoh setempat yang biasa memberi pengajian dan khotbah di masjid tersebut kehilangan kesempatan mengajarkan Islam kepada jamaahnya, bahkan kehilangan masjid dan jamaahnya, kecuali jika bersedia menerima dan mengikuti ideologi keras mereka.

Kasus di Pati ini hanya salah satu dari sejumlah kasus penyerobotan masjid yang sering dilakukan di lingkungan Nahdliyin. Jika kasus ini digambarkan dalam sebuah film, penonton akan berpikir bahwa ini hasil imaginasi sutradara. Tapi sebenarnya ini adalah manifestasi *ideologi, dana, dan sistem* gerakan Islam transnasional dan kaki tangannya di Indonesia yang terus bergerak untuk menguasai negeri kita. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar penyerobot masjid NU adalah kelompok PKS dan HTI.

Setelah menyadari banyak masjid dan jamaahnya diserobot oleh kelompok-kelompok garis keras, NU mulai melakukan konsolidasi dengan menata kembali organisasinya, antara lain, di mas-

jid-masjid. PBNU menyatakan dengan tegas bahwa gerakan Islam transnasional seperti al-Qaidah, Ikhwanul Muslimin (yang di sini direpresentasikan oleh PKS—*red*.), dan Hizbut Tahrir adalah gerakan politik yang berbahaya karena mengancam paham *Ahlussunnah wal Jamâ'ah*, dan berpotensi memecah-belah bangsa.[18] Kemampuan mereka berpura-pura bisa menerima paham dan tradisi NU juga membuat mereka sangat berbahaya karena bisa menyusup kapan saja dan ke mana saja. Sementara terkait dengan isu khilafah yang diperjuangkan HTI, Majlis Bahtsul Masa'il memutuskan bahwa Khilafah Islamiyah tidak memiliki rujukan teologis, baik di dalam al-Qur'an maupun hadits.[19]

Walaupun di beberapa tempat NU telah berhasil mengusir kelompok garis keras, namun di banyak tempat upaya penyusupan dan penyerobotan masjid dan jamaah NU terus dilakukan. Secara umum, sebagaimana ditunjukkan penelitian ini, penyusupan garis keras jauh lebih gencar daripada upaya NU untuk mengusirnya. Jika ini terus dibiarkan maka bukan tidak mungkin bahwa NU akan kehilangan presentase signifikan jumlah jamaah dan masjid-masjidnya, dan berubah menjadi kurang spiritul dan lebih keras.

Penyusupan garis keras di lingkungan NU, dan kegagalan ormas terbesar dunia ini menghentikan infiltrasinya ke pemerintahan, MUI dan bidang-bidang strategis lain secara umum di negara ini, salah satu sebabnya terjadi karena fenomena "kyai materi" yang tersebar luas. "Kyai-kyai materi" lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan jamaah dan jam'iyah NU serta negara. Puluhan juta jamaah NU yang terkonsentrasi di desa-desa

---

18. PBNU mendesak pemerintah mencegah masuknya ideologi transnasional ke Indonesia. Jauh sebelumnya, almarhum KH. Yusuf Hasjim meminta PBNU memotong masuknya ideologi transnasional karena berbahaya bagi NU dan Indonesia. (Pidato disampaikan dalam peringatan 100 hari wafatnya KH. Yusuf Hasjim, di Jombang, Jawa Timur; baca *NU Online*, "PBNU Desak Pemerintah Cegah Ideologi Transnasional," Ahad, 29 April 2007).
19. Lihat Lampiran 2 buku ini.

dan daerah-daerah tertentu, adalah kelompok pemilih terbesar (*the largest single group of voters*) di Indonesia. Suara mereka bisa menentukan siapa yang akan terpilih untuk naik ke kursi DPRD, DPR, Bupati, Gubernur dan Presiden. Realitas ini mendorong banyak parpol tergoda untuk memanipulasi NU dan memanfaatkan hubungan dengan kyai-kyai materi demi kepentingan politik mereka. Karena sifat dasar manusia, ada kyai-kyai yang merindukan amplop atau kedudukan politik kemudian maju untuk menjadi pengurus NU di tingkat cabang, wilayah, atau pusat, sebagai jembatan untuk memanfaatkan dan dimanfaatkan oleh parpol-parpol dan politisi tertentu.

Pada saat yang sama, banyak kyai-kyai spiritual yang mundur dari arena penuh pamrih dan kepentingan pribadi tersebut dan hanya berbagi ilmu dengan orang-orang yang datang tanpa pamrih untuk mendekati Tuhan, bukan kedudukan. Dengan jumlah anggota sekitar empat puluh juta, NU —bersama Muhammadiyah— betul-betul bisa menjadi soko guru yang mampu untuk tetap menyangga bangunan negara dan bangsa Indonesia. Tetapi, untuk bisa memenuhi amanah tersebut, NU harus melakukan revitalisasi spiritual dan kembali ke nilai-nilai utamanya. Dengan cara demikian, para ulama bisa membimbing yang berkuasa dan tidak membiarkan dirinya diperalat oleh mereka. Nenek moyang kita meyakini hal ini sebagai *dharma* manusia, dan karena alasan itulah wayang kulit selalu menggambarkan raja-raja bersikap hormat dan tunduk kepada para resi, dan bukan sebaliknya.

Dewasa ini, kultur wayang yang khas Indonesia dan penuh nilai-nilai luhur sudah mulai tersisih oleh kultur asing. Adopsi kultur asing secara tidak cerdas akan membuat bangsa Indonesia kehilangan jatidirinya sebagai bangsa. Hal ini bisa dilihat —antara lain— dalam kasus yang terjadi di Cairo pada awal tahun 2004. Saat itu salah seorang Ketua PBNU diundang menyampaikan paper dalam forum Pendidikan dan Bahtsul Masa'il Islam Emansipatoris bersama Prof. Dr. Hassan Hanafi dan Dr. Youhanna Qaltah. Sehari

sebelum paper disampaikan, Presiden Perhimpunan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (PPMI) Mesir dan teman-temannya masuk ke hotel Sonesta tempat acara akan dilaksanakan dan mengancam Ketua PBNU dimaksud menyajikan papernya. Mereka mengancam, jika larangannya tidak diindahkan, apa pun akan dilakukan untuk menghentikan, termasuk pembunuhan. "Kalau Bapak masih bersikeras, saya sendiri yang akan membunuh Bapak," ancam Limra Zainuddin, Presiden PPMI.[20] Setelah diselidiki, konon para mahasiswa tadi adalah para aktivis PK (PKS) di Cairo.[21]

Sebagai Muslim, mahasiswa itu seharusnya bersikap *tawâdlu'* (rendah hati), menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda (*laisa minnâ man lam yukrim kibâranâ wa lam yarham shighâranâ*). Namun semua ini tidak terjadi karena tidak adanya pemahaman dan internalisasi ajaran Islam yang penuh spiritualitas, dan mereka telah mengadopsi kultur asing secara tidak cerdas. Dua hal ini bisa membuat siapa pun mudah terjebak ke dalam pemahaman-pemahaman yang sempit dan kaku. Siapa pun yang tidak mempunyai pemahaman yang mendalam tentang Islam, khususnya tentang hakikat dan ma'rifat, akan melihat bahwa apa yang disampaikan kelompok-kelompok garis keras sama belaka seperti yang dipahami oleh kebanyakan umat Islam. Mereka menggunakan bahasa yang sama dengan umat Islam pada umumnya, seperti dakwah, *amar ma'rûf nahy munkar* atau *Islam rahmatan lil-'âlamîn*, tapi sebenarnya mereka memahaminya secara berbeda.[22]

---

20. Baca "Gertak Mati Pengawal Akidah," dalam *Gatra* edisi 14, beredar Jum'at 13 Pebruari 2004.

21. Interview dengan salah seorang alumni Universitas al-Azhar Cairo asal Indonesia angkatan 2000.

22. "Karena gerakan ideologis sering tidak terasa dan disadari oleh mereka yang dimasukinya, maka secara sistematis berkembang menjadi besar dan merasuk. Lebih-lebih jika gerakan ideologi tersebut membawa ideologi Islam yang puritan dan militan, sehingga bagi yang menganggapnya sebagai masalah justeru yang akan disalahkan adalah mereka yang mempermasalahkannya. Menentang mereka berarti alergi Islam atau anti ukhuwah. Dengan demikian gerakan ideologis

Di tangan mereka, *amar ma'rûf nahy munkar* telah dijadikan legitimasi untuk melakukan pemaksaan, kekerasan, dan penyerangan terhadap siapa pun yang berbeda. Mereka berdalih memperjuangkan *al-ma'rûf* dan menolak *al-munkar* setiap kali melakukan aksi-aksi kekerasan atau pun mendiskreditkan orang atau pihak lain. Sementara konsep *rahmatan lil-'âlamîn* digunakan sebagai dalih formalisasi Islam, memaksa pihak lain menyetujui tafsir mereka, dan menuduh siapa pun yang berbeda atau bahkan menolak tafsir mereka sebagai menolak konsep *rahmatan lil-'âlamîn*, sebelum akhirnya dicap murtad dan kafir. Padahal, sebenarnya semangat dasar dakwah adalah memberi informasi dan mengajak, dan Islam menjamin kebebasan dalam beragama (*lâ ikrâh fi al-dîn* [QS. al-Baqarah, 2: 256]).[23] Di sini kita melihat kontradiksi mendasar antara aktivitas kelompok-kelompok garis keras dengan ajaran Islam yang penuh kasih sayang, toleran, dan terbuka.

Penggunaan bahasa yang sama ini membuat mereka menjadi sangat berbahaya, karena dengan bahasa yang sama mereka mudah mengecoh banyak umat Islam dan mudah pula menyusup ke mana-mana dan kapan saja. Dengan strategi demikian, ditambah militansi yang tinggi dan dukungan dana yang kuat dari luar dan dalam negeri, kelompok-kelompok garis keras ini telah menyusup

---

seperti itu akan semakin mekar dan berekspansi secara sistematik, yang di kemudian hari baru dirasakan sebagai masalah serius tetapi keadaan sudah tidak dapat dicegah dan dikendalikan karena telah meluas sebagai gerakan yang dianut oleh banyak orang. Daya infiltrasi gerakan ideologis memang berlangsung tersistem dan meluas, yang sering tidak disadari oleh banyak pihak," (Haedar Nashir, *Manifestasi Gerakan Tarbiyah: Bagaimana Sikap Muhammadiyah?* Cet. Ke-5 [Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007], h. 59).

23. "Peran pemerintah, praktisi dakwah, ulama, dan intelektual harus memberi nasehat kepada yang [berdakwah secara] salah. Jika mereka tidak menerima nasehat ini, pemerintah harus menerapkan hukum dengan menangkap mereka dan menghukumnya sesuai dengan kesalahannya," (Penjelasan Syeikh al-Akbar al-Azhar, Muhammad Sayyid Tantawi, dalam: *Lautan Wahyu: Islam sebagai Rahmatan lil-'Âlamîn*, episode 5: "Dakwah," Supervisor Program: KH. A. Mustofa Bisri, ©LibForAll Foundation 2009).

dan berusaha mempengaruhi mayoritas umat Islam untuk mengikuti paham mereka. Umat Islam dan pemerintah selama ini telah terkecoh dan/atau membiarkan aktivitas kelompok-kelompok garis keras sehingga mereka semakin besar dan kuat dan semakin mudah memaksakan agenda-agendanya, bukan saja kepada ormas-ormas Islam besar tetapi juga kepada pemerintah, partai politik, media massa, dunia bisnis, dan lembaga-lembaga pendidikan.

Sikap militan dan klaim-klaim kebenaran yang dilakukan kelompok-kelompok garis keras memang tak jarang membuat mayoritas umat Islam, termasuk politisi oportunis, bingung berhadapan dengan mereka, karena penolakan kemudian akan dicap sebagai penentangan terhadap syariat Islam, padahal tidak demikian yang sebenarnya. Maka tidak heran jika banyak otoritas pemerintah dan partai-partai politik oportunis mau saja mengikuti dikte kelompok garis keras, misalnya dengan membuat Peraturan Daerah (Perda) Syariat yang inkonstitusional. Padahal, itu adalah "Perda *fiqh*" yang tidak lagi sepenuhnya membawa pesan dan ajaran syari'ah, dan muatannya bersifat intoleran dan melanggar hak-hak sipil serta hak-hak minoritas karena diturunkan dari pemahaman *fiqh* yang sempit dan terikat, di samping juga tidak merefleksikan esensi ajaran agama yang penuh spiritualitas, toleransi, dan kasih sayang kepada sesama manusia.

Ringkasnya, para politisi oportunis yang bekerjasama dengan partai atau kelompok-kelompok garis keras sangat berbahaya juga. Mereka ikut menjerumuskan negara kita ke arah jurang perpecahan dan kehancuran. Mereka tidak memperhatikan, dan bahkan mengorbankan, masa depan bangsa yang multi-agama dan multi-etnik. Sepertinya mereka hanya mementingkan ambisi pribadi demi melanggengkan kekuasaan dan meraih kekayaan.

Gerakan garis keras terdiri dari kelompok-keompok yang saling mendukung dalam mencapai agenda bersama mereka, baik di luar maupun di dalam institusi pemerintahan negara kita. Ancaman yang sangat jelas adalah usaha mengidentifikasi Islam dengan

ideologi Wahabi/Ikhwanul Muslimin serta usaha untuk melenyapkan budaya dan tradisi bangsa kita dan menggantinya dengan budaya dan tradisi asing yang bernuansa Wahabi tapi diklaim sebagai budaya dan tradisi Islam. Bagian manapun dari kedua bahaya tersebut, atau keduanya, hanya akan menempatkan bangsa Indonesia di bawah ketiak jaringan ideologi global Wahabi/Ikhwanul Muslimin. Dan yang paling memprihatinkan, sudah ada infiltrasi ke dalam institusi pemerintah yang sedang digunakan untuk mencapai tujuan ini.

Agen-agen garis keras juga melakukan infiltrasi ke Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bahkan sudah dibilang, MUI kini telah menjadi bungker dari organisasi dan gerakan fundamentalis dan subversif di Indonesia.[24] Lembaga semi pemerintah yang didirikan oleh rezim Orde Baru untuk mengontrol umat Islam itu, kini telah berada dalam genggaman garis keras dan berbalik mendikte/mengontrol pemerintah. Maka tidak heran jika fatwa-fatwa yang lahir dari MUI bersifat kontra produktif dan memicu kontroversi, semisal fatwa pengharaman sekularisme, pluralisme, liberalisme dan vonis sesat terhadap kelompok-kelompok tertentu di masyarakat yang telah menyebabkan aksi-aksi kekerasan atas nama Islam.

Berbagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok garis keras seperti Front Pembela Islam (FPI) dan lain-lain yang menghancurkan dan memberangus orang lain yang dinyatakan sesat oleh MUI, dan dukungan pengurus MUI kepada mereka yang melakukan aksi-aksi kekerasan terkait, mengkonfirmasi pernyataan bahwa MUI telah memainkan peran kunci dalam gerakan-gerakan garis keras di Indonesia. Saat ini ada anggota MUI dari Hizbut Tahrir Indonesia, padahal HTI jelas-jelas mencita-citakan khilafah Islamiyah yang secara ideologis bertentangan dengan Pancasila dan NKRI.

Rendahnya perhatian dan keprihatinan terhadap fenomena

---

24. Baca: "MUI Bungker Islam Radikal," di http://www.wahidinstitute.org/indonesia/content/view/718/52/

garis keras tidak hanya mengenai ideologi, gerakan, dan infiltrasi mereka. Arus dana Wahabi yang tidak hanya membiayai terorisme tetapi juga penyebaran ideologi dalam usaha wahabisasi global juga nyaris luput dari perhatian publik.[25] Selama ini, arus dana Wahabi ke Indonesia tidak mendapat perhatian publik secara serius, padahal dari sinilah fenomena infiltrasi paham garis keras memperoleh dukungan dan dorongan yang luar biasa kuat sehingga menjadi bisnis yang menguntungkan banyak agennya.

Ada orang-orang yang sadar bahwa *petrodollar* Wahabi yang sangat besar jumlahnya masuk ke Indonesia, namun cukup sulit untuk membuktikannya di lapangan karena pihak yang menerima sangat sensitif atas isu ini dan menolak membicarakannya. Sepertinya, penolakan ini dilakukan karena agen garis keras malu jika diketahui bahwa mereka telah menjual agama, malu jika diketahui mengabdi pada tujuan Wahabi, dan memang untuk menyembunyikan infiltrasi Wahabi/Ikhwanul Muslimin terhadap Islam Indonesia. Pada sisi yang lain, badan negara yang bertanggung jawab mengawasi aliran keluar-masuk dana di Indonesia juga tidak mengumumkan hal tersebut meskipun sebenarnya ada para pejabat dan pihak yang bertanggung jawab atas keamanan negara mengaku sangat prihatin dengan fenomena ini.

---

25. Dalam buku *Dua Wajah Islam*, Stephen Sulaiman Schwartz dengan jelas dan meyakinkan memaparkan aliran dana Wahabi dalam usaha-usaha wahabisasi global dan aksi-aksi terorisme internasional yang dilakukan atas nama agama. Dalam konflik Bosnia misalnya, dengan dalih membela Muslim Bosnia dari *ethnic cleansing*, Wahabi mengambil kesempatan untuk menyebarkan ideologinya dengan membangun infrastruktur pendidikan dan peribadatan. Wahabi menggunakan pendidikan (*tarbiyah*) dan peribadatan (*ubûdiyah*) sebagai *camouflage* ideologis untuk menyebarkan paham keagamaan mereka yang kaku dan sempit. Sedangkan kasus WTC sudah jelas siapa dalang di balik tragedi tersebut. (Stephen Sulaiman Schwartz (2002). *The Two Faces of Islam: Sa'ud Fundamentalism and Its Role in Terrorism*. New York: Doubleday (diterbitkan dalam bahasa Indonesia: *Dua Wajah Islam: Moderatisme vs Fundamentalisme dalam Wacana Global*, Jakarta: LibForAll Foundation, the Wahid Institute, Center for Islamic Pluralism, dan Blantika).

Sebagai misal, sudah merupakan rahasia umum di kalangan para ahli bahwa melalui Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) yang bertindak sebagai wakilnya di Indonesia, *Rabithath al-'Alam al-Islami* menyediakan dana yang luar biasa besar untuk gerakan-gerakan radikal di Indonesia.[26] Berbagai aktivitas dakwah kampus atau lazim disebut Lembaga Dakwah Kampus (LDK), yang menggagas gerakan *tarbiyah*, yang kemudian melahirkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menikmati dana Arab Saudi tersebut dan sekaligus menyebarkan virus tarbiyah di Indonesia.

Di Kabupaten Magelang, peneliti kami mendapat informasi dari mantan pengurus Muhammadiyah salah satu kecamatan di Magelang bahwa PKS sedang mencari masjid-masjid yang hendak direnovasi, atau daerah-daerah yang membutuhkan masjid baru. Secara terbuka, aktivis PKS yang bertanggung jawab atas proyek ini mengutarakan kepada mantan pengurus Muhammadiyah dimaksud bahwa dana untuk semua itu diperoleh dari Arab Saudi. Jika masjid hendak direnovasi atau dibangun, penduduk setempat hanya diminta untuk mendukung PKS dalam setiap pemilihan. Kata dia, "Tahun 2008 ini sudah ada 11 yang akan dibangun atau direnovasi dengan dana Saudi." Hampir semua jama'ah masjid di Magelang yang diserobot oleh PKS melalui strategi ini adalah warga Nahdliyin.[27] Jika di satu kabupaten saja ada 11 masjid yang dikerjakan, bayangkan berapa jumlah uang Wahabi yang digunakan untuk membangun masjid-masjid di seluruh Indonesa dengan motif politik seperti ini?

Setelah calon PKS menang dalam Pilgub Jawa Barat pada bulan Juli 2008, salah seorang Ketua NU memberitahu peneliti kami bahwa hal tersebut ditandai oleh keberhasilan PKS merebut banyak

---

26. Noorhaidi Hasan, "Islamic Militancy, *Sharia*, and Democratic Consolidation in Post-Soeharto Indonesia," Working Paper No. 143, S. Rajaratnam School of International Studies (Singapore, 23 October 2007).

27. Wawancara peneliti konsultasi di Kabupaten Magelang pada bulan Agustus 2008.

masjid NU dan para jama'ahnya. Walaupun Ketua NU dimaksud terkejut dengan kejadian tersebut, sebenarnya keberhasilan PKS merebut masjid dan jamaah NU tidak mengherankan. Tentu saja ideologi yang didukung dana asing dengan jumlah yang luar biasa besar dan dipakai secara sistematis bisa menyusup ke mana-mana dan mengalahkan oposisi yang tidak terorganisasi. Atau dengan kata lain yang sering dipakai oleh para ulama, *al-haqq bi lâ nizhâmin qad yaghlib al-bâthil bi nizhâmin* (kebenaran yang tidak terorganisasi bisa dikalahkan kebatilan yang terorganisasi).

Para agen garis keras sering berteriak bahwa orang asing, yayasan-yayasan, dan pemerintah dari Barat menggunakan uang mereka untuk menghancurkan Islam di Indonesia, dan menuding ada konspirasi Zionis/Nasrani di belakangnya. Pada kenyataannya, pemerintah dan yayasan-yayasan Barat seperti Ford Foundation dan the Asia Foundation mempublikasikan program-program yang dilakukannya secara terbuka, sehingga publik bisa mengetahui apa yang sebenarnya mereka lakukan dan berapa biaya yang dikeluarkan untuknya.[28] Walaupun dana LibForAll Foundation sangat se-

---

28. Pemerintah Amerika Serikat banyak membiayai pelatihan untuk meningkatkan sumberdaya manusia terkait demokratisasi di seluruh dunia. The National Democratic Institute (NDI), lembaga semi-pemerintah AS yang berusaha mendorong usaha-usaha demokratisasi di Indonesia, "secara tipikal lebih memilih mitranya berdasarkan komitmen mereka pada prinsip-prinsip demokratis dan anti-kekerasan daripada keyakinan-keyakinan politiknya. Faktor lain yang juga dipertimbangkan adalah: kemampuan dan dukungan politik rakyat seperti bisa dibuktikan dari hasil pemilu; organisasi-organisasi tingkat akar rumput; dan kemampuan menerima bantuan. Selama ini NDI menyelenggarakan training aktivis dan anggota, kampanye pemilihan langsung, kebijakan pembangunan, pemilihan pimpinan, analisis sikap pemilih, serta pembangunan dan reformasi partai politik. NDI juga terus menyediakan saran-saran para ahli dan informasi global, training para pemimpin partai dan instruktur pada tingkat nasional, wilayah, dan kabupaten." (Baca dalam: http://www.ndi.org/indonesia). Berdsarkan wawancara peneliti konsultasi pada bulan Maret 2008, partai yang paling banyak menerima manfaat dalam program Political Party Development NDI ini adalah PKS.

dikit dan kebanyakan pembina, penasehat, dan pengurusnya orang Indonesia asli, ia juga melaporkan program-program yang dilakukannya secara terbuka dan transparan.

Hal ini sangat berbeda dari gerakan asing Wahabi/Ikhwanul Muslimin dan kaki tangannya di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan dengan jelas bahwa, sementara para agen garis keras berteriak bahwa orang asing datang ke Indonesia membawa uang yang banyak untuk menghancurkan Islam… tentu itu benar, karena orang asing itu adalah aktivis gerakan transnasional dari Timur Tengah yang menggunakan *petrodollar* dalam jumlah yang fantastis untuk melakukan Wahabisasi, merusak Islam Indonesia yang spiritual, toleran, dan santun, dan mengubah Indonesia sesuai dengan ilusi mereka tentang negara Islam yang di Timur Tengah pun tidak ada.[29]

Dengan balutan jubah dan jenggot Arab yang ditampilkan, yang oleh beberapa pihak telah dipandang lebih tampak seperti preman berjubah, mereka ingin menunjukkan seolah-olah pandangan ekstrem yang mereka teriakkan dan paksakan memang benar-benar merupakan pesan Islam yang harus diperjuangkan. Padahal, mereka merusak agama Islam dan bertanggung jawab atas banyak kekerasan yang mereka lakukan atas nama Islam di Indonesia dan seluruh dunia. Dan kita sebagai umat Islam harus menanggung malu atas perbuatan mereka.

Karena itu, alasan utama melawan gerakan garis keras adalah untuk mengembalikan kemuliaan dan kehormatan Islam yang telah mereka nodai dan sekaligus —pada saat yang sama— untuk

---

29. Aktivitas Saudi di Indonesia hanya merupakan bagian kecil dari kampanye senilai US $70.000.000.000,- selama kurun waktu antara 1979-2003 untuk menyebarkan sekte fundamentalis Wahabi di seluruh dunia. Usaha-usaha dakwah Wahabi yang terus meningkat ini merupakan "kampanye propaganda terbesar di seluruh dunia yang pernah dilakukan—anggaran propaganda Soviet pada puncak Perang Dingin menjadi sangat kecil dibandingkan belanja propaganda Wahabi ini" (Baca dalam: "How Billions in Oil Money Spawned a Global Terror Network," dalam *US News & World Report*, 7 Desember 2003).

menyelamatkan Pancasila dan NKRI. Jika mayoritas moderat melawan kelompok garis keras dengan tegas, kita akan mengembalikan suasana beragama di Indonesia menjadi moderat, dan kelompok garis keras dewasa ini akan gagal lagi seperti semua nenek moyang ideologis mereka di tanah air kita, yang mewakili kehadiran *al-nafs al-lawwâmah*. Kemenangan melawan mereka akan mengembalikan keluhuran ajaran Islam sebagai *rahmatan lil-'âlamîn*, dan ini merupakan salah satu kunci untuk membangun perdamaian dunia.

Studi ini kami lakukan dan publikasikan untuk membangkitkan kesadaran seluruh komponen bangsa, khususnya para elit dan media massa, tentang bahaya ideologi dan paham garis keras yang dibawa ke tanah air oleh gerakan transnasional Timur Tengah dan tumbuh seperti jamur di musim hujan dalam era reformasi kita. Juga, sebagai seruan untuk melestarikan Pancasila yang merefleksikan esensi syari'ah dan menjadikan Islam sebagai *rahmatan lil-'âlamîn* yang sejati.

Dalam Bab V, studi ini merekomendasikan langkah-langkah strategis untuk melestarikan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan menegakkan warisan luhur tradisi, budaya dan spiritualitas bangsa Indonesia, antara lain dengan:

- mengajak dan mengilhami masyarakat dan para elit untuk bersikap terbuka, rendah hati, dan terus belajar agar bisa memahami spiritualitas dan esensi ajaran agama, dan menjadi jiwa-jiwa yang tenang;
- menghentikan dan memutus —dengan cara-cara damai dan bertanggung jawab— mata rantai penyebaran paham dan ideologi garis keras melalui pendidikan (dalam arti kata yang seluas-luasnya) yang mencerahkan, serta mengajarkan dan mengamalkan pesan-pesan luhur agama Islam yang mampu menumbuhkan kesadaran sebagai hamba Tuhan yang rendah hati, toleran dan damai.

Bekerjasama, saling mengingatkan tentang kebenaran (*wa tawâshau bil-haqq*) dan untuk selalu bersabar (*wa tawâshau bil-shabr*), menjadi kunci penting dalam hal ini. Kita harus tetap santun, sabar, toleran, dan terbuka dalam usaha-usaha melestarikan visi luhur nenek moyang dan Pendiri Bangsa. Tujuan mulia hendaknya tidak dinodai dengan usaha-usaha kotor, kebencian, maupun aksi-aksi kekerasan. Tujuan luhur harus dicapai dengan cara-cara yang benar, tegas, bijaksana dan bertanggung jawab, yang jauh dari arogansi, pemaksaan dan semacamnya.

Kita pantas mengingat nasehat Syeikh Ibn 'Athaillah al-Sakandari dalam *Hikam* karyanya: "Janganlah bersahabat dengan siapa pun yang perilakunya tidak membangkitkan gairahmu mendekati Allah dan kata-katanya tidak menunjukkanmu kepada-Nya" (*lâ tash-hab man lâ yunhidluka ilâ Allah hâluhu, wa la yahdîka ilâ Allâh maqâluhu*). Orang yang merasa paling mengerti Islam, penuh kebencian kepada makhluk Allah yang tidak sejalan dengan mereka, serta merasa sebagai yang paling benar dan karena itu mengklaim berhak menjadi khalifah-Nya untuk mengatur semua orang—pasti perbuatan dan kata-katanya tidak akan membawa kita kepada Tuhan. Cita-cita mereka tentang negara Islam hanya ilusi. Negara Islam yang sebenarnya tidak terdapat dalam konstruksi pemerintahan, tetapi dalam kalbu yang terbuka kepada Allah swt. dan kepada sesama makhluk-Nya.

Kebenaran dan kepalsuan sudah jelas. Garis keras ingin memaksa semua rakyat Indonesia tunduk kepada paham mareka yang ekstrem dan kaku. Catatan sejarah bangsa kita —Babad Tanah Jawi, Perang Padri, Pemberontakan DI, dan lain-lain— menunjukkan bahwa jiwa-jiwa yang resah akan terus mendorong bangsa kita ke jurang kehancuran sampai mereka betul-betul berkuasa, atau kita menghentikannya seperti berkali-kali telah dilakukan oleh jiwa-jiwa yang tenang, nenek moyang kita. Saat ini kitalah yang memilih masa depan bangsa.

Jakarta, 8 Maret 2009

Bab I

Studi Gerakan Islam Transnasional dan Kaki Tangannya di Indonesia

Dasar Pemikiran

Para aktivis garis keras sepenuhnya sadar bahwa mereka tengah terlibat dalam "perang ide-ide" untuk meyakinkan umat Islam di seluruh dunia, bahwa ideologi mereka yang ekstrem adalah satu-satunya interpretasi yang benar tentang Islam. Mereka memahami Islam secara monolitik dan menolak varian-varian Islam lokal dan spiritual seperti diamalkan umat Islam umumnya, sebagai bentuk pengamalan Islam yang salah dan sesat karena sudah tercemar dan tidak murni lagi.

Strategi utama gerakan Islam transnasional dalam usaha membuat umat Islam menjadi radikal dan keras adalah dengan membentuk dan mendukung kelompok-kelompok lokal sebagai kaki tangan "penyebar" ideologi Wahabi/Salafi mereka, serta berusaha meminggirkan dan memusnahkan bentuk-bentuk pengamalan Islam yang lebih toleran yang telah lebih lama ada dan dominan di berbagai belahan dunia Muslim. Dengan cara demikian, mereka berusaha keras melakukan infiltrasi ke berbagai bidang kehidupan umat Islam, baik melalui cara-cara halus hingga yang kasar dan keras.

Di daerah-daerah seperti Arab Saudi, Sudan, Gaza, Afghanistan—Thaliban dan wilayah-wilayah Pashtun Pakistan, mereka sudah berhasil memaksakan ideologinya. Sementara di kebanyakan belahan dunia Islam, hampir tidak ada usaha serius untuk mengungkap gerakan kelompok-kelompok garis keras serta mobilisasi dukungan untuk pandangan dan pengamalan Islam yang umumnya toleran, pluralistik, dan sejalan dengan dunia modern. Di Indonesia, kenyataannya berbeda, karena Islam spiritual masih kuat dan ada tokoh-tokoh Islam Indonesia yang menyadari bahaya ancaman gerakan garis keras dan berani menghadapi mereka sebelum nasi menjadi bubur.

Di tanah air kita, reaksi terhadap infiltrasi dan aktivitas gerakan garis keras seperti dakwah Wahabi/Salafi ini bisa dilihat dengan terbitnya SKPP Muhammadiyah Nomor 149/Kep/I.0/B/2006, Fatwa Majlis Bahstul Masa'il NU tentang Khilafah Islamiyah, serta respon para ulama dan tokoh nasional tentang bahaya dan ancaman gerakan-gerakan transnasional. Bahkan seorang mantan Panglima TNI mengemukakan, "Dulu, ancaman garis keras terhadap Konstitusi dan Pancasila ada di luar pemerintahan, seperti DI/NII. Tapi sekarang, garis keras sudah masuk ke dalam pemerintahan, termasuk parlemen, dan menjadi jauh lebih berbahaya dari sebelumnya."[1]

Reaksi ormas-ormas moderat serta respon para ulama dan tokoh nasional ini menjadi indikasi menguatnya pengaruh dan infiltrasi gerakan garis keras di Indonesia belakangan ini. Idealnya, semua ini bisa menjadi teladan bagi umat Islam di Indonesia dan seluruh dunia untuk memobilisasi perlawanan terhadap agenda Wahabi/Salafi, dan menggalang dukungan dari para pemimpin dan umat Islam yang belum tercemar untuk secara sadar melawan penyebaran ideologi garis keras tersebut. Sementara pada saat yang sama, perlawanan ini bisa mengawali usaha menelanjangi aktivitas-aktivitas gerakan garis keras transnasional secara publik.

1 Wawancara konsultasi pada 17 September 2007.

Subyek Studi

Permasalahan utama studi ini menyangkut: asal-usul, ideologi, agenda, gerakan, dan agen-agen gerakan Islam di Indonesia yang diidentifikasi sebagai kelompok garis keras; strategi mereka dalam memperjuangkan agenda dan ideologi tersebut; dan, infiltrasi yang berhasil ditanamkan kepada masyarakat dan kelompok-kelompok Islam lain yang berhaluan moderat.

Infiltrasi garis keras terhadap Islam Indonesia diduga telah membangkitkan kembali gagasan dan cita-cita formalisasi Islam yang sesungguhnya telah dikubur dalam-dalam oleh bangsa Indonesia setelah menyepakati Pancasila sebagai Dasar Negara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai konsensus final dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Atas nasehat tokoh BIN dan para ahli serta tokoh lain, kelompok-kelompok Islam moderat termasuk dalam subyek studi di sini untuk melihat sejauh mana mereka telah disusupi dan dipengaruhi oleh agen-agen garis keras tersebut.

Definisi Operasional

Untuk keperluan studi ini kami membuat definisi operasional mengenai Islam garis keras dan Islam moderat, sebagai berikut:

Islam garis keras: Diklasifikasikan sebagai individu dan organisasi.

- Individu garis keras adalah orang yang menganut pemutlakan atau absolutisme pemahaman agama; bersikap tidak toleran terhadap pandangan dan keyakinan yang berbeda; berperilaku atau menyetujui perilaku dan/atau mendorong orang lain atau pemerintah berperilaku memaksakan pandangannya sendiri kepada orang lain; memusuhi dan membenci orang lain karena berbeda pandangan; mendukung pelarangan oleh pemerintah dan/atau pihak lain atas

keberadaan pemahaman dan keyakinan agama yang berbeda; membenarkan kekerasan terhadap orang lain yang berbeda pemahaman dan keyakinan tersebut; menolak Dasar Negara Pancasila sebagai landasan hidup bersama bangsa Indonesia; dan/atau menginginkan adanya Dasar Negara Islam, bentuk Negara Islam, atau pun Khilafah Islamiyah.

- Organisasi garis keras adalah kelompok yang merupakan himpunan individu-individu dengan karakteristik yang disebutkan di atas, ditambah dengan visi dan misi organisasi yang menunjukkan orientasi tidak toleran terhadap perbedaan, baik semua karakter ini ditunjukkan secara terbuka maupun tersembunyi.

Islam Moderat: Diklasifikasikan sebagai individu dan organisasi.

- Individu moderat adalah individu yang menerima dan menghargai pandangan dan keyakinan yang berbeda sebagai fitrah; tidak mau memaksakan kebenaran yang diyakininya kepada orang lain, baik secara langsung atau melalui pemerintah; menolak cara-cara kekerasan atas nama agama dalam bentuk apa pun; menolak berbagai bentuk pelarangan untuk menganut pandangan dan keyakinan yang berbeda sebagai bentuk kebebasan beragama yang dijamin oleh Konstitusi negara kita; menerima Dasar Negara Pancasila sebagai landasan hidup bersama dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai konsensus final dalam kehidupan berbangsa dan berngera yang melindungi perbedaan dan keragamaan yang ada di tanah air.
- Organisasi moderat adalah kelompok yang memiliki karakteristik seperti yang tercermin dalam karakteristik individu moderat, ditambah dengan visi dan misi organisasi yang menerima Dasar Negara Pancasila sebagai landasan hidup bersama bangsa Indonesia dan bentuk Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI) sebagai konsensus final dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan Studi

Secara akademis, studi ini bertujuan menemukan, menunjukkan, dan membuktikan asal-usul, ideologi, dan gerakan kelompok-kelompok garis keras di Indonesia, dan mengetahui respon para agen gerakan garis keras tentang isu-isu sosial-politik dan keagamaan.

Sementara secara praksis, hasil studi ini diharapkan bisa menjadi batu loncatan bagi gerakan perlawanan terhadap agenda gerakan Islam transnasional di Indonesia dan seluruh dunia, memobilisasi para pemimpin dan umat Islam yang belum terkontaminasi ideologi gerakan garis keras untuk secara sadar melawan penyebaran ideologi mereka.

Pada saat yang sama, studi ini bertujuan mengungkap dan menunjukkan aktivitas gerakan garis keras yang merupakan faktor krusial bagi penyebaran ideologinya di Indonesia dan seluruh dunia.

Masalah Studi

Dengan latar belakang di atas, kami merancang studi ini untuk memetakan dan menjawab beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sebenarnya pandangan dan respon para agen garis keras terhadap isu-isu sosial politik dan keagamaan di Indonesia akhir-akhir ini?
2. Bagaimana peta gerakan-gerakan Islam transnasional dan kaki tangannya di Indonesia saat ini?
3. Apa yang menjadi agenda perjuangan kelompok-kelompok garis keras dan bagaimana agenda itu dikaitkan dengan persoalan-persoalan Indonesia mutakhir?
4. Bagaimana strategi kelompok-kelompok garis keras dalam

memperjuangkan agenda-agenda mereka dan menyusupkan agen-agen mereka ke tengah-tengah masyarakat?
5. Bagaimana hubungan kelompok-kelompok garis keras lokal dengan gerakan-gerakan Islam transnasional dari Timur Tengah?
6. Bagaimana pula hubungan kelompok-kelompok garis keras itu dengan kelompok-kelompok Islam yang berhaluan moderat?
7. Apakah kelompok-kelompok garis keras telah mampu mempengaruhi dua ormas Islam terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan NU?
8. Benarkah masjid dan institusi-institusi pendidikan telah dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok garis keras untuk menyebarkan paham mereka?
9. Bagaimana hubungan kelompok-kelompok garis keras dibangun dan bagaimana jaringan mereka dibentuk?

Metode Studi

Studi ini dilakukan oleh dua tim, yakni Tim Jakarta dan Tim Yogya. Tim Jakarta melakukan wawancara dan/atau konsultasi dengan para ulama, intelektual, dan tokoh-tokoh nasional mengenai isu-isu sosial-politik dan keagamaan di tanah air serta hal-hal yang terkait dengan aktivitas gerakan garis keras. Tim Jakarta juga melakukan riset pustaka untuk mengetahui kesinambungan dan hubungan berbagai gerakan garis keras di Indonesia dan dunia. Tim Jakarta disebut sebagai Peneliti Konsultasi dan Literatur, beranggotakan C. Holland Taylor, Hodri Ariev, Dr. Ratno Lukito, Niluh Dipomanggolo, dan Ahmad Gaus AF., bertanggung jawab kepada KH. Abdurrahman Wahid.

Adapun Tim Yogya adalah para peneliti yang melakukan interview dengan para aktivis gerakan garis keras, atau individu yang dipengaruhi dan/atau memperjuangkan ideologi dan agenda garis

keras. Tim Yogya disebut sebagai Peneliti Lapangan, beranggotakan Dr. Ratno Lukito, Dr. Zuly Qodir, Dr. Agus Nuryatna, dan Dr. Rizal Panggabean yang dibantu oleh 27 orang peneliti, serta berada di bawah koordinasi Prof. Dr. Abdul Munir Mulkhan sebagai Ketua, dan Dr. Sukardi Rinakit sebagai Penasehat.

Secara ringkas bisa dikemukakan, "responden" Tim Yogya adalah para aktivis atau individu yang telah terpengaruh gerakan garis keras, sedangkan "sumber" Tim Jakarta adalah para tokoh moderat. Penelitian lapangan hanya merupakan sebagian saja dari keseluruhan studi ini. Karena itu, secara akademik, Tim Yogya hanya bertanggung jawab atas hasil penelitian lapangan saja, sedangkan hasil studi secara keseluruhan berada dalam tanggung jawab Tim Jakarta di bawah arahan KH. Abdurrahman Wahid sebagai Sesepuh dan Pembina LibForAll Foundation.

a. Penelitian Literatur dan Konsultasi

Dalam studi ini, Tim Jakarta telah mengumpulkan data-data yang terkait dengan isu infiltrasi agen-agen garis keras dari berbagai sumber, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

- Sumber tertulis: Hasil penelitian yang pernah ada dengan topik yang sama atau mirip, karya-karya yang relevan, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan isu tersebut, baik yang sudah dipublikasikan maupun belum.
- Sumber tidak tertulis: Konsultasi dengan para ulama, pemimpin organisasi massa (ormas) Islam moderat seperti Muhammadiyah dan NU, cendekiawan, pemimpin partai politik, pejabat pemerintah, petinggi militer, kalangan bisnis dan media massa.

Studi terhadap berbagai dokumen dan literatur terkait dilakukan untuk memperkaya informasi, memastikan akurasi data dan informasi yang diperoleh, dan melihat kontinuitas dan perubahan dalam perkembangan gerakan

kelompok-kelompok garis keras.

Sedangkan konsultasi dilakukan untuk mendapatkan informasi dan konfirmasi tentang perkembangan terkini, sekaligus untuk minta nasehat dan rekomendasi mengenai isu-isu terkait. Tokoh-tokoh besar dari semua bidang ini memiliki keprihatinan yang sama terhadap adanya infiltrasi ideologi dan agen-agen garis keras terhadap Islam Indonesia dan telah menjadi duri dalam daging, merusak keharmonisan perbedaan dalam hidup bermasyarakat, dan akhirnya berpotensi menghancurkan Pancasila, UUD 1945, dan NKRI.

b. Penelitian Lapangan

Dalam penelitian ini, Tim Yogya menggunakan metode kualitatif. Pengambilan data secara kualitatif dilakukan dengan cara wawancara mendalam (*in-depth interviews*), sehingga untuk satu responden saja seorang peneliti bisa bertemu sebanyak 3-5 kali. Hal ini dilakukan untuk mencapai kedalaman wawancara. Untuk melengkapi hasil penelitian lapangan ini kami juga menggunakan data sekunder, yakni penelitian yang sudah ada atau studi terdahulu yang terkait dengan tema penelitian.

Setelah data-data wawancara diperoleh, para peneliti mentranskrip isi wawancara, kemudian mengirimkan transkrip tersebut kepada tim manajemen di Yogyakarta untuk bahan analisis yang dibuat oleh tim monitoring dan analis ahli yang secara khusus diundang untuk mengkaji hasil wawancara tersebut. Untuk memperkaya analisisnya, tim monitoring yang terdiri dari para aktivis, sarjana dan ahli juga melakukan observasi langsung ke lapangan untuk memverifikasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti di setiap kota/daerah dan melihat visibilitas penelitian itu sendiri di lapangan.

Penelitian Lapangan

a. Tim Yogya dan Lokasi Penelitian

Untuk mengurai isu-isu yang cukup kompleks dalam studi ini, kami menurunkan 27 peneliti lapangan dari jaringan UIN/IAIN, sebagian besar bergelar master/magister dan doktor, yang dikoordinasi oleh tim ahli yang terdri dari 6 orang dan di bawah tanggung jawab Prof. Dr. Abdul Munir Mulkhan dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta —yang juga anggota Komnas HAM— dan Dr. Sukardi Rinakit dari Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) sebagai penasehat. Penelitian dilakukan di 24 kota/daerah yang tersebar di 17 propinsi di pulau-pulau Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan, Sulawesi, Ambon, dan Nusa Tenggara Barat, dengan responden sebanyak 591 orang yang ditarik secara sengaja (*purposive sampling*).

Kota/daerah yang dipilih didasarkan pada kenyataan adanya aktivitas dan kelompok-kelompok garis keras di kota atau daerah bersangkutan. Aktivitas kelompok-kelompok garis keras ternyata tidak hanya ditemukan di daerah-daerah konflik seperti Poso, Ambon, dan Aceh, tetapi juga di daerah lain yang sepertinya aman dan tampak tidak bergejolak seperti ibukota Jakarta, Bogor, Bandung, Pekalongan, Yogyakarta, Malang, Pamekasan, Medan, dan beberapa daerah lain.

b. Karakteristik Responden

Responden penelitian lapangan ini dipilih berdasarkan posisi fungsionalnya dalam kelompok bersangkutan. Di antara mereka ada yang menempati posisi sebagai ketua, sekretaris, atau hubungan masyarakat (humas atau juru bicara) dalam sebuah perkumpulan atau organisasi, dan sebagian lain merupakan anggota biasa tetapi memiliki kedekatan emosional dengan pimpinan sehingga menjadi anggota yang dipercaya oleh pimpinannya.

Agen-agen gerakan garis keras yang menjadi responden

penelitian lapangan ini umumnya berprofesi sebagai pegawai negeri, dosen, mahasiswa, guru, wiraswasta, anggota parlemen tingkat daerah (DPRD), pimpinan perguruan tinggi atau Pimpinan partai politik. Mereka terlibat aktif dalam 58 organisasi tingkat lokal dan nasional baik sebagai Pimpinan atau pun anggota Pimpinan yang ikut menentukan kebijakan organisasi. Dari 58 organisasi ini ada organisasi-organisasi massa (ormas) Islam moderat yang terhadapnya agen-agen garis keras melakukan infiltrasi.

Para agen garis keras tersebut selalu berkomunikasi dengan masyarakat luas melalui semua media yang bisa mereka gunakan untuk menyebarkan ideologinya. Penyebaran ideologi ini bisa dilihat lebih lanjut dalam penjelasan mengenai infiltrasi agen-agen gerakan garis keras ke dalam tubuh ormas moderat seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), universitas, sekolah, masjid, instansi-instansi pemerintah maupun swasta, dan lain-lain.

Tim penelitian lapangan melaporkan bahwa sebanyak 63 persen responden menjadi pengurus inti dari organisasi tempat mereka beraktivitas, dan hanya sekitar 7 persen yang berstatus sebagai anggota biasa. Dilihat dari kedudukan dan jaringannya, organisasi tempat responden beraktivitas terbagi ke dalam organisasi lokal dan nasional. Suatu organisasi disebut lokal jika ia tidak memiliki cabang atau jaringan di tempat lain tetapi hanya berada di daerah di mana responden menetap, atau di beberapa daerah sekitar. Suatu organisasi disebut nasional jika memiliki kantor pusat di suatu kota dan cabang-cabangnya di daerah lain.

Karakteristik lain responden yang penting untuk diketahui adalah fenomena rangkap anggota atau *dual membership* antara ormas moderat dan garis keras yang sangat sering ditemukan oleh para peneliti lapangan, terutama di lingkungan Muhammadiyah. Ini menunjukkan bahwa kelompok-kelompok garis keras sudah melakukan infiltrasi ke dalam Muhammadiyah dan NU. Mereka bergerilya untuk mengubah Muhammadiyah dan NU yang moderat menjadi keras seperti mereka.

c. Nama-nama Organisasi

Nama-nama organisasi di mana para responden terlibat aktif adalah seperti daftar berikut:

- DDI (Darud Dakwah wal-Irsyad)
- DDII (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia)
- FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama)
- FPMI (Front Pembela Masyarakat Islam)
- FORMIS (Forum Mahasiswa Islam)
- FPI (Front Pembela Islam)
- FSPUI (Forum Silaturrahmi Perjuangan Umat Islam)
- FSRMP (Forum Silaturahmi Remaja Masjid Panggungharjo)
- FTPS (Forum Tokoh Peduli Syariat)
- FUI (Forum Umat Islam)
- FUI (Forum Ukhuwah Islamiyah)
- FUUI (Forum Ulama Umat Islam)
- FUUU (Forum Ulama Untuk Umat)
- GERPI (Gerakan Pemuda Perti)
- GMM (Gerakan Muslim Minangkabau)
- GPI (Gerakan Pemuda Islam)
- HIDMI (Himpunan Dai Muda Indonesia)
- HIMA PUI (Himpunan Mahasiswa Persatuan Umat Islam)
- HIMA (Himpunan Mahasiswa)
- HIMI (Himpunan Mahasiswi)
- HMI (Himpunan Mahasiswa Islam)
- HPI (Himpunan Pemuda Insafuddin)
- HTI (Hizbut Tahrir Indonesia)
- HUDA (Himpunan Ulama Dayah Aceh)
- ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia)
- IKADI (Ikatan Dai Indonesia)

- IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah)
- IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah)
- IRM (Ikatan Remaja Muhammadiyah)
- JMAF (Jamaah Masjid AR Fachruddin)
- JMF (Jamaah Masjid Fisipol)
- KAMCI (Keluarga Mahasiswa Cimahi)
- KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia)
- KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia)
- KPPRA (Komite Persiapan Partai Rakyat Aceh)
- KPPSI (Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam)
- KPSI (Komite Penegakan Syariat Islam)
- LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia)
- LDK (Lembaga Dakwah Kampus)
- LDM (Lembaga Dakwah Mahasiswa)
- LPIK (Lembaga Pengembangan Ilmu dan Kajian)
- MMI (Majelis Mujahidin Indonesia)
- Muhammadiyah
- MUI (Majelis Ulama Indonesia)
- NU (Nahdlatul Ulama)
- PBB (Partai Bulan Bintang)
- PBR (Partai Bintang Reformasi)
- PERSIS (Persatuan Islam)
- PI (Partai Islam)
- PII (Pelajar Islam Indonesia)
- PKPUS (Pos Keadilan Peduli Ummat Sumatera Barat)
- PKS (Partai Keadilan Sejahtera)
- PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia)
- PSII (Partai Sarikat Islam Indonesia)
- PUSAKA (Pusat Studi Antar Komunitas)

- RTA (Rabithah Thaliban Aceh)
- SI (Sarekat Islam)
- UKMI (Unit Kegiatan Mahasiswa Islam)

Tabel 1. Daerah Penelitian & Jumlah Responden

No.	Area Penelitian	Peneliti	Jumlah Responden
1	Aceh	Teuku Edy Faishal	24
		Laode Arham	9
2	Medan	Iswandy Syahputra	34
3	Padang	Sibawaihi	33
4	Palembang	Laode Arham	16
5	Lampung Timur	Wahid Hamdan	33
6	Tangerang dan Jakarta	Noor Aziz	18
7	Tangerang dan Jakarta	Ahmad Fuad Fanani	24
8	Bandung	Piet H. Khaidir	33
9	Bogor	Kidam Nugraha Tirta	24
10	Pekalongan	Muhammad Bilal	25
11	Solo	Muthoharun Jinan	30
12	Klaten	Muh. Irfan Daud	2
13	Yogyakarta	Suprianto Abdi	24
		Sri Roviana	16
		Enik Maslahah	8
14	Lamongan	Budi Ashari	30
15	Kediri	Imam Subawi	24
16	Malang	Syamsul Arifin	26
17	Banyuwangi	Nur Kholik Ridwan	6
18	Madura	Abdur Rozaki	7
19	Lombok	Suhaimi Syamsuri	20

20	Balikpapan	M. Husain A. Thoib	16
		Siti Salhah	10
21	Makasar	Mustari	24
22	Poso	Syahabuddin	27
23	Gorontalo	Ahmad Faishal	24
24	Ambon	Rajab	24

Peta Lokasi Penelitian Lapangan

Bab II

Infiltrasi Ideologi Wahabi-Ikhwanul Muslimin di Indonesia

Wahabi

Kanjeng Nabi Muhammad saw. pernah menyatakan bahwa umatnya akan terpecah menjadi 73 kelompok, semua masuk neraka kecuali satu.[1] Mereka —yang akan selamat— adalah "yang berpegang kepada Sunnahku dan jamâ'ah sahabatku" (*mâ ana 'alaih wa ash-hâbî*). Kelompok ini kemudian masyhur disebut *Ahlussunnah wal-jamâ'ah* (*aswaja*), orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan jamâ'ah sahabat. Para ulama kemudian berusaha keras mengidentifikasi karakter *aswaja* ini, yang kemudian —di dalam konteks interaksi sosial— tersimpul dalam sikap *al-tawassuth wal-i'tdâl*, sikap moderat dan konsisten.

Hadits prediktif ini sangat masyhur karena terkait dengan ke-

1. Versi lain menyatakan, "Semua akan selamat, kecuali satu." Namun riwayat ini dinilai lemah (*dla'îf*). Baca dalam: *Nazhm al-Mutanâtsir*, jilid I, h. 47; bandingkan juga dalam: Abû Nu'ain Ahmad ibn 'Abdillah al-Isbahânî, *Hilyat al-Auliyâ'* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Arabî, 1405 H.), jilid IX, h. 242.

selamatan di akhirat kelak. Itu pula sebabnya muncul dua versi hadits yang sangat berbeda, apakah dari 73 kelompok tersebut 1 yang selamat atau 1 yang celaka. Terkait dengan keselamatan ini pula, ada kelompok yang mengklaim bahwa hanya kelompoknya yang paling benar dan kelak akan selamat di akhirat. Demi klaim kebenaran dan keselamatan ini, mereka mudah mengkafirkan pihak lain semata untuk menegaskan bahwa diri dan kelompoknya saja yang paling benar, paling mukmin, paling muslim, dan paling selamat. Mereka lupa bahwa keselamatan tidak ditentukan dengan klaim-klaim semacam itu, tetapi dengan ketulusan dan keikhlasan dalam beragama, dengan berserah diri, tunduk, dan patuh hanya kepada Allah swt., dan —dalam term negatif— tidak dikendalikan oleh hawa nafsu. Padahal, dalam kesempatan lain, Nabi saw. memperingatkan bahwa, "Siapa pun yang mengkafirkan saudaranya tanpa penjelasan yang nyata, adalah dia sendiri yang kafir" (*man kaffara akhâhu bi-ghairi ta'wîl–fa-huwa kamâ qâla*).[2] Atau dalam riwayat lain, "Siapa pun yang mekafirkan saudaranya, maka salah seorang darinya benar-benar kafir" (*man kaffara akhâhu–fa-qad bâ'a bihâ ahaduhâ*).[3] Maka, yang manapun dan dari sisi manapun kedua riwayat tersebut direnungkan, seorang muslim *kâffah* lahir-batin tidak akan pernah mengkafirkan muslim yang mana pun.

Dalam sejarah Islam, pengkafiran paling awal gemar dilakukan oleh kelompok *Khawârij*, sekelompok orang yang keluar (desersi) dari barisan Khalifah 'Ali ibn Abi Thalib terkait *Tahkîm* dalam perang Shiffîn melawan Mu'awiyah. Sebagai kelompok yang tidak setuju dengan *tahkîm*, mereka mengkafirkan siapa pun yang berbeda sikap dan pandangan, baik dari pihak 'Ali maupun Mu'awiyah. Bahkan, mereka membunuh siapa pun yang telah dikafirkan. Jargon mereka bahwa "Hukum hanya milik Allah," telah mengesam-

2. Hadits riwayat Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, jilid XX, Bab 73 (Mesir: Mauqif Wizârat al-Auqâf, t.t.), h. 259.

3. Hadits riwayat Ahmad ibn Hanbal, *Masnad Ahmad*, Bab Masnad 'Abdullah ibn 'Umar, jilid XIII (Mesir: Mauqif Wizârat al-Auqâf, t.t.), h. 455.

pingkan peran akal manusia dalam memahami pesan-pesan wahyu.[4]

Aksi-aksi Khawârij ini telah menjadi preseden buruk bagi generasi Muslim berikutnya. Dengan aksi-aksi kejam dan destruktifnya mereka tidak hanya mengacaukan stabilitas politik, tetapi juga mendistorsi logika berfikir umat Islam dan ini terus diwariskan dari generasi ke generasi. Dewasa ini, para ulama lazim menyebut siapa pun yang mewarisi kebiasaan buruk Khawârij ini sebagai neo-Khawârij.

Beberapa tabi'at buruk Khawârij, antara lain: memahami al-Qur'an dan hadits hanya secara harfiah dan tertutup; gemar mengkafirkan siapa pun yang mempunyai sikap dan/atau pemahaman yang berbeda dari mereka; dan tidak segan-segan membunuh siapa pun yang dikafirkan. Beberapa tabi'at buruk ini juga menjadi bagian dari tabi'at Wahabi yang muncul di jazirah Arab pada abad ke-18. Memang, Wahabi tidak bisa dikatakan sebagai penerus Khawârij. Bahkan, ia dianggap sebagai fenomena yang sama sekali baru dan tidak mempunyai pendahulu sebelumnya dalam sejarah Islam.[5] Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa dalam sejarah pemikiran Islam, Wahabi tidak menempati posisi penting apa pun, bahkan secara intelektual marjinal (Wahabi menjadi signifikan bukan karena pemikirannya, tapi karena kekuasaan politik Ibn Saud dan penerusnya). Di samping itu, para peneliti dan sejarawan Islam memandang Wahabi sebagai fenomena khas yang terpisah dari aliran-aliran pemikiran maupun gerakan Islam lainnya. Bahkan, para

---

4. Kelompok *Khawârij* dan para pengikutnya sepanjang sejarah telah —secara keliru— meyakini bahwa pemahaman mereka atas ajaran agama, interpretasi mereka atas teks-teks suci, juga mempunya kebenaran mutlak sebagaimana ajaran agama dan teks-teks suci adanya. Ini adalah penyakit epistemologis yang telah membuat perbedaan pendapat tidak produktif. Padahal, dalam sebuah riwayat yang sangat masyhur Nabi saw. menuturkan, "Perbedaan pendapat di antara umatku adalah rahmat" (*ikhtilâfu ummatî rahmah*).

5. Hamid Algar, *Wahhabism: A Critical Essay* (New York: Islamic Publication International, 2002), h. 10.

tokoh Sunni paling awal menilai Wahabi tidak termasuk golongan *Ahlussunnah wal-jamâ'ah*.[6]

Wahabi adalah sebuah sekte keras dan kaku pengikut Muhammad ibn 'Abdul Wahab. Ayahnya, 'Abdul Wahab adalah hakim (*qâdlî*) 'Uyaynah pengikut madzhab Ahmad ibn Hanbal. Ibn 'Abdul Wahab lahir pada tahun 1703/1115 di 'Uyaynah, termasuk daerah Najd, belahan timur Kerajaan Saudi Arabia sekarang. Dibandingkan dengan Yaman dan Syria, Nabi pernah mengungkapkan bahwa tidak akan muncul apa pun dari Najd selain goncangan fitnah dan setan (*al-zalâzil wal-fitan wa qarn al-syaitân*). Mungkin saja pernyataan Nabi ini tidak terkait dengan Wahabi, tapi jelas bahwa daerah ini merupakan salah satu daerah yang paling akhir menerima Islam dan kampung Musailamah al-Kadzdzab.

'Utsman ibn 'Abdullah ibn Bisyr, sejarawan standar Saudi, memuji Ibn 'Abdul Wahab sebagai orang yang mendapat berkah Tuhan sehingga mampu memahami masalah-masalah yang bertentangan dan menunjukkan jalan lurus kepada siapa pun. Namun ayah dan kakak kandung Ibn 'Abdul Wahab sendiri telah sejak awal mencium gelagat tak beres dalam pemikiran pendiri Wahabi ini. Konon, 'Abdul Wahab diberhentikan dari posisi sebagai hakim dan diperintahkan meninggalkan 'Uyaynah pada tahun 1726/1139 karena ulah anaknya yang ganjil dan berbahaya ini. 'Utsman menghindari menceritakan detail perselisihan anak dengan ayah dan kakak kandungnya secara diplomatis dengan mengungkapkan sebagai "percakapan di antara keduanya" (*waqa'a bainahu wa baina abîhi kalâm*),[7] belakangan Sulaiman ibn 'Abdul Wahab, kakak kandung pendiri Wahabi ini, mengkritik dan menulis penolakan panjang lebar tentang pemikiran adik kandungnya ini (*al-Shawâ'iq al-Ilâhiyyah fî al-radd 'alâ al-Wahhâbiyyah*).[8]

---

6. Hamid Algar, *ibid.*, h. 2-3.

7. 'Utsman ibn 'Abdullah ibn Bisyr, *Unwân al-Majd fî Târîkh al-Najd* (t.t., t.t.), h. 8.

8. Edisi terbaru buku *al-Shawâ'iq al-Ilâhiyyah fî al-radd 'alâ al-Wahhâbiyyah* (Per-

Pemahaman ekstrem, kaku, dan keras Ibn ‘Abdul Wahab, yang terus dipelihara dan diperjuangkan para pengikutnya (*Wahabi*) hingga saat ini, adalah hasil dari pembacaan harfiah atas sumber-sumber ajaran Islam. Ini pula yang telah menyebabkan dia menolak rasionalisme, tradisi, dan beragam khazanah intelektual Islam yang sangat kaya. Dalam hal polemik, Kristen, Syî‘ah, tasawuf, dan Mu‘tazilah merupakan target utamanya. Namun bukan berarti bahwa selain kelompok tersebut aman dari kecaman yang didasarkan pada pembacaan harfiah atas teks-teks suci (baca: al-Qur’ân dan Sunnah).

Literalisme Wahabi telah membuat teks-teks suci menjadi *corpus* tertutup terhadap cara pembacaan selain pembacaan secara harfiah *á la* Ibn ‘Abdul Wahab. Pemahaman ini telah memutus teks-teks suci dari konteks masa risalah maupun konteks masa pembacaan. Teks-teks suci, dan akhirnya Islam sendiri, tidak lagi komunikatif dengan konteks para penganutnya. Islam yang semula sangat apresiatif dan penuh perasaan dalam merespon permasalah umat, di tangan Ibn ‘Abdul Wahab berubah menjadi tidak peduli, keras dan tak berperasaan.

Dari perspektif Ibn ‘Abdul Wahab, tujuan utama literalisme ini mungkin untuk menghindari kompleksitas pemahaman dan praktik hukum, telogi dan tasawuf umat Islam yang telah tumbuh sejak berakhirnya masa risalah. Namun membayangkan bahwa setiap individu atau masyarakat akan mengamalkan Islam sebagaimana makna harfiah kitab suci dan hadits, tanpa pengaruh tradisi maupun budaya setempat, tentu sangat tidak realistis dan merupakan mimpi belaka. Literalisme tertutup, dalam kebanyakan ka-

---

ingatan Keras Ilahi dalam Menolak Paham Wahabi) ini dicetak menjadi satu buku dengan karya Sayyid Ahmad ibn Zaini Dahlan, Mufti Makkah ketika itu, yang berjudul *Al-Durar al-Sunniyyah fî al-Radd ‘alâ al-Wahhâbiyyah* (Permata Sunni dalam Menolak Paham Wahhabi), baca dalam: ‘Abdullah al-Qashîmî, *Al-Tsaurah al-Wahhâbiyyah* (Pemberontakan Wahabi), Köln, Germany: Al-Makel Verlag, 2006.

susnya, lebih disebabkan ketakmampuan memahami kompleksitas realitas sosial dalam kaitannya dengan kompleksitas pesan-pesan luhur ajaran agama. Akibatnya, semua direduksi sesuai dengan daya tampung atau daya paham si pembaca. Dengan kata lain, keluhuran dan keluasan pesan agama kandas di keterbatasan daya pikir pembaca yang kaku.

Literalisme Ibn 'Abdul Wahab yang tertutup tidak bisa dibandingkan dengan literalisme Ibn 'Arabi —misalnya— yang terbuka. Literalisme tertutup membatasi makna sebuah teks atau teks-teks dari makna-makna lain yang sama-sama berkemungkinan benar, dan ini merupakan reduksi dan distorsi terhadap pesan teks itu sendiri. Sedangkan literalisme terbuka merupakan pencarian makna teks atau teks-teks secara luas dan terbuka dengan tetap berusaha berpegang kuat pada makna harfiah teks yang bersangkutan namun tanpa terikat secara kaku.[9]

Literalisme tertutup *á la* Wahabi sebenarnya mengidap penyimpangan epistemologis yang akut. Ia tidak akan pernah mampu melihat, apalagi memahami, kebenaran lain yang berbeda dari kebenaran harfiah yang dicapainya. Bahkan tidak akan pernah mampu memahami kompleksitas teks-teks suci, apalagi dalam kaitannya dengan kompleksitas realitas sosial. Sebagai penyakit epistemologis, ketertutupan semacam ini lazim melahirkan klaim-klaim kebenar-

9. Sebagai ilustrasi, *kâfir* menurut Ibn 'Abdul Wahab sangat jauh berbeda dari *kâfir* menurut Ibn 'Arabi. Bagi yang pertama, *kâfir* adalah lawan dari muknim, dan kemudian halal darahnya untuk ditumpahkan. Sedangkan bagi yang kedua, *kâfir* adalah suatu kondisi tertutup atau menolak kebenaran sejati, atau bahkan sumber kebenaran sejati. Bisa jadi, penolakan ini disebabkan sifat *takabbur* atau terbatasnya pengetahuan. Karena itu, mereka tidak boleh dimusuhi, apalagi diputuskan halal darahnya. Masih menurut yang kedua, *kâfir* juga bermakna tertutup dari apa pun selain Allah swt., maka *kâfir* dalam makna ini merupakan salah satu tingkat tertinggi wali Allah swt. Konon, dalam tradisi tasawuf dikenal *joke* bahwa siapa pun yang sudah dikafirkan oleh 41 orang, dan dia tetap bersabar, tidak melakukan perlawanan, apalagi mengkafirkan, maka dia sebenarnya adalah wali Allah swt.

an sepihak (*one-sided truth claims*), serta menolak dan menyalahkan apa pun/siapa pun yang berbeda.

Sebenarnya, klaim kebenaran sepihak yang kemudian mengandalkan klaim-klaim teologis dengan mengkafirkan pihak lain, merupakan sikap beragama yang tidak dewasa dan menunjukkan tidak adanya sifat rendah hati (*islâm*). Keyakinan yang dewasa dan rendah hati tidak akan pernah terganggu oleh keyakinan lain yang berbeda, bahkan akan berbagi secara terbuka untuk mencapai kebenaran hakiki. Dan al-Qur'ân sendiri menegaskan bahwa perbedaan adalah cobaan, dan tidak perlu diseragamkan. Penolakan terhadap perbedaan ini merupakan dampak langsung dari penyakit penyimpangan epistemologis literalisme tertutup manapun.

Setiap konklusi yang dihasilkan dari metode yang tidak sehat, pasti akan menyebabkan aksi-aksi yang tidak sehat pula. Distorsi dan reduksi terhadap pesan-pesan luhur Islam, dalam kasus Wahabi, kemudian menyebabkan aksi-aksi destruktif terhadap tradisi spiritual dan intelektual Islam sendiri, dan kemudian menyebabkan distorsi dan kekejaman sosial dan budaya terhadap masyarakat Islam dan masyarakat global secara keseluruhan, bahkan kekerasan terhadap ajaran Islam sendiri.

Dalam perkembangannya, setelah tak sabar dengan proses dialog dalam melakukan perubahan, Ibn 'Abdul Wahab akhirnya menyimpulkan bahwa kata-kata saja tidak cukup (*lâ yughnî al-qaul*).[10] Dia berusaha melakukan perubahan melalui perbuatan.[11]

---

10. 'Utsman ibn 'Abdullah ibn Bisyr, *Unwân al-Majd fî Târîkh al-Najd* (t.t., t.t.), h. 7.

11. Dalam hal ini Wahabi mendasarkan aksi-aksinya pada hadits tentang *amr ma'rûf*, yakni: *Man ra'â minkum munkaran, fal-yughayyir biyadih, fa-inlam yasthathi' fa-bilisânih, fa-inlam yasthathi' fa-biqalbih, wa dzâlik min adl'âf al-îmân* (Siapa pun di antara kalian yang melihat *kemungkaran*, hendaknya dia mengatasinya dengan 'tangannya,' jika tidak mampu maka dengan 'lisannya,' jika tidak mampu maka [menyesali saja dalam] 'hatinya.' Itu termasuk paling lemahnya iman). Wahabi memahami bahwa siapa pun yang melihat *kemungkaran* harus bertindak secara fisik, jika tidak mampu cukup dengan ucapan, dan jika tidak mampu cukup

Ketika ayahnya wafat pada tahun 1740/1153, Ibn 'Abdul Wahab kembali ke 'Uyaynah dan mendapat dukungan dari 'Utsman ibn Mu'ammar, penguasa setempat. Hal ini telah memberinya keleluasaan dan kekuatan untuk tidak hanya menggunakan kata-kata terhadap siapa pun yang dipandangnya menyimpang dari ajaran Islam (harus ditekankan bahwa, sebenarnya menyimpang dari pemahaman Ibn 'Abdul Wahab atas ajaran Islam). Ibn Mu'ammar menyediakan sekitar 600 orang pasukan untuk mengawal Ibn 'Abdul Wahab dan para pengikutnya dalam melakukan aksi-aksinya. Ibn 'Abdul Wahab memperkuat dukungan ini dengan menikahi al-Jauhara, bibi penguasa 'Uyaynah tersebut.

Aksi kekerasan pertama Wahabi ketika itu adalah menghancurkan makam Zaid ibn al-Khaththab, sahabat Nabi dan saudara kandung 'Umar ibn al-Khaththab. Sebelum itu, aksi-aksi pemurtadan dan pengkafiran pun dilancarkan, sebagai pembuka aksi-aksi kekerasan yang akan dilakukan. Namun patronase ini tidak berlangsung lama karena kepala suku daerah tersebut mencium bahaya laten dalam gerakan Wahabi. Atas desakan inilah, Ibn 'Abdul Wahab meninggalkan 'Uyaynah, pindah ke Dir'iyah dan menemukan sekutu baru, Muhammad ibn Sa'ud, yang terbukti menjadi sekutu permanen. Aliansi baru ini kelak melahirkan Kerajaan Saudi-Wahabi modern.

Muhammad ibn Sa'ud adalah politikus cerdas. Ia tidak menyia-nyiakan kesempatan sangat berharga untuk memberi dukungan kepada Ibn 'Abdul Wahab demi meraih kepentingan politiknya.

---

menyesali dalam hati. Para ulama Aswaja lazim memahami hadits ini bahwa aksi secara fisik adalah otoritas pemerintah/penguasa, bukan otoritas individual. Sedangkan yang kedua, dengan lisan (dan para ulama meyakini juga dengan tulisan), adalah wilayah yang bisa diperankan oleh individu-idividu yang alim/berpengetahuan, mengerti masalah agama secara mendalam. Tidak mampu memberi peringatan secara lisan maupun tulisan, hanya menyesali dalam hati, menunjukkan lemahnya iman. Karena orang yang demikian, salah satunya bodoh karena tidak belajar untuk meningkatkan pengetahuannya, atau malas dan tidak mau tahu dengan permasalahan masyarakatnya.

Dia minta jaminan Ibn 'Abdul Wahab untuk tidak mengganggu kebiasaannya mengumpulkan upeti tahunan dari penduduk Dir'iyah. Ibn 'Abdul Wahab meyakinkannya bahwa *jihâd* ke depan akan memberinya keuntungan yang lebih besar daripada upeti yang dia impikan. Maka, panggung pemurtadan, pengkafiran, dan aksi-aksi kekerasan yang akan dilakukan ke seluruh jazirah Arab pun dibangun di atas aliansi permanen ini.

Pada tahun 1746/1159, Wahabi-Sa'ud secara resmi memproklamasikan *jihâd* terhadap siapa pun yang mempunyai pemahaman *tauhîd* berbeda dari mereka. Kampanye ini diawali dengan tuduhan *syirk* (*polytheist*), murtad, dan kafir. Setiap Muslim yang tidak mempunyai pemahaman dan praktik ajaran Islam yang persis seperti Wahabi dianggap murtad, karenanya perang dibolehkan, atau bahkan diwajibkan, terhadap mereka. Razia, penggerebekan dan perampokan terhadap mereka pun dilakukan. Dengan demikian, predikat Muslim —menurut Wahabi— hanya merujuk secara eksklusif kepada para pengikut Wahabi, seperti digunakan dalam buku *'Unwân al-Majd fî Târîkh al-Najd*, salah satu buku sejarah resmi Wahabi.

Sekitar lima belas tahun setelah proklamasi jihad ini, Wahabi sudah menguasai sebagian besar jazirah Arab, termasuk Najd, Arabia tengah, 'Asir, dan Yaman. Muhammad ibn Sa'ud yang meninggal pada tahun 1766/1180 digantikan oleh 'Abdul 'Aziz, yang pada 1773/1187 merebut Riyadh, dan sekitar tujuh belas tahun kemudian mulai berusaha merebut Hijaz. Muhammad ibn 'Abdul Wahab wafat tahun 1791/1206, sesaat setelah perang melawan para penguasa Hijaz dimulai. Kurang dari satu dekade, ajaran Wahabi sudah dipaksakan dengan senjata kepada penduduk *Haramain* (Makkah dan Madinah), walaupun hanya sesaat, pemaksaan ini mempunyai pengaruh yang luar biasa tidak hanya di Hijaz, tetapi juga di dunia Islam lainnya, termasuk Nusantara.

Tahun 1802/1217 Wahabi menyerang Karbala, membunuh mayoritas penduduknya yang mereka temui baik di pasar maupun

di rumah, termasuk wanita dan anak-anak. Wahabi juga menghancurkan kubah makam Husein serta menjarah berlian, permata, dan kekayaan apa pun yang mereka temukan di makam tersebut. Pada 1803/1217 Wahabi kembali menyerang Hijaz, dan Ta'if adalah kota pertama yang mereka serbu. Pada 1805/1220 mereka merebut Madinah dan 1806/1220 merebut Makkah untuk kedua kalinya. Seperti biasa, Wahabi memaksa para ulama menyatakan sumpah setia dengan todongan senjata.

Pendudukan Haramain ini berlangsung sekitar enam setengah tahun. Periode kekejaman ini ditandai dengan pembantaian dan pemaksaan ajaran Wahabi kepada penduduk *Haramain*, penghancuran bangunan-bangunan bersejarah dan pekuburan, pembakaran buku-buku selain al-Qur'an dan hadits, larangan merayakan Maulid Nabi, pembacaan puisi *Barzanji*, pembacaan beberapa hadits *mau'izhah hasanah* sebelum khotbah Jum'at, larangan memiliki rokok dan mengisapnya, bahkan sempat mengharamkan kopi.

Semua kekejaman Wahabi ini berakhir ketika Muhammad 'Ali Pasha, Gubernur Mesir, atas perintah Sultan 'Utsmani berhasil membebaskan Haramain. Pada tahun 1811/1226 Muhammad 'Ali Pasha mendarat di pelabuhan Yanbu', pesisir Laut Merah, dan pada akhiri tahun berikutnya dia berhasil membebaskan Madinah dan membebaskan Makkah tiga bulan kemudian. Wahabi mundur ke Najd dan menyatukan semua kekuatannya di sana, namun Muhammad 'Ali Pasha terus mengejar mereka dan berhasil merebut Dir'iyah, ibu kota Wahabi ketika itu, pada tahun 1819/1234. Sayangnya, kemenangan Sultan 'Utsmani ini hanya membuat Wahabi terkubur untuk beberapa tahun. Pada tahun 1832/1248, Wahabi bangkit lagi dari kuburnya dan memulai ekspedisi militer terhadap 'Uman dan memaksa Sultan Muscat membayar upeti kepada Riyadh. Wahabi sadar bahwa Makkah dan Madinah bukan hanya pusat gravitasi religius, tetapi juga sumber keuntungan ekonomi yang tidak akan pernah berakhir. Karena itu, setelah berhasil menguasai daerah sekitarnya, Wahabi terus berusaha merebut ke-

dua kota suci tersebut, dan baru pada tahun 1925 berhasil kembali merebut Makkah dan Madinah, dan kali ini didukung "perjanjian pertemanan dan kerjasama" yang ditandatangani penguasa Wahabi-Saudi ketika itu dengan pihak Inggris.

Sejarah Wahabi tidak pernah lepas dari aksi-aksi kekerasan, baik doktrinal, kultural, maupun sosial. Dalam penaklukan jazirah Arab 1920-an ini, lebih dari 400 ribu umat Islam dibunuh, dieksekusi secara publik atau diamputasi, termasuk wanita dan anak-anak.[12] Selain itu, kekayaan dan para wanita di daerah yang ditaklukan sering dibawa sebagai rampasan perang. Setelah itu, seperti biasa, Wahabi memaksakan ajarannya kepada semua Muslim yang berada di daerah taklukannya. Wahabi kemudian menjadi 'agama' baru.

Ringkasnya, sikap dan kesukaan utama Wahabi sejak awal gerakannya, selain membunuh serta merampas kekayaan dan wanita, juga termasuk menghancurkan kuburan dan peninggalan-peninggalan bersejarah; mengharamkan *tawassul*, *isti'âna* dan *istighâtsah*, *syafâ'at*, *tabarruk*, dan ziyarah kubur; membakar buku-buku yang tidak sejalan dengan paham mereka; memvonis musyrik, murtad, dan kafir siapa pun yang melakukan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan ajaran Wahabi, walaupun sebenarnya tidak haram. Memang, sebelum mempunyai kekuatan fisik atau militer, Wahabi lazim melakukan kekerasan doktrinal, intelektual dan psikologis dengan menyerang siapa pun sebagai musyrik, murtad, dan kafir. Namun, setelah mereka mempunyai kekuatan fisik atau militer, tuduhan tersebut dilanjutkan dengan serangan-serangan fisik seperti pemukulan, amputasi, dan pembunuhan. Wahabi menyebut semua ini sebagai dakwah, *amr ma'rûf nahy munkar* dan jihad, terminologi yang sebenarnya tidak mempunyai konotasi kekerasan dalam bentuk apa pun.[13] Fenomena serupa belakangan banyak

12. Hamid Algar, *ibid.*, h. 42.

13. Secara harfiah *jihad* bermakna kesunguhan, keseriusan dalam menunaikan suatu kewajiban atau kegiatan. Secara *generik* kata ini bersifat netral dan baru

bermunculan di Indonesia, dan sulit menolak adanya relasi antara fenomena tersebut dengan paham Wahabi yang kini menjadi ideologi resmi Kerajaan Arab Saudi dan disebarkan ke Nusantara oleh para agen mereka dengan dukungan dana yang luar biasa dan cara yang sistematis.

Penolakan terhadap Wahabi

Sebelum serangan ke World Trade Center (WTC), pemerintah Saudi memang membiayai al-Qaedah, kelompok yang menggunakan kekerasan bersenjata dalam berbagai aksi-aksi agitatif dan destruktifnya. Namun setelah serangan 11 September 2001, terutama setelah al-Qaedah menyerang Kerajaan Arab Saudi, pemerintah Saudi sepertinya berhenti membiayai gerakan teror tersebut.

---

mempunyai makna konotatif ketika disandingkan dengan aktivitas tertentu. Belajar dengan sungguh-sungguh dipandang sebagai *jihad* karena kesungguhan dan keseriusan di dalamnya, bukan karena belajarnya. Ketika diucapkan dalam konteks 'perang' pun, *jihad* sebenarnya merujuk pada kesungguhan dan keseriusan di dalamnya, bukan kepada perangnya. Dalam konteks ini, sabda Nabi Muhammad saw., "*Raja'nâ min jihâd al-ashghar ilâ jihâd al-akbar*" ("Kita baru saja pulang dari kesungguhan (*jihad*) dalam bidang yang kecil menuju kesungguhan (*jihad*) dalam bidang yang besar") seharusnya tidak dipahami sebagai pulang dari 'perang kecil' menuju 'perang besar,' melainkan dari 'perjuangan kecil' menuju 'perjuangan besar.' Perjuangan fisik seperti perang, menuntut kesungguhan dan keseriusan yang tidak seberapa dibandingkan perjuangan non-fisik seperti pengendalian diri. Memperjuangkan hak-hak asasi manusia, penegakan hukum dan jaminan keadilan, juga merupakan jihad ketika semua itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Dalam Islam, seperti dalam sabda Nabi Muhammad saw., usaha mengendalikan diri dipandang sebagai jihad besar karena ia menuntut keseriusan dan kesungguhan yang luar biasa. Dalam konteks inilah, seharusnya, *amr ma'rûf nahy munkar* dilaksanakan; yakni, hanya mereka yang telah bersungguh-sungguh mengendalikan dirinya, yang perbuatan dan ucapannya telah bisa menjadi teladan bagi orang lain, yang berhak melaksanakan *amr ma'rûf nahy munkar*. *Jihâd* dan *amr ma'rûf nahy munkar* memiliki citra kotor dan buruk karena telah dijadikan jargon yang sarat dengan alasan politik dan dilakukan oleh mereka yang sebenarnya masih harus berjuang mengendalikan dirinya dan belum mampu menjadi teladan bagi yang lain.

Tetapi, pemerintah Saudi terus membiayai penyebaran ideologi Wahabi ke seluruh dunia (wahabisasai global). Kekerasan terorisme dengan peledakan bom dan semacamnya memang sangat berbahaya, namun ideologi dengan kekerasan teologis, psikologis, kultural, dan intelektual —dengan tujuan untuk menghancurkan budaya (*cultural genocide*) dan mengendalikan negara lain— jauh lebih berbahaya dari bom.

Berbagai bentuk aksi kekerasan yang dilakukan Wahabi membuat kebanyakan ulama dan umat Islam sadar bahwa apa yang mereka perjuangkan bukanlah Islam. Dugaan paling baik, ini pun dari titik pandang Ibn ʻAbdul Wahab, yang diperjuangkan adalah pemahaman tertentu atas Islam yang sangat keras dan ekstrem. Pemahaman harfiah tertutup yang berusaha memahami Kebenaran namun —karena tertutup— kemudian merasa sebagai "Kebenaran" itu sendiri.

Pandangan atas gerakan Wahabi ini akan jauh berbeda jika dilihat dari titik pandang Ibn Saʻud. Pandangan keagamaan Ibn ʻAbdul Wahab yang keras dan kejam —bagi Ibn Saʻud— jelas merupakan senjata politik potensial yang sangat ampuh dan strategis (baca: mematikan). Bagi siapa pun yang tidak terbiasa memperlakukan teks-teks maupun ajaran agama secara rasional, dewasa, dan penuh perasaan, klaim-klaim dan tuduhan-tuduhan teologis akan sulit ditolak. Ketakberdayaan di hadapan klaim dan tuduhan teologis inilah yang menjanjikan kekuasaan politik dan kekayaan bagi Ibn Saʻud. Hal ini terlihat dari kesepakatan antara pendiri Wahabi dan pendiri Kerajaan Saudi ini, bahwa Ibn ʻAbdul Wahab dan keturunan laki-lakinya akan mengendalikan otoritas keagamaan, sedangkan Ibn Saʻud dan keturunan laki-lakinya akan memegang kekuasaan politik, dan masing-masing akan menikahi keturunan wanita yang lain agar aliansi ini bisa terus dilestarikan.

Kesepakatan ini mengantarkan pada perkawinan politik dan agama, walaupun sebenarnya —mungkin tanpa disadari— agama menjadi tumbal di dalamnya, dan para penganut agama —yang pa-

hamnya berbeda— menjadi korban berikutnya. Kelak terbukti bahwa, walaupun tidak sampai menyebabkan perceraian, perkawinan ini sangat duniawi. Hal ini terlihat dalam pemberontakan pengikut fanatik Wahabi di Haram pada tahun 1979 yang telah merusak banyak bagian Masjidil Haram—muncul sebagai protes terhadap kebiasaan buruk keluarga kerajaan yang menyimpang dari ajaran Wahabi namun tetap mendapat dukungan ulama Wahabi sekalipun prilaku mereka tidak benar.

Secara umum, Wahabi sebenarnya bertentangan dengan semangat Islam sendiri. Tabi'atnya yang keras, suka memvonis musyrik, kafir, dan murtad terhadap sesama Muslim, serta aksi-aksi destruktif yang gemar mereka lakukan adalah bukti yang sulit ditolak. Perbuatan mereka seutuhnya bertentangan dengan pandangan para ulama *Aswaja* seperti ditegaskan dalam kaedah *fiqh* bahwa, menolak kerusakan, kekacauan, kekejaman dan semacamnya (*mafsâdah*) harus lebih didahulukan daripada mewujudkan kesejahteraan (*dar' al-mafâsid muqaddam 'alâ jalb al-mashlâlih*). Dalam hal ini, Wahabi justru gemar melakukan *mafsâdah* demi —menurut mereka— mewujudkan *mashlâhah* (versi Wahabi).

Andai pun aksi-aksi mereka bisa diterima, ini pun sangat bertentangan dengan kerangka dasar kaedah *fiqh* yang lazim jadi pedoman para ulama Aswaja bahwa, jika menghadapi bahaya-bahaya yang luar biasa, maka mengatasinya adalah dengan menanggung bahaya paling kecil (*yudfa'u asyaddu al-dlarûrain bi tahammuli akhaffihimâ*). Wahabi malah menyelesaikan masalah dengan masalah, dan melahirkan banyak masalah baru.

Sedangkan kegemaran mereka mengkafirkan sesama Muslim jelas merupakan pembangkangan terhadap peringatan Kanjeng Nabi Muhammad saw. bahwa, "Siapa pun yang menuduh saudaranya yang Muslim sebagai kafir, dia sendiri adalah kafir." Pada kenyataannya, tuduhan musyrik, kafir, dan murtad adalah berdasarkan paham Wahabi. Di sini terlihat dengan jelas bahwa Wahabi telah menjelma menjadi 'agama' di dalam agama.

Fakta-fakta kekejaman Wahabi ini membuat umat Islam yang berpaham *Ahlussunnah wal-jamâ'ah*, yang berpegang teguh pada ajaran untuk bersikap toleran dan moderat serta mendahulukan kebersamaan dan kedamaian dengan siapa pun, menolak paham Wahabi. Karena itu pula Sultan 'Utsmani merasa wajib menghentikan gerakan Wahabi dan berusaha menguburnya.

Keputusan Sultan 'Utsmani ini, selain dilandasi alasan politik, juga pertimbangan agama. Ketika Muhammad 'Ali Pasya berhasil menangkap para tokoh Wahabi, mereka diajak berdialog untuk mencari dan membuktikan kebenaran di antara mereka. Ajakan ini tidak berhasil karena tokoh-tokoh Wahabi berkepala batu dan tidak bisa menerima pandangan-pandangan yang berbeda dari paham mereka, apalagi yang bertentangan. Hal ini menunjukkan bahwa, bagi orang-orang Wahabi, paham mereka sudah merupakan kebenaran, dan ini tak bisa lain kecuali menganggap pahamnya sebagai 'agama' itu sendiri. Dan persis karena alasan itulah para penganut ajaran Wahabi menganggap Muslim non-Wahabi sebagai kafir.

Pada masa formatifnya, Wahabi selalu ditentang secara terbuka oleh umat Islam di daerah Hijaz dan sekitarnya. Hal ini terjadi karena ajaran Wahabi dengan jelas bertentangan dengan ajaran Islam sebagaimana diamalkan oleh umat Islam di daerah-daerah tersebut. Ekstremitas dan teror yang mereka lakukan, belum lagi pemaknaan harfiah secara tertutup atas teks-teks suci Islam, telah membuat umat Islam sadar akan bahaya-bahaya laten yang dikandung Wahabi. Perselisihan antara Ibn 'Abdul Wahab dan ayahnya, penolakan oleh Sulaiman kakak kandung Ibn 'Abdul Wahab, serta penentangan oleh Sayyid Ahmad ibn Zaini Dahlan, Mufti Makkah pada masanya, adalah bukti kongkret penolakan terhadap Wahabi.

Namun setelah Wahabi menguasai Makkah dan Madinah dan berhasil membangun kerajaan Saudi Arabia seperti dikenal sekarang, umat Islam daerah-daerah yang dikuasai Wahabi tidak

berani lagi menolak Wahabi secara terbuka. Bagi umat Islam di daerah-daerah dimaksud tidak ada pilihan lain kecuali menerima Wahabi, atau nyawa mereka akan melayang, karena Wahabi —seperti biasa— memaksa setiap Muslim menganut Wahabi. Penolakan secara terbuka hanya bisa terjadi di luar daerah kekuasaan Wahabi.

Contoh lain penolakan kontemporer secara terbuka dilakukan oleh Muslim Bosnia beberapa tahun yang lalu. Ingin memancing di air keruh, Wahabi hadir di tengah-tengah konflik bekas Yugoslavia tersebut dengan dalih ingin menyalurkan bantuan kemanusiaan dalam bentuk pembangunan sekolah-sekolah, masjid-masjid, dan pengadaan buku-buku keagamaan. Setelah memperhatikan arsitektur masjid yang khas Wahabi (bersih dari ornamen seni arsitektural masjid pada lazimnya), kurikulum sekolah dan buku-buku pelajaran yang jelas-jelas berisi ajaran Wahabi, Muslim Bosnia sadar bahwa semua bantuan tersebut hanyalah *camouflage* usaha Wahabisasi Balkan. Sebagian terbesar Muslim Bosnia menolak bantuan-bantuan tersebut karena tahu semua itu akan merusak tradisi dan budaya keberagamaan mereka yang selama berabad-abad dikenal beradab dan toleran.

Sebelumnya, penolakan dan kritik keras terhadap istana kerajaan Arab Saudi dilakukan oleh Ayatullah Khomeini pada tahun 1979. Kebiasaan buruk keluarga istana al-Saud, seperti judi, minum, main perempuan, dan sebagainya, menjadi alasan Khomeini mengritik penguasa kerajaan yang mengklaim sebagai Pelayan Dua Kota Suci (*Khâdim al-Haramain*) Islam. Ketika itu dia melontarkan gagasan penting, yakni pembebasan Makkah dan Madinah dari cengkeraman Wahabi dan menempatkannya di bawah pengelolaan dan pengawasan internasional. Sebagai pemimpin Iran, Khomeini mungkin punya agenda politik sendiri, tapi jelas gagasannya sangat penting dan berharga.

Pendudukan bersenjata atas Masjid al-Haram oleh Juhayman al-Utaybi dan para pengikutnya pada 1 Muharram 1400/20 Nopember 1979 serta kritik keras dan gagasan strategis Ayatullah

Khomeini telah membuat penguasa Wahabi-Saudi sadar bahwa borok-borok mereka terungkap secara telanjang ke dunia internasional. Hal ini sangat mengganggu dan menurunkan citra mereka sebagai *Khâdim al-Haramain*. Maka sejak 30 tahun yang lalu penguasa Wahabi-Saudi telah membelanjakan uang yang mungkin sudah lebih dari USD 90 milyar yang disalurkan melalui *Rabîthat al-'Alam al-Islâmî*, *International Islamic Relief Orgqanization* (*IIRO*), dan yayasan-yayasan lain ke seluruh dunia untuk membela diri dan memperbaiki citra mereka melalui wahabisasi global.[14] Di Indonesia, *Rabîthat al-'Alam al-Islâmî* dan *IIRO* menyalurkan dananya —di antaranya— melalui Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), LIPIA,[15] MMI, Kompak, dan lain-lain.[16]

Seorang sayyid dan ulama non-Wahabi yang sejak nenek moyangnya telah tinggal di Hijaz, menuturkan kepada peneliti studi ini bahwa, "Bagi dunia Islam, Makkah dan Madinah laksana jantung. Jika jantung sehat, ia akan mengalirkan kesehatannya ke seluruh tubuh. Jika jantung sakit, ia akan mengalirkan sakitnya ke seluruh tubuh. Karena itu jantung harus sehat dan bersih. Sudah sejak sangat awal sekali para ulama besar telah berkunjung ke Makkah dan Madinah dan kembali ke kampung halamannya membawa pengaruh yang diterimanya selama di tanah suci tersebut."[17]

Sebelum dikuasai Wahabi, kedua kota suci Makkah dan Madinah pernah menjadi pusat ibadah dan kegiatan belajar semua madzhab. Pada masa itu, madzhab-madzhab yang berbeda berdia-

---

14. Pemerintah Saudi sendiri mengkui bahwa hingga tahun 2003 sudah membelanjakan uang sebesar US$ 70 M (Baca dalam: "How Billions in Oil Money Spawned a Global Terror Network," dalam *US News & World Report*, 15 Desember 2003).
15. Noorhaidi Hasan, "Islamic Militancy, *Sharia*, and Democratic Consolidation in Post-Soeharto Indonesia," Working Paper No. 143, S. Rajaratnam School of International Studies (Singapore, 23 October 2007).
16. Zachary Abuza, "Jemaah Islamiyah Adopts the Hezbollah Model," dalam *Middle East Quarterly*, Winter 2009.
17. Interview peneliti pada tanggal 6 Juni 2007.

log secara terbuka dan dewasa, menikmati kebebasan untuk bersama-sama mencari kebenaran, bebas beribadah dan berkeyakinan sesuai dengan madzhab yang bersangkutan. Pada masa itu, para teolog (*mutakallim*), ahli hukum Islam (*fuqahâ*), para sufi (*mutashawwifîn*), dan para ahli berbagai disiplin ilmu lainnya bertemu di kota suci tersebut. Mereka berbagi pandangan, berdialog, berdebat, serta memperdalam pemahaman dan memperkuat pengamalan agamanya. Mereka tinggal dalam rentang waktu yang lama untuk kepentingan ibadah dan belajar di kedua kota suci tersebut. Di samping mereka yang tinggal lama di tanah suci, ada para jamaah haji yang lazim memanfaatkan kesempatan selama musim haji untuk belajar dari para ulama berbagai madzhab, dan membawa pulang hikmah yang mereka peroleh selama di tanah suci.

Tokoh-tokoh besar seperti Abu Hanifah, Anas ibn Mâlik, Muhammad ibn Idris al-Syâfi'î, Ahmad ibn Hanbal, Abu Yazid al-Bisthami, Junaid al-Baghdadi, Abu Manshur al-Hallaj, al-Ghazali, Ibn Rusyd, Ibn 'Arabi, bahkan KH. Ahmad Dahlan dan KH. Hasjim Asy'ari termasuk di antara mereka yang berkesempatan belajar, berdialog dan berbagi pengetahuan dengan yang lain di tanah suci.

KH. Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah) dan KH. Hasjim Asy'ari (pendiri Nahdlatul Ulama) yang sempat belajar di jantung dunia Islam tersebut membawa pengaruh yang luar biasa ke Indonesia, walaupun organisasi yang digagas keduanya sangat jelas berbeda, keduanya tetap toleran dan saling menghormati, mengakui perbedaan sebagai keragaman dan kekayaan tradisi intelektual. Hal ini kontras dengan gerakan Padri yang digagas oleh Haji Miskin, Haji Abdurrahman, dan Haji Muhammad Arif yang telah menunaikan ibadah haji ketika Wahabi menguasai kedua kota suci pada awal abad kesembilan belas. Virus Wahabi yang menjangkiti ketiga haji tersebut terbawa ke Sumatera Barat dan telah memicu perang saudara dan sesama Muslim yang sangat tragis dalam sejarah Islam Nusantara.

Wahabi sebenarnya tidak hanya ditolak oleh umat Islam saja.

Banyak non-Muslim di Barat yang menolak dan membenci Islam karena adanya aksi-aksi terorisme yang dilakukan atas nama Islam. Padahal, umat Islam non-Wahabi juga menolak dan mengutuk aksi-aksi terorisme tersebut. Andai Barat tahu bahwa pelaku terorisme tersebut adalah para penganut sekte Wahabi dan sekutu ideologisnya, tentu bukan Islam yang akan mereka benci. Sekali lagi, dalam kasus ini terlihat jelas Islam menjadi tumbal dalam usaha Wahabisasi global.

Terjadinya berbagai penolakan tidak membuat Wahabi kehilangan akal. Ditolak dalam Wahabisasi secara terbuka, mereka berusaha menyusup secara samar dan tersembunyi ke berbagai belahan dunia Islam, termasuk Indonesia yang merupakan negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia. Dalam kasus Indonesia, penyusupan yang mereka lakukan tidaklah sendirian, ada kelompok-kelompok lokal yang menjadi kaki tangan Wahabi, atau secara umum memang mempunyai orientasi dan tujuan sama, yakni formalisasi Islam, yang menjadi agen penyebaran paham Wahabi.

Gerakan Transnasional di Indonesia

Relasi antara Wahabi dan kelompok-kelompok garis keras lokal memang tidak bisa sepenuhnya ditunjukkan secara organisatoris-struktural, karena lazimnya mereka malu disebut kaki tangan Wahabi. Di samping ada kontak-kontak langsung dengan tokoh-tokoh garis keras transnasional, relasi mereka juga berdasarkan kesamaan orientasi, ideologi, dan tujuan gerakan. Berbagai kelompok garis keras ini bekerjasama dalam beragam aktivitas yang mereka lakukan. Lazimnya, kelompok-kelompok ini memiliki relasi dengan organisasi transnasional yang diyakini berbahaya dan mengancam Pancasila, NKRI, dan UUD 1945, di samping juga merupakan ancaman serius terhadap Islam Indonesia yang santun dan toleran.

Di antara gerakan-gerakan transnasional yang beroperasi di Indonesia adalah, 1) Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Hasan

al-Banna di Mesir hadir di Indonesia pada awalnya melalui lembaga-lembaga dakwah kampus yang kemudian menjadi Gerakan Tarbiyah. Kelompok ini kemudian melahirkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS);[18] 2) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan gagasan Pan-Islamismenya yang ingin menegakkan Khilafah Islamiyah di seluruh dunia, dan menempatkan Nusantara sebagai salah satu bagian di dalamnya; dan 3) Wahabi yang berusaha melakukan wahabisasi global. Di antara ketiga gerakan transnasional tersebut, Wahabi adalah yang paling kuat, terutama dalam hal pendanaan karena punya banyak sumur minyak yang melimpah. Namun demikian, ketiga gerakan transnasional ini bahu-membahu dalam mencapai tujuan mereka, yakni formalisasi Islam dalam bentuk negara dan aplikasi syari'ah sebagai hukum positif atau Khilafah Islamiyah.

Kehadiran Wahabi di Indonesia modern tidak bisa dilepaskan dari peran Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). Dengan dukungan dana besar dari Jama'ah Salafi (Wahabi), DDII mengirimkan mahasiswa untuk belajar ke Timur Tengah, sebagian dari mereka inilah yang kemudian menjadi agen-agen penyebaran ideologi Wahabi-Ikhwanul Muslimin di Indonesia. Belakangan, dengan dukungan penuh dana Wahabi-Saudi pula, DDII mendirikan LIPIA dan kebanyakan alumninya kemudian menjadi agen Gerakan Tarbiyah dan Jama'ah Salafi di Indonesia. Dibandingkan dengan HTI, Wahabi memang jauh lebih dekat dengan Ikhwanul Muslimin. Kedekatan ini berawal pada dekade 1950-an dan 1960-an ketika Gamal Abdel Nasser membubarkan Ikhwanul Muslimin yang ekstrem dan melarang semua kegiatannya di Mesir. Banyak dari tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin saat itu melarikan diri meninggalkan negaranya.

---

18. Untuk informasi memadai tentang Ikhwanul Muslimin dan PKS, baca buku Haedar Nashir, *Manifestasi Gerakan Tarbiyah: Bagaimana Sikap Muhammadiyah?* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, cet. Ke-5, 2007).

Ikhwanul Muslimin

Ikhwanul Muslimin didirikan oleh Hasan al-Banna di Mesir pada tahun 1928. Pada dekade ini Mesir dan Palestina dijajah Inggris, Maghreb dan Syria dijajah Prancis, sedangkan Libya dijajah Itali. Secara ideologis, penjajah Timur Tengah ini bisa dilihat dalam beberapa aliran. Inggris menganut liberalisme, sedangkan Itali yang sudah dikuasai Mussolini menganut fasisme. Fasisme (*Fascism*) berasal dari *facses* (Latin) atau *fascio* (Italia) yang adalah simbol otoritas Roma dan berarti batang-batang kecil yang diikat dalam satu-kesatuan dan karena itu sulit dihancurkan atau dipatahkan. Dengan kata lain, fasisme adalah simbol kekuatan melalui persatuan.

Tujuan Hasan al-Banna mendirikan Ikhwanul Muslimin, di antaranya, adalah untuk melawan penjajah, mengatasi kemunduran peradaban Islam, dan membawa umat Islam kembali kepada ajaran Islam yang murni. Sayangnya, al-Banna dan para pengikutnya tampak meyakini bahwa ideologi dan sistem gerakan fasisme Itali-Mussolini dan komunisme-Uni Soviet lebih berguna dalam mencapai tujuannya daripada liberalisme yang menjunjung tinggi kebebasan bagi setiap orang untuk mencari kebenaran dan mengamalkan ajaran agamanya. Di samping itu, al-Banna juga berkenalan dengan gagasan Wahabi, dan sejak awal sekali pola pikir totalitarianisme-sentralistik fasisme, komunisme dan Wahabisme sudah ada dalam DNA Ikhwanul Muslimin.

Secara faktual bisa dikatakan, Ikhwanul Muslimin adalah anak kandung ideologi Barat yang sekaligus memusuhi induknya. Dari fasisme-Mussolini Itali, Ikhwanul Muslimin mengadopsi sistem totalitarianisme dan negara sentralistik, namun menolak nasionalisme. Dari komunisme-Uni Soviet, mereka mengadopsi totalitarianisme, sistem penyusupan dan perekrutan anggota (*cell system*), strategi gerakan, dan internasionalisme, namun menolak ateisme. Berdasarkan fakta ini beberapa ahli menyebut Ikhwanul Muslimin dan garis keras lainnya sebagai Islamofasisme, yakni se-

buah gerakan politik yang bertujuan mewujudkan kekuasaan mutlak berdasarkan pemahaman mereka atas al-Qur'an.[19]

Dalam membangun gerakan, Ikhwanul Muslimin menggunakan jaringan tarekat yang saat itu sangat banyak dan subur di Mesir. Bahkan hingga bisa dikatakan bahwa Ikhwanul Muslimin sendiri pada masa transformatifnya adalah sebuah tarekat namun dengan tujuan politik, bukan spiritual sebagaimana layaknya tarekat tasawuf. Maka dalam waktu yang relatif cepat, Ikhwanul Muslimin berhasil merekrut ratusan ribu anggota. Memang, salah satu motif awal Ikhwanul Muslimin adalah untuk melawan penjajah Inggris di Mesir dan tidak keras terhadap Muslim yang lain. Namun, karena watak dasar gerakan ini bersifat politis yang dikemas dengan busana agama, gairah politik sudah melekat erat dalam DNA gerakan ini. Motif politik dan keinginan merebut kekuasaan dengan semangat fasisme-komunisme ini membuat Ikhwanul Muslimin sering terlibat konflik dengan penguasa.

Berakhirnya penjajahan Inggris ternyata tidak menjadi peluang emas bagi Ikhwanul Muslimin untuk mewujudkan cita-cita politiknya. Merasa punya andil dalam usaha mengakhiri penjajahan, namun kemudian tidak berhasil secara politik, membuat Ikhwanul Muslimin menjadi keras dan fanatik. Hal ini mempertajam konflik dengan pemerintah ketika itu —termasuk pembunuhan Perdana Menteri Mesir, Mahmoud an-Nukrashi Pasha pada Desember 1948— dan menyebabkan terbunuhnya pendiri Ikhwanul Muslimin, Hasan al-Banna oleh pemerintah Mesir.

Terbunuhnya Hasan al-Banna tidak membuat Ikhwanul Muslimin ikut mati, tapi semakin keras dan fanatik. Kegagalan politik Ikhwanul Muslimin ini bertemu dengan kekecewaan para opsir muda yang tidak sejalan dengan Raja Faruk ketika itu. Ikhwanul

---

19. Gerakan-gerakan revivalis Islam pada umumnya, termasuk Ikhwanul Muslimin di antaranya, menginginkan kembalinya "masa keemasan" Islam, yakni masa Nabi Muhammad saw. dan empat khalifah pertama, ketika kekuasaan berada di satu tangan penguasa tertinggi, khalifah.

Muslimin tidak menyia-nyiakan peluang politik ini dengan mendukung gerakan para opsir yang berniat melakukan pemberontakan.

Keberhasilan pemberontakan para opsir (*Free Officers Revolution*) kembali terbukti tidak menjadi peluang bagi Ikhwanul Muslimin untuk meraih kekuasaan politik di Mesir, karena ideologi Ikhwanul Muslimin maupun gerakan para opsir memang berseberangan sejak awal. Gamal Abdel Nasser, salah seorang opsir yang terlibat dalam pemberontakan pada tahun 1954 dan kemudian menjadi Presiden Mesir pada tahun 1956, tidak mau berbagi kekuasaan dengan Ikhwanul Muslimin dan bergerak dengan gagasannya sendiri, Pan-Arabisme berdasarkan sosialisme. Ikhwanul Muslimin kecewa dan merasa dikhianati.

Sayyid Qutb, yang menjadi ideolog dan salah seorang pemimpin Ikhwanul Muslimin setelah al-Banna dibunuh, merasa penguasa ketika itu telah berbuat kejam dan aniaya. Kekecewaan politik Ikhwanul Muslimin membuat Qutb dan pemimpin yang lain bersikap lebih aggresif terhadap lawan-lawan politiknya. Ditangkap dan disiksa di penjara, Qutb menyerang penguasa Mesir melalui tulisan-tulisannya, dan menuduh siapa pun yang tidak mengikuti ideologi kerasnya sebagai murtad, kafir, dan halal darahnya. Karya-karyanya sarat dengan gagasan-gagasan seperti takfir, fir‘aun, serta jahiliyah modern, yang dia gunakan untuk mengkategorikan siapa pun yang tidak sejalan dengan ideologinya. Di samping pengaruh gerakan Hizbut Tahrir yang dia peroleh dari pertemuannya dengan tokoh Hizbut Tahrir selama di penjara, semua ini jelas merupakan pengaruh Wahabisme. Di samping itu, gagasan-gagasan seperti *revolutionary-vanguard* dan *international movements* juga bermunculan dalam karya-karya Qutb, yang jelas merupakan pengaruh komunisme yang masih kuat pada masa itu.

Dalam tulisan-tulisan Qutb jelas terlihat bahwa para pengikut ideologinya harus memperjuangkan kekuasaan proletariat, supremasi ummah/syari‘ah, serta terwujudnya negara Islam dan

akhirnya khilafah yang sentralistik melalui *revolutionary-vanguard*, yaitu para pemimpin garis keras pengikut ideologi Qutb. Gagasan-gagasan Qutb ini mengilhami para pembacanya dari kalangan garis keras melakukan aksi-aksi kekerasan dan mengancam keselamatan jiwa para pejabat negara dan rakyat serta mengacaukan situasi politik tidak hanya di Mesir ketika itu, tetapi di seluruh dunia hingga dewasa ini. Secara ringkas bisa dikatakan, tulisan-tulisan Qutb mengilhami para pengikut ideologinya menggunakan kekerasan untuk meraih kekuasaan.

Perkawinan Wahabi-Ikhwanul Muslimin

Tulisan-tulisan Qutb yang bernada menghasut membuat dia dieksekusi pada tahun 1966. Memang sejak tahun 1954 banyak pemimpin Ikhwanul Muslimin selain Qutb dijebloskan ke penjara oleh Nasser. Langkah represif penguasa Mesir ini membuat banyak tokoh dan anggota Ikhwanul Muslimin merasa tidak aman lagi tinggal di Mesir, dan Arab Saudi menjadi alternatif menarik. Di antara mereka yang melarikan diri ke Arab Saudi adalah Said Ramadan yang termasuk salah seorang pendiri Rabithath al-'Alam al-Islami. Said Ramadan —menantu Hasan al-Banna— kemudian pindah ke Jenewa dan membawa Ikhwanul Muslimin ke Eropa dengan dukungan dana Wahabi untuk menguasai umat Islam Eropa agar menjadi pengikut ideologi Wahabi-Ikhwanul Muslimin. Tariq Ramadan putranya, cucu Hasan al-Banna melalui ibunya, sekarang adalah tokoh intelektual terkenal di Eropa.

Pada tahun 1960-an, Arab Saudi mengundang para tokoh Ikhwanul Muslimin —termasuk di antaranya adalah adik kandung Sayyid Qutb, yaitu Muhammad Qutb— untuk menyelamatkan diri ke Saudi. Muhammad Qutb kemudian menjadi dosen di King Abdulaziz University, Jedah, dan mengajar Osama bin Laden di antara murid lainnya.

Sikap Saudi ini merupakan refleksi ketakutan penguasa Wahabi atas gerakan Pan-Arabisme Gamal Abdel Nasser yang

berdasarkan sosialisme dan jelas merupakan ancaman terhadap dominasi ideologis Wahabi-Saudi. Dengan mengundang Ikhwanul Muslimin, Saudi ingin sekali kayuh melampaui dua hingga tiga pulau. Pertama, Ikhwanul Muslimin yang merupakan musuh Gamal Abdel Nasser bisa menjadi sekutu strategis melawan Pan-Arabisme—Sosialisme Nasser. Kedua, para anggota Ikhwanul Muslimin yang terpelajar bisa membantu Saudi membangun dan memperkuat sistem penyebaran Wahabi ke negara lain di Timur Tengah dan akhirnya ke seluruh dunia (Wahabisasi global).

Pada dekade 60-an ini, perkawinan Wahabi-Ikhwanul Muslimin terjadi dan melahirkan keturunan gerakan garis keras yang banyak di seluruh dunia hingga dewasa ini. Keduanya berbagi fanatisme ideologis, ambisi kekuasaan sentralistik, orientasi internasional, dan formalisasi agama. Wahabi sendiri mempunyai dana besar—terutama setelah harga minyak melangit pada tahun 1973— namun kurang atau tidak terdidik, sedangkan Ikhwanul Muslimin cukup terdidik namun tidak punya dana memadai. Kelak terlihat, perkawinan ini memang sangat strategis dan darinya lahir gerakan internasional dengan ideologi, sistem, dan dana yang kuat serta terus berkembang dan meluaskan diri ke seluruh dunia hingga dewasa ini.

Akhir 1970-an dan awal 1980-an merupakan suasana menegangkan bagi penguasa Saudi. Keberhasilan Revolusi Islam Iran pada tahun 1979, ditambah pemberontakan Juhayman al-Uteybi dan anak buahnya yang menduduki Masjidil Haram pada tahun yang sama, sudah cukup membuat penguasa Saudi sangat terancam. Pada dekade ini Presiden Mesir, Anwar Sadat terbunuh; dan Uni Soviet menguasai Afghanistan. Pada dekade 1980-an proyek Wahabisasi global dengan dukungan dana (Saudi) dan sistem (Ikhwanul Muslimin) bergerak jauh lebih cepat. Hal ini dilaksanakan melalui yayasan-yayasan Wahabi seperti Rabithath al-'Alam al-Islami, al-Haramain, International Islamic Relief Organization (IIRO), dan banyak lainnya. Kelak al-Haramain ini menjadi terkenal saat

PBB menyebutnya sebagai "terrorist-funding entity" yang membiayai aksi-aksi teror di banyak belahan dunia, termasuk Indonesia.

Perang Afghanistan melawan Uni Soviet memikat banyak anggota garis keras dari seluruh dunia, termasuk pendiri Laskat Jihad, Ja'far 'Umar Thalib, dan beberapa pelaku kampanye teror Jamaah Islamiyah, termasuk Hambali, Imam Samudra, dan Ali Ghufron. Bahkan, Jamaah Islamiyah —yang didirikan oleh mantan anggota Darul Islam, Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Baasyir— punya kaitan erat dengan al-Qaedah melalui Hambali, yang sebelum ditangkap termasuk pengurus inti al-Qaedah.

Secara struktural, para pengurus inti al-Qaedah beretnik Arab dan berasal dari Timur Tengah kecuali Hambali. Hambali adalah komandan militer Jamaah Islamiyah yang berjuang untuk melenyapkan NKRI dan menggantinya dengan khilafah internasional. Jamaah Islamiyah bertanggung jawab atas banyak peledakan bom di Indonesia seperti pemboman hotel Marriott, Bursa Efek Jakarta (BEJ), Bandara Soekarno-Hatta, Bom Bali, pemboman di berbagai gereja, dan usaha pembunuhan Duta Besar Filipina. Bahkan, bom di Masjid Istiqlal yang berskala kecil termasuk aksi JI sebagai usaha menumbuhkan sentimen keagamaan bahwa ada serangan terhadap Islam Indonesia.

Al-Qaedah adalah keturunan lain dari perkawinan Wahabi-Ikhwanul Muslimin, yang jelas terlihat dari kehadiran para Wahabi-Saudi yang dipimpin Osama bin Laden (murid Muhammad Qutb) dan Ayman al-Zawahiri bersama para pengikutnya. Al-Zawahiri yang sudah menjadi anggota Ikhwanul Muslimin sejak berusia 14 tahun sangat kuat dipengaruhi Sayyid Qutb, dan adalah pemimpin kedua al-Jihad —dikenal dengan nama *Egyptian Islamic Jihad*— yang bertanggung jawab atas terbunuhnya Presiden Mesir, Anwar Sadat pada tahun 1981.

Hizbut Tahrir

Mengaku kecewa dengan Ikhwanul Muslimin yang dituding

terlalu moderat dan terlalu akomodatif terhadap Barat, Taqiuddin al-Nabhani mendirikan Hizbut Tahrir pada tahun 1952 di Jerusalem Timur yang dikuasai Yordania. Menurut al-Nabhani, umat Islam —ketika itu— sudah dicemari pemikiran dan emosi kapitalisme, sosialisme, nasionalisme dan sektarianisme. Karena itu dia berambisi mendirikan Khilafah Islamiyah internasional yang akan diawali dari teritori Arab dan kemudian teritori Islam non-Arab. Setelah al-Nabhani wafat pada tahun 1977, Hizbut Tahrir dipimpin oleh Abu Yusuf Abdul Qadim Zallum yang wafat pada tahun 2003 dan kemudian digantikan oleh Ata Ibn Khaleel Abu Rashta. Radikalisme dan sikap agresif Hizbut Tahrir terus meningkat sejak pendiriannya hingga dewasa ini, karena itu Hizbut Tahrir dilarang di kebanyakan negara Islam di seluruh dunia, dan pusat gerakan internasionalnya sekarang berada di Inggris.[20]

Hizbut Tahrir mengklaim bahwa gagasan-gagasan yang mereka perjuangkan adalah murni Islam. Klaim ini tidak bisa dipisahkan dari situasi pada masa pendirian dan formatifnya di Timur Tengah serta penolakan sepenuhnya terhadap apa pun yang berasal dari atau berkaitan dengan Barat. Padahal, menurut Ed Husain (seorang mantan pemimpin Hizbut Tahrir di Inggris), di samping pengaruh al-Mawardi, pemikiran al-Nabhani jelas dipengaruhi oleh Hegel, Rousseau dan tokoh-tokoh Eropa lainnya. Bahkan, pemikiran politik al-Nabhani —dan dengan demikian Hizbut Tahrir— sepenuhnya berasal dari pemikiran politik Eropa. Hanya saja, al-Nabhani mengganti term-term yang berasal dari Barat dengan term-term berbahasa Arab sehingga bernuansa Islam.[21]

Para tokoh Hizbut Tahrir melihat umat Islam dewasa ini berada dalam masa *jahiliyyah* sebagai akibat runtuhnya khilafah. Mere-

---

20. Zeyno Baran, *Hizb ut-Tahrir: Islam's Political Insurgency* (Washington: Nixon Center, 2004), h. 16-17.

21. Ed Husain, *The Islamist* (London: Penguin Books, 2007), h. 161-164. Buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul: *Matinya Semangat Jihad*: *Catatan Perjalanan Seorang Islamis* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008).

ka bisa mengatasinya dengan mengakhiri 'ketundukan' pada Barat, memperoleh kembali identitas kolektifnya, dan yang terpenting menegakkan kembali khilafah internasional dan di dalamnya hukum Islam akan diberlakukan sebagai hukum positif. Dalam kaitan ini, Hizbut Tahrir meyakini bahwa hanya khalifah yang berhak memutuskan perang, karena itu hingga saat ini mereka menjalankan strategi penyusupan dan menunda cara-cara militer dan kekerasan dalam meraih kekuasaan,[22] sampai mereka yakin akan menang dan berhasil dalam merebut kekuasaan untuk mendirikan khilafah mereka.

Ada tiga tahap perjuangan Hizbut Tahrir dalam usaha menegakkan khilafah internasional. *Pertama*, membangun partai (*hizb*). Pada tahap ini para agen Hizbut Tahrir melakukan rekrutmen anggota baru, mereka membinanya dalam kurun waktu yang bisa berlangsung selama enam bulan hingga tiga tahun, tergantung pada progres masing-masing mereka. Tahap ini bisa dikatakan sebagai proses cuci otak dan pembentukan pribadi Islami *a la* Hizbut Tahrir, biasanya dilakukan dalam *halaqah-halaqah*. Pada tahap ini tokoh atau anggota Hizbut Tahrir juga akan membuka hubungan dengan umat untuk menyampaikan gagasan dan metode perjuangan mereka secara pribadi.

Kedua, berinteraksi dengan masyarakat. Dalam tahap ini, anggota yang telah lulus dari tahap pertama membentuk sel-sel baru dan mulai aktif mengaitkan kasus-kasus lokal dengan masalah-masalah global dan membakar massa untuk membangun ketegangan sosial antara rakyat dan pemerintah, untuk kemudian mulai menawarkan jalan Islam sebagai alternatif keluar dari ketegangan yang telah dibangunnya. Target utama mereka adalah untuk menyusup ke dalam pemerintahan dan militer, agar kelak melapangkan jalan dalam merebut kekuasaan.[23] Di seluruh dunia, tahap kedua inilah yang paling banyak beroperasi, dan agen-agen Hizbut Tahrir

22. Zeyno Baran (2004), h. 19-20.
23. Zeyno Baran (2004), h. 20-23.

sudah aktif di lebih 40 negara, termasuk Indonesia di mana pada 12 Agustus 2007 mereka mengumpulkan lebih dari 80 ribu orang di Gelora Bung Karno untuk menyerukan pendirian Khilafah Islamiyah dan melenyapkan Pancasila dan NKRI.

Ketiga, merebut kekuasaan. Tahap terakhir ini akan dilancarkan setelah mereka yakin akan menang dan berhasil merebut kekuasaan, yang antara lain akan ditandai dengan tingkat keberhasilan mereka menyusup ke dalam pemerintahan dan militer. Setelah berkuasa, mereka siap memaksakan penafsiran tentang Islam *a la* Hizbut Tahrir dalam semua bidang kehidupan umat manusia.[24]

Secara umum, sebagai akibat dari obsesi ideologi politik mereka, Hizbut Tahrir hampa spiritualitas sehingga gerakan yang dibangunnya kering dan cenderung supremasis. Bahkan, dalam banyak kasus, mayoritas aktivis Hizbut Tahrir tidak mengerti tentang Islam dan hanya mengetahui aspek-aspek yang sangat artifisial. Sangat ironis, bagaimana mungkin mereka yang tidak mengerti tentang Islam akan memperjuangkan Islam.[25] Lemahnya pemahaman yang mendalam ini menjadi penyebab utama mereka terlena dan tergoda memperjuangkan gagasan yang dikemas dalam term-term Arab yang identik dengan Islam. Secara umum, retorika kelompok-kelompok seperti ini adalah pengantar pada aksi-aksi kekerasan. Di dalamnya agama telah dimanipulasi sedemikian rupa untuk menyediakan dorongan teologis bagi para pengikut garis keras agar bersedia melakukan apa pun, hingga membunuh atau bunuh diri sekalipun jika dibutuhkan, demi mencapai tujuan politik mereka.

---

24. PBNU memperingatkan bangsa Indonesia akan bahaya gerakan transnasional karena bertentangan dengan dan mengancam kelestarian tradisi keberagamaan dan paham *Ahlussunnah wal-jamâ'ah*, Pancasila, dan NKRI (baca lampiran 2).
25. Ed Husain (2007), h. 146-149 dan 208-209.

Tiga Aspek Kekerasan

Ketiga gerakan transnasional ini (Wahabi, Ikhwanul Muslimin, dan Hizbut Tahrir), hadir di Indonesia baik secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi. Dengan ideologinya yang kaku, keras, dan ekstrem, didukung kekuatan dana dan sistem penyusupan *a la* komunisme, gerakan-gerakan transnasional ini menyusup ke hampir semua bidang kehidupan bangsa Indonesia. Ketiganya berusaha mengubah wajah Islam Indonesia yang umumnya santun dan toleran agar seperti wajah mereka yang sombong, garang, kejam, penuh kebencian, dan merasa berhak menguasai. Kekerasan yang mereka lakukan bisa dilihat dalam beberapa aspek.

Pertama, kekerasan doktrinal, yakni pemahaman literal-tertutup atas teks-teks keagamaan dan hanya menerima kebenaran sepihak. Dalam hal ini, literalisme-tertutup telah memutus relasi kongkret dan aktual pesan-pesan luhur agama dari realitas sejarah, sosial, dan kultural. Akibatnya, pesan-pesan luhur agama diamputasi sedemikian rupa dan hanya menyisakan organ yang sesuai dengan ideologi mereka.

Kedua, kekerasan tradisi dan budaya, dampak turunan dari yang pertama. Kebenaran sepihak yang dijunjung tinggi membuat mereka tidak mampu memahami kebenaran lain yang berbeda, dan praktik-praktik keagamaan umat Islam yang semula diakomodasi kemudian divonis sesat, dan pelakunya divonis musyrik, murtad, dan/atau kafir. Kelompok-kelompok garis keras menolak eksistensi tradisi, karena itu mereka lazim menolak bermadzhab (*allâ madzhabiyyah*), menolak tradisi tasawuf, dan berbagai praktik yang merupakan buah dari komunikasi teks-teks atau ajaran luhur agama dengan tradisi dan budaya umat Islam di berbagai daerah sepanjang sejarah. Akibatnya, terjadi salah kaprah dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Dengan dalih meniru Kanjeng Nabi, para anggota garis keras berpakaian *a la* busana Arab seperti gamis dan sorban, memanjangkan jenggot, namun mereka abai atas akhlak Kanjeng Nabi, seperti santun, sabar, rendah hati, pemaaf, dan seterusnya.

Ketiga, kekerasan sosiologis, dampak lanjutan dari dua kekerasan pertama, yakni aksi-aksi anarkis dan destruktif terhadap pihak lain yang dituduh musyrik, murtad, dan/atau kafir. Kekerasan sosial ini kemudian menyebabkan ketakutan, instabilitas, dan kegelisahan sosial yang mengancam negara di manapun tempat mereka menyusup. Dan akumulasi dari ketiga kekerasan ini kemudian merusak nalar dan logika umat Islam, menyuburkan kesalahkaprahan dalam memahami Islam akibat jargon-jargon teologis yang diteriakkan dengan tidak semestinya. Kebenaran, kemudian, lebih didasarkan pada jargon ideologis, bukan pada substansi pesan luhur agama yang disimbolkan oleh jargon yang bersangkutan.

Menurut seorang pejabat tinggi Departemen Pertahanan Republik Indonesia (Dephan RI), ancaman terhadap Indonesia tidak datang dalam bentuk militer dari luar negeri. Ancaman yang sebenarnya justru berada di dalam negeri, dalam bentuk gerakan ideologi garis keras. Senjata untuk mengatasinya adalah Pancasila.[26]

Motivasi Agen Garis Keras

Afiliasi tokoh-tokoh atau individu-individu aktivis garis keras lokal dengan salah satu gerakan transnasional tersebut terutama disebabkan oleh faktor-faktor seperti keuntungan finansial, kesempatan untuk mendapat kekuasaan, lingkungan dan/atau dislokasi sosial, dan/atau lemahnya pemahaman atas ajaran agama, terutama dalam hal spiritualitas.

Faktor finansial merupakan bisnis terselubung gerakan garis keras. Seorang mantan tokoh Laskar Jihad di Indonesia secara terbuka menyatakan kepada peneliti kami, ketika aktif dalam gerakan dia mendapat tunjangan tak kurang dari Rp 3 juta setiap bulan. Di tengah krisis ekonomi yang berkepanjangan, godaan materi ini sangat berpengaruh bagi mereka yang masih lemah imannya. Hal ini

---

26. Penjelasan pejabat Tinggi Departemen Pertahanan Republik Indonesia (Dephan RI) kepada peneliti konsultasi pada tanggal 31 Juli 2008.

bisa dimengerti, dana yang sangat besar memang bisa menghanyutkan iman dan menjadi lahan bisnis yang sangat menguntungkan para agennya. Keuntungan finansial ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para petualang yang ingin mendapat keuntungan instan tanpa perlu bekerja keras.

Orang-orang yang merasa punya kemampuan namun tidak punya peran sosial yang diimpikan, sering menemukan aktualisasi diri dalam kelompok-kelompok garis keras. Di dalamnya mereka mendapatkan peran dan posisi penting karena mampu merekrut dan mengatur pengikutnya serta menarik perhatian publik. Semakin banyak memperoleh pengikut dan sering muncul dalam liputan pers, semakin terpuaskan keinginannya untuk dianggap penting dan mendapat perhatian publik. Sepertinya publikasi pers menjadi pemuas impian yang telah lama tak tercapai untuk menjadi orang penting dan terkenal. Hal ini terlihat jelas antara lain dalam sebuah interview kolumnis asing dengan salah seorang Pimpinan kelompok garis keras pada bulan April 2007.[27]

Namun faktor terpenting dan barangkali menjadi alasan kebanyakan orang terpesona dengan gerakan garis keras adalah dangkalnya pemahaman mereka tentang agama (baca: ajaran Islam). Jargon-jargon garis keras seperti membela Islam, penerapan syarî'ah, maupun penegakan Khilafah Islamiyah, bagi umat Islam yang tidak mempunyai pemahaman mendalam tentang ajaran agamanya bisa menjadi ungkapan yang sangat ampuh dan mempesona. Pada saat yang sama, para penolak jargon-jargon tersebut bisa dengan mudah dituduh menolak syarî'ah, bahkan menolak Islam. Tuduhan semacam ini lazim dilontarkan oleh orang-orang yang merasa sok tahu tentang Islam, mereka yang merasa sebagai yang paling benar dalam memahami Islam. Sikap arogan ini membuat mereka lebih

---

27. Interview Bret Stephens dengan Muhammad Rizieq Shihab, di Petamburan pada 17 April 2008 (artikel lengkap "The Arab Invasion: Indonesia's Radicalized Muslims Aren't Homegrown," bisa dibaca dalam: http://www.opinionjournal.com/columnists/bstephens/?id=110009951).

suka menyalahkan siapa pun yang tidak sama dengan dirinya, dan tidak mampu melakukan introspeksi. Sikap demikian lahir karena tidak adanya sikap *berislam* secara sejati, sikap berserah diri seutuhnya kepada Allah swt. dan rendah hati sepenuhnya sebagaimana pesan utama Islam sendiri. Dangkalnya pemahaman ini menjelma menjadi kesalahkaprahan akut, mereka tidak mampu membedakan antara sumber ajaran Islam dari pemahaman atas sumber ajaran tersebut. Mereka juga tidak mampu mengurai kompleksitas relasi antara ajaran agama dengan realitas sosial, budaya, ekonomi, maupun politik. Dalam hal ini, agama yang mengandung pesan-pesan luhur dan sangat menekankan akhlak mulia, kemudian direduksi menjadi seperangkat diktum yang tak berperasaan berdasarkan batasan-batasan ideologis dan/atau platform partai.

Sungguh sayang, sementara beberapa umat Islam —baik yang awam maupun yang berpendidikan tinggi— telah dengan tulus mendukung agenda garis keras semata karena terpesona dengan jargon-jargon yang mereka gunakan, para tokohnya terus membangun simbiosa mutualistik —dengan para oportunis, individu yang sangat dangkal pemahamannya tentang Islam, atau yang idealis— yang darinya keuntungan personal diperoleh. Bukanlah sebuah kebetulan bahwa ada kelompok-kelompok garis keras yang merekrut anggota baru dengan sistem sel seperti dilakukan Ikhwanul Muslimin dan HTI, karena dengan cara demmikian mereka bisa lebih mudah dan efektif mengendalikan pengikutnya. Perekrutan dengan sistem sel merupakan media paling mudah untuk reorientasi, atau cuci otak, berdasarkan ideologi gerakan mereka. Di samping itu, keanggotaan berjenjang dan tertutup ini juga ampuh membungkam pertanyaan para anggota baru atas hal-hal yang bersifat sensitif, termasuk masalah finansial.

Gayung bersambut, baik Wahabi maupun para petualang lokal sama-sama mendapat keuntungan. Wahabi yang tidak bisa hadir secara terbuka —karena tentu akan ditolak oleh umat Islam yang mengerti sejarah dan ajaran mereka— untuk menanamkan

pahamnya di Indonesia, beruntung karena ada para petualang yang bersedia menjadi kaki tangannya untuk menyebarkan ideologi mereka. Sedangkan para petualang lokal mendapat keuntungan finansial dari aliran petrodolar yang luar biasa deras.

Terlepas dari alasan finansial tersebut, bersama-sama dengan Ikhwanul Muslimin dan HTI, Wahabi telah mempengaruhi umat Islam setempat dengan pahamnya yang ekstrem. Walaupun memiliki perspektif yang berbeda, termasuk dalam beberapa detail pemahaman keagamaan, tujuan akhir mereka mirip, yakni formalisasi Islam. Untuk mencapai tujuan ini, kelompok-kelompok garis keras menggunakan segala cara, bahkan yang bertentangan dengan ajaran Islam sekalipun. Fakta ini hanya menegaskan sebaliknya. Jika mereka memang memperjuangkan Islam, tentu mereka akan menghindari cara-cara yang bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Prinsip yang lazim menjadi pegangan para ulama *Ahlussunnah wal-jamâ'ah* menegaskan bahwa tujuan tidak bisa membenarkan cara (*al-ghâyah lâ tubarrir al-washîlah* atau *Man kâna amruhu ma'rûfan fal-yakun bi ma'rûfin*). Artinya, cara tidak akan menjadi baik karena tujuannya baik; atau, siapa pun yang mempunyai tujuan baik hendaknya dilakukan dengan cara-cara yang baik pula. Tujuan baik, jika diusahakan dengan cara-cara buruk, tentu akan menodai kebaikan itu sendiri dan bertentangan.[28]

Infiltrasi Ideologi Wahabi Pertama di Indonesia: Gerakan Padri

Selama beberapa dekade yang lalu, sebagaimana dipaparkan dalam pelajaran sejarah resmi di sekolah-sekolah, Perang Padri lebih dikenal sebagai perang melawan pendudukan penjajah Belanda. Para Padri dikenal sebagai pahlawan yang dengan gagah

---

28. "Man kâna amruhu ma'rufan fal-yakun bi ma'rûfin," (Siapa pun yang melakukan kebaikan hendaknya [dilakukan] dengan cara-cara yang baik), penjelasaan Prof. Dr. KH. Said Aqil Siraj dalam *Lautan Wahyu: Islam sebagai Rahmatan lil-'Âlamîn*, episode 5: "Dakwah," Supervisor Program: KH. A. Mustofa Bisri, ©LibForAll Foundation 2009).

berjuang/berperang membela tanah air. Sisi kekerasan dan afiliasi mereka dengan ajaran Wahabi sama sekali tidak terungkap dan hanya beredar di antara para ahli saja. Dalam hal ini, sangat berharga untuk mengetahui penggalan lain sejarah Gerakan Padri tersebut.

Gerakan Padri berawal dari perkenalan Haji Miskin, Haji Abdurrahman, dan Haji Muhammad Arif dengan Wahabi saat menunaikan ibadah haji pada awal abad ke-19, ketika itu Makkah dan Madinah dikuasai Wahabi. Terpesona oleh gerakan Wahabi, sekembalinya ke Nusantara (Indonesia) Haji Miskin berusaha melakukan gerakan pemurnian sebagaimana dilakukan Wahabi, yang juga didukung oleh dua haji yang lain.[29] Pemikiran dan gerakan mereka setali tiga uang dengan Wahabi, mereka memvonis tarekat Syattariyah, dan tasawuf secara umumnya, yang telah hadir di Minangkabau beberapa abad sebelumnya sebagai kesesatan yang tidak bisa ditoleransi, di dalamnya banyak takhayul, bid'ah, dan khurafat yang harus diluruskan, kalau perlu diperangi.[30] Tuanku Nan Renceh, misalnya, memusuhi Tuanku Nan Tuo, gurunya sendiri karena yang disebut terakhir lebih memilih bersikap moderat dalam mengajarkan Islam. Tuanku Nan Renceh juga mengkafirkan Fakih Saghir, sahabat dan teman seperguruannya, dan menyebutnya sebagai raja kafir dan rahib tua hanya karena tidak berbagi pandangan keagamaan dengannya.[31]

---

29. Abdul A'la, "Genealogi Radikalisme Muslim Nusantara: Akar dan Karakter Pemikiran dan Gerakan Padri dalam Perspektif Hubungan Agama dan Politik Kekuasaan," Pidato Pengukuhan Guru Besar, IAIN Sunan Ampel Surabaya, Mei 2008 (tidak dipublikasikan), h. 11.
30. Oman Fathurrahman, *Tarekat Shattariyah di Dunia Melayu-Indonesia: Kajian atas Dinamika dan Perkembangannya Melalui Naskah-naskah di Sumatera Barat*, Disertasi pada Program Studi Ilmu Susastera Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta 2003 (Tidak dipublikasikan), h. 164, sebagaimana dikutip Abdul A'la, *ibid.*, h. 14.
31. Suryadi, "Kontroversi Kaum Padri: Jika Bukan Karena Tuanku Nan Renceh" dalam http://naskahkuno.blogspot.com/2007/11/kontroversi-kaum-padri-jika-bukan.html, seperti dikutip Abdul A'la, *ibid.*, h. 14.

Beberapa kekerasan yang dilakukan Padri, selain mengikuti kegemaran Wahabi memusyrikkan, mengkafirkan, dan memurtadkan siapa pun yang berbeda, mereka juga menerapkan hukum yang sama sekali asing dalam diktum hukum Islam, seperti kewajiban memelihara jenggot dan didenda 2 suku (setara dengan 1 gulden) bagi yang mencukurnya; larangan memotong gigi dengan ancaman denda seekor kerbau bagi pelanggarnya; denda 2 suku bagi laki-laki yang lututnya terbuka; denda 3 suku bagi perempuan yang tidak menutup sekujur tubuhnya kecuali mata dan tangan; denda 5 suku bagi yang meninggalkan shalat fardlu untuk pertama kali, dan hukum mati untuk berikutnya.[32]

Para Padri juga melegalkan perbudakan. Tuanku Imam Bonjol, tokoh Padri terkemuka dan dikenal sebagai pahlawan nasional, mempunyai tujuh puluh orang budak laki-laki dan perempuan. Budak-budak ini sebagian merupakan hasil rampasan perang yang mereka lancarkan kepada sesama Muslim karena dianggap kafir.[33]

Kekerasan lain yang dilakukan Padri terhadap sesama Muslim di Minangkabau, antara lain penyerangan terhadap istana Pagaruyung pada tahun 1809. Serangan ini diawali oleh tuduhan Tuanku Lelo, tokoh Padri, bahwa beberapa keluarga raja seperti Tuanku Rajo Naro, Tuanku di Talang, dan seorang anak raja lainnya, tidak menjalankan akidah Islam secara benar dan dianggap kafir, sehingga harus dibunuh. Pembantaian massal pun dilakukan terhadap para anggota keluarga dan pembantu raja, termasuk para penghulu yang dekat dengan istana.[34] Pada tahun 1815, serangan dilakukan kembali dibawah komando Tanku Lintau. Dalam serangan kali ini, gerakan Padri membunuh hampir seluruh keluarga kerajaan yang telah memeluk Islam sejak abad ke-16 itu. Kekeja-

---

32. Abdul A'la, *ibid.*, h. 14-15.
33. Untuk deskripsi lebih lengkap, baca: Abdul A'la, *ibid.*, h. 15-16.
34. Lihat Puti Reno Raudha Thaib, "Sejarah Istana Pagaruyung" dalam http"//groups.yahoo.com/group/RantauNet/message/61114, sebagaimana dikutip Abdul A'la, *ibid.*, h. 22-23.

man Padri tidak hanya dalam hal itu saja. Tercatat, Tuanku Nan Renceh telah menghukum bunuh bibinya sendiri yang sudah tua, dan tidak membolehkan jenazahnya dikubur tetapi dibuang ke hutan, semata karena mengunyah sirih yang diharamkan Wahabi.[35] Apa yang dilakukan kaum Padri ini sama belaka dengan yang dilakukan oleh Wahabi pada masa formasinya dan oleh pengikutnya seperti al-Qaedah dan Taliban sampai dewasa ini.

Gerakan Padri berakhir, di samping karena faktor penjajahan, juga karena secara alamiah bertentangan dengan suasana, tradisi, dan budaya bangsa Indonesia. Fakta ini merupakan bukti kongkret betapa virus Wahabi yang menjangkiti jantung dunia Islam bisa menyebar dengan cepat ke seluruh tubuh dunia Islam. Berakhirnya gerakan Padri tidak mengakhiri penyusupan Wahabi ke Indonesia.

Infiltrasi Gerakan Transnasional pada Masa Orde Baru hingga Dewasa ini

Sejak dekade 1970-an, ketika umat Islam Indonesia kesulitan keuangan untuk membiayai studi para mahasiswa belajar ke luar negeri, Wahabi menyediakan dana yang lumayan besar melalui DDII untuk membiayai mahasiswa belajar ke beberapa negara Timur Tengah, terutama Arab Saudi. Belakangan, kebanyakan alumni program ini menjadi agen penyebaran paham transnasional dari Timur Tengah ke Indonesia. Tidak berhenti di situ, dengan dukungan dana Wahabi pula, DDII mendirikan LIPIA, dan kebanyakan alumninya kemudian memainkan peran yang berpengaruh sebagai agen Salafi (Wahabi) dan Tarbiyah (Ikhwanul Muslimin). DDII pula yang telah meletakkan dasar gerakan dakwah di kampus-kampus, dan sebagaimana alumni Timur Tengah, mereka juga menjadi para agen penyusupan paham gerakan transnasional ke Indonesia.

Masih dengan dukungan dana Wahabi, DDII juga memainkan

35. Abdul A'la, *ibid.*, h. 23.

peran penting dalam penerjemahan buku-buku dan penyebaran gagasan tokoh-tokoh gerakan transnasional seperti Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, Abul A'la Maududi, Yusuf Qardawi, dan lain-lain. Penerbitan Sabili yang mencapai tiras 100.000 eksemplar diduga tidak lepas dari dukungan dana Wahabi. Tidak bisa dipungkiri bahwa pembentukan DDII tidak terlepas dari pembubaran Masyumi yang saat itu dikuasai oleh kelompok puritan, modernis. Namun pasti tidak benar melakukan generalisasi bahwa para tokoh modernis adalah agen gerakan transnasional, tetapi Wahabi-Ikhwanul Muslimin dengan cerdas melihat peluang-peluang sekecil apa pun untuk menyusup ke dalam organisasi modernis untuk kemudian memanfaatkannya demi penyebaran ideologinya.

Selain DDII, menjelang dan setelah Orde Baru tumbang, Indonesia menyaksikan begitu banyak kelompok-kelompok garis keras lokal yang tumbuh seperti cendawan di musim hujan. Beberapa di antara kelompok ini antara lain Fron Pembela Islam (FPI), Forum Umat Islam (FUI), Laskar Jihad, Jamaah Islamiyah, Majlis Mujahidin Indonesia (MMI), PKS, Komite Persiapan Penerapan Syarî'ah Islam (KPPSI) di beberapa daerah, dan lain-lain. Dalam momen inilah, Ikhwanul Muslimin (yaitu PKS)[36] dan Hizbut Tahrir me-

36. Haedar Nashir menulis:

Keterkaitan PKS dengan Ikhwanul Muslimin sendiri juga diakui oleh Anis Matta, seorang tokoh dan sekjen Partai Keadilan Sejahtera. Berikut pernyataan Anis Matta:

> *"Inspirasi-inspirasi Al-Ikhwan Al-Muslimun dalam diri Partai Keadilan Sejahtera, kalau boleh digarisbawahi di sini, sesungguhnya memberikan kekuatan pada dua dimensi sekaligus.* **Pertama**, *inspirasi ideologis yang –salah satunya– didasarkan kepada prinsip* **Syumuliyat Al-Islâm**, *sesuatu yang bukan hanya menjadi prinsip perjuangan Hasan Al-Banna saja, tapi juga pejuang-pejuang yang lain.* **Kedua**, *inspirasi historis, semacam mencari model dan maket dari sebentuk perjuangan Islam di era setelah keruntuhan Al-Khilafah Al-Islamiyyah dan dominasi imperialisme Barat atas negeri-negeri Muslim. Tetapi yang mempertemukan dua inspirasi itu pada diri Hasan Al-Banna*

nampakkan diri secara terbuka di Indonesia. Hingga saat ini, gerakan kelompok-kelompok garis keras sudah menyebar seperti kanker ke seluruh tubuh bangsa, mereka menyusup dari istana negara hingga ke pegunungan. Hasil penelitian lapangan dan konsultasi seperti dipaparkan buku ini menunjukkan dengan jelas bahwa gerakan mereka sangat sistematis, terencana, dan dengan dukungan dana yang luar biasa.

Pola-pola penyusupan yang mereka lakukan sangat beragam, seperti pendekatan finansial hingga hal-hal yang tak terpikirkan seperti melalui layanan kebersihan (*cleaning service*) gratis di masjid-masjid, bahkan dengan pola akademis atau berbagi pengetahuan. Dalam kaitan ini, pada akhir tahun 2005, proposal dari sebuah LSM telah ditujukan kepada Kepala Negara berisi tawaran kerjasama dalam penyaluran dana sebesar 500 juta dollar AS yang diparkir di beberapa bank asing di Luar Negeri. Jika pemerintah RI mengizinkan dana tersebut masuk dan mau bekerjasama, LSM tersebut memberi tawaran: 40% dari dana itu, yaitu USD 200 juta, untuk dimanfaatkan Kabinet RI, dan LSM dimaksud akan menggunakan 60% untuk melakukan berbagai program pembangunan non-APBN/APBD, khususnya untuk "infrastruktur pendidikan kemuliaan akhlak," terutama di Sulawesi Tengah yang baru saja keluar dari konflik bersenjata yang di dalamnya kelompok-kelompok garis keras terlibat dengan jelas. Tidak cukup sampai di situ, proposal itu menyebutkan bahwa jika pemerintah RI tertarik dengan

---

> *dan Al-Ikhwanul Muslimun, adalah pada aspek denyut pergerakannya. Sebab, pada saat tokoh-tokoh yang lain menjadi pembaharu dalam lingkup pemikiran, Hasan Al-Banna berhasil mengubah pembaharuan itu dari wacana menjadi gerakan. Dan tidak berlebihan, bila inspirasi gerak itu juga yang secara terasa dapat diselami dalam denyut Partai Keadilan Sejahtera."*

Anis Matta, "Kata Pengantar" dalam Aay Muhammad Furkon, *Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer* (Bandung: Teraju, 2004), sebagaimana dikutip Haedar Nashir, *ibid.*, h. 33-34.

dana itu, maka "Dari pihak LSM mengharapkan diberikan kesempatan (lisensi) untuk menempatkan personilnya di dalam Lembaga Perencanaan Negara dan Pengawasan Negara (Tim Ekonomi RI)."

Sumber *confidential* di lingkungan istana yang mengetahui proposal tersebut menyatakan kepada peneliti kami bahwa dana itu berasal dari Arab Saudi dan, melalui beberapa bank di Malaysia, dicoba dimasukkan ke Indonesia melalui jalur resmi (izin pemerintah) mengingat jumlahnya yang teramat fantastis. Sumber kami menambahkan, proposal tersebut tiba-tiba lenyap dari istana karena ada pribadi-pribadi yang sangat prihatin pada dampak buruk proposal tersebut jika betul-betul disetujui.[37] Namun yang jelas kasus ini menunjukkan adanya upaya intervensi kekuasaan Timur Tengah terhadap Indonesia dengan dukungan dana yang sangat besar.

Usaha-usaha penyusupan secara finansial banyak dilakukan kepada orang-orang terkemuka yang diduga bisa dibeli. Ada beberapa yang memang dengan senang hati menikmati dana Wahabi dan rela menjadi saluran penyebaran ideologinya. Namun ada juga tokoh-tokoh yang lebih mencintai bangsa dan negaranya, lebih meyakini kebenaran ajaran Islam yang toleran dan moderat daripada ideologi yang keras dan ekstrem, dan dengan tegas menolak godaan dana Wahabi. Kasus yang terjadi di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, adalah contoh menarik. Rektor UIN Sunan Kalijaga, pernah didatangi 2 orang Arab Saudi yang membawa beberapa keping cd berisi buku-buku Wahabi dan Ikhwanul Muslimin yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kepada Rektor, kedua orang itu menawarkan uang untuk menggunakan nama UIN Sunan Kalijaga sebagai penerbit. Tawaran itu ditolak oleh Rektor karena ia tahu bahwa buku itu mengandung ajaran dan paham ekstrem yang akan disebarkan untuk mewahabikan Islam Indonesia melalui UIN Sunan Kalijaga. Sayang, tidak semua orang Indonesia berakhlak mulia seperti Rektor tersebut, sehingga

---

37. Wawancara peneliti konsultasi dengan sumber *confidential* pada 2006.

mereka rela menjual agama, rela menjadi agen Wahabi, dan rela mengorbankan masa depan bangsa dan negara kita. Dari sini jelas lagi bahwa Wahabi tidak hanya membiayai terorisme, tetapi juga penyebaran ideologi.

Penyerobotan masjid ini merupakan salah satu saja dari sekian cara penyusupan kelompok garis keras. Penyusupan dengan pola-pola akademis lazim dilakukan kepada dewan penyantun, pimpinan kampus, pengurus senat mahasiswa, dan lain-lain. Bahkan juga mendirikan jaringan sekolah-sekolah sendiri, seperti sekolah-sekolah "Islam Terpadu." Dari situ jelas bahwa kelompok-kelompok dakwah kampus bergerak secara sistematis untuk menguasai dunia pendidikan dan masa depan Indonesia dengan pandangan Wahabi-Ikhwanul Muslimin maupun Hizbut Tahrir.

Usaha merebut lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah lebih mudah dibanding usaha merebut lembaga-lembaga pendidikan yang berafiliasi dengan NU, bahkan lebih mudha lagi merebut lembaga-lembaga pendidikan umum yang tidak berafiliasi baik dengan NU maupun Muhammadiyah. Institusi di lingkungan Muhammadiyah lebih diikat dengan relasi formal-struktural, sedangkan di lingkungan NU lebih bersifat emosional-kultural. Di samping itu, banyak anggota Muhammadiyah tampak lebih reseptif pada gagasan-gagasan kelompok garis keras karena orientasi purifikasi Muhammadiyah yang tidak politis mirip dengan gerakan garis keras yang menjadikan gerakan purifikasi sebagai salah satu proyeknya. Banyak mahasiswa di lembaga-lembaga pendidikan umum yang tidak berafilisasi dengan keduanya, hampir sama sekali tidak punya alasan atau kemampuan teologis untuk menolak ideologi garis keras karena tidak mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang Islam.

Bahaya di Pelupuk Mata

Wahabi, di samping dua rekannya yang sama-sama keras dan ekstrem, punya andil besar dalam berbagai kekerasan yang selama

ini terjadi di seluruh dunia, baik kekerasan doktrinal, kultural, maupun sosial. Namun demikian, kebanyakan umat Islam Indonesia kerap tidak menyadari bahaya laten yang dibawa kelompok-kelompok garis keras ini semata karena kesadaran normatif yang begitu kuat. Umat Islam Indonesia selama ini cenderung melihat Islam sebagai identik dengan Arab, dan sebaliknya. Karena itu, setiap yang datang dari Arab nyaris tidak pernah dicurigai dan mudah diterima. Hal ini disebabkan kesadaran normatif Muslim Indonesia yang melihat Arab sebagai tempat diturunkannya Islam. Karena alasan inilah umat Islam Indonesia tampak enggan mengkritisi Wahabi yang merupakan paham resmi penguasa Kerajaan Arab Saudi. Sejatinya, sikap hormat tidak perlu menafikan rasionalitas dan sikap kritis.

Secara ringkas bisa dikemukakan bahwa agenda utama kelompok-kelompok garis keras adalah untuk meraih kekuasaan politik melalui formalisasi agama. Mereka mengklaim, jika Islam menjadi dasar negara, jika syarî'ah ditetapkan sebagai hukum positif, jika Khilâfah Islamiyah ditegakkan, maka semua masalah akan selesai. Semua ini adalah utopia. Jika saja mereka memahami respon 'Ali ibn Abi Thalib kepada Khawârij menjelang *Tahkîm*,[38] akan sangat jelas bahwa sebaik apa pun ajaran dan pesan agama sebagaimana termaktub dalam kitab suci, semua tergantung pada pembaca dan penganutnya, tentu mereka tidak akan memanfaatkan agama untuk meraih kekuasaan politik. Namun, sudah jamak disuarakan, gerakan-gerakan garis keras (terutama Wahabi) sebenarnya adalah reinkarnasi Khawârij. Karena itu, mustahil neo-Khawârij bersibuk

38. Dalam peristiwa tersebut *Khawârij* menemui 'Ali dan mengutip ayat bahwa "(hak menetapkan) hukum hanya milik Allah (*in al-hukm illâ liLlâh*), dengan maksud agar *ishlâh* yang ditawarkan Mu'âwiyah ditolak dan perang diteruskan hingga yang terakhir ini menyerah. 'Ali, yang lebih memilih jalan *ishlâh*, menjawab, "Kitab suci tidak membawa maknanya di atas pundaknya. Ia membutuhkan pembaca untuk menyampaikan maknanya. Dan pembaca itu adalah manusia." Manusia, potensial mencapai kebenaran, sebagaimana juga potensial jatuh pada kesalahan.

memahami respon 'Ali tetapi gigih mengkafirkan umat Islam lain yang berbeda dari atau bahkan bertentangan dengan mereka dan memperjuangkan formalisasi agama untuk mencapai tujuan politiknya.

Memang, tentu ada relasi antara berbagai permasalahan sosial dengan pengabaian terhadap ajaran agama. Seperti korupsi, kolusi, nepotisme, kemiskinan, kebodohan, dan semacamnya. Tapi solusinya bukanlah pada formalisasi agama, melainkan pada perbaikan akhlak idividu-individu sebagai para penganut agama. Solusi formalisasi agama lebih sebagai dalih untuk mencapai suatu tujuan politik daripada untuk memperbaiki permasalahan sosial. Karena permasalahan sebenarnya bukanlah pada agama yang tidak diformalkan tetapi pada para penganut agama yang mengabaikan pesan-pesan luhur agamanya.

Formalisasi agama jelas sangat membahayakan, baik bagi agama itu sendiri maupun penganutnya/bangsa Indonesia. Dengan formalisasi, agama akan diamputasi sedemikian rupa, dilepaskan dari konteks sosial dan kultural masa risalah, disapih dari pertumbuhannya sepanjang sejarah, dan pesan-pesannya akan ditentukan berdasarkan bingkai ideologis dan/atau platform partai politik. Dalam situasi demikian, identitas dan simbol-simbol keagamaan menjadi bagian terpenting, bahkan lebih penting dari substansi pesan agama itu sendiri, untuk diperjuangkan. Mereka mengejar simbol-simbol, bukan mengamalkan substansi ajaran agama.

Beberapa contoh gairah memperjuangkan simbol ini bisa dikemukakan, baik yang bersifat personal maupun publik. Sebuah riwayat menuturkan bahwa Tuhan akan mencintai hamba-hamba-Nya yang mempunyai tanda hitam di dahinya. Berdasarkan riwayat ini, sangat banyak aktivis kelompok garis keras yang berusaha membuat dahinya hitam, padahal yang dimaksudkan adalah banyak bersujud, beribadah, berserah diri kepada Allah swt., berusaha mencinta-Nya dengan sepenuh hati sehingga dia juga akan mencintai seluruh makhluk-Nya. Mereka berpikir bahwa tanda hitam

itu akan ditunjukkan sebagai bukti kepada Tuhan kelak di akhirat, padahal Allah swt. melihat hati dan perbuatan, bukan simbol-simbol. Demikian pula dengan jenggot dan pakaian. Dugaan terbaik, hal ini disebabkan tidak adanya kemampuan membedakan antara substansi ajaran agama dari simbol-simbol keagamaan atau budaya. Hal ini wajar, karena pemahaman mereka bersifat harfiah belaka. Namun kemungkinan lainnya, semua ini digunakan sebagai identitas politik untuk membedakan dari kelompok lain yang moderat dan toleran, yang memahami pesan agama lebih pada tataran substansi daripada tataran dan tanda artifisial.

Pembacaan secara harfiah dan mengutamakan simbol-simbol ini akan mengarahkan umat menjadi monolitik, penyeragaman. Tidak heran jika kelompok-kelompok garis keras kemudian menolak pluralisme, baik pluralisme agama-agama maupun dalam agama. Hal ini sangat berbahaya karena tidak akan pernah ada celah untuk perbedaan, setiap yang berbeda, dengan menggunakan term-term teologis, akan divonis kafir, murtad dan semacamnya. Pengkafiran, kebiasaan buruk Khawârij dan para pengikutnya (neo-Khawarij) ini, belakangan sangat subur di Indonesia. Gejala ini seharusnya menyadarkan kita bahwa bahaya sebenarnya bukan jauh di luar negeri, tetapi sudah di dalam selimut.

Dalam hubungannya dengan agama-agama lain, dengan indah Nabi menuturkan, "*Nahnu abnâ'u 'allât, abûnâ wâhid wa ummunâ syattâ*" (Kami [para rasul] adalah anak-anak para istri dari seorang laki-laki, ayah kami satu namun ibu kami banyak). Dalam keluarga umat manusia, para rasul mempunyai ayah (agama) yang sama, yakni Islam (dalam arti berserah diri kepada Tuhan), namun mempunyai ibu (*syir'ah wa minhâj*) yang banyak/berbeda-beda.[39] Ini

39. "...Islam datang menguatkan agama-agama, dan membenarkan sebagian premisnya. Namun tidak mengatakan bahwa ia adalah sesuatu yang berbeda dari agama-agama sebelumnya, bahkan sebaliknya. Nabi selalu mengatakan, 'Aku bukanlah sebagian dari para rasul. Kami bersama, para rasul adalah anak-anak '*allât*.' '*Allât* adalah para perempuan yang kawin dengan seorang laki-laki. Ayah

adalah pengakuan atas pluralisme, dan inilah yang ditolak oleh kelompok garis keras.

Formalisasi hukum Islam sebagai hukum positif melalui Perda-perda Syarî'ah di beberapa daerah merupakan strategi "desa mengepung kota" garis keras. "Jika daerah-daerah telah menerapkan syarî'ah Islam sebagai hukum positif, maka tidak —akan— ada alasan untuk menolaknya secara nasional," jelas tokoh-tokoh kelompok garis keras kepada peneliti kami terkait usaha formalisasi hukum Islam yang mereka lakukan. Sialnya, perda-perda dimaksud lebih merupakan aplikasi harfiah dan parsial atas hukum Islam, maka bisa dipastikan akan menimbulkan distorsi dan reduksi terhadap Islam itu sendiri, di samping diskriminasi dan alienasi terhadap non-Muslim maupun Muslim sendiri.

Seperti diketahui, kelompok-kelompok garis keras memahami teks-teks kegamaan secara harfiah, dan mengabaikan ayat-ayat dan hadits-hadits yang tidak mendukung kepentingan mereka. Maka pesan agama pun direduksi sebatas makna atau pesan yang bisa disampaikan dalam rangkaian huruf-huruf saja sesuai dengan ideologi mereka. Ayat-ayat atau hadits-hadits tentang peminum, pencuri, atau pembunuh misalnya, diturunkan ke dalam diktum hukum yang sangat harfiah dan dengan sanksi bermotif dendam. Pertanyaan mendasarnya, apakah ayat-ayat dan hadits-hadits tersebut dikemukakan memang untuk mencambuki peminum, membuntungi tangan dan kaki pencuri, dan membunuh para pembunuh? Jika jawabannya positif, di mana letak pesan utama Islam sebagai rahmat bagi seluruh makhluk dan misi Kanjeng Nabi Muhammad saw. untuk menyempurnakan akhlak mu-

---

mereka, anak-anak *'allât*, ayah kami adalah agama yang satu, tauhid. Ibu kami banyak. Ibu-ibu artinya adalah syari'ah-syari'ah, syari'ah banyak. Dalam Islam dikatakan ada perbedaan syari'ah-syari'ah tapi bukan perbedaan agama. Syari'ah berbeda-beda, tapi agama tidak berbeda." (Penjelasan Mariam Syarif al-Khalifa dalam: *Lautan Wahyu: Islam sebagai Rahmatan lil-'Âlamîn*, episode 4: "Kaum Beriman," Supervisor Program: KH. A. Mustofa Bisri, ©LibForAll Foundation).

lia? Ketika rahmat dan akhlak mulia tidak lagi ditemukan dalam aplikasi pesan-pesan agama, maka pasti agama sudah dibaca secara keliru dan pemahaman seperti itu tidak bisa diterima.

Pembacaan secara harfiah dan parsial memang sangat menguntungkan untuk membingkai pesan-pesan agama dengan ideologi dan/atau platform partai politik. Karena dengan dalih makna (harfiah), seseorang atau kelompok tertentu bisa menyembunyikan agenda politiknya pada saat membajak ajaran agama. Siapa pun yang tidak akrab dengan kompleksitas *ta'wîl* teks-teks keagamaan sebagaimana populer di kalangan ulama *Ahlussunnah wal-Jamâ'ah*, bisa kesulitan menghadapi klaim-klaim teologis kelompok-kelompok garis keras yang didasarkan pada makna-makna harfiah. Bahkan, mereka yang berpendidikan tinggi sekalipun bisa ditipu untuk mendukung agenda politiknya, seperti dibuktikan dalam studi ini bahwa banyak mahasiswa dan para profesional yang simpati dan bahkan menjadi pengikut PKS atau HTI.

Formalisasi agama memang anak kandung pembacaan harfiah atas teks-teks agama dan sangat berbahaya, baik bagi agama itu sendiri, para penganutnya, maupun penganut agama yang berbeda. Pesan-pesan luhur agama direduksi pada tingkat kepentingan ideologis, pemaknaan yang monolitik akan mengarah pada penyeragaman para penganut agama, dan penganut agama yang berbeda akan terpinggirkan, teralienasi dari komunitas umat beragama yang ekstrem. Di sini pluralisme terasa ganjil bagi pejuang formalisasi agama, karena formalisasi dan pemaknaan harfiah ini pula, kelompok-kelompok garis keras sulit menerima kehadiran non-Muslim dan Muslim dengan paham yang berbeda.

Memang, dalam salah satu riwayat diceritakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad saw. berkata, "Aku diperintahkan memerangi siapa pun hingga mereka bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah" (*Umirtu an uqâtil al-nâs hattâ yasyhadû lâ Ilâh ill Allâh*). Di tangan kelompok garis keras, ini jelas keteladanan untuk menghabisi non-Muslim, dan perang melawan non-Muslim menemukan landasan

legal-teologisnya. Namun ini bukanlah satu-satunya pembacaan. Hadits ini bisa bermakna lain dalam hati siapa pun yang akrab dengan kompleksitas *ta'wîl* dan peduli pada keseluruhan pesan Islam dan misi Nabi saw.

Jika Islam merupakan rahmat bagi seluruh makhluk (bukan hanya Muslim), maka tidak mungkin Nabi menyatakan dirinya diperintahkan membantai non-Muslim. Jika misi Nabi adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia, maka pembunuhan, dari sudut pandang mana pun dan terhadap siapa pun, sangatlah tidak bermoral. Maka hadits ini harus dibaca dalam konteks keseluruhan pesan Islam dan misi Nabi saw. Pembacaan secara parsial hanya akan menyebabkan agama menjadi sumber kebingungan.

Berdasarkan mata rantai transmisinya, hadits ini bisa diterima memang dikemukakan oleh Nabi saw. Namun harus ditekankan, kalimat tauhid sebagai kata kunci dalam hadits tersebut bukanlah dalam makna formal, di dalamnya tidak disertakan penyaksian bahwa Muhammad adalah utusan-Nya. Maka, pertama, kalimat tauhid tersebut menekankan makna hanya menuhankan Allah semata, apa pun agamanya. Dalam ungkapan lain bisa dikemukakan, "hingga mereka berserah diri, tunduk, dan patuh kepada Allah swt.," dan tidak menuhankan apa pun selain-Nya, seperti kekuasaan, kekayaan, politik, dan berbagai bentuk arogansi lainnya. Sangat masuk akal kalau mereka harus diperangi, karena siapa pun yang menuhankan kekuasaan, kekayaan, politik, dan semacamnya, sebenarnya menuhankan hawa nafsunya, dan akan melakukan apa pun demi memuaskan pujaannya. Namun tentu saja perang harus dilakukan dalam kerangka akhlak mulia, seperti penyadaran, membela diri, dan semacamnya.

Kedua, perintah memerangi ini bukan dalam konteks memaksa siapa pun masuk Islam. Karena jika dimaknai demikian, akan bertentangan dengan penegasan al-Qur'an sendiri bahwa "tidak ada paksaan dalam agama" (*lâ ikrâh fi al-dîn* [QS. 2: 256), maka siapa pun boleh beriman dan siapa pun boleh kafir (*fa man syâ'a*

fal-yu'min wa man syâ'a fal-yakfur [QS. 18: 29]). Maka perintah memerangi siapa pun yang tidak bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah bukanlah dalam konteks teologis, tetapi sosiologis. Namun di tangan kelompok-kelompok garis keras, makna harfiah inilah yang dipegang teguh dan mereka lupa bahwa "tidak ada paksaan dalam agama," bahwa "Islam adalah rahmat bagi seluruh makhluk" (bukan Muslim saja), dan bahwa "Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia."

Jelas bahwa literalisme tertutup dan formalisasi agama amat berbahaya, baik pada tataran epistemologis maupun praksis. Maka sangat penting untuk menyadari bahaya laten kelompok-kelompok garis keras yang biasa dengan literalisme tertutup dan mengagendakan formalisasi agama. Formalisasi agama yang diperjuangkan kelompok-kelompok garis keras lebih didorong oleh motivasi politik daripada agama. Dari sudut pandang manapun, sulit menerima politisasi agama sebagai bagian dari ajaran agama, karena formalisasi agama sendiri adalah pengebirian terhadap agama itu sendiri. Bagi mereka, agama sudah menjadi tujuan. Maka agama pun, secara meyakinkan, akan kehilangan pesan-pesan luhurnya, yang tersisa hanyalah simbol-simbol keagungan agama itu sendiri. Ini merupakan salah satu kesalahkaprahan dalam melihat dan memahami agama. Seharusnya, agama dilihat dan diikuti sebagai petunjuk, sebagai jalan, menuju Ilahi agar penganut agama menjadi manifestasi substansi pesan utama dan luhur agama. Ketika agama menjadi tujuan, maka Tuhan pun sirna dalam semesta keagamaan itu sendiri. Dalam konteks inilah, formalisasi agama terlihat jelas tidak didorong oleh motivasi agama, melainkan politik.

Bahaya formalisasi agama menjadi semakin kuat, dalam kasus Indonesia, karena didukung dengan sumber dana yang kuat serta sistem penyusupan yang terencana. Sudah jamak diketahui bahwa dana Wahabi leluasa mengalir ke Indonesia, dari pihak penguasa seperti tidak peduli, seakan dana itu tidak membawa agenda terselubung yang merupakan benih bahaya laten bagi Indonesia.

Di samping sebagai imbalan dalam relasi simbiosa mutualistik antara gerakan-gerakan transnasional dengan kaki tangannya di Indonesia, dana tersebut juga digunakan untuk menyebarkan gagasan formalisasi agama dan membangun sistem penyusupan ke semua bidang kehidupan bangsa Indonesia, mulai dari istana hingga ke kampung-kampung, dalam instansi-instansi pemerintahan dan masyarakat sipil, bahkan dengan cara-cara yang selama ini hampir tak terpikirkan kecuali oleh para penyusup itu sendiri.

Seperti telah dikemukakan, penting disadari bahwa banyak gerakan kelompok garis keras memang sejak awal sudah melakukan rekrutmen dengan sistem sel, dan siapa pun yang berhasil direkrut akan dibina dalam beberapa tahap 'pembinaan', seperti *ta'rîf* (pengenalan dan penanaman ajaran), *takwîn* (pembentukan pribadi sesuai ajaran), dan *tanfîdz* (eksekusi ajaran).[40] Peneliti kami mendapat informasi dari seorang anggota keluarga pendukung PKS di Jakarta bahwa, ketika terjadi perselisihan pribadi di antara dua bibinya, salah seorang darinya mengancam akan melaporkan perselisihan pribadi tersebut ke pengurus partai. Kasus ini mengingatkan pada kontrol pemerintahan komunis-Stalin di Uni Soviet yang sentralistik dan berusaha mengontrol semua aspek kehidupan rakyat.

Dengan perekrutan sistem sel seperti ini, dan dengan dukungan dana yang kuat, penyusupan yang mereka lakukan sangat terencana dan berbahaya. Mereka menyusup ke tempat-tempat peribadatan seperti masjid-masjid, ke dunia pendidikan seperti kampus-kampus dan bahkan ke beberapa pesantren yang biasanya diawali dengan pemberian buku-buku yang mengandung virus gagasan garis keras, ke media massa dan penerbitan, ke dunia bisnis, bahkan ke partai politik dan pemerintahan. Di samping menyusup ke masjid-masjid dan dunia pendidikan, garis keras juga membangun masjid-masjid baru atau merenovasinya dengan dukungan dana Wahabi seperti —antara lain— di Kabupaten Magelang, dan

40. Untuk deskripsi lengkap mengenai tahapan-tahapan pembentukan sistem penyusupan ini, penting untuk membaca: Haedar Nashir, *ibid*., h. 7-35.

mendirikan sekolah-sekolah "terpadu" sendiri di bebagai daerah. Ini merupakan bentuk lain perkawainan Wahabi-Ikhwanul Muslimin yang berlangsung di Indonesia.

Memang, bantuan masjid dipandang berguna dan terhormat. Tapi ketika itu disertai dengan syarat agar mendukung partai politik tertentu, agar menerima ajaran tertentu, itu merupakan penyusupan ajaran sekte dan agenda politik. Mereka membangun mesjid bukan untuk menyediakan tempat ibadah, tapi untuk membangun sarana penyebaran ajaran dan kampanye partai. Ini merupakan aksi memanipulasi rakyat yang polos dengan ideologi dan dana asing (Arab Saudi) yang luar biasa besar untuk merebut kekuasaan di negara Republik Indonesia, sementara pada saat yang sama mereka meneriakkan adanya ancaman asing (Barat) terhadap Indonesia. Karena alasan inilah Muhammadiyah mengeluarkan SKPP Muhammadiyah Nomor 149/Kep/I.0/B/2006 yang melarang dan mengamanahkan para pengurus agar mengusir PKS keluar dari Muhammadiyah,

> "...Muhammadiyah pun berhak untuk dihormati oleh siapa pun serta memiliki hak serta keabsahan untuk bebas dari segala campur tangan, pengaruh, dan kepentingan pihak manapun yang dapat mengganggu keutuhan serta kelangsungan gerakannya" (Konsideran poin 4). "Segenap anggota Muhammadiyah perlu menyadari, memahami, dan bersikap kritis bahwa seluruh partai politik di negeri ini, termasuk partai politik yang mengklaim diri atau mengembangkan sayap/kegiatan dakwah seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah benar-benar partai politik. Setiap partai politik berorientasi meraih kekuasaan politik. Karena itu, dalam menghadapi partai politik manapun kita harus tetap berpijak pada Khittah Muhammadiyah dan harus membebaskan diri dari, serta tidak menghimpitkan diri dengan misi,

kepentingan, kegiatan, dan tujuan partai politik tersebut." (Keputusan poin 3)

Gaya-gaya seperti ini, yakni menyediakan dan memperbaiki sarana peribadatan (masjid) tetapi untuk tujuan politik, mengingatkan pada kasus ketika KNIL berusaha masuk ke Indonesia dengan membonceng pada Pasukan Sekutu. Usaha demikian selalu dilakukan karena sudah sejak awal merasa bahwa kedatangannya akan ditentang dan ditolak, sejak awal tidak ada rasa percaya diri karena memang berlawanan, bahkan bertentangan, dengan tradisi keberagamaan bangsa Indoensia.

Ada kontradiksi yang jelas antara tradisi dan budaya keberagamaan bangsa Indonesia dengan kelompok-kelompok garis keras yang secara kultural berkiblat ke Timur Tengah. Tradisi keberagamaan bangsa Indonesia kental dengan nilai-nilai spiritualitas yang diwarisi dari generasi ke generasi, tradisi yang sebenarnya dimusuhi oleh kelompok-kelompok garis keras. Tradisi ini mengajarkan dan menekankan pola hidup berdampingan secara damai, baik dengan sesama manusia maupun alam, baik dengan yang berkeyakinan sama maupun beda, yang menerima perbedaan sebagai realitas dan kekayaan yang harus dihargai. Pola keberagamaan demikian tidak akan pernah lekang oleh panas dan tak akan pernah lapuk oleh hujan, akan selalu sesuai dengan perkembangan sejarah dan perkembangan hidup para penganutnya.

Memang, spiritualitas lebih menekankan rasa (*dzauq*) dalam beragama, sedangkan rasionalitas (*'aql*) menjadi pendorong di dalamnya. Ini adalah pola keberagamaan para nabi seperti dialami oleh Nabi Ibrahim as. dan Nabi Musa as. ketika mencari dan berusaha mengenal Allah swt. Nabi Muhammad saw. pun, ketika menjelaskan relasi 'ubûduyah manusia dengan Tuhan menyatakan, "Mengabdilah kepada-Nya *seakan-akan* kamu melihat-Nya. Namun jika kamu tidak melihat-Nya, sesungguhnya Dia melihatmu." Ungkapan *seakan-akan* menegaskan bahwa potensi inderawi (*hiss*)

dan rasional (*'aql*) memang berguna dalam beragama, namun ia harus dilampaui, kemudian rasa (*dzauq*) yang akan berperan penting dalam merasakan kehadiran Ilahi. Keluasan dan keluhuran ajaran dan pesan agama tidak bisa dibingkai semata oleh akal dan aktivitas jasmaniah, apalagi ideologi dan platform partai politik. Ia hanya bisa ditampung oleh keluasan rasa, kelapangan hati. Dalam konteks inilah, firman Allah swt. dalam hadits kudsi yang menyatakan, "Bumi dan langit-Ku tidak mampu menampung-Ku, tetapi hati hamba-Ku yang beriman," harus direnungkan secara mendalam. Maka penolakan atas spiritualitas jelas merupakan sebuah arogansi beragama. Dan inilah, terutama, yang ditolak oleh kelompok-kelompok garis keras.

Kelompok-kelompok garis keras sangat berbeda, bahkan hingga tingkat tertentu bertentangan, dengan tradisi dan keberagamaan spiritualistik ini. Mereka telah mereduksi agama menjadi sebatas kerangka tanpa daging, bahkan tanpa jiwa dan perasaan. Hal ini disebabkan pemahaman mereka yang harfiah dan tertutup, yang menyapih agama dari konteks historis, sosial, dan budaya pada masa risalah dan sesudahnya hingga saat ini. Pendekatan ini telah membuat mereka terpaku pada huruf-huruf dan tidak menyadari adanya makna-makna yang lebih luas daripada sekedar yang terkandung dalam huruf-huruf tersebut. Keluhuran dan keluasan agama direduksi sebatas makna-makna harfiah yang tertutup. Tiadanya kesadaran ini pula yang telah membuat mereka membuat klaim-klaim kebenaran sepihak dan pada saat yang sama memvonis salah dan sesat setiap yang berbeda, karena mereka tidak mampu memahami realitas batin pihak lain. Padahal keberagamaan seseorang tidak diukur oleh aktivitas jasmaniah maupun intelektual, melainkan oleh kedalaman hati tanpa menafikan keduanya.

Sikap monolitik dalam beragama tidak pernah memberi ruang pada perbedaan. Dengan klaim-klaim teologis pula, mereka ingin menegaskan bahwa hanya merekalah yang benar, dan karena itu akan termasuk dalam kelompok yang selamat (*mâ ana 'alaih wa*

ash-hâbî). Tuduhan-tuduhan kafir dan musyrik kepada orang lain jelas merupakan pembunuhan karakter, rekrutmen psikologis, dan sangat politis. Sulit mencari landasan teologis untuk membenarkan tuduhan-tuduhan demikian. Karena, andai mereka memang memiliki pengamalan keagamaan yang tulus, keyakinan keagamaan yang luas dan mendalam, tentu hati mereka akan lapang melebihi keluasan langit dan bumi, sehingga tidak akan pernah sesak oleh keragaman maupun perbedaan, bahkan dengan pertentangan sekalipun. Keberagamaan yang tulus tidak akan menyediakan ruang untuk kebencian, akan selalu berpikir positif (*husn al-zhann*) terhadap siapa pun dan lebih mewaspadai realitas dirinya. Sehingga, ketika Kanjeng Nabi Muhammad saw. menyatakan bahwa umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan, Muslim yang sejati tidak akan sibuk mencari siapa yang tidak atau belum termasuk ke dalam *mâ ana 'alaih wa ash-hâbî* sehingga pantas dikafirkan, tetapi akan berpikir apakah dirinya sudah memenuhi kategori tersebut.

Keberagamaan yang monolitik jelas menjadi ancaman tidak hanya terhadap keamanan dan keselamatan bangsa Indonesia, tetapi juga terhadap budaya dan tradisi keberagamaan bangsa Indonesia. Pemaksaan selalu menelan korbannya sendiri, cukuplah tragedi Padri sekali saja, dan jangan sampai bahaya laten komunisme terulang lagi. Kelompok-kelompok garis keras tidak hanya mengklaim sebagai yang paling benar di antara sesama Muslim yang lain, mereka berjuang untuk mengubah tradisi dan budaya bangsa Indonesia. Disadari atau tidak, ini merupakan proyek formalisai agama yang akan berujung —salah satunya— pada realisasi wahabisasi global, penegakan Khilafah Islamiyah, atau Islamisasi negara Indonesia dan melenyapkan NKRI. Karena itu, melawan formalisasi Islam bagai sekali mengayuh dayung dua—tiga pulau terlampaui: dengan menolak formalisasi Islam, kita akan menyelamatkan Islam dari reduksi dan pembajakan demi kepentingan politik, menyelamatkan Pancasila, NKRI, budaya dan tradisi keberagamaan spiritual bangsa Indonesia, dan mengilhami umat Islam

di negara-negara lain menolak ajaran palsu gerakan garis keras dan kembali kepada pesan-pesan luhur agama Islam yang benar-benar merupakan *rahmatan lil-'âlamîn*.

Bab III

Ideologi dan Agenda Gerakan Garis Keras di Indonesia

Pendahuluan

Setiap Muslim pasti yakin bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Mahatahu, Mahakuasa, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan seterusnya. Tak ada satu pun di dunia ini yang lepas dari pengetahuan, kekuasaan, dan kasih sayang-Nya. Ringkasnya, Tuhan mengetahui dan mengatur semua aspek kehidupan makhluk-Nya, termasuk manusia. Namun demikian, kemahakuasaan-Nya dikendalikan oleh kasih sayang-Nya (*al-Rahmân 'alâ al-'arsy-istawâ* [QS. 20: 5]).[1] Dengan kekuasaan-Nya, Allah swt. bisa saja membuat semua manusia menjadi satu umat saja (QS. 11: 118), tapi itu tidak dilakukan-Nya dan Dia biarkan makhluk-Nya memilih apakah akan beriman atau tidak (QS. 18:

---

1. Dalam tradisi tafsir, terutama yang berorientasi *isyârî*, ayat ini lazim dipahami sebagai indikasi bahwa kasih sayang Allah mengendalikan kekuasaan-Nya. Al-Rahmân merupakan ungkapan yang secara eksplisit bermakna kasih sayang, sedangkan *'arsy* yang secara literal bermakna singgasana, dipahami sebagai simbol kekuasaan. Karena itu, sekalipun Allah swt. Mahakuasa, kekuasaan-Nya secara efektif berada dalam kontrol kasih sayang-Nya.

29), bahkan Dia nyatakan bahwa tidak boleh ada paksaan dalam agama (QS. 2: 256).

Untuk kebaikan manusia, melalui para utusan-Nya Dia ajarkan hal-hal yang baik (*haqq*) dan yang buruk (*bâthil*), yang harus dilakukan (*wâjib*) dan dilarang (*haram*), yang sebaiknya dilakukan (*sunnah*) dan tidak (*makrûh*), di samping yang bebas untuk dilakukan atau tidak (*ibâhah*). Ketentuan-ketentuan ini menjadi tangga pertama bagi manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Karena hanya dengan semakin dekat dia akan semakin tahu apa saja yang Allah swt. inginkan dan harus dia lakukan sesuai dengan kehendak-Nya. Dalam kaitan ini, Nabi Muhammad saw. meriwayatkan bahwa Allah swt. berfirman, "Hamba-Ku terus mendekatkan diri kepada-Ku dengan melaksanakan amal-amal yang menyenangkan (*nawâfil*) hingga Aku mencintainya. Dan manakala Aku mencintainya, Aku menjadi pendengaran yang dengannya dia mendengar, menjadi kedua matanya yang dengannya dia melihat, menjadi lisannya yang dengannya dia berucap, dan menjadi kedua kakinya yang dengannya dia berjalan."[2] Ketika Allah swt. menjadi pendengaran, penglihatan, lisan, dan kedua kakinya, saat itulah sang hamba hanya melakukan apa yang Allah swt. kehendaki. Dengan kata lain, Allah swt. mengatur semua aspek kehidupannya. Ini semestinya menjadi aspirasi setiap Muslim sebagai perwujudan keikhlasan dirinya menjadi hamba Allah swt. Anehnya, para agen garis keras yang *semuci* (berlagak paling suci) dan sok tahu kehendak Tuhan untuk semua manusia, sangat bernafsu untuk mengatur setiap aspek kehidupan manusia dengan pemahaman mereka yang terbatas, kaku, relatif dan tidak manusiawi.

Dengan keberagamaan yang senantiasa berada dalam kehadiran Ilahi (*ihsân*) seperti dijelaskan di atas inilah umat Islam moderat,

---

2. Selengkapnya, hadits qudsî ini berbunyi: *Lâ yazâl al-'abd yataqarrabu ilayya bi al-nawâfil hatta uhibbahu. Fa-idza ahbabtuhu, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi, kuntu 'ainâhu allati yubshiru biha, kuntu lisanahu alladzi yanthiqu bihi, kuntu rijlâhu allati yabthisyu biha.*

Ahlussunnah wal Jamâ'ah, memahami diktum: Allah swt. mengatur semua aspek kehidupan manusia. Hamba yang sejati, yang dengan sempurna berserah diri kepada Allah swt., yang mencapai kualitas *mukhlish* (murni tanpa noda) dalam beragama, mampu menunaikan amanah kekhalifahan untuk memakmurkan bumi dan melestarikan rahmat untuk seluruh makhluk-Nya (*khalîfat Allah fil-ardl*). Kemampuan ini tidak berasal dari intelektualitas, pemahaman-pemahaman tekstual, maupun kekuasaan politik, tetapi dari kesadaran spiritual dan kelapangan kalbu yang mampu menampung kehadiran Ilahi.[3] Karena itu, dakwah mereka yang telah mencapai kualitas *Ihsân* (*muhsinîn*) akan berupa usaha menumbuhkan kesadaran spiritual agar orang lain bisa benar-benar berserah diri sepenuhnya kepada Allah swt., merasakan kehadiran Ilahi, dan segala aspek dalam hidupnya diatur oleh Allah swt. sebagai hamba-Nya. Para *muhsinîn* menyadari bahwa syarî'ah bukanlah tujuan, tetapi jalan. Kesadaran spiritual akan mengendalikan manusia apakah akan menempuh jalan yang benar (*haqq*) atau tidak (*bâthil*).

Pemahaman dan keberagamaan kelompok-kelompok garis keras sangat jauh berbeda dibandingkan pemahaman dan keberagamaan umat Islam moderat. Pada satu sisi, sebagai akibat dari interpretasi literal, sempit, dan terbatas atas ajaran Islam, mereka lebih menekankan keberagamaan lahiriah dan abai terhadap yang batiniah.[4] Simbol, identitas dan kuantitas bagi mereka lebih pen-

---

3. Dalam sebuah hadits qudsi diriwayatkan, Allah swt. berfirman: "Langit dan bumi-Ki tidak mampu menampung-Ku, tapi hati kalbu hamba-Ku yang beriman." Keimanan yang sempurna tidak akan menyisakan ruang bagi apa pun yang tak terpuji, semua yang ditampungnya senantiasa dalam kesesuaian dengan kehendak Ilahi.

4. Dalam kaitan ini penting diingat bahwa kelompok-kelompok garis keras secara umum mengabaikan spiritualitas, bahkan secara keliru menganggapnya sebagai bid'ah dan khurafat. Hal ini merupakan dampak langsung dari obsesi politik dan kekuasaan duniawi mereka, di samping orientasi literal, sempit, dan terbatas dalam memahami sumber-sumber ajaran Islam. Bagi Wahabi misalnya, memerangi tasawuf merupakan salah satu proyek utama mereka. Karena itu, wa-

ting dibandingkan tingkat kesadaran spiritual dan kualitas dalam beragama. Karena itu, mereka ingin memaksakan pemahamannya tentang Islam kepada siapa pun melalui formalisasi dan implementasi hukum Islam, mendirikan Negara Islam atau Khilafah Islamiyah, dan hal-hal terkait lainnya.

Mereka menduga Tuhan akan puas kalau ada kekuasaan politik atau penguasa yang memerintah atas nama-Nya. Mereka berimaginasi Allah swt. akan bahagia jika hukum Islam versi mereka menjadi hukum positif atau hukum negara. Bahkan —secara tak sadar— ada yang berpandangan bahwa Tuhan tidak berdaya sehingga Islam perlu dibela, atau barangkali hal ini hanya dalih belaka untuk agenda tersembunyi dalam meraih kekuasaan. Semua ini tidak bisa dipisahkan dari kebodohan. Memang, pengetahuan yang sedikit sangatlah berbahaya. Kebodohan sering membuat seseorang arogan dan menolak kebenaran semata karena tidak mampu memahami atau merasakannya.[5] Dalam kaitan ini terlihat signifikansi

---

habisasi global sebenarnya adalah juga aksi pendangkalan keberagamaan umat Islam. Sedangkan bagi Ikhwanul Muslimin, implementasi syari'ah sebagai hukum positif dan merebut kekuasaan menjadi obsesi utama. Adapun Hizbut Tahrir, obsesi merebut kekuasaan untuk mendirikan khilafah internasional adalah proyek utamanya. Dari ketiga gerakan transnasional yang beroperasi di Indonesia ini, tak satu pun yang berorientasi pada usaha menumbuhkan kesadaran spiritual dalam beragama. Kalau tidak memusuhi dan membasmi tasawuf, minimal mengabaikan dan menyisihkannya dari tradisi keberagamaan umat Islam.

5. Jalaluddin Rumi menceritakan hikayat penolakan eksistensi matahari oleh kelelawar. Konon, sayup-sayup antara tidur dan jaga kelelawar mendengar obrolan masyarakat burung tentang indahnya Matahari Sumber Cahaya. Begitu bangun, kelelawar berusaha melihat matahari. Karena silau dia pejamkan matanya dan kembali ke sarang, tidur lagi. Senjahari dia bangun untuk mencari makan, dan kembali mencari matahari yang sudah terbenam. Dengan sombong dia berteriak, "Kalian semua bohong dan salah, Matahari yang kalian bicarakan tidak ada, hanya ilusi. Aku sudah mencari kian kemari, tidak ada jejak eksistensinya." Siapa pun yang tahu pasti akan tahu, siapa pun yang bodoh dan tidak sadar akan kekurangannya, akan dengan sombong merasa sebagai yang paling benar sehingga menolak kebenaran yang tidak sesuai dengan pemahamannya atau perasaannya.

sebuah riwayat, "Carilah ilmu walau ke negeri Cina!" (*uthlub al-'ilm walau bi al-shîn*)[6] dan Ilmu adalah cahaya (*al-'ilm nûr*) sedangkan kebodohan berarti kegelapan. Tidak ada yang bisa diharapkan dari kegelapan selain kesesatan dan kesalahan, serta pemahaman secara parsial dan dangkal.[7]

Jika formalisasi agama menjadi tujuan, ketika beragama dan menganut Islam pun menjadi tujuan, maka formalitas dan agama menjadi tuhan baru yang diperjuangkan sehingga tidak ada lagi jalan untuk meraih *ridlâ* Allah swt. Semua ini adalah kesalahan teologis yang harus diluruskan, bahkan harus dilawan jika disebarkan kepada orang lain. Setiap usaha formalisasi agama adalah murni bertujuan politik, untuk meraih kekuasaan. Jika dikatakan bahwa itu berdasarkan fakta bahwa Allah swt. mengatur semua aspek kehidupan manusia, ini jelas sebuah kesalahpahaman teologis yang harus ditolak. Bukan bentuk negara maupun formalisasi agama yang dibutuhkan untuk menjadi muslim yang baik, tetapi keikhlasan kesadaran spiritual untuk selalu merasakan kehadiran Ilahi (*ihsân*). Maka klaim untuk mewujudkan masyarakat Islami melalui implementasi syarî'ah maupun pendirian Negara Islam atau Khilafah Islamiyah adalah semata manuver politik untuk meraih kekuasaan.

Ideologi kelompok garis keras adalah totalitarian-sentralistik dan menjadikan agama sebagai referensi teologis. Maka klaim teo-

---

6. Riwayat ini sangat masyhur hingga dianggap sebagai hadits. Sangat berharga dalam kaitan ini mengemukakan riwayat lain berkaitan dengan aktivitas belajar, "*Man thalab al-'ilm li arba'in dakhala al-nâr—au nahwa hadzih al-kalimah—: liyubâhiya bih al-'ulama, au liyimâriya bih al-sufahâ', au liyashrifa bih wujuh al-nâs ilaih, au liya'khudza bih min al-umarâ*," (Siapa pun yang belajar untuk empat tujuan maka akan masuk neraka —atau dengan redaksi lain— untuk kebanggaan di hadapan para ulama, untuk berdebat dengan orang-orang awam, untuk mendapat perhatian orang lain, atau untuk mendapatkan sesuatu dari pemerintah) (Abu Muhammad 'Abdullah ibn 'Abdurrahman ibn al-Fadll ibn Bahram al-Darimi, *Sunan al-Dârimî* (Kairo: Mauqi' al-Wizârat al-Auqâf al-Mishriyah, tt.), vol. I, h. 410).

7. Hikayat *Meraba Gajah dalam Gelap* dengan gamblang menuturkan hal ini, baca Epilog buku ini.

logis yang mereka sampaikan sebenarnya menjadi manuver politik untuk berlindung dari serangan siapa pun dan sekaligus untuk menyerang siapa pun yang tidak mendukung atau bahkan menentang mereka, yaitu: agama menjadi alat mereka untuk meraih kekuasaan. Para agen garis keras dengan licik memanfaatkan keyakinan umat Islam bahwa Allah swt. mengatur semua aspek kehidupan manusia, menjadikannya sebagai *entry-point* bagi garis keras sendiri untuk mengatur dan menguasai rakyat. Sedangkan agenda garis keras adalah menjadi wakil Tuhan di bumi (*khalîfat Allâh fil-ardl*). Padahal, yang bisa menjadi khalifah Allah di bumi hanyalah mereka yang dalam beragama telah mencapai kualitas *muhsinîn* dan *mukhlishîn*, yakni para Wali Allah swt.

Para sufi memahami syari'ah sebagai jalan, bukan tujuan. Karena itu mereka sangat toleran dan inklusif ketika bertemu dengan para penempuh jalan yang berbeda. Mereka sadar bahwa para penempuh jalan (umat beragama) sama-sama ingin mendekat kepada Tuhan, asal dari semua yang ada. Kesadaran atas kesamaan tujuan inilah yang membuat mereka bersikap toleran terhadap perbedaan. Ada perbedaan-perbedaan artifisial namun juga persamaan-persamaan substansial, baik di antara para penganut agama yang sama maupun yang berbeda. Karena itu para sufi, umat beragama yang sangat menekankan aspek spiritual, tidak pernah berpikir untuk memaksa siapa pun menempuh jalan yang sama seperti yang dilaluinya, karena jalan apa pun yang ditempu—tujuannya sama. Menurut mereka, setiap orang mempunyai jalannya sendiri sesuai dengan kecenderungan pribadi dan keyakinan yang dianutnya dalam mendekat kepada Tuhan. Syari'ah bagi mereka adalah jalan-jalan yang jika diikuti dengan benar akan mengantarkan siapa pun yang melaluinya kepada asal semua yang ada, Allah swt. Demikian sebaliknya, jika jalan yang seharusnya digunakan sebagai sarana kemudian diubah dan diyakini sebagai tujuan, para penempuh jalan hanya akan melangkah di tempat, tidak akan pernah sampai pada Tujuan akhir yang seharusnya mereka capai. Di tengah keheranan-

nya mereka akan berusaha mengajak, atau bahkan memaksa, setiap penempuh jalan yang lain untuk bersama-sama menjadikan jalan sebagai tujuan karena mereka ingin punya banyak teman dan tidak tertinggal dalam perjalanan, tanpa menyadari bahwa mereka sendiri tidak pernah bergerak lebih maju dan lebih dekat kepada Tujuan.[8]

Dalam laporan penelitian berikut ini akan menjadi jelas bagaimana retorika para agen garis keras dalam menganalisis permasalahan yang dihadapi umat Islam telah mereduksi pesan-pesan luhur Islam, bahkan mendistorsi keluhuran Islam yang merupakan *rahmatan lil-'âlamîn*. Misalnya, mereka merendahkan, bahkan mengkafirkan, siapa pun yang berbeda atau bahkan bertentangan paham, keyakinan, atau agama dari mereka. Di samping merusak keluhuran ajaran Islam dan harus diluruskan, semua ini juga mengancam keamanan bangsa, kelestarian Pancasila, dan keutuhan NKRI. Penting disadari bahwa retorika mereka yang dikemas secara teologis menjadi pengantar pada aksi-aksi kekerasan dalam berbagai bentuknya.

Ideologi Totalitarian-Sentralistik dan Politisasi Syari'ah

Pandangan ideologis yang bersifat totalitarian-sentralistik terhadap syari'ah membawa kepada konsekuensi ketentuan hukum yang totaliter dan sentralistik pula. Artinya, hukum harus mengatur semua aspek kehidupan umat tanpa kecuali dan negara mengontrol pemahaman dan aplikasinya secara menyeluruh. Itu sebabnya, dalam pandangan ini, pengamalan syari'ah tidak dapat dipisahkan

---

8. Secara harfiah syari'ah adalah jalan air, atau sungai. Melaluinya air akan mengalir secara alamiah sesuai dengan watak dasarnya dan akan terus mengalir hingga mencapai laut, asal dan tujuan mereka. Dengan pemaknaan dasar semacam ini, siapa pun yan mengikuti jalan dengan benar maka dia akan sampai pada Asal dan Tujuan diri-Nya (*al-Awal wal-Akhir*), walaupun tidak semua orang sadar tentang Asal dan Tujuan mereka (untuk ilustrasi lebih lengkap, baca dalam: Muhammad ibn Mukrim ibn Manzhur al-Ifriqi al-Mishri, *Lisân al-'Arab* (Beirut: Dâr al-Shâdir, tt.), vol. 8, h. 175).

dari politik. Ideologi totalitarian-sentralistik ini sangat menonjol dalam penampilan kelompok-kelompok garis keras di Indonesia akhir-akhir ini, seperti dalam politisasi syari'ah yang muncul dari pemahaman mereka yang sempit dan terbatas terhadap syari'ah.

Fenomena politisasi syari'ah tampak menonjol dalam penelitian ini. Sebagai contoh, di beberapa tempat di mana gerakan penegakan syari'ah muncul dengan kuat seperti di Padang, Aceh, Makassar dan Palembang banyak kegiatan ibadah dilakukan dengan tujuan ganda, selain untuk penegakkan hukum Islam juga penegasan sikap dan identitas politik terhadap isu-isu nasional. Di Padang, pengajian-pengajian akbar diselenggarakan oleh KPPSI untuk sosialisasi dan kampanye percepatan penegakan syari'ah dalam kehidupan masyarakat di daerah ini. Di Palembang, FU3-SS mempelopori sepenuhnya kebersatuan antara Ulama dan Umara dalam kegiatan-kegiatan pengajian atau forum pertemuan lainnya. Demikian pula di kantong-kantong masyarakat lainnya, pertemuan-pertemuan ritual senantiasa diarahkan untuk mendorong masyarakat mendukung formalisasi hukum Islam di samping —tentu saja— penegasan sikap dan identitas politik kelompok-kelompok tersebut terhadap isu-isu sosial-politik secara umum.

Jadi, kebutuhan terhadap syari'ah itu bukan karena murni kebutuhan terhadap tatanan hukum (*rule of law*) atau kebenaran agama, melainkan karena kebutuhan penegasan identitas dan keuntungan politik (*political advantage*) kelompok-kelompok garis keras yang memiliki agenda politik dengan memainkan isu agama (syari'ah). Para politisi oportunis yang bekerjasama dengan kelompok-kelompok garis keras tidak peduli pada masa depan bangsa dan negara dan turut serta melakukan kudeta terhadap Konstitusi negara kita.

Dalam konteks politik kita mendapati jargon syari'ah banyak digunakan di berbagai daerah bukan sebagai identitas ketaatan seorang Muslim terhadap ajaran Islam tetapi sebagai simbol dan alat perlawanan terhadap dominasi politik negara (pemerintah

pusat). Hal ini tampak sekali dalam argumen-argumen yang dikemukakan oleh para responden yang nuansa politisnya lebih kental ketimbang persoalan kebutuhan substantif hukum itu sendiri. Dalam hal ini, syari'ah dijadikan alat politik untuk menampilkan identitas dan bukan murni alasan normatif ketaatan kepada ajaran agama. Fakta historis di Aceh memperkuat hal ini. Gerakan Aceh Merdeka, misalnya, muncul dan berkembang dari akar masalah yang kompleks yang hanya sedikit saja terkait dengan persoalan agama. Persoalan utama yang sebenarnya adalah kekecewaan Aceh terhadap pemerintah pusat, dan kontestasi antardaerah yang terjadi di Aceh.[9] Persoalan semacam itu juga menjadi latar belakang utama gerakan DI/TII. Kartosuwirjo, tokoh utama DI/TII –yang awalnya adalah salah seorang tokoh PSII dan keluar dari partai tersebut karena kekecewaan terhadap kebijakan partai– melakukan pemberontakan terhadap Pemerintahan Soekarno karena kekecewaannya atas kebijakan Soekarno. Hal ini terlihat dari dua surat rahasia yang dia kirimkan ke Soekarno.[10]

Di Aceh, kampanye penegakan syari'ah justru muncul dengan kuat setelah rekonsiliasi antara kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah Indonesia tercapai. GAM sendiri tampaknya sejak awal tidak pernah mengagendakan implementasi syari'ah dalam gerakan politik mereka. Maka tidaklah mengherankan kalau pada akhir-akhir ini gerakan penegakan syari'ah itu justru muncul dari kelompok-kelompok yang kecewa terhadap sikap melunaknya GAM terhadap pemerintah Republik Indonesia.

Wawancara dengan responden di daerah itu menunjukkan gejala munculnya kelompok-kelompok puritan di daerah pesisir pantai Aceh Barat (Meulaboh), dengan kecenderungan untuk

---

9. Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia,* (Jakarta: LP3ES, 1987) h. 178-197.

10. B. J. Boland, *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*, (Leiden: The Hague-Martinus Nijhoff, 1982), h. 55-62.

mengimplementasikan aturan-aturan syari'ah lebih kuat lagi dalam kehidupan individual maupun masyarakat. Secara umum, penelitian ini juga mendapati responden di Aceh yang dengan kuat mendukung pelaksanaan syari'ah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara —walaupun pendapat mereka kebanyakan masih dalam tataran ide yang abstrak sifatnya— dan bukannya aspek praktis aturan hukum yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Sejalan dengan hal itu, sekarang ini Qanun Syari'ah juga sudah secara resmi diimplementasikan di Aceh sebagai instrumen hukum yang secara konstitusional mengatur kehidupan masyarakat Muslim di daerah itu. Kita melihat, pro—kontra juga muncul di kalangan masyarakat Aceh tentang bagaimana nilai-nilai syari'ah itu dapat dimunculkan dalam aturan kehidupan sehari-hari. Namun, terlepas dari perbedaan dalam hal detailnya, para responden mengatakan bahwa aturan hukum syari'ah harus mereka implementasikan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Aceh paska rekonsiliasi GAM-RI.

Secara umum, penelitian ini juga menunjukkan betapa kebutuhan penegakan syari'ah lebih dilandasi oleh faktor kekecewaan terhadap situasi sosial-politik kontemporer masyarakat secara umum daripada semangat keberagamaan yang sebenarnya. Hampir semua responden berargumen bahwa syari'ah dibutuhkan sebagai solusi tepat bagi problem-problem kehidupan yang mereka hadapi. Mereka juga berargumen bahwa situasi krisis yang menimpa Indonesia tidak lain karena pembangunan masyarakat dan bangsa Indonesia yang terlalu berorientasi kepada negara-negara Barat. "Baik kapitalisme maupun liberalisme telah menjadi pegangan dalam membangun bangsa selama ini, karena itu pantaslah krisis menimpa negeri ini. Dalam kondisi seperti itu syari'ahlah yang menjadi solusinya," demikian argumen mereka. Seorang aktivis jamaah kampus di Yogyakarta menyatakan:

> Penyebab krisis politik: karena kita meyakini ada hukum yang lebih layak dan lebih baik dibandingkan hukum Islam. Akhirnya Islam tidak lagi dijadikan sebagai acuan. Paling sekadar moral dan ritual. Tapi dalam konteks solusi, Islam dijauhkan, karena ada satu asumsi bahwa hukum syari'ah itu tidak layak untuk menjadi solusi, apakah persoalan politik, sosial, ekonomi, dan lain-lain.

Aktivis lain menjelaskan hal senada:

> Sebenarnya satu saja yang harus dilakukan, mengajarkan, memberitahukan dan meyakinkan opini publik bahwa Islam punya aturan yang sifatnya sempurna. Artinya, Islam layak sebagai solusi, tidak perlu mengambil dari yang lain.

Padahal, seperti diyakini para ahli tafsir dan ulama, Islam bukan merupakan bagian terpisah dari agama-agam yang lain. Ia tidak datang sebagai sesuatu yang sama sekali baru. Bahkan bisa dikatakan, Islam adalah komplementer, melengkapi dan menyempurnakan, dan bukan sebagai alternatif yang menafikan lainnya.[11]

Secara normatif, aturan hukum dalam syari'ah yang banyak dipahami oleh responden adalah aturan yang rigid. "Sebagai hukum sakral," menurut mereka, "syari'ah bersifat rigid karena datang bukan dari sumber duniawi tetapi dari Tuhan yang mengetahui segala seluk beluk kehidupan manusia. Kehadiran syari'ah memang dimaksudkan untuk memperbaiki kehidupan manusia yang tidak beraturan; karena itu, manusialah yang harus mengikuti hukum Tuhan tersebut, bukannya hukum Tuhan yang harus mengikuti keinginan manusia. Hukum Tuhan harus tegas karena manusia

---

11. Penjelasan KH. Abduraahman Wahid dalam: *Lautan Wahyu: Islam sebagai Rahmatan lil-'Âlamîn*, episode 4: "Kaum Beriman," Supervisor Program: KH. A. Mustofa Bisri, ©LibForAll Foundation 2009.

memang cenderung suka dengan permainan dan ketidakseriusan." Tentu bisa diterima bahwa manusia harus mengukuti ajaran (hukum) agama yang dianutnya; masalahnya, siapa yang menafsirkan firman Tuhan ke tingkat hukum yang akan diregulasi dengan otoritas negara dan menjadi hukum positif. Haruslah ditekankan bahwa itu adalah pemahaman manusia atas firman Tuhan, maka diktum yang dihasilkan tidak bisa dikatakan sebagai hukum Tuhan.[12] Kesalahkaprahan cara pandang ini mendorong mereka bersikap totaliter dan absolutistik.

Ideologi dan orientasi seperti ini menghasilkan pemikiran tentang hukum Islam yang menekankan *corporal punishment* atau hukuman fisik terhadap pelanggar aturan syari'ah. Seorang responden di Padang berpendapat bahwa:

> Agar pencurian dapat diberantas maka hukuman bagi pelakunya adalah sesuai dengan syari'ah Islam, yaitu tangannya dipotong. Jika tetap mencuri lagi maka tangan yang satunya dipotong juga, bahkan kedua kakinya, hingga dibiarkan sampai mati. Itulah hukuman Islam, yang akan memberi efek jera bagi para pelakunya.

Orientasi hukuman fisik seperti itu tidak lain dipengaruhi

---

12. Para imam madzhab seperti Abu Hanifah, Malik ibn Anas, Muhammad ibn Idri al-Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal, menyuruh para muridnya untuk tidak menerima begitu saja hasil ijtihadnya. Mereka menyuruh murid-muridnya untuk meninjau kembali hasil ijtihadnya karena sekalipun pendapat hukumnya didasarkan pada sumber-sumber sakral yang mempunyai otoritas kebenaran, mereka sadar bahwa dirinya adalah manusia yang tidak mempunyai otoritas kebenaran. Abu Hanifa bahkan memperingatkan murid terdekatnya dengan mengatakan: "Celaka Engaku Yusuf. Apa yang aku katakan hari ini, aku ubah besok. Apa yang aku katakan besok, aku ubah lusa," karena Yusuf menerima dan mengikuti begitu saja pendapat gurunya. Lalu, bagaimana mungkin pendapat hukum mereka yang bukan mujtahid kemudian merasa berhak diundangkan dan dipaksakan kepada orang lain? Bahkan para imam madzhab dimaksud tidak pernah menyetujui fatwanya dijadikan madzhab resmi negara.

oleh filsafat hukuman yang bertujuan untuk memberikan efek jera yang sebesar-besarnya kepada pelaku kriminal dan rasa takut kepada orang lain. Pernyataan responden di atas hanya sekadar gambaran betapa syari'ah dipahami secara sangat dangkal dan dengan orientasi balas dendam sebagai suatu sistem hukum yang keras. Dalam pemahaman mereka, merupakan suatu hal yang pantas bagi pelanggar hukum untuk mendapatkan hukuman (fisik) yang sekeras-kerasnya sehingga tidak akan ada lagi keinginan untuk mengulangi perbuatannya. Efeknya, hukum Islam kehilangan semangat pendidikan dan tidak manusiawi. Di Aceh, tempat pemberlakuan hukum cambuk bagi pelanggar Qanun, stigma syari'ah sebagai hukum yang keras, kasar, dan primitif menjadi tak terbantahkan.

Orientasi hukuman yang bersifat badaniah seperti itu dapat dipahami bila kita hubungkan dengan orientasi ingin kembali pada masa formatif Islam yang akan membawa kepada pemikiran yang *backward looking*, dalam arti semangat mencontoh masa lalu dalam mengimplementasikan hukuman. Tradisi hukum Islam yang hadir di Arab pada abad ketujuh Masehi tentu wajar kalau memakai pendekatan fisik dalam memberikan hukuman, seperti cambuk, potong tangan, dan sebagainya, yang mungkin merupakan metode hukuman yang sesuai dengan kondisi masyarakat Arab yang tidak beradab pada saat itu. Tetapi ketika tradisi *corporal punishment* seperti itu hendak direvitalisasi dalam era sekarang, maka sangat mungkin justru akan berakibat buruk terhadap syari'ah sendiri karena munculnya kesan-kesan yang negatif terhadap tradisi hukuman semacam itu. Dari sekian banyak responden, tampaknya tak ada satu pun yang mendukung reinterpretasi ajaran-ajaran Syari'ah tentang filsafat hukuman tersebut, sehingga metode *corporal punishment* itu tampaknya masih akan menjadi *mainstream* bagi para aktivis gerakan garis keras di Tanah Air.

Tampak jelas bahwa para tokoh dan agen garis keras lebih melihat hukum pada tataran sanksi, bukan pada tujuannnya. Padahal, pada abad ke-12 M, al-Ghazali (*al-Mustashfâ min 'Ilm al-ushûl*, vol. I,

h. 284) yang disusul al-Syathibi (*al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Ahkam*, vol. I, h. 380), telah mengemukakan pandangan filosofis bahwa tujuan hukum (*maqâshid al-syarî'ah*) bukanlah pada pemberian sanksi kepada pelakunya, melainkan dalam melindungi lima hal primier (*al-dlarîriyyât al-khamsah*) kehidupan manusia, yakni perlindungan beragama, hidup, kekayaan, kehormatan atau keturunan, dan kesehatan akal. Dalam pandangan ini ketentuan hukum dipahami sebagai proses pendidikan, dan melihat para pelaku kejahatan secara positif—masih bisa diarahkan untuk lebih baik. Ayat-ayat hukum, seperti tentang pencurian misalnya, tentu diturunkan bukan untuk membuntungi tangan pencuri.

Lalu, apa motivasi atau *reasoning* mereka mempertahankan syari'ah dengan wajah semacam itu? Konsisten dengan analisis di atas, kecenderungan kepada hukuman fisik tampaknya lebih dilatarbelakangi keinginan para aktivis garis keras untuk menampilkan syari'ah dengan wajah yang berbeda dari yang biasa mereka lihat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, motivasi untuk menampilkan syari'ah seperti itu sejatinya muncul karena dorongan untuk tampil beda dan membangun identitas di tengah-tengah pluralisme tradisi hukum yang ada di Tanah Air.

Penampilan yang berbeda itu boleh jadi disengaja untuk menawarkan komoditas (syari'ah) yang betul-betul *distinct* sehingga nilai jual politiknya sangat laku di tengah masyarakat yang memang sedang mencari jawaban atas berbagai problema yang muncul. Di sini jelas, mengapa kelompok-kelompok garis keras menolak ide-ide pembaharuan syari'ah yang dilontarkan oleh kalangan reformis, sebagaimana mereka juga menolak pandangan Muslim moderat yang lebih menekankan sisi manusiawi dan pendidikan dalam pengamalan ajaran Islam. Dalam pandangan mereka, ide-ide pembaharuan hanya tipu daya para musuh Islam yang sengaja ingin menjauhkan umat Islam dari syari'ah. Mereka yakin bahwa pembaharuan syari'ah itu tidak diperlukan oleh umat Islam karena syari'ah itu *shalih li kulli zaman wa makan*, sesuai dengan

segala bentuk masyarakat dan perubahan waktu.

Siapa pun akan setuju bahwa syari'ah senantiasa sesuai sepanjang masa dan di semua tempat. Namun harus diingat bahwa, syari'ah dalam hal ini jangan direduksi pada fatwa-fatwa hukum yang merupakan hasil ijtihad para ulama. Dalam kasus ayat-ayat tentang pencurian misalnya, para ulama sepakat bahwa pesan perenial (*shalih li kulli zaman wa makan*) di dalamnya adalah larangan mencuri, bukan pada potong tangannya. Hal ini menjadi sangat jelas ketika 'Umar ibn al-Khaththab, misalnya, tidak memotong tangan seorang pencuri ketika dia menjadi Amirul Mukminin. Sialnya, para agen garis keras telah mereduksi —bisa jadi karena pengetahuannya sangat terbatas— syari'ah sebagai fatwa-fatwa dan diktum-diktum hukum, sekalipun yang pertama (*syari'ah*) bersifat perenial namun yang kedua (fatwa) tentu sangat terikat dengan ruang dan waktu.

Obsesi Penegakan Syari'ah

Seperti diketahui, ide dan aspirasi pendirian negara Islam di Indonesia telah melahirkan beragam respon dan tafsiran di masyarakat, baik di kalangan Muslim maupun non-Muslim. Ada yang berpandangan, isu negara Islam sengaja dihembuskan untuk mendiskreditkan kelompok-kelompok Islam, tapi sebagian yang lain mengakui dengan terus terang bahwa ide dan aspirasi pendirian negara Islam dewasa ini benar-benar ada dan akan direalisasikan.[13] Secara historis, Negara Islam Indonesia (NII) atau Darul

13. Partai-partai bearasas Islam seperti PKS, pada umumnya menolak tuduhan akan mendirikan, atau setidaknya memfasilitasi pendirian, negara Islam. Namun KH Abdurahman Wahid menyatakan bahwa aspirasi pendirian negara Islam itu memang ada. (Dari wawancara yang muncul di Reuters News Service 10 Juli 2008, "Indonesian Islamist party eyes polls and presidency"). Sementara itu kalangan non-Muslim pada umumnya bersikap objektif dengan melihat kekuatan politik yang ada. Jika partai-partai berhaluan kebangsaan masih menguasai parlemen maka aspirasi negara Islam tidak akan terwujud. (Lihat, Harold Crouch, "The Recent Resurgence of Political Islam in Indonesia," dalam

Islam (DI) pernah dideklarasikan oleh S. Maridjan Kartosuwirjo di Jawa Barat, yang kemudian diikuti oleh Daud Beureuh di Aceh dan Kahar Muzakkar[14] di Sulawesi Selatan. Saat ini, Aceh telah menerapkan hukum Islam, sementara beberapa daerah di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Syari'ah Islam.

Apakah perkembangan di tiga daerah itu merupakan wujud dari gejala keberhasilan ide negara Islam, yang kelak akan diikuti oleh daerah lain melalui efek domino? Belum jelas benar, memang. Akan tetapi, isu penegakan syari'ah Islam seperti yang terlihat dalam kasus keluarnya Perda-perda Syari'ah memang telah memunculkan spekulasi yang mengarah pada ide pendirian negara Islam. Apalagi terbukti bahwa beberapa gerakan penegakan syari'ah tersebut mengaitkan dirinya dengan perjuangan NII atau DI, seperti di Cianjur (NII KW9) dan Sulawesi Selatan (melalui Komite Persiapan Penegakan Syari'ah Islam atau KPPSI yang dikaitkan dengan perjuangan Kahar Muzakkar).[15]

Penerapan syari'ah Islam secara formal jelas bertentangan dengan konstitusi. Namun ada celah yang bisa ditempuh untuk mencapai tujuan itu, yakni melalui wewenang otonomi daerah.[16]

Anthony L. Smith, ed., *Islam in Southeast Asia: Analysing Recent Development*, Singapore, ISEAS, 2002, h. 2). Kendati begitu, terdapat pandangan yang umum di kalangan non-Muslim bahwa sebenarnya aspirasi pendirian negara Islam tidak pernah mati di kalangan Islam. Lihat, misalnya, Patmono SK, "Aspirasi Islam dalam Konteks Negara Bangsa," dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (eds.), *Menjadi Indonesia: 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara* (Jakarta; Mizan dan Yayasan Festival Istiqlal, 2006), h. 599.

14. Nama ini hendaknya tidak dikaburkan dengan A. Kahar Muzakkir, tokoh Muhammadiyah yang ikut dalam perumusan dan penerimaan Pancasila pada 1945.

15. Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia hingga Nigeria* (Jakarta: Alvabet, 2004), h. 83 dan 89.

16. Wewenang otonomi daerah dimungkinkan setelah keluarnya Undang-Undang No 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini menyerahkan 11 kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yakni

Para eksponen gerakan garis keras bekerjasama dengan politisi dan pejabat oportunis di daerah memanfaatkan otonomi daerah untuk memberlakukan syari'ah Islam secara formal melalui Perda-perda. Artinya, proses mengislamkan negara melalui penerapan syari'ah secara konstitusional adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Maka strategi yang ditempuh adalah "desa mengepung kota," yakni melalui formalisasi syari'ah di daerah-daerah dengan Perda-perda Syari'ah. Nantinya, ketika semakin banyak daerah di tanah air yang menerapkan syari'ah sebagai hukum regional, maka langkah menjadikan syari'ah sebagai hukum nasional dan pendirian Negara Islam hanya soal waktu saja. Hal ini bisa disimak dari statemen seorang proponen penegakan syari'ah bahwa, "Kalau masyarakat sudah Islami, syari'ah Islamnya jalan, maka jadi negara Islam dengan sendirinya tanpa diucapkan."[17]

Saat ini tujuan mereka sudah semakin dekat, yang terlihat dengan pengakuan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2008 bahwa Perda-perda Syari'ah tidak inkonstitusional. Pengakuan MK memang bisa menjadi bukti legalitas formil bahwa Perda-perda Syari'ah konstitusional. Tetapi secara materiil harus disadar bahwa Perda-perda Syari'ah bersifat sektarian, tidak mewakili kepentingan bangsa Indonesia secara keseluruhan, hanya mengakomodasi kepentingan sekelompok kecil dari mayoritas umat Islam, bahkan mengabaikan minoritas non-Muslim. Pengakuan MK ini tentu tidak bisa dilepaskan dari atmosfer dan arah angin pemerintah lima tahun terakhir ini. Pengakuan MK ini juga menunjukkan bahwa Indonesia sekarang sepertinya sedang bergerak dan bergeser dari Ne-

---

bidang pertanahan, pertanian, pendidikan dan kebudayaan, tenaga kerja, kesehatan, lingkungan, pekerjaan umum, transportasi, perdagangan dan industri, investasi modal dan koperasi. Ada lima bidang yang masih menjadi wewenang pemerintah pusat yaitu politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, kebijakan moneter dan fisikal, serta agama. Lihat pasal 7 UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah.

17. Habib Rizieq Shihab, "Jika Syari'ah Islam Jalan, Maka Jadi Negara Islam," Wawancara Jurnal *Tashwirul Afkar*, Edisi No. 12 tahun 2002, h. 104.

gara Pancasila menuju Negara Islam (baca: Islam versi garis keras).

Suasana di Indonesia saat ini bagaikan kodok dalam tempayan di atas tungku untuk direbus, dan sudah dimasukkan sejak air masih dingin. Secara perlahan tapi pasti, tanpa menyadari bahwa dirinya sedang menjalani proses pembunuhan, kodok diam saja dan rileks di dalam tempayan. Pada saat dia sadar, semua sudah terlambat. Penyusupan ideologi memang tidak dirasakan oleh banyak orang gerakan ideologi sering tidak dirasakan dan disadari oleh mereka yang dimasuki. Maka secara sistematis berkembang menjadi besar dan merasuk.... dengan demikian, gerakan ideologis seperti itu akan semakin mekar dan berekspansi secara sistemik, yang dikemudian hari baru dirasakan sebagai masalah serius tetapi keadaan sudah tidak dapat dicegah dan dikendalikan karena telah meluas sebagai gerakan yang dianut oleh banyak orang.[18]

Ada beberapa alasan mengapa akhir-akhir ini muncul tuntutan penerapan syari'ah secara legal formal. Di antara alasan itu, yang terpenting, adalah pandangan bahwa Islam merupakan agama sempurna yang meliputi semua cara hidup secara total. Maka Islam harus dijadikan sebagai satu-satunya referensi dalam memecahkan berbagai permasalahan bangsa. Lalu lahirlah slogan semacam: "Selamatkan Indonesia dengan syari'ah" (HTI),[19] atau "Penegakan syari'ah melalui institusi negara merupakan satu-satunya jalan keluar untuk mengatasi kemelut bangsa" (MMI),[20] atau "krisis multidimensi akan berakhir dengan diberlakukannya syari'ah Islam" (FPI),[21] atau "Islam adalah solusi" (PKS),[22] yang

---

18. Haedar Nashir, *Manifestasi Gerakan Tarbiyah: Bagaimana Sikap Muhammadiyah?* Cet. Ke-5 (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), h. 59.
19. Hizbut Tahrir Indnesia, *Selamatkan Indonesia dengan Syari'ah* (Jakarta, HTI Press, 2006).
20. Pandangan MMI, lihat dalam Jamhari dan Jajang Jahroni, eds., *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), h. 50.
21. Togi Simanjuntak, *Premanisme Politik* (Jakarta: ISAI, 2000), h. 54.
22. Visi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), lihat www.pk-sejahtera.org, "Visi dan Misi".

menjadi obsesi kelompok-kelompok garis keras.

Selain itu, tuntutan penerapan hukum Islam juga didesak oleh keinginan yang kuat untuk menampilkan identitas keislaman yang khas di tengah percampuran identitas dalam arus globalisasi dunia.[23] Di samping itu, faktor korupsi, tidak adanya jaminan kepastian hukum, proses peradilan yang tidak independen dan sering direcoki berbagai kepentingan, juga telah memberi alasan pada kelompok-kelompok garis keras untuk menawarkan alternatif hukum, walau permasalahan yang sebenarnya bukan pada aspek diktum hukum melainkan aparat hukum.

Alasan-alasan di atas sangat rapuh sebagai dasar bagi tuntutan penegakkan syari'ah. Bahwa Islam merupakan agama sempurna dan harus menjadi referensi bagi penyelesaian semua persoalan hidup, semua orang Islam punya keyakinan seperti itu. Bahkan, setiap umat beragama meyakini kesempurnaan agamanya. Syari'ah pun sudah menjadi bagian integral kehidupan umat Islam Indonesia sehari-hari selama berabad-abad sejak Islam masuk ke Nusantara. Jadi, tuntutan penerapan syari'ah yang diteriakkan kelompok-kelompok garis keras sangat mengada-ada, seolah-olah umat Islam Indonesia selama ini tidak mengamalkan syari'ah Islam. Kecuali jika yang mereka maksud adalah *fiqh* yang diterapkan di beberapa negara lain seperti Arab Saudi, Afghanistan di bawah Taliban, dan lain-lain yang berpaham Wahabi. Jika ini yang dimaksudkan, memang "masuk akal" kalau muncul tuntutan yang begitu keras, karena jenis *fiqh* yang mereka yakini memang keras dan kaku serta menuntut penegakkan secara keras pula sebagai akibat ideologi totalitarian-sentralistik yang mereka adopsi dari kelompok-kelompok garis keras transnasional.

Paham Wahabi sendiri ditegakkan oleh Bani Sa'ud sejak abad 18 dengan kekerasan dan banjir darah. Ketika paham itu dibawa

---

23. Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad, Islam, Militancy, and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia*. Disertasi (Leiden: Utrecht University, The Netherland, 2005), h. 179-180.

masuk ke Nusantara (Sumatera Barat) pada awal abad 19, meletuslah Perang Padri antara pengikut ajaran Wahabi melawan Muslim lokal, pemangku adat, dan guru-guru tarekat. Rezim Taliban di Afghanistan adalah contoh lain lagi dari penerapan hukum *a la* Wahabi yang sangat ekstrem. Ketika berkuasa pada 1996-2001, rezim ini membentuk Departemen Amar Ma'ruf Nahy Munkar yang bertugas mengontrol pengamalan ajaran agama. Polisi agama berpatroli di kota-kota dengan cambuk dan senapan otomatis mencari warga yang melanggar *fiqh* Taliban. Jika kedapatan warga melanggar syari'ah maka ditangkap, dipukul, atau dipenjara. Aksi-aksi Front Pembela Islam (FPI) yang berperilaku seperti polisi agama dan berpatroli keliling kota sangat mirip dengan aktivitas polisi agama Afghanistan di bawah Taliban.[24]

Apakah tuntutan penegakkan syari'ah yang marak belakangan ini maksudnya adalah syari'ah *a la* Wahabi? Sangat mungkin. Apalagi jika diperhatikan, hampir semua kelompok garis keras yang menuntut penegakan syari'ah di tanah air berasal dari —atau memiliki kaitan ideologis dengan— organisasi-organisasi garis keras transnasional yang lahir di arena konflik Timur-Tengah. Para pemimpin mereka pun kebanyakan keturunan Arab atau mereka yang pernah belajar di Arab Saudi atau negara lain di Timur Tengah yang kemudian kehilangan tradisi keberagamaannya dan menganut paham Wahabi dan Ikhwanul Muslimin atau Hizbut Tahrir.

---

24. Itu memang terkenal dalam sejarah peradaban Islam, gerakan-gerakan *amar ma'ruf* yang dengan kekerasan itu, yang belakangan, pada abad belakangan itu dilakukan oleh Wahabi. Waktu bergerak di Saudi Arabia itu kan semua bangunan-bangunan dan yang lain-lain yang dianggap oleh dia itu tidak benar, dihancurkan. Oleh karena itu maka peninggalan-peninggalan Islam di Arab Saudi itu habis sekarang itu tidak ada. Tempat tinggal Nabi dengan *Khadijah* hilang. Tempat kelahiran Nabi, hilang sampai sekarang. Tapi anehnya, istana-istana dan tempat-tempat pemukiman raja Abdul Aziz itu masih dipelihara dengan begitu rupa bagusnya di Ryadh. (Penjelasan Prof. KH. M. Tolchah Hasan, dalam: *Lautan Wahyu: Islam sebagai Rahmatan lil-'Âlamîn*, episode 5: "Dakwah," Supervisor Program: KH. A. Mustofa Bisri, ©LibForAll Foundation 2009).

Jadi, yang mereka perjuangkan sebenarnya bukan syari'ah Islam seperti yang dipahami oleh mayoritas umat Islam Indonesia, melainkan "syari'ah Islam" versi Wahabi-Ikhwanul Muslimin. Itu sebabnya, kampanye penegakkan syari'ah oleh kelompok-kelompok garis keras selalu menimbulkan masalah dan keributan di mana-mana di kalangan umat Islam sendiri. Hal ini berbeda dengan dakwah Islam yang lazim disampaikan para ulama, yang menyampaikan "pesan Islam" yang esensial dan universal, yang memberi kesejukan, bukan keributan.

Sementara derasnya arus modernisasi dan globalisasi yang dianggap berdampak buruk terhadap kehidupan umat Islam juga menjadi alasan tuntutan formalisasi hukum Islam.[25] Sedangkan alasan lain yang dikemukakan adalah untuk membentengi diri dari arus globalisasi, namun yang ditampilkan justru penguatan identitas untuk menegaskan perbedaan dari yang lain. Adalah hak setiap orang untuk memelihara diri dari pengaruh luar, dan ini tidak menjadi masalah. Hal yang menjadi masalah adalah ketika itu dilakukan dengan menggunakan instrumen-instrumen negara yang merupakan milik publik untuk kepentingan sekelompok orang, seperti pemberlakuan Perda Syari'ah yang sering bertolak belakang dengan kemaslahatan umum. Maka, jika umat Islam lain menolak Perda Syari'ah, itu bukan sekadar suatu kewajaran, tetapi juga hak. Bahkan menjadi *kewajiban* semua warga negara untuk menyelamatkan negeri ini dari pemaksaan kehendak oleh sekelompok orang dengan mengatasnamakan agama yang berpotensi memecah belah bangsa. Di sini harus ditegaskan pula bahwa itu bukanlah penolakan terhadap Islam itu sendiri, melainkan terhadap pemaksaan dan formalisasi pemahaman mereka tentang bagian tertentu dari Islam.

Kelompok-kelompok garis keras sangat bernafsu membatasi

---

25. Sukron Kamil dan Chaider S. Bamualim (eds.), *Syari'ah Islam dan HAM: Dampak Perda Syari'ah terhadap Kebebasan Sipil, Hak-hak Perempuan, dan Non-Muslim* (Jakarta: CSRC-UIN Jakarta, 2007), h. xxiii-xxiv.

keluasan rahmat Allah, bahkan kebesaran Allah, ke dalam kotak kecil Perda Syari'ah. Lalu mereka memaksa semua orang tunduk pada syari'ah *a la* Wahabi yang mereka perjuangkan melalui perangkat undang-undang. Sambil memaksa orang lain, mereka mengklaim bahwa Islam adalah rahmat bagi semua orang (*Islam rahmatan lil-'âlamîn*). Dan dengan dalih itu mereka memaksa semua orang masuk ke dalam 'rahmah', padahal pemaksaan itu sendiri bertentangan dengan semangat rahmah. Alih-alih akan percaya, orang justru akan sinis dengan klaim itu. Akibatnya, doktrin Islam yang mulia itu (*Islam rahmatan lil-'âlamîn*) menjadi tercemar akibat berbagai tindakan mereka yang tidak segan-segan membajak agama untuk kepentingan kelompok sendiri. Mereka adalah diktator yang berusaha menipu umat Islam dengan bertopeng sebagai juru bicara Tuhan. Ini bukan saja tindakan subversif terhadap negara, melainkan juga bisa menjadi subversi terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah *subhânahu wa ta'âlâ*, karena Tuhan melarang pemaksaan dalam bentuk apa pun dalam agama (*lâ ikrâh fid-dîn*), dan tidak pernah memberi mandat kepada siapa pun untuk menjadi juru bicara-Nya.

Keluarnya Perda-perda Syari'ah pada umumnya difasilitasi oleh fraksi partai-partai yang mengklaim sebagai partai Islam bekerjasama dengan politisi dan partai oportunis di DPRD daerah bersangkutan dengan dukungan atau desakan dari kelompok-kelompok garis keras. Di daerah seperti Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat bahkan dibentuk Komite Persiapan Penegakan Syari'ah Islam atau KPPSI yang menghimpun berbagai elemen gerakan. Di daerah lain, desakan penerapan syari'ah Islam sering datang dari kalangan garis keras seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI) dan berbagai organisasi kelaskaran yang muncul dengan label Islam seperti Laskar Jihad, Laskar Jundullah, Laskar fi Sabilillah, dan lain-lain yang dari namanya saja tidak menimbulkan simpati pada mayoritas muslim dan umat yang lain. Tak jarang fraksi-fraksi par-

tai berhaluan kebangsaan pun kesulitan menolak terlibat dalam proses persalinan Perda-perda Syari'ah tersebut, baik karena alasan mencari aman, takut dituduh anti-Islam, atau karena alasan-alasan pragmatis kekuasaan. Tidak adanya pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang Islam juga menjadi salah satu alasan sulitnya menolak klaim-klaim dan desakan para agen garis keras.

Tuduhan anti-Islam yang dialamatkan oleh kelompok-kelompok garis keras kepada para penentang Perda Syari'ah pada dasarnya merupakan bentuk teror teologis yang memanfaatkan sentimen keagamaan. Tuduhan ini sangat efektif karena menciptakan rasa takut di kalangan sebagian orang Islam. Amir Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Abu Bakar Ba'asyir bahkan pernah mengancam, "Jika pemberlakuan syari'ah Islam dihalang-halangi maka umat Islam wajib berjihad,"[26] tegasnya, seakan-akan semua orang Islam setuju dengan pandangannya. Terobsesi dengan pemberlakuan syari'ah Islam secara formal, Ba'asyir selalu mengulang-ulang penegasannya: "Berjihad untuk melawan kaum *kuffâr* yang menghalangi dan menentang berlakunya syari'ah Islam adalah wajib dan amal yang paling mulia."[27] Amir MMI itu menuding penentang Perda Syari'ah sebagai kafir.

Menghadapi tuduhan-tuduhan seperti di atas, anggota DPRD atau pemerintah daerah yang "lemah imannya" mungkin akan gentar mendengar ancaman semacam itu dan/atau sulit menjelaskan perbedaan besar antara Islam dan pemahaman atasnya. Tetapi para ulama yang memahami Islam secara mendalam dan menyeluruh, setia pada kebenaran, akan tahu sepenuhnya bahwa tuduhan itu hanyalah manuver politik semata yang sama sekali tidak memiliki bobot teologis. Ulama yang sejati tidak akan pernah mengkafirkan

---

26. Statemen Abu Bakar Ba'asyir seperti dikutip dalam Andi Muawiyah Ramli (*ed.*), *Demi Ayat Tuhan: Upaya KPPSI Menegakkan Syari'ah Islam* (Jakarta: OPSI, 2006), h. 387.
27. Statemen Abu Bakar Ba'asyir seperti dikutip dalam Andi Muawiyah Ramli (*ed.*), *Ibid.*

orang lain. Tuduhan kafir secara membabi buta di atas adalah bukti lain betapa pemahaman para agen garis keras tentang Islam sangat dangkal dan parsial.

Dari waktu ke waktu, grafik penerapan Perda Syari'ah menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi. Jika pada tahun 2003 baru ada 7 daerah yang menerapkan Perda Syari'ah, maka hingga Maret 2007 sudah lebih dari 10 persen dari seluruh daerah di Indonesia yang menerapkan Perda Syari'ah,[28] dan jumlah ini terus bertambah. Bahkan, disahkannya UU APP telah berdampak negatif di beberapa daerah. Hal ini antara lain bisa dilihat dengan dikeluarkannya larangan tari Jaipong yang merupakan tarian khas daerah setempat oleh Gubernur Jawa Barat, H. Ahmad Haryawan, walaupun kemudian menampik telah melarang tarian tersebut. Jika hal semacam ini terus dibiarkan dan mayoritas daerah —atas desakan kelompok-kelompok garis keras— menerapkan Perda Syari'ah, maka jalan menuju terbentuknya negara Islam Indonesia memang menjadi terbuka lebar. Padahal secara historis, formalisasi Islam sering atau nyaris tidak pernah menyelesaikan masalah. Bahkan di negara yang memproklamirkan diri sebagai Negara Islam pun, degradasi moral seperti korupsi dan sejenisnya tetap merajalela, kesejahteraan rakyat tetap tidak merata. Dalam ungkapan lain, apa yang dulu ditekan, seperti segmentasi etnis dan kesukuan, manuver-manuver politik, persaingan antarpribadi, spekulasi dan korupsi mencuat kembali pascaislamisasi tersebut.[29]

Sebenarnya, penentangan terhadap Perda-perda Syari'ah bukannya tidak ada. Pendiri Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, KH Abdurrahman Wahid, menyebut Perda-perda Syari'ah yang banyak bermunculan akhir-akhir ini sebagai kudeta terhadap Konstitusi.[30]

---

28. Majalah *Time*, 5 Maret 2007.
29. Oliver Roy, *Gagalnya Islam Politik* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 1996), h. 32.
30. Pernyataan KH Abdurrahman Wahid saat berbicara pada "Kongkow bersama Gus Dur" untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional di Radio Utan

Sementara tokoh Muhammadiyah Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif menanggapi maraknya Perda Syari'ah yang cenderung diskriminatif, menegaskan bahwa pemerintah pusat harus mengintervensi Perda-perda Syari'ah karena Konstitusi 1945 menjamin kebebasan beragama.[31] Buya Syafi'i juga menyebut bahwa jika syari'ah Islam benar-benar diterapkan sebagai hukum negara maka perpecahan tidak hanya akan terjadi antara kelompok Muslim dan non-Muslim tetapi juga antarsesama umat Islam sendiri.[32]

Dengan menyebut kalangan non-Muslim, apakah Buya Syafi'i berlebihan? Sepertinya tidak. Dari kalangan non-Muslim, salah satu reaksi atas lahirnya Perda-perda Syari'ah adalah gagasan umat Kristiani untuk menjadikan Manokwari, Papua Barat, sebagai "Kota Injil," beberapa waktu yang lalu.[33] Kemudian bergulir juga wacana untuk menerapkan "Perda Hindu" di Bali, "Perda Kristen" di Sulawesi Utara dan Nusa Tenggara Timur yang mayoritas penduduknya Nasrani. Menanggapi lahirnya Perda-perda Agama ini Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi mensinyalir bahwa tanda-tanda disintegrasi bangsa sudah terlihat sebagai akibat dari upaya penerapan hukum agama yang dipaksakan.[34]

Organisasi Islam terbesar di dunia, Nahdlatul Ulama (NU), secara resmi menentang pemberlakuan Perda-perda Syari'ah. Rais Syuriah PBNU, KH Sahal Mahfudz mengatakan bahwa, "Kita (NU) menentang pemberlakuan Perda-perda Syari'ah karena akan menjurus kepada perpecahan bangsa. Syari'ah bisa dilaksanakan

---

Kayu, Jl Utan Kayu No. 68 H, Jakarta, 20 Mei 2006. Lihat juga, www.gusdur.net., "Penerapan Perda Syari'ah Mengkudeta Konstitusi."

31. "Review sharia bylaws, say scholars," *The Jakarta Post*, 1 Maret, 2008.

32. Ahmad Syafii Maarif, "Pertimbangkan Dampak yang Akan Timbul," dalam Kurniawan Zein dan Saripuddin HA, *Syariat Islam Yes, Syariat Islam No: Dilema Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 44.

33. "Kebijakan Daerah Bernuansa Syari'ah," Gatra, 29 November 2007.

34. Pernyataan KH Hasyim Muzadi, disampaikan dalam "Dialog Islam dan Negara" di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, pada 26 Juli 2007.

tanpa perlu diformalkan."[35] Senada dengan itu, KH Hasyim Muzadi menyebut bahwa bahaya kampanye penerapan syari'ah secara formal bukan hanya akan menyebabkan perpecahan bangsa akan tapi juga mengubah Indonesia menjadi negara Islam.[36]

Pihak pemerintah sendiri melalui Menteri Dalam Negeri (ketika itu Muhammad Ma'ruf) pernah menyatakan akan menginventarisasi Perda-perda Syari'ah yang banyak bermunculan di daerah. Menurutnya, Perda-perda itu akan dievaluasi dan diteliti mana yang berpegang pada konsensus nasional yaitu Pancasila, UUD '45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Dia menegaskan bahwa, Perda yang bertentangan dengan Undang-undang di atasnya dan melanggar kepentingan umum akan dibatalkan.

Namun, niatan pemerintah ini ditentang keras oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketua Fraksi PKS DPR, Mahfudz Sidik menyatakan, "Tidak ada dasar bagi pemerintah untuk mencabut Perda-perda yang bernuansa Islam, apalagi sejumlah aturan yang dikeluarkan beberapa Pemda tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi. Mereka yang menolak kehadiran Perda-perda Syari'ah itu lebih dilatarbelakangi kekhawatiran dan kecemasan. Bagi masyarakat setempat, Perda-perda tersebut justru mendorong kehidupan mereka lebih baik. Karena itu, pemerintah pusat tidak perlu merespon pihak-pihak yang menolak Perda tersebut. Perda-perda itu tak ada alasan untuk dipersoalkan," ungkapnya seraya menambahkan bahwa PKS akan tetap mendukung Perda-perda tersebut.[37] Dalam konteks ini, ada kecenderungan kuat bahwa demokrasi dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang tidak demokratis. Demokrasi yang semakin kuat justru bergandengan tangan dengan intoleransi yang semakin pekat, maka tak berlebihan jika PKS dinilai sebagai ancaman demokrasi yang lebih besar dibandingkan dengan Jama'ah

---

35. "NU states opposition to sharia bylaws," *The Jakarta Post*, 29 Juli 2006.
36. *The Jakarta Post*, *ibid*.
37. PKS Tolak Pencabutan Perda Bernuansa Islam, www.gatra.com., 14 Juni 2006.

Islamiyah, misalnya.[38]

Benarkah Perda-perda Syari'ah tersebut mendorong kehidupan yang lebih baik, seperti yang diyakini PKS? Sebuah penelitian yang dilakukan oleh *Center for the Study of Religion and Culture* (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta yang dipublikasikan belum lama ini justru menunjukkan fakta sebaliknya. Dalam diskusi hasil penelitian tersebut pada 21-22 November 2007 di Bogor, para peneliti mengatakan bahwa tidak ada korelasi antara kesejahteraan masyarakat dengan penerapan Perda Syari'ah; kehidupan masyarakat tidak berubah antara sebelum dan sesudah diberlakukannya Perda-perda Syari'ah. Bahkan diungkapkan bahwa Perda-perda Syari'ah justru memicu terjadinya berbagai pelanggaran hak-hak sipil —terutama— di kalangan non-Muslim dan perempuan.[39]

Kalangan non-Muslim terkena kewajiban untuk melaksanakan beberapa aspek dari Perda Syari'ah. Di Kabupaten Cianjur, misalnya, dilaporkan seorang perempuan non-Muslim mengaku dipaksa mengenakan jilbab di kantor setiap hari Jumat. Pemaksaan serupa juga menimpa seorang guru di sekolah negeri dan seorang siswi sebuah SMU. Bagi siswi yang menolak, orang tuanya diharuskan mengajukan permohonan dan pernyataan bahwa siswi tersebut adalah non-Muslim. Jilbabisasi juga diberlakukan terhadap keturunan Tionghoa yang bekerja di kantor BCA Cianjur.[40] Kalangan non-Muslim sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan penerapan syari'ah Islam di Cianjur, tetapi pada beberapa kasus ternyata aturan Perda syari'ah diberlakukan juga bagi kalangan non-Muslim.[41]

---

38. Sadanand Dhume, *My Friend the Fanatic: Travels with an Indonesian Islamist* (Melbourne: Text Publishing Company, 2008), h. 264 dan 269.

39. Hasil penelitian ini telah diterbitkan dalam buku *Syari'ah Islam dan HAM: Dampak Perda Syari'ah terhadap Kebebasan Sipil, Hak-hak Perempuan, dan Non-Muslim,* Sukron Kamil dan Chaider S. Bamualim, eds. (Jakarta: CSRC-UIN Jakarta, 2007).

40. Sukron Kamil dan Chaider S. Bamualim, eds. *Ibid*, h. xxviii.

41. Sukron Kamil dan Chaider S. Bamualim, eds. *Ibid*, h. xxxii.

Menurut laporan the Wahid Institute, kaum perempuan non-Muslim di Padang (Sumatera Barat) dan Bulukumba (Sulawesi Selatan) juga terkena kewajiban memakai jilbab setelah keluarnya Perda Syari'ah.[42] Seorang wali murid Katolik yang 2 anak perempuannya dipaksa memakai jilbab di sekolah negeri di Padang mencoba membujuk anaknya bahwa jilbab hanya sekadar etika berpakaian, jadi sebaiknya peraturan itu diikuti saja. Namun, anak-anaknya merasakan bahwa kewajiban berjilbab itu lebih dari sekadar etika berpakaian. Mereka merasakan bahwa saat ini berada dalam suatu lingkungan yang memusuhi agama mereka. Beberapa siswi lain menyatakan bahwa saat ini rekan-rekannya telah memandang mereka pindah agama ke Islam karena memakai jilbab. Menanggapi kasus-kasus ini, seorang tokoh Katolik di Padang menyatakan bahwa Perda Syari'ah telah menimbulkan dampak psikologis yang cukup serius terhadap kalangan siswi non-Muslim.[43]

Hasil riset CSRC UIN juga menyebutkan bahwa Perda-perda Syari'ah pada umumnya bersifat diskriminatif terhadap kaum perempuan. Perda jilbab, anti-prostitusi, dan larangan keluar malam tanpa muhrim bagi perempuan yang diberlakukan secara serampangan telah menimbulkan ketakutan bagi para wanita untuk beraktivitas di luar rumah pada malam hari. Bahkan di Tangerang, pernah muncul kontroversi menyusul terbitnya Perda No. 8 tahun 2005 yang salah satu isinya (pasal 4) menyebutkan: "Setiap orang yang sikap atau perilakunya mencurigakan sehingga menimbulkan suatu anggapan bahwa ia/mereka pelacur, dilarang berada di jalan-jalan umum... atau di tempat lain...." Pasal ini telah memakan korban ketika perempuan-perempuan baik-baik yang bukan pekerja seks komersial (PSK) pun menjadi sasaran razia dan ditangkap petugas. Kasus ini menyulut kontroversi di berbagai media massa.

---

42. "Govt defies calls to review sharia bylaws," *The Jakarta Post*, 16 Februari 2008.

43. "Catholic students forced to wear the Islamic veil," *AsiaNews.com*, diakses tanggal 17 September 2007 pukul 11.39.

Di Aceh, kaum perempuan yang tidak berjilbab dipermalukan dengan dipotong rambutnya di depan umum. Peraturan mengenai jilbab dalam Perda telah mendiskreditkan perempuan yang tidak memakai jilbab, padahal hukum berjilbab itu sendiri masuk dalam ranah *khilafiyah*, ada ulama yang mewajibkan dan ada yang tidak.[44] Sementara, jilbab sebenarnya adalah budaya, bahkan wanita Kristiani dan Yahudi pun di beberapa daerah Eropa dan Timur Tengah juga mengenakan jilbab.

Selain alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, formalisasi hukum Islam juga menjadi pintu masuk bagi pragmatisme kekuasaan di daerah-daerah. Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada merupakan contoh penting dari kasus ini. Seorang calon Kepala Daerah tidak jarang menawarkan syari'ah sebagai "jualan" mereka untuk menarik perhatian pemilih. Cara ini juga ditempuh elit politik untuk meningkatkan legitimasi keagamaan mereka di mata publik.[45] Sebagai contoh, Perda Syari'ah Islam di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dikeluarkan oleh bupati menjelang awal dan akhir masa jabatannya. Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, Perda-perda Syari'ah digulirkan oleh bupati untuk membangun citra dirinya yang sempat turun akibat kritik dari beberapa ulama atas kebijakan pembangunan di Kabupaten tersebut.[46] Di Cianjur, seorang calon Bupati yang menjual isu syari'ah Islam ke masyarakat berhasil meraih dukungan massa dan menduduki jabatan bupati.[47]

Dalam kasus-kasus di atas, syari'ah Islam tidak lebih dari sekadar komoditas politik. Kolaborasi antara para politisi oportunis dengan kelompok-kelompok garis keras telah menjadi gejala politik baru yang bertanggung jawab atas keluarnya banyak Perda Syari'ah

44. Sukron Kamil dan Chaider S. Bamualim, eds. *Op., cit.*, h. xxvi – xxvii.
45. Sukron Kamil dan Chaider S. Bamualim (eds.), *Ibid.*, h. xxiii.
46. "Regulasi Syari'ah di Kalimantan Selatan," dalam *Reform Review: Jurnal untuk Kajian dan Pemetaan Krisis*, Vol. I No. 1, April-Juni 2007, h. 59.
47. Sukron Kamil dan Chaider S. Bamualim (eds.), *op., cit.* h. xxxi.

di berbagai daerah di tanah air. Kepentingan politik di balik penerapan Perda-perda Syari'ah telah membutakan para elit politik yang haus dukungan massa atas keragaman tafsir dan pengamalan Islam di masyarakat. Semuanya ditundukkan ke dalam satu pemahaman syari'ah versi kelompok garis keras, yaitu syari'ah Wahabi-Ikhwanul Muslimin. Itu sebabnya muatan Perda-perda Syari'ah yang bermunculan di berbagai daerah tidak jauh berbeda dari aturan-aturan hukum yang diterapkan oleh rezim Arab Saudi dan rezim Taliban Afghanistan yang berpaham Wahabi. Sayangnya banyak orang yang tidak menyadari hal tersebut, atau telah terprovokasi oleh kelompok-kelompok garis keras yang selalu siap dengan senjata pamungkasnya: "Ikuti kami atau anda memang anti-Islam dan kafir!"

Tuduhan kafir jelas merupakan manuver politik, siapa pun tidak akan menjadi kafir karena tuduhan tersebut. Kafir lebih disebabkan gerak hati (*a'mâl al-qalb*) terkait ajaran agama. Jargon-jargon seperti "Islam adalah solusi" dan "Selamatkan Indonesia dengan Syari'ah" adalah retorika simplistis dan komoditas politik sebagai usaha rekrutmen psikologis umat Islam. Apakah seseorang kafir atau mukmin, itu adalah urusan dia dengan Tuhan, bukan urusan orang lain. Tuhan pun tidak memaksakan kehendak-Nya kepada hamba-hamba-Nya, maka alasan apa pula yang bisa membenarkan seseorang boleh memaksakan kehendaknya kepada yang lain, bahkan dalam hal agama sekalipun?

Syari'ah sebagai Solusi Krisis Multidimensional

Mayoritas responden berpendapat bahwa penyebab krisis yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 adalah karena negara ini tidak menerapkan syari'ah Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi memakai sistem hukum yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945. Akibatnya, hukum Tuhan dijauhkan dan tidak menjadi penentu utama dalam segala keputusan dan kebijakan yang menyangkut kehidupan publik. Seorang respon-

den mengatakan bahwa berbagai krisis yang menimpa Indonesia menandakan bahwa "bangsa ini sudah kafir," karena Islam tidak dijadikan rujukan. Mayoritas responden penelitian menarik isu krisis multi-dimensi ke dalam wilayah teologis. Pernyataan seorang responden ini bisa mewakili pandangan terhadap masalah krisis multidimensi tersebut:

> Sumber masalahnya karena Syari'ah Islam tidak ditegakkan. Kalau ditegakkan, setiap pencuri potong tangan, siapa yang mau mencuri lagi? Kalau yang berzina dirajam, siapa yang mau berzina?..... Kalau pencuri tidak dipotong tangannya, berapa tubuh orang yang rusak dan berapa kerugian negara dari kerjaan tangan pencuri tersebut? Kalau pembunuh tidak diqisas, berapa nyawa manusia yang melayang dari pembunuhan tersebut?

Para responden juga mengatakan bahwa salah satu sebab mengapa aturan syari'ah mengalami proses marjinalisasi adalah karena arus globalisasi. Globalisasi dimaknai sebagai universalisasi, liberalisasi ekonomi, dan Westernisasi atau bahkan Amerikanisasi. Dalam pengertian universalisasi, globalisasi dipandang punya kontribusi dalam melahirkan homogenisasi budaya yang, pada tingkat tertentu, memarjinalkan nilai-nilai agama. Budaya global yang selalu menjadi rujukan dan *trend-setter* adalah sesuatu yang diinisiasi, dikonstruksi, dan dikembangkan oleh Barat (Amerika dan Eropa). Dengan demikian, globalisasi juga dipahami oleh para responden sebagai Westernisasi atau bahkan lebih spesifik lagi, Amerikanisasi.

Dalam konteks hukum, para responden beranggapan bahwa setelah reformasi tidak ada penegakan hukum. Tidak hanya aparat penegak hukum di pengadilan yang oleh para responden dianggap tidak mampu menegakkan hukum secara memadai, tapi

juga aparat kepolisian. Mereka dianggap tidak mampu memberantas tempat-tempat maksiat di berbagai tempat di Indonesia, seperti tempat prostitusi dan perjudian, baik yang terang-terangan maupun yang terselubung, yang berskala besar atau kecil.[48]

Hampir semua responden sepakat bahwa syari'ah Islam adalah solusi terhadap semua krisis yang dialami bangsa ini. Syari'ah Islam diperlukan untuk memperbaiki moral masyarakat yang rusak karena Tuhan semakin dijauhkan dari kehidupan mereka. Di bidang hukum, efek jera hukum Islam dianggap lebih kuat dibanding sistem yang selama ini berlaku. Efek jera ini sangat diperlukan jika bangsa Indonesia ingin mengatasi problem akut yang sudah sekian lama tidak bisa dipecahkan, yaitu kolusi, korupsi, dan nepotisme. Di bidang ekonomi, ekonomi Islam dianggap jauh lebih menjanjikan dalam menciptakan kesejahteraan umat dibanding sistem ekonomi sekuler yang tidak bisa lepas dari riba. Keadilan sosial akan bisa tercapai jika menerapkan syari'ah Islam karena sistem ini lebih memihak kepada masyarakat luas dibanding sekadar membela kepentingan kelompok minoritas elit seperti dalam sistem kapitalis. Jika sistem kapitalis melahirkan kesenjangan sosial, sistem ekonomi Islam melahirkan keadilan sosial.

Untuk menegakkan syari'ah Islam maka diperlukan adanya persatuan umat Islam. Syari'ah Islam sulit ditegakkan selama umat Islam terpecah belah, mudah diadu domba, dan tidak mau bekerja sama. Menurut para responden, perbedaan strategi dalam memperjuangkan syari'ah Islam tidak berarti tidak ada titik temu. Paling tidak berbagai organisasi Islam bisa bertemu dalam satu hal: memperjuangkan syari'ah Islam dengan berbagai cara, baik lewat Perda

---

48. Ada kesan bahwa kelompok-kelompok garis keras membatasi maksiat pada hal-hal seperti porstitusi, perjudian, dan semacamnya. Padahal, makna dasar maksiat adalah pengabaian, pembangkangan, perlawanan, atau penentangan terhadap ketentuan agama. Lagi-lagi di sini jelas, betapa kelompok garis keras melakukan reduksi atas pesan-pesan ajaran agama hanya pada hal-hal yang sesuai dengan ideologi dan kepentingan mereka saja. Atau karena memang tidak mampunyai pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang Islam?

Syari'ah seperti dilakukan KPPSI dan lain-lain; mempengaruhi kebijakan publik seperti dilakukan MUI dan lain-lain; menguasai parlemen seperti dilakukan PKS, PBB dan lain-lain; *sweeping* seperti dilakukan FPI, FBR dan lain-lain, maupun dengan cara yang lain.

Ada kecenderungan kuat kelompok-kelompok garis keras memahami Islam lebih sebagai seperangkat aturan hukum. Padahal Islam tidak hanya terdiri dari aturan hukum (*islâm*) yang berkaitan dengan aspek jasmaniah. Ia juga terlibat dengan aspek emosional dan spiritual yang berkaitan dengan keyakinan (*îmân*) dan kebaikan lahiriah dan batiniah (*ihsân*) manusia. Idealnya, ketiga aspek ini harus seimbang untuk mencapai kualitas keberagamaan yang matang dan dewasa. Dalam kaitan ini, Jenderal (Purn.) Polisi I Made Mangkupastika mengemukakan, "Saya sudah meneliti para pelaku teror atas nama Islam yang tertangkap di Indonesia. Akhrinya saya sampai pada kesimpulan, mereka mengidolakan syari'ah [hukum Islam, *red.*] dan sama sekali tidak tahu tentang hakikat dan ma'rifat. Jika mereka sudah sampai ke tinkat hakikat dan ma'rifat, tidak mungkin mereka berbuat begitu."[49]

Dengan demikian, tidak heran jika mereka ingin menyelesaikan masalah hanya dengan pendekatan hukum. Bahkan, ketika membincang masalah yang dihadapi bangsa pun, mereka lebih fokus pada hal-hal seperti pencurian, prostitusi, minuman keras, dan semacamnya. Akibatnya, ketika mereka menyatakan bahwa Tuhan semakin jauh, jalan yang ditawarkan bukanlah kesadaran spiritual untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi implementasi hukum dan formalisasi agama agar "Tuhan" (tuan?) mendekat kepada mereka. Tidak jelas benar, apa yang mereka maksudkan bahwa 'syari'ah sebagai solusi krisis multidimensional.' Mereka berpikir bahwa *recovery* ekonomi, sistem politik, dan hal-hal lain harus *taken for granted* dari syari'ah. Jelas bahwa kelompok-kelompok garis keras telah salah paham atau memang tidak mengerti maksud: Islam me-

49. Wawancara peneliti konsultasi, Mei 2007 di Jakarta.

liputi (*syumûliyah*) semua aspek kehidupan manusia. Mereka memahami *syumûliyah* di sini adalah dalam makna struktural.

Garis Keras Versus Umat Islam

Penelitian ini menghasilkan temuan tentang pertentangan antara pandangan-pandangan kelompok garis keras dengan mayoritas umat Islam. Maka menjadi jelas bahwa kelompok-kelompok garis keras yang tampak mendominasi ruang publik—sebenarnya tidak mewakili pandangan *mainstream* Islam Indonesia. Keunggulan mereka semata-mata karena militansi dan tak kenal lelah berani bersuara vokal. Agama sudah menjadi "bisnis" mereka yang digunakan untuk mencapai kekuasaan, mengejar karier, mengumpulkan kekayaan, dan lain-lain yang sama sekali bertentangan dengan nilai-nilai luhur ajaran Islam itu sendiri. Hal ini berbeda dari kebanyakan umat Islam yang pada umumnya merupakan *silent majority* dan tidak membisniskan agama, sehingga suara mereka seakan terserap oleh hiruk-pikuk kelompok minoritas yang rewel dan militan tersebut.

Para responden yang memperjuangkan Perda-perda Syari'ah hampir semuanya menyatakan bahwa Islam merupakan agama yang mengatur setiap aspek kehidupan manusia. Atas dasar itu, Islam harus diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan, bukan hanya ibadah tapi juga dalam kehidupan politik, ekonomi, hukum, dan sebagainya. Pandangan ini sebenarnya juga dianut oleh semua umat Islam. Bedanya, kelompok-kelompok garis keras memandang bahwa penerapan syari'ah itu *harus* dilakukan melalui otoritas pemerintah (seperti Perda). Sementara mayoritas umat Islam Indonesia yang diwakili NU dan Muhammadiyah berpandangan bahwa syari'ah Islam wajib diamalkan tetapi *tidak harus* melalui otoritas pemerintah, melainkan melalui kesadaran setiap individu.

Kelompok-kelompok garis keras berpandangan bahwa konsep *Islam kaffah* memiliki konsekuensi kewajiban untuk membentuk pemerintahan atau kekhalifahan Islam. Sementara mayoritas

umat Islam berpandangan bahwa kewajiban utama adalah taat pada pemerintahan yang sah dan berdaulat, sedangkan bentuk dan sistem pemerintahannya cukup sesuai dengan bentuk dan sistem di negara masing-masing.[50] Dua pandangan yang berbeda ini berimplikasi pada perbedaan cara memposisikan dan melihat syari'ah Islam, serta bagaimana syari'ah Islam itu beroperasi di tengah masyarakat, terutama masyarakat plural seperti Indonesia.

Para responden meyakini syari'ah sebagai sebuah hukum ciptaan Allah yang lengkap dan menyeluruh (*syumuliah*), walaupun tanpa dilengkapi prosedur hukum yang jelas. Pandangan semacam ini diikuti oleh pemikiran bahwa hukum Islam harus diperlakukan sama oleh setiap orang Islam di mana pun berada tanpa mengindahkan batas-batas negara. Tetapi, mayoritas ulama dan umat Islam tidak berpandangan seperti itu. Bagi kebanyakan mereka, hukum Islam bersifat kontekstual, yaitu terikat dengan ruang dan waktu dan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat (*al-hukmu yadûr ma' al-'illah, wujûdan wa 'adâman*). Contohnya adalah perubahan pandangan hukum Imam Syafi'i ketika ia berpindah dari Irak (yang telah melahirkan *qaul qadîm* atau fatwa-fatwa lama) ke Mesir (yang melahirkan *qaul jadîd* atau fatwa-fatwa baru). Dengan cara seperti inilah hukum Islam menjadi hidup dan sejalan dengan nafas zaman.

Dari hasil penelitian lapangan ini juga tampak bahwa ideologi hukum yang dianut kelompok-kelompok garis keras telah menghasilkan sebuah pandangan hukum yang kaku, yaitu: *Pertama*, hukum Islam dipercayai mampu mengatur segala macam permasalahan hukum yang muncul pada era modern sekarang ini sehingga

---

50. Ketua Umum PBNU, KH Hasyim Muzadi, misalnya, pernah menyatakan bahwa, "Siapa pun yang menjadi kepala negara, yang telah diproses secara sah, baik menurut ukuran agama maupun negara, dia itulah Khalifah Tidak perlu mencari model-model yang lain." Lihat, Hasyim Muzadi: "Khilafah Islamiyah bukan Gerakan Agama, tapi Gerakan Politik." *NU Online,* Selasa, 5 September 2006.

keputusan-keputusan yang dibuat di luar lembaga syari'ah harus ditolak. *Kedua*, orientasi perjuangan implementasi hukum Islam yang lebih *inward-looking,* sehingga tidak terlalu memberikan perhatian yang mendalam terhadap isu-isu di luar substansi hukum Islam yang belum diatur. Masalah-masalah hukum kontemporer yang dihadapi bangsa ini sama sekali tidak disentuh, seperti masalah pluralisme hukum, konflik antarsistem hukum, atau hubungan hukum Islam dengan tradisi hukum lain yang ada di Indonesia. Akibatnya, persoalan-persoalan praktis kebangsaan yang berhubungan dengan hukum secara umum tidak diperhatikan.

Pandangan hukum seperti di atas bersumber dari asumsi bahwa karena Tuhanlah sumber dari segala sumber kehidupan maka manusia tidak sepantasnya berpegangan kepada sistem hukum yang dibuat bukan oleh sumber kehidupan tersebut. Hanya Allahlah yang berhak menciptakan hukum karena Dialah yang mengetahui kebutuhan manusia seluruhnya. Pandangan semacam ini dapat dilihat misalnya dalam pernyataan seorang responden di Palembang:

> Sistem syari'ah Islam itu dibentuk berdasarkan al-Qur'an, tidak bisa dibentuk oleh manusia. Kalau undang-undang dibuat oleh manusia, maka sistemnya tidak bisa mengalahkan sistem Tuhan dalam al-Qur'an.

Pada satu sisi, pemahaman semacam ini menegaskan pandangan yang totaliter terhadap sistem hukum. Pandangan ini menolak apa pun yang ada di luar sistem syari'ah karena hukum-hukum yang tidak berasal dari Islam tidak pantas untuk dijadikan sebagai pedoman hidup karena diturunkan dari pemikiran manusia saja. Pada sisi yang lain, para tokoh dan/atau agen garis keras merasa benar-benar mengerti keinginan Tuhan ketika menafsirkan al-Qur'an sehingga merasa tidak akan salah. Mayoritas umat Islam *tidak* berpandangan seperti itu. Bagi mereka, adat suatu masyara-

kat yang tidak bertentangan dengan Islam bisa menjadi hukum. Dasarnya adalah kaidah Ushul Fikih, *al-'adat muhakkamah* (adat bisa menjadi hukum).

Perdebatan tentang apakah selain Tuhan dapat menjadi sumber hukum dalam Islam sejatinya merupakan persoalan yang sudah berlangsung sejak masa sejarah awal Islam itu sendiri. Polemik tersebut dimulai ketika kaum Muslim mempertanyakan peran yang dapat dimainkan oleh akal manusia dalam menentukan baik dan buruk. Kelompok yang percaya pada kemampuan akal manusia cenderung bersikap positif dalam hal ini. Dalam pandangan mereka, akal manusia seharusnya bisa menjadi sumber hukum dalam menentukan kebaikan atau keburukan suatu hal. Di samping wahyu Tuhan, akal sejatinya dapat menjadi hakim dari perbuatan manusia, sehingga sumber hukum Islam tidak hanya didasarkan pada Qur'an dan Sunnah saja tetapi juga akal manusia itu sendiri. Kelompok yang lain memiliki pemahaman bahwa selain Tuhan sejatinya tidak dapat menjadi hakim dari persoalan-persoalan hukum yang dihadapi karena Tuhanlah yang berhak menentukan sesuatu itu baik atau buruk.

Dari isu sederhana tentang peran akal tersebut maka bergulirlah persoalan apakah hukum Islam dapat berpegangan kepada selain al-Qur'an dan Sunnah, misalnya kepada hukum adat atau tradisi normatif masyarakat lokal tertentu? Bagi mayoritas umat Islam tradisi-tradisi hukum yang hidup dalam masyarakat, dimungkinkan untuk berperan sebagai rujukan hukum dengan landasan Ushul Fikih yang telah disebutkan di atas.

Para responden menyatakan kecenderungannya terhadap pemikiran hukum yang menempatkan wahyu Tuhan sebagai satu-satunya sumber pembentukan hukum. Oleh karena itu mereka biasanya hanya basa-basi (*lip service*) ketika menyatakan tentang peran nilai-nilai normatif masyarakat lokal dalam penciptaan hukum. Secara umum mereka juga memandang sebelah mata terhadap eksistensi sistem hukum di luar Islam. Bagi mereka, kesempurna-

an hukum Islam merefleksikan sifat independensi Islam dalam hal penetapan hukum. Konsekuensinya, nilai-nilai hukum yang secara teoretis tidak berasal dari wahyu akan ditolak karena semua perkara —pada dasarnya— sudah dipecahkan oleh Tuhan.

Tipe pemikiran ideologi hukum seperti ini pada tataran praktisnya berimplikasi kepada dua sikap: *Pertama*, kecenderungan untuk menolak segala bentuk nilai normatif yang berada di luar sistem kewahyuan Islam. Adat atau tradisi hukum masyarakat lokal juga tak luput dari penolakan ini karena dianggap tidak bersumber dari/berlandaskan pada Syari'ah. *Kedua*, sikap apatis terhadap eksistensi tradisi hukum yang ada dalam masyarakat Indonesia. Mereka juga menolak kemungkinan dialog antara hukum Islam dengan hukum lain dalam rangka pembangunan sistem hukum nasional. Dengan kata lain, pemahaman terhadap syari'ah seperti itu memberi dampak pada sikap penolakan terhadap kenyataan pluralisme hukum.

Hal yang menarik untuk dicermati adalah variasi argumen baru dalam sikap para responden terhadap nilai-nilai lokal/adat. Hal ini dapat dilihat dari penelitian terhadap Komite Persiapan Penegakan Syari'ah Islam (KPPSI) di Padang, Sumatra Barat, yang menjadi wadah bagi beberapa organisasi garis keras di propinsi ini seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majlis Mujahidin Indonesia (MMI), Paga Nagari, dan kelompok lokal lainnya. Jargon "Adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah" yang semula ditujukan untuk memfasilitasi rekonsiliasi konflik kelompok Islam dengan kelompok adat, rupanya diubah orientasi pemaknaannya oleh KPPSI kepada syari'ah untuk menguasai hukum adat.

Jargon itu pun tidak lagi dipahami sebagai kesiapan untuk saling berdialog antara Islam dan adat dalam proses penciptaan hukum, akan tetapi kepada argumen perlunya legislasi hukum Islam di Sumatra Barat dengan mengesampingkan eksistensi hukum adat. Sikap seperti ini tidak hanya dijumpai di Padang saja tetapi juga di tempat-tempat lain, misalnya di Gorontalo.

Fenomena seperti ini sejatinya bersifat a-historis, karena ketika agama Islam masuk ke Nusantara, wilayah ini sudah sangat kaya dengan tradisi keberagamaan dan peradaban, termasuk tradisi dan peradaban hukum. Sejak kedatangannya Islam telah bersikap akomodasionis (baca: menerima tradisi lokal) dan melebur ke dalam budaya masyarakat setempat. Ini bukan hal yang sukar bagi Islam yang di dalam doktrinnya sendiri memerintahkan agar dakwah dilakukan sesuai dengan kultur masyarakat yang bersangkutan (QS. 14:4). Di dalam tradisi dan peradaban masyarakat yang beragam itu Islam justru memasukkan nilai-nilai moral dan teologis sehingga Islam tumbuh dan berkembang dengan corak yang bhinneka atau plural sesuai dengan budaya masyarakat Nusantara yang juga bhinneka. Dari sini pula lahir tradisi pluralisme hukum Islam dalam masyarakat Indonesia.

Gerakan-gerakan Islam yang berorientasi pada formalisasi agama sekarang ini rupanya telah menelikung sejarah Islam di negeri sendiri. Sikap rekonsiliatif yang menjadi tradisi masyarakat Muslim dalam menyikapi adat lokal pun menipis sejalan dengan masuknya pengaruh aliran semacam Wahabi, Ikhwanul Muslimin, dan Hizbut Tahrir yang dibawa oleh para agen garis keras dengan berpretensi melakukan pemurnian secara membabi buta, yaitu menolak semua yang mereka anggap sebagai "tidak Islami."

Sejalan dengan itu, tradisi hukum adat yang hidup selama ratusan tahun dalam masyarakat kita pun dinafikan. Akibatnya, tradisi apresiasi dan rekonsiliasi terhadap perbedaan faham dan kebhinnekaan masyarakat semakin berkurang. Sikap positif terhadap tradisi-tradisi normatif yang berasal dari luar Islam pun menurun.

Sikap seperti itu sebetulnya mudah diprediksi karena orientasi ideologis yang bersifat totalitarian-sentralistik yang mengantarkan kepada pemahaman eksklusif dan kaku terhadap hukum Islam. Tradisi hukum yang berasal dari luar Islam harus didudukkan dalam kerangka subordinat karena pemahaman mereka atas syari'ah yang harus dijadikan standar tunggal untuk memfilter kera-

gaman tradisi normatif yang hidup dalam masyarakat. Pemahaman semacam ini membawa kepada pandangan hidup yang monolitik, sehingga pluralisme hukum yang nyata-nyata hidup dalam masyarakat harus diubah agar sesuai dengan pemahaman syari'ah mereka yang totalitarian-sentralistik dan monolitik.

Penolakan kepada tradisi-tradisi hukum di luar syari'ah —sebagaimana di atas— pada kenyataannya tidak hanya tertuju kepada tradisi lokal hukum adat saja, tetapi juga secara umum kita dapati dalam sikap para responden terhadap hukum Barat dan sistem demokrasi yang dianggap berasal dari Barat. Hampir semua responden sepakat bahwa Islam mustahil disandingkan dengan Barat. Nilai-nilai Islam tidak mungkin dikomparasikan dengan nilai-nilai dari Barat karena keduanya memang tidak sejajar dan berasal dari dunia yang sama sekali berbeda. Di beberapa daerah di mana isu penegakan syari'ah muncul secara dominan, gerakan penolakan terhadap segala sesuatu yang berasal dari Barat muncul secara dominan pula.

Di Padang, Bogor, Makassar, Aceh, Palembang, dan tempat-tempat lainnya, isu-isu anti ilmu Barat, filsafat Barat, rasionalisme Barat, dan lain-lainnya muncul secara koinsiden dengan semakin gencarnya kampanye penegakan syari'ah tersebut. Secara umum para responden menonjolkan keunggulan Islam di atas semua sistem nilai kehidupan sebagai alasan tidak perlunya Islam mengadopsi nilai-nilai Barat, yang mereka anggap justru akan merusak keislaman masyarakat itu sendiri. Seorang responden menyatakan sebagai berikut:

> .... Kerusakan kita yang paling parah adalah masalah akhlak. Dan ini adalah keberhasilan yang disebarkan oleh Yahudi-Nasrani. Kita tidak berdaya, kita anggap semua yang datang dari Barat adalah bagus. Tidak, saya bilang! Al-Qur'an ini adalah petunjuk bagi orang taqwa dan taqwa itu penduduk surga....

Ideologi absolutisme hukum Islam membawa kepada pemahaman bahwa semua nilai-nilai kehidupan manusia yang berasal dari pemikiran non-Islam tidak bisa diterima. Logika sederhananya adalah: mengapa orang Islam harus mengambil aturan dan nilai-nilai kehidupan dari luar Islam padahal Islam telah menyediakan itu semua untuk dipraktikkan dalam kehidupan? Dengan alasan ini, sebagian responden menolak demokrasi.

Para responden tidak hanya berpandangan negatif terhadap Barat, tetapi juga kepada orang-orang Islam yang mereka anggap mengikuti jalan pemikiran Barat, seperti pernyataan salah seorang responden di Yogyakarta:

> Itu adalah tren baru yang muncul dengan adanya kemunduran umat Islam. Karena kesalahan logika, ketika melihat Islam berada di bawah sedangkan peradaban Barat di atas. Beberapa generasi Islam akhirnya menjadi silau dan berupaya bisa maju seperti Barat. Untuk menjadi maju mereka berpikir, tidak ada jalan lain kecuali mengikuti cara Barat.

Menurut para responden, Islam selamanya tidak dapat direkonsiliasikan dengan Barat. Banyak pula yang meyakini bahwa demokrasi tidak akan mungkin dicari dasar penguatnya dalam ajaran Islam, karena demokrasi pada dasarnya memberikan kekuasaan kepada masyarakat (rakyat), termasuk di dalamnya kekuasaan menciptakan hukum, karena hukum memang dipahami berasal dari nilai-nilai normatif masyarakat. Sedangkan dalam Islam, kekuasaan untuk mengatur kehidupan itu semata-mata merupakan hak Allah. Seorang responden di Bogor mengemukakan:

> Pengertian demokrasi adalah kedaulatan di tangan rakyat. Implikasinya hak membuat hukum ada di tangan rakyat, bukan di tangan Allah. Jika demikian, maka de-

mokrasi bertentangan dengan Islam yang mengakui hak membuat hukum itu hanya milik Allah.

Di sinilah doktrin Khilafah Islamiyah sebagaimana yang dimunculkan oleh kelompok HTI mendapatkan tempat. Bagi mereka, Khilafah Islamiyah adalah jawaban Islam terhadap dominasi sistem demokrasi Barat yang sudah begitu mendalam merasuki relung masyarakat Islam di dunia ini. Meski secara formal doktrin Khilafah Islamiyah diusung oleh HTI, namun dalam wacana publik banyak kelompok garis keras sepakat dengan agenda HTI ini karena di dalamnya terkandung agenda legislasi hukum Islam yang menjadi obsesi semua kelompok garis keras. Persoalannya, lagi-lagi mayoritas umat Islam Indonesia tidak sepakat dengan doktrin Khilafah Islamiyah. Bahkan ormas Islam terbesar seperti NU menyebut Khilafah Islamiyah yang dibawa HTI sebagai ideologi transnasional yang berbahaya bagi bangsa Indonesia.[51]

Obsesi kepada sistem khalifah membuat HTI menolak sistem pemerintahan Indonesia yang ada sekarang, yang menurut mereka sekadar turunan dari sistem demokrasi Barat. Pandangan ini sejalan dengan MMI yang juga menolak sistem demokrasi karena buatan manusia yang pasti mengandung banyak cacat. Sebagai alternatifnya, MMI mengusung konsep "Allah-krasi," yaitu sistem pemerintahan berdasarkan hukum-hukum Tuhan yang sempurna. Allah-krasi lah, dan bukan demokrasi, yang akan membawa kebaikan bagi segenap umat manusia. Untuk tegaknya sistem Allah-krasi itu, MMI memperjuangkan negara Islam dan menolak pemerintahan Indonesia yang sekular karena menerapkan Pancasila sebagai asas tunggal.[52]

---

51. Untuk kutipan lengkap keputusan Bahtsul Masa'il tentang Khilafah Islamiyah, lihat Lampiran 2; baca juga: "Caliphate not part of Koran: NU," *The Jakarta Post*, 25 November 2007. Lihat juga, "PBNU Desak Pemerintah Cegah Ideologi Transnasional," *NU Online*, 29 April 2007.
52. Wawancara Abu Bakar Basyir, *Sabili* No 12 Th X Januari 2003, h. 25.

Namun pada kenyataannya, MMI tetap bisa berkompromi dengan sistem pemerintahan yang ada. Perjuangan MMI dalam penegakan syari'ah pun diwujudkan dalam bentuk usulan-usulan rumusan undang-undang atau peraturan kepada lembaga politik yang ada (eksekutif atau legislatif) ketimbang menolak terlibat dengan pemerintah sebagaimana yang ditunjukkan oleh HTI. Meski pendekatan mereka berbeda, baik HTI maupun MMI sesungguhnya memiliki sifat yang sama dalam pandangan hukum mereka yaitu absolutistik dan totaliter, sehingga tujuannya tetap sama dalam aspek menguasai hukum yang ada untuk disubordinasikan ke dalam pandangan hukum mereka.

Pendapat para responden penelitian ini nyaris sama dalam hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai abstrak atau dimensi teologis hukum Islam. Sedangkan dalam hal-hal yang lebih aplikatif dan aksi implementatif hukum tersebut, terdapat polarisasi. Pandangan teologis mereka sama bahwa syari'ah tidak lain adalah hukum Tuhan yang diturunkan di bumi untuk mengatur seluk-beluk kehidupan orang Islam baik dalam hal kehidupan individu maupun bermasyarakat. Namun dalam hal praksis, tidak ada kata sepakat mengenai implementasi ajaran syari'ah tersebut dalam kehidupan nyata.

Polarisasi itu terbentuk karena adanya benturan antara pertimbangan imaginatif mereka dengan realitas kehidupan itu sendiri. Akibatnya, muncullah berbagai bentuk gerakan Islam dari yang cenderung keras seperti ingin menegakkan Khilafah Islamiyah di pentas politik nasional, terang-terangan menolak demokrasi (tidak ikut pemilu, misalnya), serta bersikap frontal terhadap NKRI (direpresentasikan oleh HTI), hingga gerakan yang ingin menegakkan supremasi syari'ah di pentas nasional tapi melalui mekanisme demokrasi dan karena itu ikut pemilu (direpresentasikan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS). Ada juga yang ingin menegakkah syari'ah dalam lingkup daerah seperti KPPSI di Sulawesi Selatan dan Sumatera Barat.

Pertanyaannya kemudian: Apakah kampanye penegakan syari‘ah tersebut dapat diterima oleh masyarakat Indonesia yang plural yang telah menerima Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber hukum nasional? Apakah metode penyampaiannya sesuai dengan prinsip-prinsip syari‘ah itu sendiri?

Jika menengok negara-negara yang sudah menerapkan syari‘ah seperti Arab Saudi, Iran, Sudan, Afghanistan, Pakistan, Nigeria, dan lain-lain, maka penerapan syari‘ah Islam, lebih tepatnya penerapan fikih, sebenarnya sama sekali tidak menjanjikan. Puluhan ribu orang mati di Sudan Selatan karena perang sipil ketika sistem syari‘ah diperkenalkan pada tahun 1983. Di beberapa propinsi Nigeria, di mana hukum syari‘ah dalam bentuk *hudud* diberlakukan, orang-orang dicambuk dan dipotong tangannya, untuk menunjukkan bahwa rezim penguasa adalah orang-orang yang konsisten melaksanakan hukum Allah. Di Pakistan dan Afghanistan hampir setiap saat bom meledak karena pemahaman yang kaku terhadap syari‘ah. Bahkan di Mesir yang cenderung sekuler, seorang penulis wanita (Farah Fauda) mati dibunuh di depan apartemennya oleh seseorang yang tengah melaksanakan fatwa ulama yang menyebut bahwa sang penulis telah murtad. Seorang ulama Mesir yang membela si pembunuh menyatakan bahwa jika pemerintah gagal melaksanakan syari‘ah (termasuk membunuh yang murtad tadi) maka setiap muslim berhak melaksanakan pembunuhan itu. Penerapan syari‘ah dengan otoritas *wilâyatul faqih* di Iran sejak 1979, telah menyebabkan banyak umat Islam Syi‘ah menjadi risih dengan kemunafikan ulama dan kemudaian menolak Islam. Iran juga tercatat sebagai salah satu negara dengan prosentase tertinggi kecanduan narkoba di dunia. Sementara penerapan *fiqh* Wahabi di Arab Saudi bisa terlihat dalam kasus seperti belasan gadis sekolah yang terbakar hidu-hidup setelah ditolak menyelamatkan diri dari gedung sekolahnya yang terbakar oleh polisi agama semata karena mereka tidak memakai cadar.

Perang sipil dan pertumpahan darah di Sudan Selatan terjadi

karena penerapan syari'ah. Konflik berdarah di Nigeria utara terjadi karena kelompok-kelompok garis keras yang diinspirasi Wahabi ingin memberlakukan syari'ah, sementara Nigeria adalah negara plural dengan konstitusi non-agama seperti Indonesia. Menurut laporan, ketika syari'ah Islam pertama kali diterapkan di Nigeria utara, lebih dari 6000 orang mati akibat konflik agama antara 1999-2002. Di wilayah Kaduna, sekitar 2000 orang meregang nyawa akibat kerusuhan agama yang dipicu oleh penerapan syari'ah pada tahun 2000. Kerusuhan agama yang dipicu oleh penerapan syari'ah juga terjadi di daerah-daerah Bauchi, Jos, dan Aba, yang menelan korban nyawa ratusan orang.[53]

Apakah Perda-perda Syari'ah Islam yang banyak bermunculan di tanah air kita akhir-akhir ini akan menciptakan "kebahagiaan" yang sebenarnya bagi bangsa Indonesia jika sudah terbukti gagal di negara-negara lain? Satu-satunya cara untuk mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan hidup yang sebenarnya di dunia dan akhirat, adalah dengan mngkuti syari'ah dalam pengertiannya yang paling dalam dan luas, yakni sebagai jalan menuju Allah swt. Realisasi semacam ini bisa terlihat pada jiwa-jiwa yang tenang, yang berserah diri, tunduk, dan patuh secara jasmaniah (fisikal), nafsaniyah (emosional), dan rohaniah (spiritual) hanya kepada-Nya, dan menjaga diri agar tidak didominasi oleh hawa nafsu. Kebahagiaan dan kesempurnaan hidup tidak akan pernah bisa dicapai melalui pemaksaan maupun formalisasi agama, tetapi melalui kesadaran yang tumbuh di dalam hati. Ironisnya, hampir semua garis keras sepakat untuk menerapkan syari'ah dalam arti sempit (baca: hukum Islam) sambil menolak spiritualitas untuk mencapai tujuan yang sebenarnya.

Memanfaatkan atau Menolak Demokrasi untuk Menegakkan Syari'ah?

Demokrasi adalah sistem yang dipilih bangsa Indonesia sejak

---

53. "Nigeria's Muslim-Christian Riots: Religion or Realpolitik," *The Economist*, 17 Januari, 2003.

berdirinya Republik ini, mulai dari Demokrasi Terpimpin yang dipraktikkan Soekarno sampai Demokrasi Pancasila yang diusung Orde Baru. Meskipun kedua model demokrasi tersebut pernah dimanipulasi oleh rejim yang berkuasa waktu itu, di era reformasi ini demokrasi masih tetap dianggap sebagai pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia.

Dalam penelitian ini muncul karakteristik kelompok-kelompok garis keras yang menunjukkan adanya dua wajah. Lima puluh sembilan persen (50%) menolak demokrasi karena dipandang tidak sesuai dengan ajaran Islam, namun empat puluh satu persen (41%) yang lain —termasuk kebanyakan pendukung PKS— menerima demokrasi untuk mencapai tujuan mereka. Baik yang menerima maupun yang menolak akhirnya bertemu pada tujuan yang hendak mereka capai, yaitu legislasi hukum Islam dan mendirikan Negara Islam. Jika tujuan itu sudah tercapai, kelak dengan sendirinya demokrasi bisa dibuang, karena demokrasi dalam hal ini hanya sebagai alat sementara untuk mencapai tujuan. Hal ini telah berhasil dilakukan, misalnya, oleh Hamas yang berideologi Ikhwanul Muslimin di Palestina yang memanfaatkan demokrasi untuk menguasai pemerintahan, dan setelah berkuasa mereka kemudian menghancurkan kelompok Islam yang lain (baca: kelompok Fatah). Ringkasnya, demokrasi digunakan untuk tujuan yang tidak demokratis.

Kelompok-kelompok garis keras yang tidak menerima demokrasi mendasarkan diri pada pertimbangan teologis dan sosiologis. Secara teologis demokrasi dianggap sistem yang tidak Islami karena tidak berasal dari Islam. Sebagai ciptaan manusia, demokrasi dijalankan tanpa landasan tauhid dan keimanan. Padahal dalam Islam, sistem politik harus didasarkan pada al-Qur'an dan Sunnah. Asumsi yang dibangun dalam demokrasi bahwa kekuasaan di tangan rakyat bertentangan dengan Islam yang menganggap kekuasaan di tangan Tuhan. Dalam demokrasi, keputusan didasarkan pada suara terbanyak, sedangkan dalam sistem Islam

(khilafah) pengambilan keputusan harus lewat *ahl hall wal 'aqdi*, yang di dalamnya duduk para tokoh yang memiliki otoritas. Dalam konteks ini yang lebih ditekankan adalah kompetensi bukan jumlah suara yang didapat. Seorang responden mantan anggota Laskar Jihad, mengatakan:

> Mengangkat presiden dengan suara terbanyak bertentangan dengan al-Qur'an. Apalagi kalau dikatakan suara rakyat adalah suara Tuhan. Kebenaran tidak boleh diatur dengan suara terbanyak. Dalam Islam, mengangkat pemimpin itu dengan syura oleh orang-orang berilmu.

Penolakan kelompok garis keras tidak hanya terhadap demokrasi, tapi juga terhadap perangkat yang menyertainya, seperti pemilu. Pemilu dianggap haram hukumnya karena ia dilaksanakan bukan untuk mengimplementasikan hukum Islam, tapi hukum sekuler yang diputuskan lewat suara mayoritas. Demokrasi dianggap tidak tepat karena mayoritas bangsa Indonesia adalah Muslim. Para responden menyatakan bahwa sudah sewajarnya jika syari'ah Islam dijadikan sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka berdalih demokrasi telah gagal menjawab problem kontemporer bangsa dan gagal melahirkan perubahan. Ketika sistem demokrasi telah gagal, mengapa sistem Islam tidak diberi kesempatan untuk dijadikan sebagai alternatif? Bagi sebagian responden, demokrasi sudah harus diganti dengan sistem yang berbasiskan pada syari'ah Islam yang punya kepastian hukum yang tetap karena diciptakan oleh Allah.

Tak lepas dari ideologi totalitarian-sentralistik yang dianutnya, para agen kelompok-kelompok garis keras selalu merespon permasalahan dalam dikotomi dan oposisi-biner. Terkait dengan demokrasi, mereka berpikir bahwa Tuhan turut bermain secara efektif dalam percaturan politik praktis. Itu sebabnya mereka menilai demokrasi sebagai pesaing bagi kekuasaan Tuhan. Hal ini

kerap dilakukan orang-orang yang inferior dan mengajak atau membawa Tuhan terlibat dalam kontestasi politik mereka untuk meraih kekuasaan. Sebagai alternatif, mereka menawarkan *ahl al-hall wal 'aqd* dalam memilih pemimpin atau penguasa politik. Mereka berpikir, dalam majlis *ahl al-hall wal 'aqd* semuanya berjalan lancar-lancar saja dan tidak ada permasalahan. Andai mereka jeli membaca sejarah Islam, khususnya alasan mengapa 'Umar ibn al-Khaththab menetapkan tujuh orang sebagai *ahl al-hall wal 'aqd* untuk memilih penggantinya, pasti mereka sadar. Mungkin mereka melihat *ahl al-hall wal 'aqd* memang sempurna, atau pengetahuan mereka sangat dangkal tentang Islam dan hal-hal praktis terkait lainnya. Hal ini juga terlihat, antara lain, dalam reduksi syari'ah semata sebagai seperangkat aturan hukum. Padahal, sebagaimana makna dasarnya, ia mencakup keseluruhan pedoman hidup untuk berserah diri, tunduk, dan patuh kepada Allah swt., hingga bisa merasakan kehadiran-Nya.

Khilafah Internasional

Khilafah internasional, atau Khilafah Islamiyah menurut Hizbut Tahrir dan kelompok-kelompok garis keras lainnya, adalah gerakan politik dengan orientasi internasional. Hal ini ditegaskan, antara lain, oleh majlis Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama bahwa gagasan tersebut, sekalipun dilekatkan pada kata sifat *islam*, tidak mempunyai rujukan dan landasan teologis apa pun di dalam al-Qur'an maupun al-Hadits.[54] Kata *islamiyah* digunakan hanya untuk memberi bobot teologis dan lebih sebagai komoditas politik.

Khilafah Islamiyah merupakan topik yang hangat dalam diskursus Islam di Tanah Air saat ini. HTI adalah organisasi Islam yang paling gencar menyuarakan isu Khilafah. Menurut salah seorang responden, organisasi ini punya target bahwa pada 2015 nanti isu Khilafah telah bisa diterima dan tidak dianggap sebagai sesuatu yang utopis oleh publik di Indonesia.

---

54. Lihat lampiran 2 buku ini.

Meski banyak responden (41%) yang mempercayai demokrasi bisa digunakan untuk mencapai tujuan, namun pada saat bersamaan hampir 74% responden juga setuju dengan ide Khilafah Islamiyah karena dianggap sebagai sistem yang paling sesuai dengan syari'ah Islam. Ide-ide khilafah telah mempengaruhi sebagian umat Islam, yang bisa dilihat dari dua pernyataan responden berikut ini:

> Kalau ada orang Islam yang tidak sepakat dengan khilafah, maka Islamnya harus dipertanyakan. (Aktivis Ikhwanul Muslimin UGM)

> [D]i dunia ini ada dua sistem, yaitu sistem cara Islam [khilafah] atau sistem cara kafir. Nah sistem kafir ini banyak sekali ada liberalisme, kapitalisme, komunisme, dan di Indonesia ada sistem Pancasila." (Aktivis MMI)

Para responden berpendapat bahwa umat Islam harus memakai sistem khilafah agar ajaran-ajarannya bisa diwujudkan dalam sebuah negara. Idealisme ini menunjukkan bahwa mereka merupakan pengusung "Islam ideologis" dan "Islam politis," yaitu menjadikan Islam sebagai sistem yang harus diterapkan dalam seluruh kehidupan melalui kekuasaan negara, baik dalam skala nasional (Negara Islam) maupun transnasional (Khilafah Islamiyah).

Dalam seminar tentang penegakan Syari'ah Islam yang berlangsung di Yogyakarta pada 5 September 2007, Sidiq al-Jawi dari HTI dan Irfan Awwas dari MMI menyatakan bahwa mereka memiliki tujuan yang sama, yakni menegakan Khilafah Islamiyah, walaupun dengan metode yang berbeda. HTI dengan cara menegakkan khilafah di Indonesia, MMI dengan cara memformalkan syari'ah Islam dalam Perundang-undangan di Indonesia.

Menurut pendapat dua orang ini, hukum hanya dari Allah, maka tidak ada hukum selain dari Allah di muka bumi ini. Hu-

kum yang bukan dari Allah adalah sesat dan kafir, tidak perlu ditaati. Ketaatan harus kepada hukum Allah saja. Oleh sebab itu, jika ada orang Islam yang tidak setuju dengan Khilafah Islam dan formalisasi syari'ah Islam di Indonesia maka sejatinya dia adalah orang-orang yang sesat dan salah asuhan, sudah terkena paham sekular yang memisahkan agama dan negara.

MMI dan HTI juga menolak Negara Pancasila yang dianggapnya telah merusak Indonesia, dan ini semua akibat kaum nasionalis sekuler seperti Soekarno, Hatta, dan para Pimpinan nasional lain di Indonesia. MMI dan HTI berpandangan bahwa untuk menyelamatkan Indonesia tidak lain kecuali harus dengan syari'ah Islam dan Khilafah Islamiyah, sebab hanya Islam yang mampu menjawab semua masalah di Indonesia. Penegakan syari'ah Islam hukumnya wajib, sebab Islam itu *kaffah* tidak bisa pilih-pilih. Bagi MMI dan HTI, penegakkan syari'ah Islam tidak akan sempurna tanpa adanya kekuatan dari negara yang mendukungnya. Karena itu, ujarnya, agar Syari'ah Islam bisa tegak sempurna di Indonesia, tidak ada lain kecuali Indonesia harus menjadi Negara Islam atau Khilafah Islamiyah, bukan Negara Pancasila seperti sekarang ini yang membuat sengsara banyak orang Islam.

Tentang penegakan syari'ah Islam, Jamaah Tarbiyah menyatakan dukungannya karena itu menjadi misi yang harus dikerjakan oleh semua umat Islam. Syari'ah Islam harus ditegakkan karena kerusakan moral yang terjadi disebabkan umat Islam tidak menegakkan syari'ah Islam. Jika kita menengok Madinah maka sebetulnya kelompok mayoritas senantiasa bertindak sebagai kelompok yang menentukan. Dalam pandangan aktivis kelompok ini, suatu saat nanti Indonesia harus menjadi Negara Islam sebab mayoritas penduduknya beragama Islam, dan penduduk non-muslimnya tidak akan terganggu.

Pandangan bahwa mayoritas berhak menentukan —ketika mengutip Madinah— ini bertentangan dengan argumentasi mereka ketika menolak demokrasi di atas, yang di dalamnya dinyatakan

bahwa keputusan tidak boleh diambil berdasarkan suara terbanyak.

Dukungan yang sangat tegas dan jelas tentang perlunya Khilafah Islamiyah juga datang dari lembaga-lembaga dakwah kampus (LDK). Khilafah Islamiyah, kata mereka, adalah sebuah keniscayaan yang telah dijanjikan Allah, karena itu tidak usah kita ingkari. Namun demikian, Khilafah Islamiyah harus ditegakkan secara bertahap, perlu ada pembinaan dan penyadaran pada masyarakat secara terus-menerus dan pelan-pelan. Dengan demikian, tahun 2015, di Indonesia bisa dicanangkan berdirinya Khilafah Islamiyah.

Negara Islam dan Non-Muslim

Para responden dari KPPSI Sumatera Barat memiliki pendapat yang sama dengan HTI dalam hal penegakan Syari'ah Islam, seperti halnya Jamaah Tarbiyah di Medan. Mereka sepakat bahwa Perda-Perda Syari'ah didukung agar masyarakat sedikit demi sedikit terbebas dari penyakit masyarakat yang makin membahayakan. Masyarakat membutuhkan solusi yang tepat dalam hidup sehari-hari. Solusi yang tepat itu adalah syari'ah Islam.

Di sinilah sebenarnya titik temu antara berbagai kelompok garis keras dalam perjuangan mereka. Walaupun bahasa yang mereka gunakan berbeda namun intinya sama, yakni bagaimana agar Perda-Perda Syari'ah Islam di negeri ini bisa terlaksana, dengan demikian ini sebenarnya merupakan bagian dari gerakan menegakkan Negara Islam tetapi melalui konstitusi negara yang disahkan melalui DPRD, DPR, dan seterusnya.

Para aktivis KAMMI DIY melihat Perda Syari'ah dan Negara Islam merupakan kebutuhan masyarakat pada saat bangsa mengalami krisis seperti sekarang ini. Masyarakat harus didorong agar melaksanakan syari'ah sehingga mereka benar-benar memahami apa itu syari'ah. Di sini kita melihat bahwa tujuan para aktivis KAMMI, HTI dan Jamaah Tarbiyah sebenarnya sama, yakni me-

negakkan syari'ah, hanya metodenya saja yang berbeda. HTI ingin menegakkan Khilafah secara langsung tanpa mengakui pemerintahan yang ada, sementara aktivis Jamaah Tarbiyah dengan cara yang perlahan-lahan dan bertahap.

Pendapat responden yang berafiliasi dengan HTI, KAMMI, KPPSI dan Jamaah Tarbiyah tentang Perda Syari'ah dan Khilafah Islamiyah memiliki kemiripan namun dalam membahasakannya terdapat perbedaan. Pada dasarnya mereka mempunyai satu suara yaitu bagaimana Perda Syari'ah Islam dan Khilafah Islamiyah bisa berdiri. KPPSI dan Jamaah Tarbiyah melalui jalur politik dan kultural, sedangkan HTI dengan jalur kekuasaan pragmatis, sementara KAMMI dengan jalur politik di kampus maupun di parlemen sebagai sayap politik PKS. Karena itu tidak keliru untuk mengatakan bahwa penegakan syari'ah sudah menjadi agenda bersama. Gagasan penegakan syari'ah Islam (*tathbiq al-syari'ah*) dinyatakan oleh Amir MMI, Abu Bakar Ba'asyir, demikian:

> NU, Muhammadiyah dan lain-lain sudah banyak berperan dalam membina individu dan keluarga. Tetapi hasilnya kita rasakan sangatlah minim. Bukan salah NU dan ormas-ormas Islam, tapi salahnya pemerintah yang tidak mau memakai hukum Islam. Maka, saya katakan, pemerintah itu sekarang merusak moral rakyat. Jadi, pembinaan-pembinaan yang kita lakukan selama ini dirusak oleh kebijakan pemerintah... Jadi kami tinggal memusatkan perhatian dan melakukan Islamisasi pemerintah. Harus pemerintah yang 100% menjalankan hukum Islam, dasarnya Islam. Tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Pandangan-pandangan di atas sejalan dengan survei PPIM UIN Jakarta tahun 2002. Sebanyak 67% dari jumlah responden menyatakan perlunya Indonesia diperintah dan diatur dengan hukum Islam, sementara survei yang sama pada tahun 2001 hanya

berkisar 57%. Terkait kepemimpinan dalam Islam, 67% responden menyatakan setuju Indonesia dipimpin berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, dan 70,8% setuju Indonesia menjadi Negara Islam.

MMI dengan program *tathbiqusy syari'ah*-nya (penegakkan syari'ah) menggunakan gerakan dakwah dan gerakan tajdid. Menurut MMI, Islam merupakan ideologi alternatif yang harus ditegakkan sesuai ketentuan Allah melalui hamba-Nya di muka bumi. MMI berpendapat bahwa di Negara Syari'ah kalangan non-Islam tidak akan dipaksa masuk Islam. Mereka diperbolehkan tetap dalam agamanya masing-masing, bahkan dalam hal khusus, mereka tidak akan dikenai hukum syari'ah. Merekalah yang disebut sebagai *kafir dzimmi*, yakni orang-orang non-Muslim yang berada di bawah pemerintahan Islam atau Negara Islam dan wajib membayar pajak untuk mendapat perlindungan penguasa. Tetapi ada juga orang non-Muslim yang disebut sebagai *kafir harbi*, yakni orang non-Muslim yang memusuhi Islam.

Menurut MMI, di Indonesia ini belakangan banyak orang non-Muslim yang masuk dalam kategori *kafir harbi*, karena kebencian mereka pada Islam baik yang ditunjukkan dengan ucapan maupun tindakan. Dalam ucapan, orang-orang tersebut banyak memberikan pernyataan yang memojokkan Islam; demikian juga dalam tindakan, seperti misalnya penolakan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas), sehingga orang non-Muslim sebenarnya telah berbuat zalim pada umat Islam. Walhasil, mereka layak disebut sebagai kaum *kafir harbi,* kelompok non-Muslim yang boleh diperangi.

Pandangan MMI dan kelompok yang sejenis tersebut memperlihatkan simplifikasi mereka dalam membangun konsep-konsep keislaman. Mereka terkesan kuat dalam meletakkan Islam formal dalam oposisi biner dengan nilai-nilai Islam substantif yang tidak sejalan atau mendukung agenda mereka. Ada kecenderungan kuat bahwa retorika kelompok-kelompok garis keras seperti pernyataan MMI di atas merupakan pengantar menuju aksi-aksi kekerasan atau teroris-

me yang dari sudut pandang manapun tidak bisa dibenarkan.

Memperhatikan ideologi dan gerakan kelompok garis keras, nuansa kental yang terpampang kuat adalah kecenderungan mereka untuk menolak kompromi budaya. Sejalan dengan itu, mereka menjadikan pemahaman dirinya tentang agama sebagai *model of reality*, sebagai bentuk kongkret dan final yang harus direpresentasikan dalam realitas kehidupan apa adanya. Mereka merasa berhak memainkan peran sebagai juru bicara Tuhan, sehingga hanya tafsirnya saja yang benar dan harus diterima oleh siapa pun. Ketika mengatakan bahwa hukum adalah milik Allah swt., mereka menggunakan ayat tersebut untuk memperkuat posisi politiknya karena tafsirnya tentang Islam secara langsung disandarkan kepada kebenaran mutlak Allah swt. Dengan cara demikian mereka menolak sejarah dan perkembangan sosiologis. Alih-alih akan merespon kehidupan secara bijaksana, mereka malah berusaha mengembalikan kehidupan ke masa-masa yang mereka anggap ideal. Kecenderungan mereka ini pada umumnya disebabkan ketidakmampuan menjalani modernisme secara kreatif, dan/atau menyikapi Barat secara kritis dan konstruktif.

Menghadapi Tantangan Modernitas

Umat Islam Indonesia pada umumnya bersikap positif terhadap modernitas dan menghadapi tantangannya secara kreatif; sementara kelompok garis keras bersikap reaksioner terhadap modernitas, mereka menolaknya karena dianggap produk Barat; mereka mengidealkan masa lalu dan ingin kembali ke masa lalu. Kelompok garis keras ini disebut demikian karena memang memiliki ciri yang menonjol dalam hal keyakinannya, yaitu menganut paham absolutisme, keras, dan tak kenal kompromi. Dalam banyak hal kelompok ini menjadi puris, dalam arti ia tidak toleran terhadap berbagai sudut pandang yang ada dan berkompetisi, bahkan memandang keragaman sebagai kontaminasi atas kebenaran yang mereka yakini.

Salah satu isu modernitas yang muncul di dunia Islam adalah masalah kesetaraan laki-laki dan perempuan. Kelompok-kelompok garis keras memiliki pandangan bahwa kaum perempuan wajib menjadi ibu rumah tangga, bukan berperan aktif dalam ranah publik. Paham kelompok garis keras ini berbeda jauh dari paham kebanyakan umat Islam moderat, yang diwakili Muhammadiyah dan NU. Muhammadiyah, misalnya dalam keputusan Tarjih di Padang, 2002, memutuskan bahwa tidak ada halangan bagi perempuan untuk terlibat dalam ranah publik, termasuk terlibat dalam partai politik, atau menjadi presiden. Ada kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk terlibat di dalamnya.

Dalil yang sering menjadi sandaran bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan merupakan dalil untuk kepemimpinan dalam rumah tangga (keluarga) dan harus dipahami sebagai tanggung jawab suami atas keluarga untuk memberikan nafkah yang cukup, bukan dalil untuk membatasi aktivitas publik perempuan, apalagi tunduk pada laki-laki. Pendapat Majlis Tarjih Muhammadiyah ini berbeda dari pendapat kelompok garis keras yang cenderung menolak kepemimpinan perempuan, termasuk penolakan terhadap keterlibatan perempuan sebagai pemimpin politik. Hal itu bisa dilihat dalam pernyataan di bawah ini:

> Perempuan itu harus diarahkan menjaga moral anak-anak, karena laki-laki adalah pemimpin dunia dan keluarga. Konsep kesetaraan gender merupakan konsep Barat yang bertentangan dengan Islam. Jika Islam terlihat mengekang perempuan maka itu demi menjaga fitnah dalam keluarga. (Aktivis Wahdatul Islamiyah).

Para responden pada umumnya sepakat menempatkan perempuan pada posisi domestik, jika tidak dikatakan di bawah laki-laki, sebab laki-laki kodratnya adalah pemimpin perempuan.

Hal lain yang juga menonjol dari isu modernitas adalah ma-

salah pemahaman terhadap pluralisme atau pandangan yang menyangkut para penganut agama lain. Kelompok garis keras pada umumnya meyakini bahwa non-Islam adalah kelompok kafir dan tidak akan rela dengan Islam, dan akan membuat kerusakan terhadap Islam.[55] Kelompok Islam moderat memahami bahwa plu-

55. "Ada kecenderungan dari sebagian kelompok Muslim tertentu, yang mengoposisi-binerkan antara Islam dengan kafir. Dalam arti begini, muslim adalah umat Islam, selain umat Islam adalah kafir. Ini yang cenderung menguat saat ini... Lebih dalam lagi, adalah orang yang memahami keimanan secara monopolistik, jadi seakan-akan yang tidak seperti pemahaman dia, itu sudah tidak iman lagi. Ini sebenarnya fenomena lama, tidak hanya sekarang. Dulu pada saat *Syaidina Ali Karram-Allah wajhah* (semoga Allah memuliakannya) kita kenal sebuah kelompok namanya *Khawarij* yang mengkafirkan semua orang di luar golongannya. Nah ini semua sampai sekarang reinkarnasinya masih ada, sehingga seperti Azhari datang ke indonesia *ngebom*, itu dia merasa mendapat pahala... Kafir itu sebenarnya merujuk pada konsep orang yang mengingkari nilai-nilai ketuhanan atau bahkan nilai-nilai kemanusiaan. Di dalam Islam ada konsep *kafir bin-nikmat* (menolak mengakui kenikmatan yang diberikan Allah swt.) itu, ya sebenarnya intinya sama. Ketika seseorang sudah tidak menghargai nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai yang intinya moralitas luhur, bagaimana kepedulian terhadap sesama, bagaimana membangun solidaritas, semuanya dinegasikan, maka itu semuanya kafir. Terlepas agamanya apa... Jadi definisi kafir di dalam Al Quran, sepanjang yang saya ketahui, itu adalah lawan dari orang yang bersyukur. Tuhan itu hanya membagi manusia dalam dua kelompok saja: yang berterimakasih, yang bersyukur, dan yang kafir. Kafir itu yang tidak bersyukur; *La-in syakartum la-azidannakum wa la-in kafartum inna 'adzabi lasyadid* (Kalau kamu bersyukur kami tambah nikmatku, kalau kamu kufur--azab-Ku sangat pedih). Sampai Nabi Sulaiman saja berkata di dalam Quran, "*Hadza min fadl-li Rabbi-liyabluwani aasykuru am akfuru* (Ini adalah anugrah Tuhan kepadaku untuk menguji apakah aku ini orang syukur atau orang kufur) (QS. Al-Naml, 27:49), itu kata Al Quran. Orang kafir itu tidak selalu non-muslim. Seorang muslim pun bisa kafir, kalau dia tidak berterimakasih, tidak bersyukur, atau tidak berterima kasih kepada sesama manusia dia disebut kafir. Atau kalau dia diberi peringatan kemudian dia tidak mengubris peringatan itu, dia disebut kafir... Saya tidak menemukan satu pun dalam al-Quran bahwa definisi kafir itu sama dengan non-muslim, seperti definisi kita sekarang ini, kalau kita tanya orang, apa yang disebut kafir adalah pasti non-muslim." (Secara berurutan, penjelasan Prof. DR. KH. Abdul A'la, DR (HC) KH. Hasyim

ralisme adalah suatu keharusan dalam sebuah masyarakat yang majemuk seperti Indonesia. Prinsip pluralisme memberi landasan bagi sikap-sikap toleransi yang harus dikembangkan terhadap perbedaan-perbedaan agama dan keyakinan.

Menurut kelompok moderat, pluralisme memiliki landasan yang kuat dalam Islam, karena al-Qur'an sendiri sangat menghargai perbedaan-perbedaan di kalangan manusia. Tidak demikian halnya dengan kelompok garis keras yang meyakini bahwa kelompok di luar Islam adalah ancaman yang selalu berusaha untuk menghancurkan Islam. Kelompok garis keras juga menganggap pluralisme berbahaya karena melemahkan akidah Islam.

Fenomena ini merupakan indikasi kemunduran dalam Islam Indonesia, karena sejatinya umat Islam Indonesia sejak dulu tidak pernah mempermasalahkan pluralisme (walaupun tidak dengan istilah yang sama) dan bahkan menganggapnya sebagai kelebihan Islam dalam memposisikan dirinya di tengah agama-agama lain. Munculnya citra 'Islam moderat' di Indonesia juga ditopang oleh wacana pluralisme ini. Baru belakangan, ketika kelompok-kelompok garis keras yang berorientasi totalitarian-sentralistik dan monolitik, yang merupakan karakter fasisme-komunisme, menguat di Indonesia, wacana pluralisme menjadi isu teologis dengan wajah yang buruk. Bahkan, bersama sekularisme dan liberalisme, pluralisme telah diharamkan oleh MUI yang lupa bahwa secara teologis apa pun dibolehkan dalam ranah interaksi sosial dan semua yang tercakup di dalamnya, kecuali yang dilarang (*al-ashlu fi al-mu'âmalah al-'ibâhah*).

Secara ringkas bisa dikemukakan, kelompok-kelompok garis keras telah mereduksi ajaran Islam menjadi seperangkat ideologi politik sebagai dalih dan senjata dalam meraih kekuasaan. Pemahaman mereka yang sempit dan kaku, di samping karena dang-

---

Muzadi, dan Prof. Dr. Jalaluddin Rakhmat dalam: *Lautan Wahyu: Islam sebagai Rahmatan lil-'Âlamîn*, episode 3: "Umat," Supervisor Program: KH. A. Mustofa Bisri, ©LibForAll Foundation 2009).

kalnya pemahaman tentang Islam dan khazanah intelektual yang telah dihasilkan selama berabad-abad di berbagai daerah dan berbagai disiplin membuat mereka tidak apresiatif terhadap pemahaman lain tentang Islam. Lebih dari itu, tidak adanya semangat tasawuf atau orientasi spiritual—yang berpadu dengan ideologi totalitarian-sentralistik, membuat mereka merasa sebagai yang paling benar. Di dalamnya, Tuhan pun tidak lagi signifikan. Hal yang penting adalah, bagaimana meraih kekuasaan dan memaksakan pemahamannya sendiri tentang Islam terhadap oran lain, sesuatu yang bahkan Tuhan pun tidak mau memaksakannya.

Bab IV

Infiltrasi Agen-agen Garis Keras terhadap Islam Indonesia

Pengantar

Faktor terpenting keutuhan bangsa Indonesia sejak dahulu hingga sekarang adalah kesetiaan para elit dan anak-anak bangsa pada warisan tradisi dan budaya bangsa Indonesia sendiri, dan berbagai keragaman dan kesamaan menjadi fakta yang diterima dan dihargai. Pada hakikatnya, tradisi dan budaya bangsa Indonesia mengandung pesan-pesan luhur berbagai agama. Namun bukan berarti menghasilkan agama baru, melainkan menyerap pesan-pesan luhur yang terkandung dalam semua agama yang dianut bangsa Indonesia. Karena itu, kesamaan ini menjadi perekat keutuhan bangsa, sementara perbedaan yang ada menjadi kekayaan dan tidak dipertentangkan.

Para tokoh nasional sebelum kemerdekan yang punya kepedulian kuat pada masalah-masalah kebangsaan terkait dengan agama, sudah sejak awal menyadari potensi ketegangan antara negara dan agama. Beberapa di antara mereka mulai mendiskusikan hubungan antara agama sebagai seperangkat ajaran dengan negara bangsa

atau nasionalisme.[1] Akhirnya diyakini, negara yang akan dibangun harus mampu menjamin keutuhan bangsa Indonesia serta melestarikan tradisi dan budaya bangsa. Dari sinilah lahir Pancasila yang dirumuskan dan digali Soekarno dari tradisi dan budaya bangsa Indonesia sendiri.

Secara historis maupun sosiologis dan kultural jelas bahwa Pancasila merupakan bagian integral dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Ini sebabnya, para tokoh dan pemimpin nasional memahami dengan tepat arti penting Pancasila bagi bangsa Indonesia, mereka juga merasakan bahwa di dalamnya terkandung pesan-pesan luhur semua agama. Tidak hanya itu, nilai-nilai luhur sebagaimana terkandung di dalam Pancasila tercermin dalam aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia yang moderat, toleran, *tepo-sliro*, dan lain-lain. Secara ringkas bisa dikatakan, praktik bangsa Indonesia adalah *living Pancasila*.

Memang, sekalipun hubungan antara Islam sebagai seperangkat ajaran dengan nasionalisme telah dibincang secara intensef jauh sebelum kemerdakaan, dalam sidang-sidang penetapan dasar negara—gagasan untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara sempat muncul ke permukaan. Hal ini bisa dimengerti, karena pada dekade 1940-an dan 1950-an merupakan masa subur dan berkecamuknya berbagai macam ideologi di seluruh dunia. Namun akhirnya, dengan pemahaman dan pengamalan agama yang sangat mendalam dan spiritual, yang lebih menekankan isi daripada kemasan, para Pendiri Bangsa meyakini Pancasila sebagai merefleksikan esensi syarî‘ah dan secara bulat menyepakati sebagai dasar negara.[2]

---

1. Baca dalam "Pengantar Editor" buku ini.
2. Hal ini tidak menafikan fakta seperti disampaikan Bung Hatta tentang utusan Indonesia timur yang telah menemuinya dan menyampaikan untuk tetap bergabung menjadi Indonesia asal tidak ada formalisasi agama (baca: Islam). Sikap terbuka para ulama yang mengamini usulan atau syarat seperti disampaikan Bung Hatta ketika itu menunjukkan jiwa besar mereka. Mereka sadar betapa keluhuran dan kebesaran Islam, keagungan Allah swt., yang tak terbatas—tidak

Esensi syari'ah dimaksud adalah tercermin dalam falsafah hidup bangsa Indonesia, yakni: pengakuan ketuhanan secara monoteistik (sila pertama); penghargaan pada nilai-nilai kemanusiaan dalam kerangka keadilan dan peradaban (sila kedua); penolakan secara eksplisit terhadap separatisme dan mendahulukan kebersamaan atau jamaah (sila ketiga); kepemimpinan yang bijaksana (*hikmah*) dengan sistem musyawarah dan perwakilan (sila keempat); jaminan kesejahteraan rakyat, keadilan dan perlindungan hukum untuk siapa pun tanpa kecuali (sila kelima). Tak satu pun dari pesan-pesan luhur ini yang bertentangan dengan ajaran agama manapun yang dianut bangsa Indonesia. Inilah yang dimaksudkan bahwa Pancasila merefleksikan esensi syarî'ah sebagaimana diyakini para Pendiri Bangsa.

Tidak bisa dipungkiri, kesadaran dan pemahaman yang mendalam atas tradisi dan budaya bangsa Indonesia pada satu sisi serta pemahaman dan pengamalan agama yang mendalam dan spiritual pada sisi yang lain, adalah faktor yang sangat menentukan keutuhan dan kelestarian Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemimpin Indonesia, terutama pemimpin formal pemangku kekuasaan politik, seharusnya orang yang mengerti dan setia pada tradisi dan budaya bangsa Indonesia pada satu sisi, serta mengerti secara mendalam dan mengamalkan agamanya secara spiritual pada sisi yang lain. Dalam hal ini, spiritualitas akan dengan kuat mendorong pada kesetiaan dan kejujuran menunaikan amanah kekuasaan.

Kekayaan dan keluarga, kekuasan dan relasi personal, semua adalah cobaan yang akan terus menggoda seseorang untuk setia pada amanah (kepercayaan) yang harus ditunaikan atau justru menggunakan amanah yang diperoleh untuk meraih keuntungan pribadi dan kelompok. Di tengah arus dana asing (Wahabi) yang sangat besar dan menggoda, kejujuran personal menjadi sangat

---

akan pernah bisa dibatasi oleh formalitas kekuasaan politik yang sangat terbatas.

penting dan berharga. Di tengah arus ideologi transnasional yang sangat kuat, kesetiaan pada tradisi dan budaya bangsa menjadi amat penting dan berharga. Di sinilah semua komponen bangsa —khususnya para pemimpin bangsa— harus sadar untuk melestarikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia pada satu sisi, dan terus berusaha memahami agama yang dianut secara mendalam dan mengamalkannya secara tulus pada sisi yang lain. Para pemimpin harus benar-benar menjadikan "tahta untuk rakyat" sebagai kenyataan, bukan jargon politik yang bisa ditukar dengan komoditas lain demi meraih kekuasaan.

Prasyarat dalam bidang kultural dan agama ini sangat penting, terutama di tengah maraknya penyusupan ideologi transnasional yang berusaha keras meruntuhkan NKRI dan melenyapkan Pancasila. Kelompok-kelompok garis keras menyalahkan para Pendiri Bangsa karena telah memilih Pancasila sebagai dasar negara, bukan Islam. Menurut mereka, inilah penyebab krisis multidimensional di Indonesia: krisis ekonomi, degradasi moral, tidak tegaknya keadilan, tidak adanya kepastian hukum, maraknya korupsi, dan lain sebagainya. Dengan menimpakan semua masalah ini pada Pancasila, mereka ingin menodai Pancasila untuk kemudian melenyapkannya. Mereka menawarkan pemahaman sempit dan terbatas tentang Islam sebagai pengganti Pancasila. Dengan kata lain, mereka menginginkan formalisasi Islam. Usaha formalisasi agama yang ditolak oleh Sunan Kalijogo pada masanya. Padahal sebenarnya, jika mau jujur, nilai-nilai luhur Pancasila belum sepenuhnya diwujudkan. Bahkan, Pancasila sempat disalahgunakan sebagai senjata politik oleh beberapa penguasa yang lalu.

Sambil terus menimpakan semua masalah bangsa pada Pancasila, ada beberapa kelompok yang terus melakukan *sweeping* dan perusakan tempat hiburan dengan dalih *amr ma'rûf nahy munkar*, memfitnah murtad atau kafir, termasuk mengancam dan/atau menyerang siapa pun secara fisik semata karena tidak sejalan dengan mereka. Anehnya, semua ini tidak mereka rasakan sebagai

degradasi moral maupun pelanggaran hukum. Beberapa aksi jalanan yang mereka lakukan tampak saling terkait dengan usaha-usaha konstitusional di parlemen, pemerintahan, dan fatwa MUI. Hal ini menjadi petunjuk bahwa mereka bekerja dengan sistem, bukan sebuah kebetulan, dalam usaha memperjuangkan ideologinya untuk mengatur semua aspek kehidupan bangsa Indonesia sesuai dengan pemahaman mereka yang sempit dan terbatas tentang Islam. Bahkan, ada indikasi kuat bahwa semua ini mendapat dukungan dana asing (Wahabi) yang luar biasa besar, dan masuk secara leluasa ke Indonesia.

Syeikh al-Akbar al-Azhar, Muhammad Sayyid Tantawi menilai aksi-aksi yang bersifat intimidatif, merugikan pihak lain secara materi maupun non-materi, mengancam keselamatan atau bahkan menghilangkan jiwa dan/atau mencederai raga siapa pun, sekalipun dilakukan atas nama dakwah dan/atau *amr ma 'rûf nahy munkar*, itu adalah dakwah yang salah dan umat Islam harus menolaknya. Bahkan, wajib hukumnya bagi pemerintah untuk menangkap para pelaku kejahatan (*jarîmah*) tersebut dan menghukumnya mereka sesuai dengan aturan yang berlaku. Dakwah apa pun yang tidak sejalan dengan pesan luhur agama, adalah dakwah yang salah dan harus ditolak.[3]

Ideologi kelompok-kelompok garis keras yang totalitarian-sentralistik adalah untuk menguasai dan mengatur semua aspek kehi-

3. "Secara harfiah dakwah adalah mengajak... menawarkan tauhid, menawarkan agama Islam, menawarkan *akhlakul karimah*, akhlak mulia... Bukan mengancam, bukan menghujat... Keliru kalau dakwah itu serba menghakimi orang, mengkafirkan orang, menyesatkan orang... Dakwah yang baik itu adalah dakwah yang mencerahkan, yang mendidik, yang mencerdaskan, dan memberi harapan kepada manusia......[S]emua dakwah yang berbeda dengan semua orientasi Ilahiyah ini, adalah dakwah yang salah." (Secara berurutan, penjelasah oleh KH. Masdar F. Mas'udi, Prof. KH. Said Aqil Siraj, Dr. Haedar Nashir, Prof. A. Syafi'i Ma'arif, dan Syeikh al-Akbar al-Azhar, Muhammad Sayyid Tantawi dalam: *Lautan Wahyu: Islam sebagai Rahmatan lil-'Âlamîn*, episode 5: "Dakwah," Supervisor Program: KH. A. Mustofa Bisri, ©LibForAll Foundation 2009).

dupan manusia. Sedangkan agenda mereka, menjadi wakil Tuhan (*khalîfah Allah*) untuk mengatur semua aspek kehidupan manusia. Untuk mewujudkan ambisi ini, mereka menyusup dengan segala cara ke hampir semua bidang kehidupan bangsa Indonesia; di sektor swasta dan pemerintahan, dunia pendidikan maupun penerbitan, dunia politik maupun bisnis. Islam pribumi dan orientasi spiritual adalah dua hal yang selalu mereka serang, karena keduanya menjadi hambatan utama mereka mencapai tujuan.[4]

Menurut Dr. Haedar Nashir, Ketua PP. Muhammadiyah,

> Pada umumnya gerakan ideologis masuk ke dalam lingkungan sosial tertentu bagaikan aliran air, dimulai dari tempat yang paling rendah dan terus mengalir untuk kemudian lama-kelamaan menjadi air bah, atau seperti orang makan bubur panas dari pinggir hingga ke tengah. Gerakan ideologis masuk dan mekar menempuh proses berikut ini: (1) Masuk ke lingkungan yang sepaham atau mirip sehingga akan dengan mudah diterima tanpa kecurigaan dan kemudian berkembang cepat; (2) Mula-mula menyembunyikan paham dan tujuan utamanya namun lama-kelamaan merasuk menjadi ideologi yang diterima; (3) Dikembangkan oleh aktor-aktor atau pelaku-pelaku yang memiliki daya militansi dan kegigihan yang tinggi (*true believers*); (4) Memanfaatkan suasana rentan di tubuh organisasi atau lingkungan yang dimasuki sambil

4. "Jadi saya melihat ini semua garis keras segala macam itu kalau kita cari hulunya itu dari mental orang Arab, itu sangat jelas. Mengapa kita seperti dikejar-kejar. Ambil Islamnya dong, jangan diambil tafsiran-tafsiran. Arabisme tidak sama dengan Islam, termasuk berpakaian segala macam itu bagi saya, itu [bukan Islam]. Itu namanya kita mengadopsi suatu kultur atau subkultur secara sangat tidak cerdas. Al-Quran hanya mau bersahabat dengan orang yang beriman dan orang yang cerdas." (Penjelasah Prof. A. Syafi'i Ma'arif dalam: *Lautan Wahyu: Islam sebagai Rahmatan lil-'Âlamîn*, episode 3: "Umat," Supervisor Program: KH. A. Mustofa Bisri, ©LibForAll Foundation 2009)

menunjukkan citra gerakannya sebagai lebih baik; (5) Menggunakan teori belah-bambu, yakni mendukung habis-habisan orang-orang yang bersimpati dan sebaliknya mengeliminasi atau mendelegitimasi orang-orang yang dianggap menjadi penghambat atau penentang ideologinya; (6) Menyuburkan benih-benih kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan pada ideologi-ideologi lain yang menjadi tandingannya untuk kemudian memasukkan virus ideologinya seolah-olah sebagai penawar; (7) Menyuburkan idiom-idiom yang positif (idealisasi) tentang paham/ideologinya sambil mendelegitimasi ideologi/paham dan keberadaan pihak/lingkungan yang dimasukinya; (8) Tidak segan mengembangkan *taqiyah*, yakni menyembunyikan agenda dan ideologinya yang sekati/sesungguhnya, sambil menampilkan hal-hal permukaan yang memikat atau menarik dari ideologinya; (9) Menampilkan diri sebagai "kekuatan alternatif" daripada yang lainnya dengan menggunakan filosofi air mengalir, yakni setelah ada celah atau lubang maka arus ideologi dan gerakannya masuk secara niscaya; (10) Tumbuh dan mekar karena di dalam organisasi/lingkungan yang dimasukinya ada pihak-pihak yang simpati, sepaham, dan mendukung; (11) Secara langsung atau tidak langsung memanfaatkan pihak-pihak yang ada di dalam yang merasa tidak puas dengan keadaan, baik karena alasan personal maupun organisasional, jadi mengalir mengikuti orang-orang yang kecewa di dalam untuk dijadikan penyambung ideologi gerakannya, seperti memanfaatkan suasana konflik internal; (12) Menggunakan sebanyak mungkin sarana/media yang dapat menyebarkan benih-benih ideologinya, termasuk media yang ada di dalam organisasi atau lingkungan yang dimasukinya.[5]

---

5. Haedar Nashir, *Manifestasi Gerakan Tarbiyah: Bagaimana Sikap Muhammadi-*

Walaupun Dr. Haedar menulis bukunya: *Manifestasi Gerakan Tarbiiyah: Bagaimana Sikap Muhammadiyah?* Untuk menyelamatkan ormas KH. Ahmad Dahlan dari infiltrasi PKS dan gerakan-gerakan garis keras lain, tulisannya juga sangat tepat sebagai penjelasan cara penyusupan gerakan Islam transnasional ke seluruh bidang kehidupan bangsa kita.

Menghadapi bahaya laten ini, pemimpin Indonesia haruslah orang yang mengerti tradisi dan budaya bangsa, yang mendalam pemahamannya tentang agama dan taat mengamalkannya secara spiritual. Hal yang pertama akan mendorong kesetiaan sejati pada tradisi dan budaya bangsa, sedangkan spiritualitas akan mendorong kesetiaan kepada rakyat dan perjuangkan mewujudkan pesan-pesan luhur Pancasila. Kedekatan dengan Tuhan akan membuat seorang pemimpin mampu memahami hati nurani rakyatnya, karena dengan kedekatan tersebut dia akan selalu berada dalam bimbingan Tuhan dalam menunaikan amanah *khilâfah*, dia akan diatur oleh-Nya: apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak, karena —dengan kedekatan yang sesunggunya— Dia akan menjadi pendengaran, penglihatan, lisan, dan kedua kaki-Nya[6] dalam menunaikan amanah yang diembannya.

Halaman-halaman berikut melaporkan temuan penelitian tentang penyusupan para agen garis keras terhadap Islam Indonesia, termasuk Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Majlis Ulama Indonesia (MUI), lembaga-lembaga Pendidikan, instansi pemerintahan dan swasta, serta penyusupan dana asing yang digunakan membiayai proyek penyusupan dalam semua bidang ini. Paduan sistem, ideologi, dan dana yang kuat telah membuat penyusupan ini semakin luas, mendalam, dan berbahaya bagi bangsa Indonesia.

---

yah? (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), h. 57-59.

6. Selengkapnya, hadits qudsî ini berbunyi: *Lâ yazâl al-'abd yataqarrabu ilayya bi al-nawâfil hatta uhibbahu. Fa-idza ahbabtuhu, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi, kuntu 'ainâhu allati yubshiru biha, kuntu lisanahu alladzi yanthiqu bihi, kuntu rijlâhu allati yabthisyu biha.*

Infiltrasi di Muhammadiyah

Pada bulan Desember 2006 ormas Muhammadiyah mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat (SKPP) Muhammadiyah Nomor: 149/Kep/I.0/B/2006 tentang "Kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Mengenai Konsolidasi Organisasi dan Amal Usaha Muhammadiyah." Surat Keputusan ini ditandatangani oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin, MA dan Sekretaris Umum Drs. H.A. Rosyad Sholeh.

SKPP ini dikeluarkan dengan tujuan untuk "menyelamatkan Muhammadiyah dari berbagai tindakan yang merugikan Persyarikatan". Apa tindakan yang merugikan itu? Ada sepuluh butir keputusan yang dituangkan dalam SKPP tersebut. Secara garis besar tindakan yang disebut merugikan itu antara lain adalah infiltrasi di tubuh Muhammadiyah dari organisasi lain yang memiliki paham, misi, dan kepentingan yang berbeda dengan Muhammadiyah.

SKPP menyebut Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai politik yang telah memanfaatkan Muhammadiyah untuk tujuan meraih kekuasaan politik. Karena itu SKPP menyerukan kepada para anggota dan piminan Muhammadiyah agar membebaskan diri dari misi dan tujuan partai politik tersebut. "Muhammadiyah harus bebas dari pengaruh, misi, infiltrasi, dan kepentingan partai politik yang selama ini mengusung misi dakwah atau partai politik bersayap dakwah, di samping bebas dari misi/kepentingan partai politik dan organisasi lainnya sebagaimana kebijakan khittah Muhammadiyah."

Sejauhmana sebenarnya "cengkraman" PKS dan gerakan garis keras lain dalam Muhammadiyah dan bagaimana itu bisa terjadi sehingga ormas terbesar kedua di Indonesia ini merasa khawatir? Di sini akan digarisbawahi poin-poin yang disebut SKPP sebagai penyusupan partai politik bersayap dakwah yang memanfaatkan amal usaha, masjid, lembaga pendidikan, dan fasilitas lainnya milik Muhammadiyah untuk kegiatan politik. Aktivitas PKS di tubuh

Muhammadiyah yang mengatasnamakan dakwah seperti pengajian dan pembinaan keumatan, juga disebut dalam SKPP ini sebagai telah digunakan untuk kepentingan politik.

Bukan hanya itu, organ-organ media massa yang berada di lingkungan Muhammadiyah rupanya juga telah disusupi gerakan garis keras, baik oleh orang-orang yang berasal dari luar maupun yang sejak semula merupakan anggota Muhammadiyah lalu menjadi aktivis kelompok garis keras sambil tetap menancapkan kakinya di Muhammadiyah. SKPP menyerukan agar seluruh media massa yang berada di lingkungan Muhammadiyah benar-benar menyuarakan paham, misi, dan kepentingan Muhammadiyah serta menjadi wahana untuk sosialisasi paham, pandangan, keputusan, kebijakan, kegiatan, dan syiar Muhammadiyah serta menjauhkan diri dari paham, misi, dan kepentingan organisasi/gerakan lain.

SKPP Muhammadiyah ini memang lahir untuk memperkuat upaya konsolidasi di tubuh organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa adanya infiltrasi ideologi dan gerakan lain di tubuh Muhammadiyah telah dianggap sebagai persoalan yang serius. Salah satu buktinya adalah munculnya sikap mendua di kalangan Muhammadiyah seperti dalam melaksanakan Hari Raya Idul Fitri/Idul Adha, serta menjadikan Muhammadiyah sebagai sarana kegiatan partai politik (baca: PKS), yang menimbulkan pengeroposan dan mengganggu keutuhan organisasi.

Tiga bulan sebelum SKPP ini lahir, telah terbit sebuah buku yang ditulis oleh Ketua PP Muhammadiyah, Dr. H. Haedar Nashir, yang berjudul: *Manifestasi Gerakan Tarbiyah: Bagaimana Sikap Muhammadiyah?*[7] Buku ini mengupas secara jelas upaya-upaya penyu-

---

7. Dalam waktu lima bulan sejak diterbitkan pertamakali pada Agustus 2006, buku *Manifestasi Gerakan Tarbiyah: Bagaimana Sikap Muhammadiyah?* Karya Haedar Nashir ini telah dicetak ulang lima kali oleh Suara Muhammadiyah dengan jumlah tiras 25.000 eksemplar. Kutipan-kutipan di sini diambil dari cetakan ke-5, Januari 2007, ditambah hasil wawancara dengan Haedar Nashir tanggal 20 Februari 2008.

supan yang dilakukan Gerakan Tarbiyah (PKS) ke dalam tubuh Muhammadiyah.

Buku inilah yang menjadi alasan bagi keluarnya SKPP Muhammadiyah yang telah disebutkan di atas karena, "Adanya keresahan di sejumlah daerah mengenai kehadiran pengembangan paham dan gerakan Islam lain seperti paham Tarbiyah dan ideologi PKS di sementara lingkungan Muhammadiyah, baik di Persyarikatan maupun amal usahanya, yang bersifat faktual atau nyata dan tidak mengada-ada, yang menuntut ketegasan sikap Pimpinan Pusat Muhammadiyah."[8]

Mengapa gerakan PKS meresahkan Muhammadiyah? Menurut Haedar, karena ia masuk ke dalam tubuh Muhammadiyah dan menarik anggota atau menyebarkan paham gerakannya. Haedar mengakui bahwa pada mulanya tidak ada masalah antara Muhammadiyah dengan PKS. Bahkan mempersilakan PKS jika ingin memperoleh dukungan dari anggota Muhammadiyah asalkan, "harus menampilkan sikap yang simpatik dan menjaga hubungan yang harmonis, bukan melakukan ekspansi dengan alasan sebagai gerakan dakwah (sayap dakwah) yang berhak masuk ke mana pun."[9] Masalah etika ini menjadi titik persinggungan yang pertama antara Muhammadiyah dengan PKS. Dan ini bukan satu-satunya.

Perbedaan paham dan misi antara Muhammadiyah dengan PKS merupakan titik persinggungan yang paling penting ketika keduanya berhimpitan. Muhammadiyah memiliki paham dan misi perjuangan yang sangat jelas sebagai organisasi moderat. Sementara itu PKS mengembangkan "konsep Tarbiyah yang melekat dan tidak lepas dari gerakan Ikhwanul Muslimin yang memiliki keyakinan, sistem, metode, strategi, dan teknik tersendiri dalam gerakannya di Mesir. Bahkan di ujung kepemimpinan Hasan al-Banna, kemudian di bawah Sayyid Qutb, gerakan Ikhwanul Muslimin tampil menjadi kekuatan politik yang radikal dan terlibat dalam konflik-konflik

8. *Ibid.*, h. 41.
9. *Ibid.*, h. 44-45.

politik yang keras, termasuk pembunuhan Perdana Menteri Mesir, Mahmoud an-Nukrashi Pasha pada Desember 1948, yang kemudian berujung dengan terbunuhnya dua tokoh Ikhwanul Muslimin tersebut. Konsep pembinaan anggotanya melalui gerakan Tarbiyah tampak monolitik dan melahirkan militansi yang tinggi dan radikal dalam gerakan Ikhwanul Muslimin."[10]

Menurut Haedar, "[P]erkembangan gerakan Tarbiyah di Indonesia cukup pesat, sehingga dalam tempo sepuluh tahun sejak tahun 1980, telah menyebar ke seluruh kampus-kampus ternama di Indonesia seperti UI, IPB, ITB, UGM, Unair, Brawijaya, Unhas, dan lain-lain. Lebih-lebih setelah kelahiran dua majalah Tarbiyah yang terbit akhir tahun 1986, yakni *Ummi* dan *Sabili*, yang menyebarkan pemikiran-pemikiran Ikhwanul Muslimin."[11] Dua media masa dengan tiras yang cukup besar itu (majalah *Sabili* diperkirakan terbit 100.000 eksemplar setiap edisi),[12] selain menjadi wahana pembinaan juga sebagai media informasi dan komunikasi pemikiran Tarbiyah di Indonesia.

Haedar mengutip pernyataan Anis Matta, tokoh dan Sekjen PKS bahwa inspirasi-inspirasi Ikhwanul Muslimin memberi kekuatan pada PKS. Hasan al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin, berhasil mengubah pembaharuan dari wacana menjadi gerakan. Dan tidak berlebihan, ujar Anis, "bila inspirasi gerak itu juga yang secara terasa dapat diselami dalam denyut Partai Keadilan Sejahtera."[13] Yang secara jelas bertabrakan dengan paham dan misi Muhammadiyah tentu saja konsep Tarbiyah itu sendiri (yang menjadi sistem Ikhwanul Muslimin), terutama yang berorientasi pada pendirian **Negara Islam, dengan sistem dan undang-undang yang harus ditegakkan**

10. *Ibid.*, h. 15.
11. *Ibid.*, h. 25.
12. Lihat, Arskal Salim dan Azyumardi Azra, "The State and Shari'a in the Perspective of Indonesian Legal Politics," *Introduction* dalam buku *Shari'a and Politics in Modern Indonesia* (Singapore: ISEAS, 2003).
13. Haedar, *op., cit.*, h. 33-34.

di dalamnya.[14] Masuk akal kalau Muhammadiyah menganggap hal ini sebagai ancaman bukan saja bagi Muhammadiyah tapi juga bagi bangsa. Muhammadiyah jelas tidak bercita-cita mendirikan negara Islam, dan telah menerima Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Dalam kesaksian tokoh-tokoh Muhammadiyah, infiltrasi PKS ke dalam Muhammadiyah sebenarnya sudah terlihat sejak menjelang pemilu 2004, dan semakin jelas pada Muktamar Muhammadiyah di Malang tahun 2005. Seorang tokoh Muhammadiyah, sebagaimana dikutip *Syirah*,[15] mengemukakan bahwa infiltrasi PKS ke dalam Muhammadiyah dilakukan lewat anggotanya sendiri. Upaya yang sistematis itu semakin terlihat tepatnya di dalam sidang komisi. "Orang-orang tertentu sengaja dikirim masuk ke dalam komisi-komisi tersebut," kata sumber tadi. Kemudian sumber tadi memasuki semua komisi untuk mencari kejelasan tanda-tanda tersebut. Dan dugaannya memang benar, nuansa di dalam forum komisi hampir sama semua. Wacana yang dikembangkan pun sama yaitu menilai Muhammadiyah sudah keluar dari syari'ah Islam dan Tarjih pun sudah keluar dari khittah.

Sumber tadi juga menuturkan bahwa sesepuh Muhammadiyah, Buya Syafi'i (Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif), mendapat SMS dari orang Muhammadiyah sendiri, yang isinya seruan agar tidak memilih orang-orang tertentu karena orang-orang itu perlu di-Islam-kan. "Penyusupan wacana dan ideologi itu dilakukan oleh anggota Muhammadiyah sendiri yang merangkap di PKS. Meski jumlah mereka tidak begitu besar di dalam forum Muktamar, namun gerakan yang begitu sistematis itu membuat mereka mampu mewarnai dan mendominasi forum," ungkapnya.[16] Apalagi PKS tidak bergerak sendirian, melainkan bersama-sama dengan para aktivis

---

14. *Ibid.*, h. 9. Cetak tebal (*bold*) mengikuti aslinya.
15. "Intervensi PKS Ke Muhammadiyah Dilakukan Secara Sistematis." http://www.syirah. com/syirah_ ol/online_ detail.php? id_kategori_ isi=1734
16. *Ibid*.

HTI yang sengaja disebar di arena Muktamar sebagai peserta atas nama utusan daerah-daerah. Kampanye PKS dan HTI terang-terangan dilakukan di arena Muktamar dengan menyebarkan daftar nama-nama yang harus dipilih dan tidak perlu dipilih ke sebagian besar peserta Muktamar dari Jawa, Jabotabek, Sulawesi, Sumatera dan Indonesia Timur (NTT, NTB, Ambon).

Dalam arena Muktamar juga terjadi perdebatan keras antara kaum muda Muhammadiyah yang berhaluan moderat-progresif versus HTI. Muhammad al-Khattat atau Gatot (ketika menjadi Ketua HTI)[17] yang menjadi peserta Muktamar dari Jakarta mencoba "menghabisi" kaum muda Muhammadiyah yang tergabung dalam Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM), ketika Panitia Muktamar menggelar diskusi dengan tema, "JIMM: Berkah atau Laknat?"

Tatkala nama-nama calon ketua Muhammadiyah perempuan diusung dalam arena muktamar, para aktivis HTI menanggapinya dengan gemuruh sambil berteriak bahwa jajaran piminan Muhammadiyah tidak layak untuk perempuan, sebab perempuan bukanlah pemimpin; mereka menganggap hal itu tidak Islami. Dan setiap kali perempuan bicara di arena Muktamar maka cemoohan pun berkumandang dari sebagian peserta Muktamar laki-laki aktivis HTI.

Ketika forum Muktamar membahas isu adanya infiltrasi dari organisasi lain atas nama dakwah, sebagian piminan Muhammadiyah yang merangkap anggota di PKS dan HTI tidak senang. Mereka berdalih bahwa "PKS dan HTI itu sama-sama Islam dan membantu Muhammadiyah, maka tidak logis kalau kita harus melarang kedua organisasi itu bergerak lewat Muhammadiyah." Namun

---

17. Muhammad al-Khaththat sudah dipecat dari posisinya sebagai Ketua HTI karena melakukan kegiatan yang dilarang oleh Pengrus HT Pusat (Internasional), yakni bergabung dengan organisasi Islam lain dengan mengatasnamakan HTI. Baca dalam http://osolihin.wordpress.com/2008/10/20/m-al-khaththat-dikeluarkan-dari-hti-kenapa-ditutup-tutupi/

klaim membantu Muhammadiyah itu dibantah oleh Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir. Menurutnya, kalau benar mau membantu seharusnya mereka melepaskan bajunya (baca: baju PKS dan HTI).[18]

Sejatinya, infiltrasi terhadap Muhammadiyah sudah berlangsung sejak minimal dua tahun sebelum Muktamar Malang. Itu yang menjadi alasan mengapa beberapa kebijakan PP Muhammadiyah berhasil dibatalkan oleh kelompok garis keras karena dipandang tidak sesuai dengan ideologi mereka. Kebijakan yang dibatalkan itu antara lain Dakwah Kultural (panduan bagi aktivis Muhammadiyah untuk bersikap moderat), kepemimpinan perempuan, dan pengembangan pemikiran Islam di Lembaga Tarjih. Terhadap beberapa tokoh moderat Muhammadiyah yang dianggap berpengaruh atas keluarnya kebijakan PP Muhammadiyah tersebut disebarkan isu bahwa mereka adalah pengikut paham sekuler dan liberal, bahkan dengan kosa kata yang kasar seperti ”sipilis” (penyakit kelamin)—sebagai akronim dari sekuleris, pluralis dan liberalis. Istilah ”sipilis” ini dipopulerkan Adian Husaini, seorang aktivis DDII (Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia) yang sangat gemar menggunakan kata-kata kotor (seperti *sipilis* tadi) dalam tulisan-tulisannya ketika menyerang orang lain yang berbeda paham dan pemikiran.

Tentang mudahnya ormas seperti Muhammadiyah diinfiltrasi kelompok Tarbiyah Ikhwanul Muslimin atau PKS, menurut Haedar, karena Muhamamadiyah sebagai organisasi cenderung longgar dan tidak monolitik. Namun yang lebih penting lagi, para kader PKS cenderung melakukan pragmatisasi peribadatan, yakni dapat menjalankan praktek peribadatan di dua wilayah sekaligus untuk mengesankan sebagai kelompok alternatif. “Jika berada di Muhammadiyah mereka akan seperti warga Muhammadiyah, dan jika berada di tengah warga NU, maka mereka akan beribadah seperti warga NU. Ini adalah bentuk lain dari *taqiyyah* (menyembunyikan

---

18. Wawancara dengan Haedar Nashir di Kantor PP. Muhammadiyah di Jakarta, 20 Februari 2008.

identitas diri—red)," kata Haedar Nashir,[19] atau sebenarnya *nifaq*.

Buntut dari adanya infiltrasi itu keluarlah SKPP Muhammadiyah tadi. SKPP ini membuat kelompok-kelompok garis keras berang. HTI menuntut agar SKPP ini juga diberlakukan terhadap kelompok-kelompok progresif-moderat di Muhammadiyah. Padahal kelompok-kelompok progresif-moderat sejatinya sudah tersingkir dari jajaran kepengurusan Muhammadiyah akibat manuver kelompok-kelompok garis keras. Dan yang paling terpukul dengan keluarnya SKPP ini tentu saja PKS karena namanya disebut secara eksplisit, sehingga PKS pun perlu mengeluarkan respon melalui sebuah "Risalah" yang intinya membantah bahwa PKS telah berusaha menguasai masjid, jadwal khotib, rumah sakit, sekolah dan kampus, atau amal usaha milik organisasi lain.[20]

Tiga belas bulan setelah keluarnya SKPP Muhammadiyah, PKS mengadakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) pada 1-4 Februari 2008 di Bali. Mukernas ini dapat dibaca sebagai reaksi terhadap lahirnya SKPP Muhammadiyah dan buku Haedar Nashir. Ini terlihat dari rekomendasi yang dihasilkannya, antara lain menyangkut pluralitas dan semangat kebangsaan. "Bagi PKS, Pancasila dan UUD 1945 sudah final sebagai dasar negara dan konsitusi nasional bangsa."[21] Di Mukernas Bali itu juga PKS menyatakan diri sebagai partai terbuka dan menerima calon legislatif dari kalangan non-Muslim. Dipilihnya Bali (pulau Dewata Hindu) sebagai tempat Mukernas juga bermakna simbolik bahwa PKS kini telah berubah. Apalagi para petinggi partai di acara tersebut terlihat mengenakan *udeng-udeng*, penutup kepala yang menjadi tradisi umat Hindu Bali.

Mengapa setelah 10 tahun berdiri PKS baru sekarang bicara

---

19. Wawancara, *ibid*.
20. "Risalah PKS untuk Mengokohkan Ukhuwah dan Ishlah," dikeluarkan tanggal 27 September 2007.
21. Pernyataan Mahfudz Siddiq, Ketua Fraksi PKS di DPR dan Ketua Tim Operasi Media Mukernas Bali. Lihat, "Mukernas PKS Rekomendasikan Tiga Agenda," *Republika*, 4 Februaru 2008, h. 3. Lihat juga, "PKS Serukan Bangkitkan Semangat Kebangsaan," *Kompas* , 4 Februari 2008, h. 3.

tentang pluralitas, perlunya semangat kebangsaan, dan menerima Pancasila dan UUD 1945 sebagai telah final? Jawaban sederhananya tentu karena kalkulasi politik menjelang Pemilu 2009. PKS jelas tidak berdaya di hadapan konstituen pemilih Islam yang sebagian besar berafilisai kepada Muhammadiyah dan NU yang memang bervisi kebangsaan, pluralis, dan menerima Pancasila dan UUD 1945 telah final sebagai dasar dan konstitusi negara Indonesia. Oleh karena itu, PKS tidak bisa memandang sebelah mata SKPP Muhammadiyah tersebut.

Namun jalan yang ditempuh PKS untuk menjadi partai terbuka dan menerima Pancasila sebagai dasar negara bukan hal yang mudah. Beberapa hari setelah Mukernas, partai ini harus menjelaskan kepada konstituennya yang keberatan dengan berbagai kebijakan yang dihasilkan dalam Mukernas Bali. Menghadapi berbagai reaksi itu, pada 6 Februari 2008, PKS mengeluarkan "Bayan Seputar Isu Partai Terbuka dan Caleg Non Muslim" yang dikirim ke berbagai media massa.

Isi *bayan* (penjelasan) itu adalah bahwa sesuai keputusan Musyawarah Majelis Syuro PKS ke VII di Jakarta, dan dikuatkan kembali dalam Musyawarah Majelis Syuro PKS IX di Bali adalah: Bersih, Peduli dan Profesional. Dalam *bayan* itu, PKS juga menyinggung tentang adanya isu yang menyebutkan bahwa PKS menjadi partai terbuka. Dalam hal ini, *bayan* tersebut menyatakan, istilah "terbuka" tidak pernah menjadi keputusan partai, baik oleh sidang-sidang Majelis Syuro, Dewan Pimpinan Tinggi Partai (DPTP) maupun dalam Khitob Qiyadi (arahan pimpinan). Selanjutnya disebutkan bahwa PKS tetap sebagai partai dakwah yang berasaskan Islam, memiliki moral Islam, dan syariat Islam wajib dengan konsisten dijalankan oleh setiap pemeluk agama Islam, terutama kader-kader PKS. Selanjutnya PKS meminta seluruh jajaran struktur, pengurus dan kader supaya tidak lagi mewacanakan isu "partai terbuka" untuk menghindari mudharat yang lebih besar daripada kemaslahatan yang diharapkan.

Isu PKS sebagai partai terbuka memperoleh tantangan keras dari kalangan dalam PKS sendiri, akhirnya PKS kembali menjadi partai tertutup, hanya untuk kalangan Islam dan konsisten memperjuangkan syariat Islam. Mengapa PKS begitu mudah memungkiri kebijakan-kebijakan yang dihasilkannya di Mukernas Bali? Tampaknya PKS ingin menempuh politik bermuka dua: untuk konsumsi publik yang lebih luas ia perlu menegaskan identitas sebagai partai terbuka dan bervisi kebangsaan dengan retorika menerima Pancasila dan UUD 1945 sebagai telah final bagi bangsa Indonesia. Namun di hadapan konstituennya ia tetap menyatakan diri sebagai partai dakwah berasas Islam, dan syariat Islam wajib dengan konsisten dijalankan oleh setiap pemeluk agama Islam (Piagam Jakarta). Jika begitu, bukankah berarti bahwa retorika penerimaan Pancasila dan UUD 1945 hanya sebagai tameng?

Menjadi jelas bahwa PKS sangat terganggu dengan SKPP Muhammadiyah. Karena itu berbagai cara ditempuh agar SKPP itu tidak relevan bagi PKS. Salah satu caranya adalah memasang tameng penghalang. Ibarat bermain catur, ketika sang raja di-*skak* maka cara yang aman adalah menghalanginya dengan buah catur yang lain. Dalam hal ini, Pancasila dan UUD 1945 digunakan sebagai buah catur (tameng penghalang dari serangan musuh). Persis di sinilah letak bahayanya. Infiltrasi di Muhammadiyah yang berakibat keluarnya SKPP justru dimanfaatkan oleh PKS untuk menyusup lebih jauh ke jantung kesadaran bangsa Indonesia, yaitu dengan mengklaim telah menerima Pancasila dan UUD 1945. Dengan begitu, bukan saja SKPP Muhammadiyah "menjadi tidak relevan," tapi juga kecurigaan bahwa PKS pada akhirnya mencita-citakan pendirian negara Islam "menjadi tidak berdasar." Sayangnya, orang Melayu terlanjur yakin pada pepatah bahwa: "Ular yang paling berbahaya adalah ular yang bisa berubah warna!"

Hingga awal tahun 2009 ini, SKPP Muhammadiyah masih belum bisa diimplementasikan secara efektif. Hal ini menjadi bukti betapa kuat dan dalam infiltrasi garis keras masuk ke dalam

Muhammadiyah. Mereka terus melancarkan perang ideologi dan melakukan *black-campaign* terhadap siapa pun yang tidak setuju atau menjadi hambatan di dalam tubuh Muhammadiyah. Tokoh-tokoh moderat Muhammadiyah prihatin pada perkembnangan bahwa kelompok-kelompok garis keras semakinkuat di Muhammadiyah sehingga mungkin saja mereka akan berhasil merebut Muhammadiyah pada Muktamar 2010. Jika ini terjadi, bangsa Indonesia tidak hanya kehilangan salah satu aset kultural ormas mderatnya dan mungkin Muhammadiyah akan menjadi salah satu bungker baru gerakan garis keras di Indonesia, bangsa Indonesia juga akan kehilangan salah satu soko guru Pancasila, UUD 1945, dan NKRI.

Penyusupan di Nahdlatul Ulama

Sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) pantas merasa terusik dengan berbagai perkembangan yang dianggap membahayakan bangsa dan organisasinya, terutama menyangkut paham *Ahlussunah wal Jamaah* yang dianut warga NU. Ditengarai bahwa gerakan-gerakan garis keras telah menyusup ke dalam NU melalui masjid-masjid, majlis-majlis taklim, dan pondok-pondok pesantren yang menjadi basis warga Nahdliyin (sebutan untuk warga NU).

Ketua Umum PBNU KH. Hasyim Muzadi menyebut bahwa masjid-masjid yang selama ini dibangun dan dikelola oleh warga NU berikut takmir masjid dan tradisi ritual peribadatannya telah diambil alih oleh kelompok Islam ekstrim. Menurutnya, hal itu dilakukan karena kelompok yang kerap mem-bid'ah-kan bahkan mengkafirkan warga Nahdliyyin itu "[T]tidak mampu membuat masjid sendiri, kemudian mengambilalih masjid orang lain (masjid warga nahdliyyin, red), terus dipidatoin di situ untuk politisasi. *Kan* maksudnya begitu. Yang dirugikan akhirnya NU," ungkap Hasyim Muzadi yang menyebut kelompok ekstrem itu antara lain adalah pengusung wacana Khilafah Islamiyah, yakni Hizbut Tahrir

Indonesia.[22]

Hasyim menginstruksikan semua pengurus NU di seluruh Indonesia untuk menjaga masjid agar tidak dimasuki oleh kelompok-kelompok garis keras. Ia juga mengingatkan agar kelompok-kelompok garis keras itu diwaspadai karena secara keyakinan memang sudah tidak segaris dengan NU. "Mereka adalah kelompok yang ingin mendirikan negara Islam," tegasnya.[23]

Isu penyusupan kelompok-kelompok garis keras ke dalam NU sebenarnya telah lama menjadi pembicaraan yang santer di kalangan warga Nahdliyin. Salah satu alasan keompok-kelompok garis keras sering menuduh masjid-masjid NU mengajarkan bid'ah dan beraliran sesat, adalah untuk merebut masjid-masjid tersebut. Karuan saja tuduhan itu membuat para tokoh NU berang. Pada 25 Februari 2007 Pimpinan Pusat (PP) Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) mengeluarkan maklumat yang berisi peneguhan kembali ajaran dan amaliyah *Ahlussunnah wal Jamâ'ah* (Aswaja) yang selama ini dipraktikkan oleh warga Nahdliyin. Sebanyak 8 Ketua Pengurus Wilayah LDNU se-Indonesia menandatangani maklumat yang merupakan respon atas tuduhan sesat terhadap ajaran dan amaliyah NU itu.

> Maklumat itu berbunyi sebagai berikut: "...kami menyadari dengan sepenuh hati, bahwa dewasa ini telah tumbuh dan berkembang gejala pemikiran dan gerakan ke-Islam-an (*al-harakah al-islamiyyah*) melalui praktik-praktik keagamaan yang dapat melunturkan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah ala NU, maka dengan ini kami menyatakan: '...Senantiasa menjalankan amaliah ibadah Ahlussunnah wal Jama'ah *a la* NU; melestarikan prak-

---

22. Hasyim Muzadi: "Khilafah Islamiyah bukan Gerakan Agama, tapi Gerakan Politik." Lihat, *NU Online,* Selasa, 5 September 2006.

23. "Hasyim Imbau Takmir Masjid NU Waspada," lihat *NU Online*, Selasa, 28 November 2006.

> tik-praktik dan tradisi keagamaan salafush shalih; seperti salat-salat sunnah, salat tarawih 20 rakaat, wirid, salawat, qunut, talqin, ziarah qubur, tahlil, manaqib, ratib, Maulid Nabi, haul, dan istighotsah; serta toleran terhadap tradisi budaya yang sesuai dengan nilai-nilai Islam sebagai bagian dari dakwah Ahlussunnah wal Jamaah *a la* NU.'"[24]

Maklumat itu merupakan rangkaian respon NU terhadap gerakan kelompok-kelompok garis keras yang telah menjadikan NU sebagai sasaran penyusupan paham mereka yang radikal dan bertentangan dengan paham Aswaja NU yang moderat. Menurut Ketua Umum PP- LDNU, KH. Nuril Huda, "NU merasa perlu segera melakukan gerakan-gerakan nyata untuk menyelamatkan paham yang sudah diyakini kebenarannya selama ini. Jika tidak, tidak ada jaminan dalam waktu sepuluh tahun mendatang ajaran moderat yang terkandung dalam Aswaja akan hilang dan tergantikan oleh paham yang lain."[25]

Menurut salah seorang Ketua PBNU, KH. Masdar F. Mas'udi, "Jumlah masjid milik warga NU yang disusupi dan diambil alih oleh kelompok-kelompok garis keras yang mengklaim dirinya paling benar itu mencapai ratusan. Mereka menganggap masjid-masjid NU mempraktikkan bid'ah dan beraliran sesat. Proses pengambilalihan masjid-masjid itu berbentuk penggantian para takmir masjid yang selama ini diisi oleh warga Nahdliyin. Tradisi-tradisi ritual keagamaan khas NU pun diganti," katanya.[26] Tidak hanya menyusup ke masjid-masjid NU, kelompok-kelompok garis keras

---

24. "NU Layani Tantangan Kelompok Islam Garis Keras," lihat *NU Onlne*, Selasa, 27 Februari 2007.
25. "Rebut Kembali Masjid Nahdliyyin, LDNU Kumpulkan Majelis Ta'lim se-Jabotabek," lihat, *NU Online* 24 Agustus 2006.
26. "Dianggap Sesat, Masjid-masjid NU Diambilalih," lihat. *NU Online*, Kamis, 25 Mei 2006.

juga telah menyusup ke organisasi generasi muda NU, pondok-pondok pesantren NU, dan organisasi-organisasi majelis taklim di bawah naungan NU.

Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) adalah salah satu organisasi di bawah NU yang menjadi sasaran penyusupan kelompok-kelompok garis keras. Ketua Pimpinan Pusat (PP) IPNU, Muhammad Asyhadi menyebutkan, "Saat ini kaum muda NU yang telanjur masuk ke dalam gerakan Islam garis keras cukup banyak. Kalau sudah masuk, mereka biasanya kehilangan identitas ke-NU-an dan ke-IPNU-annya. Untuk itu, IPNU telah bekerjasama dengan ikatan pelajar lainnya dalam menghadang pengaruh aliran garis keras di lingkungan masing-masing melalui pelatihan motivasi pelajar dengan sasaran pelajar."[27]

Kelompok-kelompok garis keras juga menyusup ke pondok-pondok pesantren. Tak pelak, para pemimpin pesantren pun merasa gerah dengan gerakan ini. Maka pada tanggal 18-21 Mei 2007, Rabithath al-Ma'âhid al-Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) mengumpulkan para Pimpinan pondok pesantren (ponpes) se-Indonesia di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Salah satu agenda pertemuan asosiasi pesantren NU se-Indonesia itu adalah membahas munculnya ideologi transnasional yang dinilai mengancam tradisi kesarjanaan dan keagamaan pondok pesantren.

Wakil Ketua Pimpinan Pusat RMI NU Abdul Adhim mengatakan, "Ideologi transnasional atau ideologi impor dari luar negeri itu dinilai telah mengancam keutuhan bangsa dan pesantren. Karena, ideologi tersebut kebanyakan tidak sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat. Islam Indonesia yang didakwahkan Walisongo itu '*kan* penuh semangat toleransi dan santun. Nah, ideologi Islam transnasional itu datang dengan tidak santun, dengan teriak Allahu Akbar sambil pecahkan kaca," ujar Adhim.[28]

---

27. Kantor Berita Nasional Antara, 15 Oktober 2006.
28. "RMI Kumpulkan Pimpinan Ponpes se-Indonesia Bahas 'Ancaman' Ideologi Transnasional," lihat *NU Online*, Rabu, 16 Mei 2007.

Karena itu, menurut Adhim, organisasi yang menghimpun 14 ribu pondok pesantren NU se-Indonesia itu merasa turut bertanggung jawab atas keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam menghadapi masuknya ideologi impor dimaksud.

Sebelumnya, majelis-majelis taklim yang berada di bawah organisasi NU yang biasa mengkoordinasi pengajian (kaum ibu, bapak, atau remaja) juga tidak luput dari penyusupan kelompok-kelompok garis keras yang membawa paham transnasional dari Timur Tengah (Wahabi-Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir). Untuk menghadapi gempuran garis keras ini, NU telah mengkoordinasi anggotanya untuk memperkuat kembali paham Aswaja yang dianut NU agar kaum Nahdliyin tidak mudah terhasut oleh kelompok garis keras. Pada bulan Agustus tahun 2006 LDNU mengadakan pertemuan yang diikuti oleh 162 Ketua Majelis Taklim se-Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi). Menurut Ketua Umum LDNU KH. Nuril Huda, pertemuan tingkat Jabotabek itu hanya permulaan. Nantinya akan dilakukan di daerah-daerah, terutama daerah di luar Jawa. Karena, fenomena penyusupan garis keras tidak terjadi di wilayah Jabotabek saja, melainkan juga di seluruh Indonesia.[29]

NU memandang kelompok-kelompok garis keras bukan hanya berbahaya bagi NU namun juga bagi bangsa Indonesia. Itu sebabnya, NU menyerukan agar pemerintah mencegah masuknya ideologi garis keras yang bercorak transnasional atau lintas negara itu ke Indonesia, walaupun seruan ini tampaknya masih bertepuk sebelah tangan. Ketua Umum PBNU KH. Hasyim Muzadi menjelaskan bahwa dirinya telah mengunjungi berbagai negara di Barat dan Timur untuk mengkampanyekan bahwa Islam merupakan agama, bukan ideologi, dan yang terjadi di Timur Tengah selama ini bukan Islam sebagai agama, tapi sebagai ideologi. "Ideologi Islam Timur Tengah antara lain Ikhwanul Muslimin, Majelis Mujahidin, Al-Qa-

---

29. "Rebut Kembali Masjid Nahdliyyin, LDNU Kumpulkan Majelis Ta'lim se-Jabotabek," lihat, *NU Online*, 24 Agustus 2006.

eda, dan sebagainya. Tapi ideologi Islam itu bukan Islam, karena Islam sebagai agama bukan bersifat gerakan kepentingan, apalagi politis," ujar Hasyim.[30]

Oleh NU, ide Khilafah Islamiyah atau pun Negara Islam yang dikampanyekan oleh kelompok-kelompok garis keras ke dalam Islam Indonesia dipandang sebagai ancaman bagi keutuhan NKRI. Lebih prinsip lagi, menurut NU, ide Khilafah Islamiyah atau pun Negara Islam tidak memiliki dasar teologis di dalam al-Quran maupun Hadits. Pandangan ini diputuskan oleh NU setelah melakukan *Bahtsul Masa'il* (forum pembahasan masalah agama—*red.*) dalam sebuah Mukernas di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Jawa Timur, selama tiga hari pada pertengahan November 2007 yang dihadiri oleh 500-an kyai NU.

Selain meneliti teks-teks al-Quran dan Hadits terkait gagasan negara Islam, forum *Bahtsul Masa'il* juga meneliti sejumlah referensi khazanah intelektual Muslim yang eksistensinya diakui dan diterima sebagai otoritatif (*mu'tabar*), seperti *Attasyrî' al-Jinâ'î al-Islâmî, al-Qaish al-Hâmî' al-Asyarqi, Jâm'ul Jawâmi', Ad-Dîn Waddaulah wa Tatbîqis Syarî'ah*, dan *al-Fiqhul Islâmî*. Kesimpulannya, forum *Bahtsul Masa'il* tidak melihat adanya dasar teologis tentang ide pendirian Negara Islam atau Khilafah Islamiyah.[31] "Jadi, upaya-upaya untuk mengganti NKRI dengan negara Islam jelas dilarang, terlebih lagi jika upaya tersebut akan mendatangkan lebih banyak masalah bagi bangsa ini," demikian bunyi rekomendasi *Bahtsul Masa'il*.[32]

Walhasil, tokoh-tokoh NU sepakat menolak ide negara Islam. Bukan hanya itu, mereka juga menyerukan kepada pemerintah dan para pemimpin agama agar mewaspadai ideologi transnasional yang mengancam keutuhan bangsa, ideologi negara (Pancasila), dan NKRI. "Selama ini gerakan tersebut (garis keras—*red.*) telah

---

30. "PBNU Desak Pemerintah Cegah Ideologi Transnasional," lihat *NU Online*, 29 April 2007.
31. Lihat Lampiran 2 buku ini.
32. "Caliphate not part of Koran: NU," lihat *Jakarta Post*, 25 November 2007.

sering menyerang kita. Kini saatnya kita menyerang balik mereka," ujar KH. Ali Maschan Moesa, Ketua Tanfidziah NU Jawa Timur, dalam konferensi tersebut.[33]

Bagi NU, gagasan negara Islam merupakan penafsiran yang keliru terhadap pemahaman istilah Islam *kaffah* (menyeluruh) yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk kewajiban pendirian Pemerintahan Islam. Syariat atau hukum Islam memang harus diamalkan, tapi tak perlu melalui kekuasaan atau pemerintahan Islam. Kaum Muslim di sebuah negara memang berkewajiban melaksanakan setiap ajaran Islam. Namun demikian, kewajiban itu tak berlaku bagi upaya pendirian Pemerintahan Islam. "Ber-Islam dengan sungguh-sungguh tak harus dengan Khilafah Islamiyah. Mengakui dan taat pada pemerintahan yang sah dan berdaulat adalah wajib," ungkap Ketua Umum PBNU KH. Hasyim Muzadi, seraya menjelaskan bahwa dua kekuatan Islam moderat terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah, hingga saat ini tak pernah menghendaki negeri ini dibangun dengan dasar sebuah agama tertentu, termasuk agama Islam.[34]

NU tidak hanya menyorot penyusupan ideologi Khilafah Islamiyah yang dikampanyekan Hizbut Tahrir Indonesia, tapi juga penyusupan paham Wahabi dan Ikhwanul Muslimin yang sama-sama mengancam keutuhan NKRI dan berupaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Ketua Pengurus Pusat Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU) KH. Imam Ghozalie Said menengarai bahwa kelompok-kelompok garis keras yang belakangan ini banyak bermunculan pada umumnya merupakan penganut paham Wahabi baru. "Kelompok-kelompok ini tidak suka dengan tradisi yang dijalankan oleh NU, seperti tahlil," ujarnya.[35]

---

33. Baca Lampiran 2 buku ini, lihat pula dalam *Jakarta Post*, *ibid*.
34. "PBNU: Khilafah Islamiyah Celakakan Muslim Minoritas di Negara Lain," lihat *NU Online*, Kamis, 26 Juli 2007.
35. KH. Imam Ghozalie Said: "Ideologi Transnasional Sukses, Indonesia

Pandangan politik dari kelompok-kelompok ini, lanjut Said, adalah Hadits Nabi: 'Barangsiapa yang meninggal dan tidak pernah berbaiat khalifah, maka ia mati seperti matinya orang jahiliyyah!' (*man mât wa lam yabi' fa-qad mâta mîtatal-jâhiliyyah*).[36] Kelompok Ikhwanul Muslimin juga menggunakan dalil senada, yaitu: 'Barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka termasuk golongan orang yang kafir.'[37] "Ini *kan* berat secara teologis. Kita ini dianggap tidak Islam lagi karena tidak ikut paham mereka," paparnya.[38] Lebih jauh Said menjelaskan, doktrin gerakan Ikhwanul Muslimin berasal dari Sayyid Qutb yang ditulis dalam bukunya yang terkenal, yaitu *Ma'alim fi at-Tariq* yang di antaranya menyatakan, 'suatu negara yang tidak memberlakukan syariat Islam, berarti negara itu jahiliyah.'

Reaksi keras NU terhadap kelompok-kelompok garis keras telah mematahkan mitos bahwa *silent majority* atau kelompok mayoritas pada umumnya hanya bisa berdiam diri dalam menghadapi minoritas garis keras yang vokal dan agresif. Meski ancaman garis

---

Berubah Total," lihat, *NU Online*, Jumat, 22 Juni 2007.

36. Hadits ini disampaikan dalam konteks kewajiban mengangkat pemimpin, bukan dalam hal kewajiban mendirikan Negara Islam. Karena hanya orang bodoh (*jâhiliyah*) yang tidak akan menyusun tatanan sosial tanpa pemimpin, tanpa pemerintahan. Hadits yang lazim dikutip dalam konteks ini adalah pernyataan Nabi, "Siapa pun di antara kalian, satu orang atau lebih, yang bepergian, maka wajib menentukan pemimpin."

37. Ayat ini berada dalam satu rangkaian kecaman terhadap siapa pun yang mengamalkan ajaran agama secara parsial, hanya memilih yang sesuai dengan kepentingan dan kecenderungan pribadinya, bahkan memutarbalikkan pesan-pesan agama semata demi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Mereka dikecam sebagai zhâlim, fâsiq, dan kâfir. Nabi pernah menjelaskan bahwa umat-umat terdahulu telah mengalami kehancuran karena dalam mengamalkan ajaran agamanya mereka lebih berdasarkan kepentingan dan kecenderungan pribadi dan kelompoknya, bukan ketaatan sejati kepada pesan agama. Di tangan kelompok garis keras, ayat ini telah —secara keliru— dipahami sebagai kewajiban formalisasi sistem hukum dan bentuk negara.

38. KH. Imam Ghozalie Said, *ibid*.

keras itu semula tertuju kepada paham dan eksistensi NU, namun NU menganggap itu merupakan ancaman terhadap bangsa dan negara. Sebab tradisi keberagamaan NU merupakan amal keagamaan yang dipraktikkan oleh mayoritas umat Islam Indonesia, sehingga secara ringkas bisa dikatakan bahwa warga NU dan bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. NU menyadari bahwa setiap bahaya yang mengancam kelestarian Pancasila dan keutuhan NKRI, adalah juga ancaman terhadap dirinya. NU juga memahami bahwa setiap ancaman pada dirinya, kelak akan menjadi bahaya bagi NKRI. Sebagai *indigenous* Islam atau Islam pribumi yang telah menyatu dengan denyut nadi budaya masyarakat Indonesia, NU menilai gerakan dan ideologi transnasional tidak sesuai dengan kondisi masyarakat dan budaya Indonesia yang damai. "Kelompok-kelompok Islam yang berideologi transnasional itu di negara asalnya sendiri kerap melahirkan konflik. Sehingga, jika bangsa Indonesia mengikutinya, maka akan ikut menjadi bagian dari masalah mereka, selain itu karena memang tidak sesuai dengan budaya setempat."[39]

Sebagaimana Muhammadiyah, NU telah menganggap Pancasila dan UUD 1945 sebagai konsensus nasional yang sudah final dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. NU juga telah menganggap NKRI sebagai bentuk final bagi bentuk negara Indonesia. Sebagai ormas Islam terbesar di dunia, NU merasa bertanggung jawab atas keutuhan dan keselamatan bangsa dan negara. Karena itu, sikap dan reaksi NU yang sangat tegas terhadap kelompok-kelompok garis keras yang mengusung ideologi negara Islam bisa dimengerti. Sebab ancaman terhadap NU, berarti juga merupakan ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara Indonesia, dan sebaliknya.

Menghadapi ancaman kelompok-kelompok garis keras yang banyak bermunculan akhir-akhir ini, NU dan Muhammadiyah se-

---

39. "PBNU Minta Bangsa Indonesia tak Ikuti Ideologi Transnasional," lihat, *NU Online*, Selasa, 15 Mei 2007.

bagai dua ormas Islam terbesar di Indonesia sepakat untuk membendung gerakan mereka sekaligus menggalang kekuatan untuk terus mengkampanyekan Islam moderat.[40] Kedua ormas ini mengabarkan kepada dunia bahwa kelompok-kelompok garis keras sesungguhnya tidak merepresentasikan Islam. Mereka malah membajak Islam untuk kepentingan politik kelompok mereka sendiri.

Infiltrasi di Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Menguatnya peran MUI akhir-akhir ini patut mendapatkan perhatian khusus. Kevokalan MUI dalam menyuarakan berbagai pandangan dan tuntutannya juga paralel dengan kecenderungan ini. Yang membuat MUI lebih kuat dari ormas keagaman umumnya adalah karena keterkaitan langsung lembaga agama bikinan Orde Baru ini dengan pemerintah. Karena sejak awal didirikannya diniatkan sebagai instrumen pemerintah otoriter untuk menyangga kekuasaan dan menjinakkan gerakan keagamaan anti pemerintah, maka ia memiliki fasilitas yang sangat besar. Ia, misalnya, memiliki cabang di seluruh Indonesia, secara formal dari kabupaten, propinsi hingga pusat dan memiliki struktur informal di tingkat kecamatan. Seluruh struktur tersebut mendapatkan biaya dari negara. Sementara di pihak lain, MUI bisa mencari dana tambahan dari proyek-proyek keagamaan yang diciptakannya tanpa dikontrol oleh pemerintah dan publik, seperti dari sumber proyek labelisasi halal untuk makanan, kedudukannya yang penting dalam Bank Syari'ah di seluruh perbankan yang membuka gerai Syari'ah, serta proyek-proyek politik tertentu dari pemerintah seperti sosialisasi RUU tertentu yang berkaitan dengan isu agama.[41]

Ormas Islam apa pun yang doktrin dan akidahnya benar menu-

40. "Major Muslim groups spearhead moderate campaign," *Jakarta Post*, 22 Juni 2006.

41. Ahmad Suaedy dkk. Kata Pengantar: "Fatwa MUI dan Problem Otoritas Keagamaan" dalam *Kala Fatwa Jadi Penjara* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), h. x-xxv.

rut MUI, maka bisa bergabung dan punya wakil di dalamnya tanpa mempertimbangkan jumlah anggota oraganisasinya. Akibatnya, wakil organisasi besar dan moderat seperti NU dan Muhammadiyah tidak representatif dibandingkan dengan gerakan garis keras kecil yang anggotanya hanya puluhan ribu saja. MUI memiliki hak prerogatif untuk menentukan sah dan tidak, benar dan sesatnya suatu keyakinan untuk menjadi anggota. Ahmadiyah, misalnya, karena dianggap menyimpang, bukan hanya tidak bisa masuk menjadi anggota, MUI bahkan mendesak pemerintah untuk melarangnya (MRoRI-WI No. 4). Sementara, betapa pun subversifnya secara politik, jika MUI menilai tidak ada penyimpangan, akan diakomodasi. Salah satu contoh paling memprihatinkan adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dalam doktrinnya, HTI menyatakan sebagai organisasi politik yang anti demokrasi, atau dalam bahasa agama mengharamkan demokrasi dan memperjuangkan Khilafah Islamiyah. HTI mengaku dan berusaha melenyapkan Pancasila dan meruntuhkan NKRI. Dengan demikian, dari sudut manapun HTI gerakan subversif, namun keberadaanya diakomodasi oleh MUI, bahkan anggota HTI menggurita di dalam struktur MUI dari pusat sampai daerah.[42] Tidak bisa dibayangkan jika suatu saat HTI menjadi besar dan hampir pasti akan berhadapan dengan eksistensi Indonesia sebagai negara bangsa.

Sistem keanggotaan MUI yang demikian, serta lemahnya orientasi dan pengamalan spiritual di antara kebanyakan anggotanya, membuat produk-produk dan fatwa yang dikeluarkannya sejalan dengan arus gerakan garis keras. Ini disebabkan karena wakil ormas-ormas Islam yang moderat tidak banyak meskipun dihitung dari jumlah anggotanya sangat besar. Karena inilah, MUI menjadi salah satu target utama penyusupan para agen garis keras dan alat mereka dalam usaha menegakkan ideologi dan mewujudkan agenda politik mereka.

Akibat selanjutnya adalah bahwa organisasi Islam dengan dok-

42. Ibid.

trin apa pun, termasuk organisasi dan gerakan fundamentalis yang anti demokrasi dan anti Pancasila sekali pun, terkecuali yang secara nyata dicap sebagai teroris seperti Jamaah Islamiyah (JI), bisa menjadi anggota dan mendominasi MUI. Dari kenyataan demikian, MUI sesungguhnya bisa dikatakan sebagai bungker dari organisasi dan gerakan fundamentalis dan subversif di Indonesia.[43] Lebih dari itu, karena MUI dibiayai oleh pemerintah, maka organisasi dan gerakan fundamentalis juga mendapatkan subsidi dari pemerintah melalui MUI tersebut untuk tujuan mereka menghancurkan dasar negara. Pemerintah, dengan demikian, melakukan *capacity building* gerakan fundamentalis dan radikal, bahkan yang anti Pancasila, UUD 1945, dan NKRI sekalipun.

Gagasan MUI untuk memisahkan produk halal dari produk haram di tempat-tempat perbelanjaan, dengan jelas akan menjadi langkah menunjukkan secara telanjang kepada publik: siapa yang muslim dan siapa yang bukan, yang akan dengan mudah diketahui ketika mereka berbelanja. Terkait labelisasi halal dan haram ini, logika MUI berlawanan arus dengan logika al-Qur'an dan al-Hadits. Al-Qur'an dan Hadits hanya menjelaskan hal-hal yang diharamkan, bukan sebaliknya, seperti diteorikan oleh para *fuqaha* bahwa *kull syai'in halâl illâ ma hurrima* (apa pun halal kecuali yang diharamkan). Mungkin mereka tidak merasa, atau merasa tapi labelisasi halal pasti lebih menguntungkan daripada labelisasi haram.

Masalah MUI ini menguat secara mencolok sejak lima tahun terakhir ini, karena penguasa tampak lebih dekat dengan partai-partai garis keras yang setia mendukungnya, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan PBB (Partai Bulan Bintang). Apakah kedekatan penguasa dengan kelompok-kelompok garis keras ini karena alasan oprtunisme atau memang memiliki agenda yang sama dengan mereka, hanya Allah swt. yang tahu. Seandainya karena oportunisme atau tidak mengerti sama sekali tentang semua masalah yang mengancam bangsa ini, semoga Allah swt mengilhami mereka lebih

43. http://www.wahidinstitute.org/indonesia/content/view/718/52/

mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada hidup yang hanya sementara dan fana di dunia ini.

Kaitan penguasa lima tahun terakhir ini dengan partai-partai garis keras yang terbuka dan tersembunyi hendak menegakkan pendasaran negara pada Syari'ah Islam, diperkuat dengan diangkatnya ketua dan juru bicara MUI yang paling vokal menentang pluralisme, kebebasan beragama dan keyakinan, K.H. Ma'ruf Amin, sebagai anggota Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden) bidang keagamaan. Dengan demikian, cukup jelas ke mana arah pandangan dan *policy* pemerintah dalam bidang keagamaan, kebebasan beragama dan keyakinan.[44] Begitu gegap-gempitanya penyesatan dan kekerasan antaragama, tapi hampir tidak pernah terdengar suara tegas penguasa agar aparat negara lebih tegas dan adil terhadap pelaku kekerasan agama serta keberpihakannya untuk melindungi para korban penyesatan dan kekerasan. Hampir tidak pernah pula terdengar suara tegas penguasa tentang keinginannya untuk menegakkan hak-hak asasi manusia dan konstitusi dalam jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Sebaliknya, penguasa justru menunjukkan dukungannya secara eksplisit dan hendak mengikuti semua keputusan MUI, walaupun tidak merefleksikan atau mewakili pikiran moderat mayoritas ulama dan umat Islam Indonesia. Lembaga semi pemerintah yang didirikan oleh rezim Orde Baru untuk mengontrol umat Islam saat itu, kini telah tampak berbalik mendikte/mengontrol pemerintah. Pada Rakernas tersebut MUI mengeluarkan fatwa 10 kriteria aliran sesat sebagai pedoman masyarakat Muslim untuk memantau secara mandiri aliran-aliran sesat. Akibatnya sudah jelas, makin tak terkendalinya kekerasan antaragama yang cenderung liar.

---

44. Van Zorge Report, January 29, 2008.

Infiltrasi di Lembaga-lembaga Pendidikan

Seorang murid kelas 4 Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Bekasi, Jawa Barat, menyebut orangtuanya kafir karena ia masih duduk di depan televisi saat azan berkumandang di *loud speaker* masjid. Tentu saja si orangtua terkaget-kaget dari mana anak kesayangannya memperoleh kosa kata "kafir" dan mengalamatkan kepada dirinya.[45] Di Ciputat, Tangerang, seorang siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) menuding ibunya akan masuk neraka karena tidak memakai jilbab sebagaimana yang ia kenakan karena suruhan gurunya di sekolah.

Beberapa responden di lokasi penelitian menyebutkan bahwa anak-anak mereka kini lebih keras dalam soal agama, seperti dengan mudah menyebut kata "kafir" kepada orang lain. "Sebagai orangtua tentu saja saya ingin anak saya kelak menjadi orang yang saleh, tapi saya juga tidak mau anak-anak saya bersikap fanatik dan diajari membenci orang lain, apalagi orangtua sendiri, hanya karena pemahaman agama."[46]

Ungkapan-ungkapan seperti "kafir" dan "masuk neraka" adalah ungkapan keras yang sebenarnya tidak lazim digunakan dalam kehidupan beragama umat Islam Indonesia. Dulu, ungkapan itu hanya dialamatkan kepada kaum penjajah dengan tujuan untuk memberi legitimasi moral keagamaan untuk melawan dan mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Di masa perkembangan Islam di tanah Arab, kelompok yang gemar menuding orang Islam lain sebagai kafir adalah kelompok Khawarij yang mengkafirkan Sayyidina Ali dan Muawiyah serta para sahabat yang sejalan dengan keduanya. Sekalipun sebagai sekte Khawarij sudah tidak ada, namun kebiasaan buruknya diwarisi oleh banyak gerakan garis keras untuk mendiskreditkan siapa pun yang tidak sejalan —atau bahkan ber-

45. Wawancara dengan seorang responden di Bekasi, Jawa Barat, 11 Februari 2008.

46. Wawancara dengan seorang responden di Ciputat, Tangerang, Banten, 20 November 2007.

tentangan— dengan mereka. Wahabi disebut-sebut sebagai pewaris sejati dimaksud.

Benarkah kini anak-anak kita telah mewarisi ajaran kaum Khawarij (Wahabi) yang mudah mengkafirkan orang lain? Jika benar, bagaimana teologi radikal dari Arab Saudi dan gerakan garis keras dari Timur Tengah tersebut bisa menyusup dan mencuci otak anak-anak kita? Ini isu penting yang telah menyita perhatian banyak kalangan dalam sepuluh tahun terakhir, ketika mulai banyak bermunculan kelompok-kelompok garis keras bercorak Timur Tengah yang tak kenal kompromi dalam memaksakan agenda-agenda mereka, dengan penghujatan, teror, dan penyerangan kepada yang lain yang dianggap "kafir". Mereka tampaknya lupa pada hadis shahih dari Nabi Muhammad saw. (sebagaimana yang sudah dikemukakan sebelumnya) bahwa: "Siapa pun yang mengkafirkan saudaranya tanpa penjelasan yang nyata, adalah dia sendiri yang kafir" (*man kaffara akhâhu bi-ghairi ta'wîl—fa-huwa kamâ qâla*).[47] Atau dalam riwayat lain, "Siapa pun yang mekafirkan saudara, maka salah seorang darinya benar-benar kafir" (*man kaffara akhâhu—fa-qad bâ'a bihâ ahaduhâ*).[48]

Terkait dengan soal bagaimana proses kontaminasi teologis terhadap anak-anak dan generasi muda itu dilakukan, kasus-kasus di atas mengingatkan kita pada fenomena serupa pada tahun 1980-an ketika banyak orangtua yang cemas melihat anak-anaknya tiba-tiba rajin beribadah tapi pada saat bersamaan memisahkan diri dari pergaulan. Anak-anak perempuan mereka memakai jilbab tertutup yang berbeda dengan kerudung Muslim khas Melayu; sebagian bahkan ada yang menutup seluruh bagian tubuhnya dengan kain hitam dan hanya menyisakan matanya saja, bahkan ada yang matanya pun ditutup dengan sejenis kain kasa. Anak laki-

47. Hadits riwayat Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, jilid XX, Bab 73 (Mesir: Mauqif Wizârat al-Auqâf, t.t.), h. 259.
48. Hadits riwayat Ahmad ibn Hanbal, *Masnad Ahmad*, Bab Masnad 'Abdullah ibn 'Umar, jilid XIII (Mesir: Mauqif Wizârat al-Auqâf, t.t.), h. 455.

laki memelihara jenggot dan menghitamkan jidat. Itu merupakan masa ketika kelompok-kelompok *usroh* atau *tarbiyah* menjamur di kampus-kampus menawarkan satu pandangan keagamaan yang fanatik serta seolah lebih saleh dan taat dibandingkan orang lain di sekitarnya.[49]

Saat ini, gejala radikalisasi keagamaan tidak hanya berhenti di kampus-kampus tapi sudah masuk pula ke sekolah-sekolah tingkat dasar dan menengah. Cerita anak yang mengkafirkan orangtuanya sendiri hanya contoh kecil bagaimana agen-agen garis keras telah berhasil mempengaruhi cara pandang keagamaan anak-anak dan remaja usia sekolah. Jika di perguruan-perguruan tinggi ada LDK (lembaga dakwah kampus) yang merupakan bentukan kelompok Tarbiyah Ikhwanul Muslimin dan hingga kini masih menjadi ajang rekruitmen kelompok ini, maka di sekolah-sekolah tingkat menengah, rekruitmen dilakukan melalui Badan Rohani Islam atau Rohis, yang merupakan satu-satunya organisasi pelajar Islam yang boleh beraktivitas di sekolah negeri/umum.

Para pelajar sekolah umum biasanya tidak memiliki pengetahuan agama yang mendalam, sebagaimana agen-agen garis keras yang sebenarnya mempunyai pemahaman yang dangkal tentang Islam. Akibatnya, mereka cenderung mudah tertarik dengan tawaran "Islam harakah" atau Islam gerakan yang ditawarkan kelompok Tarbiyah Ikhwanul Muslimin. Ini juga sebenarnya yang terjadi dengan kampus-kampus umum di mana mahasiswanya mudah jatuh cinta pada "Islam harakah". Para pelajar dan mahasiswa kurang memiliki pemahaman agama yang mendalam sebagaimana anak-anak pesantren. Pada anak-anak pesantren, pengajaran agama diberikan secara komprehensif karena tujuannya memang menuntut ilmu, sehingga anak-anak santri cenderung memiliki perspektif yang luas dan tidak mudah jatuh pada sikap hitam-putih dalam beragama. Sedangkan pada "Islam harakah", agama hanya diajarkan satu di-

---

49. Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia* (Jakarta: Teraju, 2002), h. vi.

mensi, yaitu ideologi, karena tujuannya politik. Dalam bahasa KH. A. Mustofa Bisri, bab yang dipelajari oleh kelompok-kelompok semacam ini baru *bab al-ghadlab* atau bab marah. Padahal, dalam pelajaran agama masih banyak bab yang lain, seperti bab *shabr*, bab *tawâdlu'*, bab *qanâ'ah*, bab *tasâmuh*, dan lain-lain.[50]

Melalui dua strategi, yaitu diseminasi ideologi dan kaderisasi, agen-agen garis keras masuk ke lembaga-lembaga pendidikan di semua tingkatan. Strategi *pertama*, penyelenggaraan program peribadatan, seperti training keislaman di sekolah-sekolah, yaitu training Islam pemula (*Islamic training for beginners*), bimbingan belajar, kursus-kursus bagi para pelajar dan mahasiswa, pelayanan buku-buku harakah atau gerakan, serta pelayanan penyediaan da'i gratis, termasuk menyediakan khatib gratis yang siap pakai untuk shalat Jumat. Strategi *kedua*, kaderisasi. Gerakan ini melakukan latihan-latihan yang intensif untuk anak-anak, remaja dan mahasiswa yang bakal dibina untuk menjadi kader gerakan. Latihan-latihan khusus, seperti Studi Islam Intensif, Latihan Mujahid Dakwah dan Pembina, dilakukan secara berjenjang dan intensif.

Kelompok-kelompok garis keras telah berhasil menyiapkan dan melatih kader-kadernya untuk menjadi aktivis dalam berbagai bidang dan disebar di masyarakat, termasuk lembaga-lembaga pendidikan yang dianggap sangat strategis untuk menyiapkan kader masa depan. Beberapa pola kegiatan lain yang bisa dikenali secara terbuka antara lain menyelenggarakan berbagai bentuk pelatihan keagamaan maupun pelatihan keterampilan umum lainnya bagi mahasiswa, pelajar dan masyarakat umum. Semua pola itu mudah dikenali karena memiliki ciri yang khas yaitu metode tarbiyah yang menjadi karakteristik gerakan Ikhwanul Muslimin di Timur Tengah.

Untuk masyarakat umum, penyediaan kader terlatih seperti khatib, guru ngaji, dosen, dokter, biasanya dilakukan dengan komando terpusat. Gerakan ini juga menyediakan tenaga terlatih un-

50. KH. A. Mustofa Bisri, diskusi di The Wahid Institute, 28 Januari 2008.

tuk pendidikan kerumah-tanggaan, seperti masak-memasak yang beroperasi dari rumah ke rumah, bahkan penyediaan *cleaning service* gratis di masjid. Biasanya, jika agen gerakan ini telah dipercaya memegang suatu lembaga seperti masjid atau pengajian dan pendidikan dalam masyarakat, maka yang dilakukan kemudian ialah pembersihan terhadap pihak mana pun yang tidak mendukung paham dan ideologi mereka, dan mengundang teman-temannya untuk mengisi struktur yang sudah dibersihkan.

Saat ini banyak sekali masjid, sekolah-sekolah Islam dari tingkat paling rendah yaitu taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi telah berhasil dimasuki oleh para agen gerakan tersebut. Di kota-kota di Indonesia bisa ditemukan dengan mudah pamflet atau iklan di surat kabar mengenai ustadz atau guru ngaji yang siap memenuhi kebutuhan masyarakat baik dalam bentuk khutbah, ceramah atau bimbingan keluarga. Mereka juga menyediakan tenaga untuk bimbingan keagamaan (Islam) bagi pelajar dan mahasiswa selain bagi masyarakat umum.

Selain menjangkau lembaga-lembaga formal yang telah lebih dulu berdiri, kelompok ini juga berusaha mendirikan sendiri sekolah-sekolah Islam yang mempunyai ciri khas, yang biasanya mereka namakan Sekolah Islam Terpadu (SIT). Sekolah semacam ini telah berhasil didirikan di berbagai kota di Indonesia dengan obyek utamanya para murid dari tingkat kanak-kanak (TK) hingga sekolah tingkat atas (SMU). Belakangan Taman Kanak-Kanak TK Islam Terpadu (TK-IT) yang jumlahnya ratusan itu telah mampu bersaing dengan TK-Raudhatul Athfal (milik Muslimat NU) dan TK-ABA (milik Aisyiyah-Muhammadiyah). Dalam hal ini, ada satu kasus menarik. Pada tahun 2006 sebuah TK milik Aisyiyah Muhammadiyah di Prambanan yang telah berdiri 20 tahun hendak diubah menjadi TK Islam Terpadu, dengan dukungan dari Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, selaku Dewan Pembina dan Pengurus Yayasan Islamic Centre yang berafilisi dengan PKS. Tentu saja pihak Pimpinan Wilayah Muhammadiyah

Jateng keberatan dengan rencana tersebut sekalipun dengan alasan akan dibangun Islamic Center. Gagal diakuisisi oleh PKS, TK Aisyiyah tersebut tetap berdiri sampai sekarang.

Keberadaan kelompok Tarbiyah Ikhwanul Muslimin (PKS) di lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah mulai terkuak tatkala Farid Setiawan, pengurus Muhammadiyah wilayah Yogyakarta, menulis sebuah artikel opini di Majalah *Suara Muhammadiyah.* Dalam artikel berjudul ”Tiga Upaya Mu'alimin dan Mu'alimat” itu Farid mensinyalir terjadinya penyusupan agen-agen garis keras di Madrasah Mualimin dan Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta. Kedua lembaga pendidikan menengah ini dikenal sebagai tempat pengkaderan ulama Muhammadiyah yang langsung dikelola oleh Pimpinan Pusat.

Lebih lengkap, Farid Setiawan menulis:[51]

> ... transformasi ideologi di kedua madrasah tersebut (Muallimin dan Muallimat, *ed.*) lama-kelamaan mulai memudar ... karena mewabahnya "virus *tarbiyah*" yang makin menggurita. "Virus *tarbiyah*" tersebut sebagian besar memasuki urat nadi kepengurusan madrasah, dari guru sampai pendamping asrama yang biasa disebut *musyrif* dan *musyrifah.*
>
> Memang, virus ini secara kasat mata tidak dapat dilihat dengan jelas, namun yang pasti "kegenitan politik" dalam berafiliasi terhadap salah satu partai dan *manhaj* lain menjadikan para pengurus, guru, *musyrif* dan *musyrifah*-nya semakin menampakkan gerakan yang berbeda dengan Muhammadiyah. Mereka cenderung menggunakan gerakan baru non-Muhammadiyah dalam mengembangkan gerakan dan kepentingan politiknya.
>
> Dalam bentuk kaderisasi, mereka cenderung mengguna-

51. Farid Setiawan, "Tiga Upaya Mu'allimin dan Mu'allimat," *Suara Muhammadiyah*, 3 April 2006.

> kan sistem yang berbeda dengan Muhammadiyah seperti *Daurah, Liqa', Usrah, Daulah Islamiyah* serta doktrin *Jihad fi Sabilillah* yang diambil sebagai jargon suci dalam membakar semangat kader. Para fungsionaris "virus *tarbiyah*" tersebut sangat intens dalam membina, mendampingi serta mendidik santri-santri madrasah, untuk kepentingan menjaring kader-kader partainya.

Bagaimana kader-kedar Muhammadiyah yang berhasil direkrut dan dibina oleh garakan Tarbiyah (PKS) menjadi kader mereka, dan bagaimana perbenturannya dengan Muhammadiyah yang moderat? Farid melanjutkan analisisnya:

> Produk keluaran dari pola kaderisasi yang dilakukan "virus *tarbiyah*" tersebut membentuk diri serta jiwa para kadernya menjadi seorang berpemahaman Islam yang ekstrem dan radikal. Sehingga wajar kalau terjadi paradoks gerakan dengan dinamika Muhammadiyah yang dikenal moderat. Perbenturan paham Islam radikal dengan Islam moderat makin tampak dan kian meruncing seiring dengan berkembangnya gerakan "virus *tarbiyah*" tersebut.
>
> Perkembangan dari pola kaderisasi tersebut saat sekarang telah tersebar ke berbagai penjuru Muhammadiyah. Hal ini membuat kekecewaan yang cukup tinggi di kalangan warga dan Pimpinan Muhammadiyah di berbagai daerah. Putra-putri mereka yang diharapkan menjadi kader penggerak Muhammadiyah malah bisa berbalik seratus delapan puluh derajat, dan bahkan jadi memusuhi Muhammadiyah sendiri. Fenomena seperti itu juga menjadikan orang-orang di luar Muhammadiyah ikut berdukacita dan berbela-sungkawa yang sedalam-dalamnya atas matinya sekolah kader Muhammadiyah yang selama ini

diunggul-unggulkan.

Suara Muhammadiyah secara berseri menurunkan opini terkait kasus penyusupan di dua lembaga pendidikan Muhammadiyah tersebut. Namun, beberapa piminan Muhammadiyah yang telah terpengaruh paham dan ideologi garis keras ternyata tidak senang dengan opini yang dikeluarkan oleh *Suara Muhammadiyah*. Polemik ini pun berbuntut panjang, dan berakhir dengan dikeluarkannya SKPP No 149 tentang Konsolidasi Organisasi PP Muhammadiyah, yang diedarkan secara nasional, yang melarang anggota Muhammadiyah memanfaatkan Muhammadiyah untuk kepentingan politik, dan secara khusus menyebut PKS.

Artikel Farid Setiawan ternyata telah ikut membantu persyarikatan Muhammadiyah mengatasi masalah yang membelitnya selama bertahun-tahun. Alasannya jelas karena Farid mau berterus terang, jujur, dan berani mengemukakan apa yang ia saksikan dan merugikan organisasi Muhammadiyah. Seharusnya ini menjadi inspirasi bagi yang lain melakukan hal yang sama, demi menyelamatkan Muhammadiyah dari penyusupan dan penggerogotan garis keras.

Sejak beberapa tahun belakangan ini, gerakan Tarbiyah Ikhwanul Muslimin ini juga mampu mengembangkan model pendidikan bergaya Arab dengan sponsor utama dari Timur Tengah, khususnya Arab Saudi. Sebagai contoh, kini telah berdiri beberapa Ma'had Ali (semacam lembaga kursus pendidikan keagamaan) di berbagai kota, lagi-lagi dalam kaitannya dengan universitas-universitas Muhammadiyah. Bahkan pada beberapa program studi di universitas tersebut seluruh mahasiswanya diberi beasiswa dan disuplai dengan dosen dari Arab Saudi secara langsung.

Sebagai misal, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dibuka kelas khusus Ma'had Abu Bakar, yang semua pembiayaan berasal dari Arab Saudi, dengan dosen-dosen Wahabi dari Arab Saudi dan dosen alumni Timur Tengah. Di UMY ini, bebe-

rapa dosen di Fakultas Fisipol, Teknik, Ekonomi dan Hukum, adalah aktivis HTI. Mereka menyusun program yang disebut Islamisasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dengan menyusun kurikulum Pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, yang hanya boleh diajarkan oleh orang-orang tertentu, khususnya alumni Timur Tengah.

Dosen yan paling berpengaruh dalam perkuliahan di Ma'had Abu Bakar UMY adalah dua Ketua Muhammadiyah, keduanya alumni Universitas Ibn Saud Arab Saudi. Dalam sebuah tulisan Prof. Khaled M. Abou el Fadl, dinyatakan bahwa jaringan Universitas Ibn Saud memang dibiayai untuk melakukan penyebaran paham Wahabi ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia, agar menjadi paham mayoritas di dunia Islam. Fadl juga menyebutkan bahwa sudah lebih banyak pengajar di Universitas Al-Azhar, Mesir, bermazhab Wahabi ortodoks konservatif yang mengikuti jejak tokoh radikal Ikhwanul Muslimin, yaitu Hassan al-Bana dan Sayyid Qutb. Sejak tahun 1990-an, kata Fadl, Wahabisme telah menjadi sistem pemikiran yang dominan di dunia Islam.[52] (Lihat kembali penjelasan mengenai kombinasi paham Wahabi-Ikhwanul Muslimin ini dalan Bab II, *Latar Belakang Masalah: Penyusupan Ideologi Wahabi-Ikhwanul Muslimin di Indonesia*).

Peneliti kami diberitahu bahwa di kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), gerakan penyusupan paham Wahabi-Ikhwanul Muslimin demikian kuatnya, terutama lewat Fakultas Teknik, Agama Islam, dan Program Magister Agama Islam, di mana ketuanya adalah Dewan Syuro PKS, Dr. Muinudinillah, Lc., lulusan King Abdul Aziz University, Arab Saudi. Dalam kelas Magister Studi Islam UMS, ada tiga kelas yang mendapatkan beasiswa dari Arab Saudi, dan buku-buku dari Arab menjadi bacaan wajib di kelas. Yang menarik adalah, kira-kira tiga per-empat mahasiswa S2 Studi Islam itu merupakan kader PKS yang dibawa oleh Direk-

52. Khaled M. Abou el Fadl, *Melawan "Tentara Tuhan,"* (Jakarta: Serambi, 2001), h. 22.

turnya dan mendapatkan beasiswa dari Kerajaan Arab Saudi.

Penelitian ini menemukan data bahwa di UMS, sekitar 60% dosennya adalah PKS, yang tersebar di seluruh fakultas. Dari 60% dosen tersebut banyak di antaranya adalah pejabat di UMS, karena itu menjadi persoalan yang tidak sederhana bagi Rektor UMS untuk mengimplementasikan SKPP Muhammadiyah dalam usaha menertibkan dengan memecat mereka, misalnya. Jika melakukan pemecatan maka UMS akan *collapse*, sebab dosennya habis. Demikian juga mahasiswanya, separoh dari mereka lebih dekat dengan PKS karena kampus UMS didominasi oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) yang merupakan sayap PKS, di samping itu banyak juga mahasiswa yang merupakan alumni dari pesantren Ngruki Pimpinan Abu Bakar Ba'asyir, Amir Majelis Mujahiddin Indonesia (MMI).

Data di atas cukup mengejutkan, karena bisa terjadi bahwa di kampus milik Muhammadiyah para mahasiswanya lebih banyak anggota KAMMI (PKS) dan bukan IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah). Padahal, Ketua BPH UMS adalah Drs. Dahlan Rais, M.Hum (adik kandung Amien Rais) dan Ketua PP Muhammadiyah. Sedangkan Wakil BPH adalah Drs. Marpuji Ali, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah.

Dewasa ini sudah menjadi pemandangan umum bahwa PKS dan HTI sudah menguasai masjid-masjid kampus di Yogyakarta, termasuk masjid kampus UGM, UIN, Masjid Syuhada, Masjid Pascasarjana UGM, dan masjid kampus UMY. Masjid-masjid kampus menjadi ajang sosialisasi dan disseminasi kelompok Tarbiyah Ikhwanul Muslimin di perguruan tinggi. Dalam hal ini pihak universitas tidak bisa berbuat banyak karena sebagian gerakan Tarbiyah Ikhwanul Muslimin didukung oleh pejabat kampus.

Ada beberapa ketegangan yang muncul di kampus-kampus tersebut. Di Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dan UIN sering muncul penolakan dari mahasiswa dan dosen yang mengetahui bahwa kelompok Tarbiyah Ikhwanul Muslimin berusaha mema-

sukkan paham dan ideologi mereka pada saat khutbah Jumat dan pengajian mahasiswa, termasuk pada pengajian Ramadhan. Penolakan di UAD oleh beberapa dosen dan mahasiswa berakhir dengan pembubaran pengajian tersebut. Di masjid UIN Yogyakarta peristiwa pembubaran ini dilakukan oleh Takmir Masjid dan PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, sayap mahasiswa NU) karena kelompok Tarbiyah Ikhwanul Muslimin itu dianggap tidak memberikan ruang pada semua mahasiswa dan dosen UIN yang berbeda paham.

Lembaga-lembaga pendidikan telah lama menjadi ajang penyusupan gerakan garis keras, terutama karena kelompok-kelompok ini telah berhasil menguasai jaringan dan menempatkan kader-kader mereka di dalam struktur organisasi lembaga pendidikan bersangkutan. Kampus-kampus ternama seperti UI, ITB, IPB, UGM, Unpad, dan kampus-kampus besar di luar Jawa menjadi tempat yang subur bagi pengembangbiakan paham garis keras. Dalam Mata Kuliah Agama Islam, misalnya, para mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti mentoring. Jika tidak mau ikut, jangan harap bisa memperoleh nilai tinggi dalam Mata Kuliah Agama Islam tersebut. Adapun para mentornya tidak lain adalah kader yang memang sudah diatur oleh LDK (Lembaga Dakwah Lampus) yang juga sudah dikuasai kelompok garis keras.

Di Medan, Sumatera Utara, dari 34 mahasiswa aktivis LDK yang menjadi responden penelitian, 31 orang di antaranya menolak demokrasi dan setuju mendirikan sistem Khilafah Islamiyah di Indonesia, proyek utama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Di Bandung, dari 32 responden mahasiswa, 4 di antaranya adalah aktivis LDK dan semuanya setuju Khilafah Islamiyah dan menolak demokrasi. Sebagai perbandingan, 5 responden aktivis KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) di Bandung setuju demokrasi tapi pada saat bersamaan juga setuju Khilafah Islamiyah. 5 Aktivis KAMMI di Bogor yang menjadi responden penelitian juga setuju demokrasi dan pada saat bersamaan setuju dengan Khila-

fah Islamiyah. Ini tidak mengagetkan karena KAMMI merupakan *underbouw* PKS yang juga menerima demokrasi. Dengan kata lain, agenda HTI untuk memperjuangkan khilafah Islamiyah di Indonesia rupanya telah masuk ke lingkungan pendidikan dan didukung oleh para aktivis LDK dan KAMMI.

Infiltrasi di Instansi-Instansi Pemerintah dan Swasta

Dewasa ini kita sering mendengar ungkapan seperti: "Saat ini tidak ada lagi yang bercita-cita mendirikan negara Islam," atau, "Stigma negara Islam sengaja ditiupkan oleh kelompok-kelopok yang anti-Islam," dan seterusnya. Namun, pada kenyataannya, kita mendengar kerisauan banyak pihak atas berbagai indikator yang mengarah kepada formalisasi agama dalam bentuk negara Islam, mulai dari tuntutan kembali ke Piagam Jakarta hingga bermunculannya Perda-perda Syari'ah di berbagai daerah di tanah air. Kalau ada yang menunjukkan bahwa itu merupakan indikator ke arah perwujudan negara Islam, maka dia akan cepat dituduh mengidap penyakit Islamophobia atau anti-Islam. Padahal tidak demikian, dia justru mengungkapkan yang sebenarnya, sebagaimana dibuktikan studi ini.

Kasus ini pernah menimpa Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono. Pada tahun 2006, Menhan Juwono mengungkapkan adanya penyusupan gerakan radikal ke dalam partai-partai Islam yang ingin mendirikan negara Islam untuk menerapkan syar'iah. Menurut Menhan, gerakan radikal itu menunggu saat yang tepat untuk terciptanya radikalisasi. Menhan menambahkan, pendirian negara Islam untuk menerapkan syariah akan membuat partai-partai Islam berseteru, karena interprestasi syari'ah berbeda-beda antarparpol Islam. Menhan kemudian meminta parpol Islam untuk waspada terhadap penyusupan itu.[53]

Atas pernyataannya itu, Menhan menerima badai protes dari kalangan aktivis partai. Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera

---

53. *Republika*, 7 Oktober 2006.

(PKS), Tifatul Sembiring menyebut pernyataan Menhan itu hanya memberi stigma negatif kepada partai-partai Islam. Tudingan seperti itu, kata dia, mirip cara-cara yang digunakan Orde Baru. Reaksi keras juga disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal PPP, Lukman Hakim Saifuddin. Menurutnya, Menhan tidak pantas membuat tuduhan seperti itu. Apalagi, ujarnya, faktanya cita-cita mendirikan negara Islam sudah ditinggalkan.

Semua ini merupakan reaksi politik yang lebih didasarkan pada kepentingan jangka pendek. Seharusnya, pernyataan Menhan dipahami sebagai refleksi kecintaannya pada NKRI dan Islam. Penyusupan bukanlah isapan jempol belaka. Bahkan seorang mantan Panglima TNI mengemukakan kepada peneliti kami, "Dulu, ancaman garis keras terhadap NKRI dan Pancasila ada di luar pemerintahan, seperti DI/NII. Tapi sekarang, garis keras sudah masuk ke dalam pemerintahan, termasuk parlemen, dan menjadi jauh lebih berbahaya dari sebelumnya."[54]

Saat ini, mantan Ketua PKS menempati posisi strategis sebagai Ketua MPR RI. Tiga tokoh lainnya menjadi menteri dalam kabinet, termasuk departemen pertanian yang sangat strategis karena punya cabang di semua kecamatan seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dan menguasai apa pun yang diberikan oleh pemerintah kepada para petani. Bahkan, menurut seorang pengasuh salah satu pesantren besar di Jawa Tengah, "PKS sudah berhasil menyusup sampai ke desa-desa di berbagai daerah di Jawa Tengah dengan memanfaatkan fasilitas Departemen Pertanian."[55]

Dewasa ini bangsa Indonesia menyaksikan buah koalisi partai-partai garis keras dengan politisi dan parpol-parpol oportunis. Secara makro, beberapa tahun ini pemerintah Indonesia mendapat banyak pujian internasional karena adanya kemajuan situasi ekonomi serta "keberhasilan" menangkap dan mengadili para pelaku teror atas nama Islam. Semua ini menciptakan citra adanya stabili-

54. Wawancara peneliti konsultasi pada 17 September 2008
55. Wawancara peneliti konsultasi di Jakarta pada bulan Maret 2008.

tas. Tapi sebenarnya, di luar perhatian pers dan politisi internasional, dan banyak masyarakat Indonesia sendiri, situasi sosial dalam konteks keagamaan di Indonesia menjadi semakin tidak kondusif karena adanya kerjasama antara para politisi dan parpol oportunis dengan parpol dan gerakan garis keras yang telah membiarkan idelogi, agen dan agenda garis keras masuk ke mana-mana hampir di semua bidang kehidupan bangsa Indonesia.

Peneliti kami mendapat penjelasan dari seorang sejarawan yang juga aktif mempelajari dan meneliti pendidikan para imam dan khatib serta pandangan keagamaan yang disampaikannya dalam khotbah Jum'at, "Ketika saya mendengarkan khotbah-khotbah yang disampaikan di banyak masjid waktu shalat Jum'at di Jakarta, saya khawatir dengan masa depan negeri ini." Dia menambahkan, "Khotbah Jum'at yang disampaikan banyak berisi kecaman terhadap pihak lain, yang sebenarnya tidak pantas dilakukan di dalam masjid."[56]

Ustadz AR adalah alumni Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, yang memiliki pandangan moderat-progresif. Ia mengagumi Syeikh al-Akbar al-Azhar, Muhammad Sayyid Thantawi karena pandangan-pandangan keagamaannya yang bersifat moderat. Para alumni al-Azhar seangkatannya yang telah kembali ke Indonesia juga banyak yang memiliki pandangan seperti dirinya. Sejak tahun 2002 ustadz AR rutin memberikan pengajian di beberapa perkantoran di Jakarta, baik milik pemerintah atau BUMN maupun swasta. Namun sejak tahun 2004, ustadz AR harus menerima kenyataan pahit bahwa ia "dipecat" sebagai penceramah di perusahaan ekspedisi di Jakarta Selatan dan kantor Beacukai di Jakarta Timur.

Ustadz AR tidak tahu apa kesalahannya. Selidik punya selidik, ternyata Badan Pembinaan Rohani Islam atau Binroh di dua kantor tersebut kini telah dikuasai oleh kelompok Tarbiyah (PKS). Beberapa temannya sesama ustadz pun rupanya mengalami hal yang sama. Sudah menjadi tradisi bagi kelompok Tarbiyah jika sudah

---

56. Wawancara peneliti konsultasi di Jakarta pada bulan Agustus 2007.

mengendalikan sebuah forum pengajian, maka mereka akan mengambil seluruhnya, termasuk menetapkan materi dan mengatur siapa saja yang boleh dan tidak boleh mengajar di forum tersebut. Sudah pasti mereka akan mengganti para pengajar dengan orang-orang mereka sendiri yang sepaham, dan memanfaatkannya sebagai forum sosialisasi ideologi dan agenda politik mereka.

Cerita lain dikemukakan oleh BM, seorang aktivis Islam yang pernah bergiat di Youth Islamic Study Club (YISC) al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Berbekal idealisme dan jaringan alumni al-Azhar, BM dan teman-temannya sering mengkoordinasi pengajian di kantor-kantor perusahaan besar di Jakarta. Adapun para dosen atau pengajar yang masuk dalam daftar BM dkk. adalah doktor-doktor keislaman alumni Barat dan Timur Tengah yang mengajar di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Universitas Paramadina, atau kalangan cendekiawan Muslim terkemuka lainnya. Dalam 5 tahun, aku BM, ia dan kawan-kawan telah berhasil mengorganisasi belasan forum pengajian di kantor-kantor perusahaan besar di Jakarta. Namun, sejak tahun 2003, BM mengaku proposal yang ia tawarkan untuk melanjutkan kegiatan tersebut selalu ditolak oleh kantor dan perusahaan yang sama. Setelah diselidiki, ternyata lembaga Binroh kantor dan perusahaan itu memang sudah "jatuh" ke tangan kelompok Tarbiyah. Sejak itu, ia dan teman-temannya tahu diri dan mundur teratur.

Bagaimana corak dan warna pengajian yang dibawakan oleh kelompok Tarbiyah ini? Kiranya penuturan seorang sumber berinisial AT berikut ini cukup memberi gambaran. AT adalah direktur sebuah perusahaan telekomunikasi yang berkantor di kawasan Jalan Jend. Sudirman Jakarta. Menurutnya, pengajian anak-anak buahnya di kantornya saat ini berbeda dari pengajian yang dulu biasa dilakukan yang lebih menekankan spiritualitas, intelektualitas, akhlak, dan etos kerja. Pengajian saat ini menurutnya cenderung keras serta berbau politik dan jihad. Tak jarang, ujarnya, penceramah mengangkat topik yang kontroversial di masyarakat dan tidak

ragu-ragu menghujat kelompok lain. "Terus terang, saya cemas dengan perkembangan ini. Tapi karena saya orang yang awam di bidang agama, saya tidak bisa berbuat apa-apa," ungkapnya.

Perihal adanya penyusupan ideologi di forum-forum pengajian kantor pemerintah pernah menggegerkan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Bogor, yang dipimpin Walikota Nur Mahmudi Ismail, mantan Presiden PKS. Adalah Hasbullah Rachmad, ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Depok, yang mengungkapkan hal tersebut pada Desember 2006. Hasbullah memberi contoh bahwa pengajian rutin yang dibawakan guru ngaji dari Fraksi PKS di kalangan birokrasi Pemkot Depok merupakan bentuk pemaksaan. "Mereka yang ingin karirnya naik diwajibkan ikut pengajian PKS. Itu benar-benar terjadi," kata Hasbullah. Langkah yang dilakukan Nur Mahmudi dan Fraksi PKS ini, menurut Hasbullah, sangat meresahkan pegawai Pemkot Depok. Hasbullah mengatakan, seandainya dia wali kota, dia tidak perlu menggelar pengajian semacam itu. "Saya cukup lakukan kontrak politik dengan pejabat dinas. Misalnya bisa *nggak* menerbitkan IMB dalam waktu seminggu? Kalau tak mampu, ya kita ganti. Itu yang penting dilakukan untuk tingkatkan pelayanan masyarakat," jelasnya.[57]

Sebenarnya jaringan para ustadz PKS yang tersebar di berbagai kantor dan perusahaan bukan sesuatu yang baru. Para alumni gerakan *usroh* atau Tarbiyah Ikhwanul Muslimin yang dulunya merupakan aktivis pengajian di kampus-kampus setelah lulus kuliah mereka bekerja di berbagai perusahaan. Tidak hanya di perkantoran atau perusahaan di Jakarta, tapi juga di perusahaan-perusahaan besar di seluruh Indonesia. Melalui mereka inilah jaringan pengajian *a la* Tarbiyah dibentuk di tempat mereka bekerja sekarang. Jadi, jaringan yang pernah mereka bangun dalam gerakan

57. "Fraksi PKS Diingatkan Tak Paksakan Ideologi Partai," *Kompas*, 18 Desember 2006.

dakwah di kampus dahulu, mereka lanjutkan ketika bekerja di perusahaan-perusahaan besar tersebut.[58]

Dalam risalah resminya sendiri, PKS memang menyatakan secara eksplisit tentang penyebaran kader mereka melalui tiga tahap, yaitu: *Pertama*, penyebaran kader dakwah ke organisasi/lembaga di berbagai sektor kehidupan menuju pusat kekuatan dan kebijakan; *kedua*, penapakan karir kader dakwah dalam organisasi/lembaga tersebut; *ketiga*, berperan dalam mempengaruhi, merumuskan, menerjemahkan, dan mengimplementasikan kebijakan publik agar sesuai dengan *manhaj* Islam.[59]

Sebagai partai dakwah, tentu saja PKS berhak mengambil peran dalam syiar Islam di masyarakat. Namun ketika dakwah yang dilakukan berhimpitan dengan tujuan-tujuan politik untuk memobilisasi dukungan dalam rangka memenangkan pemilu, maka umat Islam yang bukan PKS pun berhak untuk menolak dan membentengi diri. Menurut Ketua PP. Muhammadiyah, Haedar Nashir:

> Ukhuwah dengan sesama kelompok Islam maupun dengan komponen bangsa lainnya, tidak harus mengorbankan kebutuhan Muhammadiyah. Justru sebaliknya, jika benar-benar ingin membangun ukhuwah, maka sesama gerakan Islam jangan saling mengganggu, apalgi menganggap diri alternatif dan kemudian memposisikan seluruh kelompok/jamaah Islam lain wajib dimasuki dan "di-Islam-kan kembali." Sikap seperti itu selain angkuh dan merusak etika sesama umat Islam, bahkan dapat menyebarkan benih konfik dan permusuhan di tubuh umat Islam. Jika Muhammadaiyah melakukan pemagaran diri, bukanlah anti-ukhuwah, juga bukan reaksioner. Lihatlah masalah dari hulu, jangan dari hilir. Tak ada asap, tak

58. Ali Said Damanik, *op., cit.*, h. 161.

59. Lihat, *Platform Kebijakan Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera* (Jakarta: Majelis Pertimbangan Pusat PKS, 2007), h. 20.

> ada api. Muhammadiyah sekadar mereaksi dan kemudian melakukan pemagaran diri. Jika ingin ukhuwah justru kembangkan sikap saling toleran, saling memahami, dan saling menghargai, jangan merasa diri paling Islami dan sebagai alternatif dari yang lain.
> Bahkan partai Islam apa pun, tetap memiliki misi dan kepentingan sendiri, tidak identik dengan Islam itu sendiri. Partai politik kendati berlabel Islam atau dakwah bahkan sejatinya tetap partai politik, yang orientasi utamanya tetap pada perjuangan kekuasaan untuk dirinya sendiri, karena itu tidak harus dipersepsikan sebagai mewakili Islam dan umat Islam secara keseluruhan.[60]

Penutup

Dalam konteks inilah kita bisa memahami jika umat Islam Indonesia bereaksi keras terhadap penyebaran kader PKS, dan di mata mereka justru merupakan infiltrasi. Itulah alasan mengapa Muhammadiyah mengeluarkan SKPP No. 149 tahun 2006 yang melarang anggotanya memanfaatkan organisasi Muhammadiyah untuk kepentingan politik. Demikian juga NU yang mengeluarkan fatwa-fatwa untuk mewaspadai dan melawan ideologi dan gerakan transnasional. Dewasa ini ancaman terhadap Pancasila dan NKRI serta Islam sekaligus semakin kuat dan berbahaya. Karena dengan ideologi, sistem dan kekuatan dana yang dimiliki, para agen garis keras telah berhasil menyusup ke berbagai sektor kehidupan bangsa Indonesia.

Sebagai elemen terbesar bangsa Indonesia, bahkan komunitas Muslim terbesar di dunia, umat Islam Indonesia memiliki kewajiban dan tanggung jawab moral yang sangat besar untuk menyelamatkan tidak hanya NKRI dan Pancasila dari berbagai ancaman, melainkan juga berkewajiban menyelamatkan Islam dari pembaja-

---

60. Haedar Nashir, *Kristalisasi Ideologi & komitmen Bermuhammadiyah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), h. 8-9.

kan dan pemudaran nilai-nilainya yang luhur dan mulia. Semua ini bisa dilakukan, di antaranya, dengan menyadari keterbatasan pemahaman dan pengetahuan kita, terus belajar secara terbuka dan rendah hati, dan mengamalkan ajaran agama yang penuh spiritualitas dan kasih sayang Tuhan. Jika demikian, kita akan bersikap toleran dan menghargai perbedaan dan kebebasan, serta menolak usaha siapa pun yang hendak menjadikan Islam sebagai media kekuasaan.

Bab V

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Kepulauan Nusantara merupakan wilayah yang sangat kaya dengan warisan spiritual, sebuah tradisi yang secara terbuka mengakui dan menerima perbedaan. Hal ini dilandasi kesadaran bahwa perbedaan yang ada hanyalah bersifat lahiriah, dan semua bertemu dalam suatu realitas substansial yang sama. Dalam suasana seperti inilah Islam dibawa oleh para wali, tokoh-tokoh yang sangat mementingkan aspek substantif ajaran agama tanpa mengabaikan aspek-aspek lahiriah, masuk ke Nusantara. Karena itu, penduduk Nusantara menerima Islam layaknya menerima pesan-pesan luhur spiritual yang mengakui eksistensi dan realitas tradisi keberagamaan yang telah menjadi bagian integral kehidupan mereka.

Seperti sering diingatkan bahwa agama adalah jalan dan cara (*syir'ah wa minhaj*), dua prinsip yang terkandung di dalamnya adalah: ketulusan mengabdi kepada Allah swt. (*ikhlash al-'ibâdah ilâ Allâh*) dan berhias dengan akhlak mulia dan terpuji (*al-tahallî bi makârim al-akhlâq*). Pengabdian kepada Allah swt. tidak hanya dilakukan dalam ibadah murni (*ibâdah mahdlah*) seperti shalat, zakat,

puasa, dan haji, melainkan juga dalam membantu dan melayani makhluk Allah swt. Ini berarti selalu ada dimensi ibadah dalam setiap aktivitas umat beragama, tergantung pada niat atau maksud dalam melakukan aktivitas yang bersangkutan. Sedangkan akhlak mulia secara eksplisit menekankan agar pengabdian kepada Allah swt. dalam berbagai bentuk dan caranya dilakukan dengan cara-cara yang baik dan terpuji, tidak merugikan atau menyakiti siapa pun.

Walaupun tidak dirumuskan secara teoretis, keberagamaan penduduk Nusantara sama belaka dengan yang disebutkan di atas. Perhatian, pelayanan, dan bantuan terhadap siapa pun dilakukan dengan kesadaran menciptakan karma bagus bagi umat Hindu, untuk memberi darma dan melepaskan manusia dari penderitaan dunia maya ini bagi umat Budha, untuk mendapat *ridlâ* Allah swt. bagi umat Islam, dan sebagai wujud kasih sayang Allah terhadap sesama bagi umat Nasrani. Dan dengan tepat Pancasila merefleksikan pesan-pesan luhur agama ini: Hyang Mahaesa, nilai-nilai kemanusiaan, perasaan sebagai satu-kesatuan, musyawarah dalam kepemimpinan, dan keadilan.

Pesan-pesan luhur inilah yang belakangan digugat dan dihujat oleh kelompok-kelompok garis keras sebagai penyebab degradasi moral dan keterpurukan bangsa Indonesia, baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Tujuannya jelas, dengan mendiskreditkan Pancasila mereka berusaha melakukan formalisasi agama, yakni pemahaman mereka yang sempit, dangkal, parsial, dan kaku tentang Islam. Padahal realitasnya jelas, degradasi moral dan ke erpurukan bangsa adalah karena ulah penguasa yang tidak setia pada dasar dan konstitusi negara. Hingga saat ini, pesan-pesan syari'ah sebagaimana terefleksi dalam Pancasila belum sepenuhnya diwujudkan. Karena itu, degradasi moral dan keterpurukan bangsa hanya dalih semata untuk mengganti Pancasila dengan negara Islam versi mereka dan/atau mengubah NKRI dengan khilafah internasional.

Sebenarnya, benih gerakan garis keras sudah hadir di Indonesia modern sejak dekade 1970-an walaupun ketika itu hadir bermanis muka dan belum menunjukkan tujuan yang sebenarnya, karena mereka sadar belum punya kekuatan yang memadai. Benih ini kemudian tumbuh bagai jamur di musim hujan menjelang dan setelah berakhirnya rejim Orde Baru dengan memanfaatkan atmosfer demokrasi dan kebebasan untuk tujuan yang tidak demokratis dan membungkam kebebasan. Ada beberapa di antaranya yang memilih aksi-aksi jalanan sebagai media memaksakan ideologinya, namun ada pula yang memilih jalur politik praktis dan parlementer. Fenomena ini menarik perhatian dan keprihatinan banyak pihak, terutama umat Islam moderat dan nasionalis yang mencium gelagat tak beres dalam aksi-aksi mereka.

Melalui studi yang didesain untuk menemukan, menunjukkan, dan membuktikan ada dan tidaknya bahaya laten dalam gerakan-gerakan tersebut, diketahui bahwa gerakan-gerakan ini punya hubungan dengan gerakan Islam transnasional yang berasal dari Timur Tengah, terutama Wahabi, Ikhwanul Muslimin, dan Hizbut Tahrir. Tujuan mereka adalah mengatur semua aspek kehidupan bangsa Indonesia. Dengan kata lain, mereka menganut ideologi totalitarian-sentralistik yang menjadikan agama sebagai justifikasi teologis bagi ambisi politiknya. Sedangkan agenda utama mereka adalah untuk menjadi wakil Allah swt. Dengan segala keterbatasan dan kedangkalan pemahaman dan pengamalannya atas ajaran Islam, mereka merasa berhak mewakili-Nya.

Keyakinan umat Islam bahwa Allah swt. mengatur semua aspek hidup manusia digunakan dengan sangat licik oleh mereka. Memang benar Allah swt. mengatur semua aspek hidup manusia, tapi pemahaman politis kelompok garis keras adalah kesalahpahaman yang berpangkal pada sempit dan dangkalnya pemahaman mereka tentang Islam. Para ulama moderat memahami keyakinan ini dalam sikap berislam (berserah diri) yang mendalam dan ikhlas (tulus) melalui amal-amal *nawâfil* sehingga Allah swt. hadir bag-

inya sebagai pendengaran, penglihatan, lisan, dan kedua kakinya, sehingga indera dan organ tubuhnya hanya melakukan apa yang memang dikehendaki oleh Allah swt.[1] Allah swt. tidak mengatur semua aspek kehidupan manusia secara politik dan kekuasaan, melainkan secara spiritual dan cinta. Berislam secara ikhlas dan mendalam bermakna hanya berserah diri kepada Allah swt., bukan pada kehendak-kehendak rendah hewani, termasuk yang dikemas dalam retorika politik orang-orang yang mengklaim berhak mewakili Allah swt. dan memanfaatkan agama sebagai alat untuk menguasai semua aspek hidup setiap orang.

Demi ambisi politiknya, mereka menyusup ke banyak bidang kehidupan bangsa Indonesia: dari istana negara hingga ke pegunungan; melalui jalur parlementer, aksi-aksi jalanan, penyerobotan mesjid dan lembaga-lembaga pendidikan, hingga *cleaning service* gratis; bahkan ke dalam ormas-ormas Islam moderat. Semua ini dilakukan sebagai aksi-aksi yang saling mendukung secara sistemik. Ada kalanya aksi-aksi jalanan, misalnya, mendapat pembelaan dan dukungan di parlemen, dan mendapat pembenaran melalui fatwa MUI. Pernah juga terjadi fatwa MUI didukung aksi-aksi jalanan dan parlementer. Demikian pula isu-isu politik di parlemen mendapat dukungan aksi-aksi jalanan dan MUI. Semua ini tidak bisa dilihat sebagai sebuah kebetulan semata.

Ada dua alasan aksi-aksi saling dukung ini bisa terjadi. *Pertama*, ada kesamaan ideologis di antara kelompok-kelompok garis keras yang terlibat, yang terutama berafiliasi dengan Wahabi, Ikh-

---

1. Teks lengkap hadits qudsî ini berbunyi: "*Lâ yazâl al-'abd yataqarrabu ilayya bi al-nawâfil hatta uhibbahu. Fa-idza ahbabtuhu, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bihi, kuntu 'ainâhu allati yubshiru biha, kuntu lisanahu alladzi yanthiqu bihi, kuntu rijlâhu allati yabthisyu biha*" ("Hamba-Ku terus mendekatkan diri kepada-Ku dengan melaksanakan amal-amal yang menyenangkan (*nawâfil*) hingga Aku mencintainya. Dan manakala Aku mencintainya, Aku menjadi pendengaran yang dengannya dia mendengar, menjadi kedua matanya yang dengannya dia melihat, menjadi lisannya yang dengannya dia berucap, dan menjadi kedua kakinya yang dengannya dia berjalan").

wanul Muslimin, dan/atau Hizbut Tahrir. Namun bukan berarti bahwa tidak ada perbedaan. Untuk saat ini, mereka masih bisa bersatu karena merasa menghadapi musuh bersama, yakni umat Islam moderat yang menolak formalisasi agama dan lebih menekankan spiritualitas dan keberagamaan substantif. Kelak, jika kelompok moderat telah berhasil dikuasai, mereka akan bertikai di antara mereka sendiri untuk merebut kekuasaan mutlak di tanah air kita.

Alasan *kedua*, Wahabisasi global telah menjadi bisnis yang menggiurkan sehingga banyak aktivis telah memperoleh keuntungan finansial dari aksi-aksi yang mereka lakukan. Berpadunya ideologi, dana, dan sistem dalam gerakan garis keras ini membuat aksi-aksi mereka sangat berbahaya bagi tradisi keberagamaan bangsa Indonesia sebagaimana juga bagi kelestarian Pancasila dan keutuhan NKRI.

Aspek lain yang harus mendapat perhatian serius adalah, jika pada masa Orde Lama dan Orde Baru gerakan garis keras berada di luar pemerintahan, dewasa ini telah menyusup jauh ke dalamnya. Hal ini membuat mereka semakin berani dan berbahaya, karena usaha-usaha mengganti Pancasila dan mengubah NKRI bisa dilakukan melalui jalur parlementer di tingkat nasional maupun regional. Bahkan, aksi-aksi ilegal dan inkonstitusional yang mereka lakukan mendapat dukungan dan perlindungan dari pemerintah. Keberhasilan para aktivis garis keras menyusup ke dalam pemerintahan ini, di samping karena kekuatan ideologi, dana, dan sistem yang mereka miliki, juga dimungkinkan oleh politisi oportunis yang lebih mengutamakan keuntungan pribadi dan kelompoknya dan tanpa perasaan mengorbankan masa depan bangsa dan negaranya.

Fenomena ini tampak menguat dalam lima tahun terakhir ini, termasuk adanya beberapa departemen yang jelas-jelas berpihak pada kepentingan kelompok-kelompok garis keras. Apakah penguasa yang membiarkan hal ini terjadi adalah oportunis atau bukan, hanya Allah swt. yang tahu. Seandainya semata karena ti-

dak menyadari sepenuhnya bahaya-bahaya yang mengancam bangsa dan negara kita, semoga Allah swt. mengilhami mereka agar mengutamakan kepentingan bangsa dan negara kita, dan berani menolak kelompok-kelompok garis keras yang memanfaatkan mereka dalam mencapai tujuan politiknya. Namun jika kedekatan mereka dengan kelompok-kelompok garis keras karena oportunisme, rakyat harus sadar dalam memilih pemimpin yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara kita.

Politisi oportunis sama berbahayanya dengan para aktivis gerakan garis keras sendiri. Mereka adalah orang-orang munafik yang bermuka ganda dan tampil sesuai dengan kepentingan dan keuntungan yang ingin diraihnya. Demikian pula perilaku partai oportunis. Jika kelompok garis keras ingin berkuasa dan mengatur setiap aspek kehidupan manusia atas nama Allah swt., maka para oportunis ingin meraih dan melestarikan kekuasaan serta menumpuk kekayaan untuk diri dan kelompoknya. Kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana juga keluhuran pesan agama, tidak punya tempat dalam agenda perjuangan mereka. Tidak ada secercah pun harapan masa depan yang lebih cerah dari kelompok-kelompok garis keras maupun partai dan politisi oportunis selain kekangan, larangan, dan serangkaian aturan yang akan membelenggu kebebasan dan kreativitas setiap orang, yang mereka lakukan untuk menjamin tercapainya ambisi politiknya.

Keterlibatan gerakan garis keras transnasional dan dana asing (Wahabi), di samping partai dan politisi oportunis, telah membuat fenomena gerakan garis keras di Indonesia menjadi cukup besar dan kompleks. Retorika mereka menjadi pengantar pada banyak aksi-asksi kekerasan atas nama agama. Penolakan ormas-ormas Islam moderat seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah telah membuat gerakan garis keras menjadikan kedua ormas ini sebagai salah satu target utama infiltrasi mereka. Di samping karena kesetiaannya pada tradisi keberagamaan bangsa Indonesia yang santun dan toleran, NU dan Muhammadiyah telah menerima Pan-

casila dan NKRI sebagai konsensus final bangsa Indonesia.

Para tokoh Islam moderat menilai gerakan garis keras sebagai akibat dangkalnya pemahaman dan pengamalan ajaran Islam. Persis karena alasan inilah mereka menolak dan menyerang spiritualitas —karena tidak mengerti— sebagai penyimpangan dari ajaran Islam. Maka usaha-usaha untuk melestarikan Pancasila dan keutuhan NKRI, sekaligus untuk menghadirkan Islam sebagai *rahmatan lil-'âlamin*, harus dilakukan dengan cara-cara damai, bertanggung jawab, dan melalui jalur pendidikan —dalam arti kata seluas-luasnya— yang mencerahkan. Usaha-usaha ini bukan hanya kewajiban NU dan Muhammadiyah, melainkan semua komponen bangsa sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Dalam konteks era reformasi dan demokrasi ini sangat penting mengingat nasehat Syeikh Ibn 'Athaillah al-Sakandari dalam *Hikam* karyanya: "Janganlah bersahabat dengan siapa pun yang perilakunya tidak membangkitkan gairahmu mendekat kepada Allah dan kata-katanya tidak menunjukkanmu kepada-Nya" (*lâ tash-hab man lâ yunhidluka ilâ Allah hâluhu*, *wa la yahdîka ilâ Allâh maqâluhu*). Perilaku dan perkataan para aktivis garis keras maupun politisi oportunis jelas membuat umat Islam semakin jauh dari Allah swt. Hal ini harus disadari dan diwaspadai oleh seluruh rakyat Indonesia.

SKPP Muhammadiyah No. 149/Kep/I.0/B/2006[2] dan keputusan Bahtsul Masa'il NU tentang Khilafah Islamiyah,[3] adalah usaha-usaha penyadaran secara struktural. Saat ini, beberapa pengurus Muhammadiyah dan NU telah mengambil sikap tegas terhadap infiltrasi garis keras ke dalam organisasi mereka. Kedua ormas Islam moderat ini telah berusaha menyadarkan para elit dan masyarakat bahwa kelompok-kelompok garis keras itu berbahaya karena membawa ideologi transnasional (asing) yang mengancam budaya dan tradisi keberagamaan bangsa Indonesia, mengancam Pancasila

2. Lihat Lampiran 1 buku ini.
3. Lihat Lampiran 2 buku ini.

dan keutuhan NKRI. Menurut SKPP Muhammadiyah dan fatwa-fatwa NU, apa yang dilakukan organisasi-organisasi garis keras itu bukan gerakan dakwah, melainkan gerakan politik untuk tujuan meraih kekuasaan.

Rekomendasi Strategis

Ideologi dan agenda garis keras yang telah memanipulasi keyakinan umat Islam menyebabkan mereka sering bersikap dan bertindak brutal terhadap siapa pun yang tidak mendukung, apalagi yang menolak, pandangan mereka. Karena itu, usaha dalam mengatasi masalah ini membutuhkan orang-orang yang bersifat kesatria dan berani, yang tidak takut kepada siapa pun kecuali kepada Allah swt.

Dalam sejarah Nusantara, kita mengenal adanya para wali, resi, kesatria dan pemberani yang selalu tampil membela kebenaran dan memperjuangkan keadilan. Keteladanan semacam ini terus mengilhami generasi demi generasi, dan para Pendiri Bangsa adalah di antaranya. Dewasa ini pun, tetap ada banyak orang Indonesia yang mewarisi sifat-sifat mulia tersebut. Mereka berjuang demi kebenaran dan keadilan dengan tetap setia pada falsafah hidup nenek moyang dan persatuan bangsa kita. Sayangnya, karena tidak terorganisasi, mereka sering merasa terpisah dan terisolir. Sementara pada saat yang sama para agen garis keras terus menyerang siapa pun yang mengajarkan dan melestarikan nilai-nilai luhur agama dan falsafah hidup nenek moyang kita. Dalam hal inilah kita perlu membangun gerakan yang mampu mengilhami dan mendukung mayoritas terbesar bangsa Indonesia yang selama ini diam (*the silent majority*) demi menyuarakan kebenaran agama dan tradisi nenek moyang kita. Dengan demikian, kelompok-kelompok garis keras tidak akan berhasil menguasai Indonesia, dan umat Islam moderat akan kembali mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara yang bisa menjadi jaminan bagi minoritas dan benar-benar menjadi rahmat bagi seluruh makhluk.

Untuk melestarikan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan menegakkan warisan luhur tradisi, budaya dan spiritualitas bangsa Indonesia, harus ada usaha-usaha terorganisasi untuk melaksanakan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Mengajak dan mengilhami masyarakat dan para elit untuk bersikap terbuka, rendah hati, dan terus belajar agar bisa memahami spiritualitas dan esensi ajaran agama, dan menjadi jiwa-jiwa yang tenang.
2. Menghentikan dan memutus —dengan cara-cara damai dan bertanggung jawab— mata rantai penyebaran paham dan ideologi garis keras melalui pendidikan (dalam arti kata yang seluas-luasnya) yang mencerahkan, serta mengajarkan dan mengamalkan pesan-pesan luhur agama Islam yang mampu menumbuhkan kesadaran sebagai hamba Tuhan yang rendah hati, toleran dan damai.
3. Menyadarkan para elit dan masyarakat bahwa paham dan ideologi garis keras yang dibawa oleh gerakan Islam transnasional dari Timur Tengah dan disebarkan oleh kaki tangannya di Indonesia bertentangan dengan Islam serta tradisi, budaya dan corak keberagamaan bangsa Indonesia yang sejak lama bersifat santun, toleran, dan moderat.
4. Memperjuangkan, melestarikan dan mewujudkan Pancasila yang merefleksikan esensi syari'ah, serta meyakinkan para elit dan masyarakat bahwa hal ini merupakan cara untuk mewujudkan Islam benar-benar sebagai rahmat Tuhan bagi seluruh makhluk, sebagaimana dicita-citakan oleh para Pendiri Bangsa.
5. Bekerjasama dengan para kyai spiritual untuk merevitalisasi Nahdlatul Ulama sesuai dengan paham *Ahlussunnah wal Jamâ'ah*, serta mohon dan mendukung kyai-kyai spiritual untuk memimpin NU. Dengan cara demikian, kelompok-

kelompok dan para agen garis keras akan sulit menyusup dan mempengaruhi ormas moderat ini; NU akan membantu menghentikan penyusupan garis keras ke pemerintahan, MUI, dan bidang-bidang strategis lainnya; membangun negara menjadi lebih adil dan sejahtera; dan menjadi pelopor perjuangan membebaskan dunia dari krisis kesalahpahaman tentang Islam serta menyelamatkannya dari ancaman dan bahaya garis keras.

6. Bekerjasama dengan para ulama, intelektual, dan budayawan dari beragam disiplin dan keahlian, dari ormas-ormas Islam moderat, untuk memberikan informasi alternatif atas fatwa-fatwa MUI yang tidak sepenuhnya menyuarakan pesan sejati Islam; dan dalam kerangka ini pula, mendorong proses *istinbath* hukum di lingkungan MUI dilakukan secara terbuka dan melibatkan para ulama di luar struktur keanggotaan MUI dari berbagai disiplin dan keahlian untuk berpartisipasi di dalamnya, agar *instinbath* hukum tidak dilakukan secara tertutup dan terbatas kepada orang-orang yang sealiran seperti lazim di lingkungan Wahabi atau sekte-sekte yang fanatik.
7. Berkerjasama dan mendorong para praktisi pendidikan dari tingkat dasar, menengah, dan tinggi untuk memperkenalkan dan mengajarkan kekayaan, keluhuran, dan arti penting warisan budaya dan tradisi bangsa Indonesia; mendorong otoritas dunia pendidikan dan para praktisi pendidikan, orangtua/wali murid, untuk kersikap kritis terhadap berbagai kegiatan dan pengajaran keagamaan di lingkungan mereka yang kerap digunakan sebagai sarana infiltrasi ideologi garis keras; mengkampanyekan *life-long study* atau belajar seumur hidup agar bisa mengatasi kebodohan, khususnya dalam pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
8. Bekerjasama dengan para pengusaha untuk mendukung terwujudnya keadilan, keamanan, ketertiban, dan stabilitas

sosial demi terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan sejahtera melalui institusi-institusi pemerintah dan masyarakat sipil; mengajak para pengusaha untuk menggunakan kekayaan mereka secara bijaksana, agar tidak pernah mendukung kelompok-kelompok garis keras maupun parpol dan/atau politisi oportunis yang bekerjasama dengan garis keras untuk mencapai agenda politiknya; kelompok-kelompok garis keras sangat khawatir jika para pengusaha memutuskan untuk melawan dan menghentikan mereka.[4]

9. Mewujudkan institusi pemerintahan yang bersih, adil, dan taat hukum (*the institutions of good governance and the rule of law*), yang mengutamakan usaha-usaha untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan agar masyarakat dan negara bisa berkembang dan menjadi lebih maju secara nyata, dan agar jargon keadilan dan kesejahteraan tidak lagi menjadi komoditas politik kelompok-kelompok garis keras dalam usaha mencapai tujuan dan agenda politik mereka.
10. Menumbuhkan dan meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pesan-pesan luhur agama Islam sebagai rahmat bagi seluruh makhluk, dan memobilisasi tokoh-tokoh Indonesia yang *nguri-uri ngelmu* (menghidupkan dan mengamalkan warisan spiritual bangsa) untuk membantu umat manusia mengatasi krisis salah paham tentang Islam yang telah menyebar dari garis keras Timur Tengah ke Barat dan Timur serta melahirkan ancaman serius bagi non-Muslim dan Muslim di seluruh dunia.
11. Membangun jaringan generasi cinta Merah-Putih yang akan mengilhami generasi muda mengenai arti penting sejarah, tradisi dan budaya nenek moyang bangsa sendiri, mendo-

4. Sadanand Dhume mengutip pernyataan Anis Matta (Sekjen PKS ketika itu) dalam: *My Friend the Fanatic: Travel with an Indonsian Islamist* (Melbourne: Text Publishing Company, 2008), h. 239.

rong pemahaman tradisi dan budaya bangsa dalam konteks keagamaan secara utuh, menyeluruh dan mendalam. Dengan demikian gerakan dan ideologi asing seperti Wahabi, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir dan lain-lain tidak akan menemukan celah untuk menyusup dan mencuci otak anak-anak bangsa.

12. Menumbuhkan keyakinan dan kebanggaan bahwa tradisi dan budaya bangsa sendiri sejalan dengan ajaran agama yang dianut bangsa Indonesia, walaupun Nusantara bukan tempat turunnya agama-agama dimaksud; mendorong usaha-usaha pemahaman keagamaan, tradisi, dan budaya secara integral, mendalam dan menyeluruh agar anak-anak bangsa tidak mengadopsi tradisi dan budaya asing secara tidak cerdas dan dangkal yang sangat bernafsu melakukan pemusnahan kultural (*cultural genocide*) terhadap budaya Nusantara.

Apakah anak-anak cucu kita kelak akan mewarisi Indonesia yang tetap santun, toleran, damai, beradab, dan spiritual, kitalah yang menentukan pilihan.

Epilog

Belajar Tanpa Akhir

A. Mustofa Bisri

Buku *Ilusi Negara Islam* ini bisa dibaca dari sudut pandang politik dan pendidikan. Secara politik, buku ini bisa menjadi peringatan bagi bangsa Indonesia tentang adanya bahaya tersembunyi dalam gagasan dan usaha-usaha untuk mengubah Indonesia dari negara bangsa menjadi negara agama, Negara Islam. Hal ini tidak hanya berbahaya bagi bangsa Indonesia, tetapi juga bagi Islam sendiri. Bagi bangsa Indonesia , perubahan menjadi negara agama akan menjadi awal reduksi kekayaan budaya dan kebebasan beragama tidak hanya bagi nonmuslim melainkan juga bagi Muslim sendiri, bahkan distorsi terhadap Islam sendiri. Bagi nonmuslim, perubahan ini bisa membuat mereka mengalami alienasi psikologis dan sosial di sebuah negara yang menganut keyakinan resmi berbeda dari keyakinan yang mereka anut. Sedangkan bagi Muslim, perubahan ini akan berarti penyempitan, pembatasan, dan hilangnya kesempatan untuk menafsirkan pesan-pesan agama sesuai dengan konteks sosial dan budaya bangsa Indonesia, dan setiap pembacaan yang berbeda dari tafsir resmi negara akan menjadi subversif dan harus dilarang.

Bagi Islam sendiri, formalisasi akan mengubahnya dari agama menjadi ideologi yang batas-batasnya akan ditentukan berdasarkan kepentingan politik. Islam yang semula bersifat terbuka dan luas, hidup layaknya organisma yang komunikatif dan interaktif dengan situasi dan kondisi para penganutnya, dan akan dibungkus dalam kemasan ideologis dan berubah menjadi monumen yang diagungkan tanpa peduli pada tujuan sejati dan luhur agama itu sendiri. Akhirnya, agama menjadi *ghâyah*, tujuan akhir, bukan lagi jalan sebagaimana semula ia diwahyukan. Keridlâan Allah yang merupakan *ghâyah* pun semakin jauh.

Usaha-usaha menjadikan Islam sebagai ideologi dan mewujudkan Negara Islam boleh jadi disebabkan adanya semangat yang berlebihan namun tidak didukung oleh pengetahuan yang memadai. Semangat yang berlebihan dapat mendorong seseorang untuk memutlakkan pengetahuan yang dicapai, sekalipun bersifat parsial. Akibatnya, pengetahuan lain yang berbeda dipandang sebagai salah dan harus ditolak. Menarik membandingkan pemahaman parsial ini dengan hikayat "Meraba Gajah dalam Gelap," lima orang yang berselisih tentang gajah semata karena mereka masing-masing merabanya dalam gelap, dalam terbatasnya jangkauan pengetahuan, dan dalam ketiadaan cahaya (*hidâyah*).

Bagi siapa pun yang mengerti sepenuhnya tentang gajah, sungguh menggelikan mendengar kelima orang itu terus berselisih, bersikeras memaksakan definisinya tentang gajah berdasarkan hasil rabaan yang dilakukannya. Sialnya lagi, karena memang tidak percaya diri dengan pengetahuan yang dicpainya, ada di antara mereka yang berusaha menjadikan pemahamannya tentang gajah sebagai madzhab resmi, sementara pemahaman rekannya yang berbeda, karena menjadi ancaman bagi pandangan resminya, dipandang sebagai subversif dan harus dibungkam.

Tidak berhenti di situ saja. Karena semangat yang berlebihan dan merasa mengamalkan sabda Nabi, "Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat," —kembali ke hikayat gajah— ada saja

yang bersikeras dan memaksa orang lain mengakui bahwa gajah seperti pohon, atau ayunan, atau tembok, atau pecut, atau kipas. Atau, dalam realitas interaksi sosial-religius, Islam direduksi menjadi ideologi dan seperangkat konklusi hukum semata, yang hanya mewakili sebagian kecil aspek ajaran Islam sendiri. Semangat menyampaikan dari Rasulullah SAW yang terlalu besar, ternyata sering membuat orang memahami sabda beliau itu hanya menjadi "Sampaikan dariku cukup satu ayat saja." Dan semakin parah lagi bila yang bersangkutan menganggap bahwa satu ayat yang dimilikinya itu adalah satu-satunya kebenaran yang harus disampaikan kemana-mana dengan mempersetankan ayat-ayat lainnya.

Andai masing-masing terus belajar, saling mendengarkan dengan yang lain, tentu pemahaman mereka akan lebih baik dan lengkap. Karena sebenarnya, kebenaran kita berkemungkinan salah, dan kesalahan orang lain berkemungkinan benar. Siapa pun yang telah tertutup mata hatinya —antara lain karena merasa diri paling pintar dan paling benar— tidak akan mampu melihat pemahaman lain yang berbeda, yang tersisa adalah arogansi (*takabbur*) dan penolakan terhadap yang lain. Ketika arogansi dimulai, ketika mendengarkan orang lain diakhiri, ketika belajar dihentikan, maka kebodohan dimulai, suatu keadaan yang sangat berbahaya bagi yang bersangkutan dan seluruh umat manusia.

Kebodohan adalah bahaya tersembunyi yang ada dalam setiap orang, mengatasinya adalah dengan terus belajar dan terus mendengarkan orang lain. Karena kebodohan pula ada orang-orang yang berusaha menyenangkan Nabi dengan hanya meniru penampilan lahiriahnya namun mengabaikan aspek khulûqiyahnya; ada yang ingin menyenangkan Tuhan dengan membangun negara agama namun mengubah agama itu sendiri dari semula sebagai jalan kemudian menjadi tujuan akhir. Mereka berpikir, Kanjeng Nabi Muhammad saw., akan bahagia jika umatnya memakai busana sebagaimana beliau pakai empat belas abad yang lalu; Mereka berpikir, Allah swt. akan senang (*ridlâ*) jika Islam dijadikan ideologi

resmi negara dan hamba-Nya membangun negara agama, Negara Islam. Dalam hal inilah mereka lupa bahwa Kanjeng Nabi Muhammad saw. telah menegaskan diri bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia, akhlak yang luhur (*innamâ bu'itstu li utammima makârim al-akhlâq*), mereka juga lupa bahwa satu-satunya prinsip dan tujuan diutusnya Rasûl Allâh adalah sebagai rahmat bagi seluruh makhluk (*wa mâ arsalnâka illâ rahmatan lil-'âlamîn*). Bahkan, dengan berdalih untuk menegakkan rahmat ini pun, ada saja yang berusaha memaksa orang lain masuk ke dalam apa yang mereka anggap rahmat; sebuah tindakan yang dari sudut pandang mana pun sebenarnya bertentangan dengan semangat rahmat itu sendiri.

Dalam konteks pendidikan dan dalam konteks nilai-nilai luhur pesan utama Islam ini, buku Ilusi Negara Islam ini membawa pesan pendidikan yang sangat jelas dan tegas. Bahaya laten atau bahaya tersembunyi yang sebenarnya dari gagasan pembentukan Negara Islam adalah kekurangtahuan yang dibarengi dengan anggapan kesempurnaan pengetahuan. Jika semua orang terus belajar dan mau mendengarkan yang lain, maka mereka akan semakin baik dan menyeluruh dalam memahami Islam, mereka tidak akan mereduksi Islam menjadi idelogi atau tata negara. Mereka akan tahu bahwa Islam tidak cukup dikemas dalam ideologi, tidak memadai dibungkus dalam sekat-sekat tata negara. Karena itu, gagasan penting dalam buku ini adalah perjuangan untuk terus mendorong setiap orang agar terus belajar, perjuangan untuk melawan kebodohan, perjuangan untuk mendorong setiap orang agar terus membuka diri kepada siapa pun, perjuangan untuk membebaskan setiap orang agar keluar dari kotak-kotak ideologis dan kotak-kotak dogmatis yang selama ini membelenggu mereka dan telah menjebak mereka memahami ajaran luhur agama hanya sebata pesan yang bisa ditampung oleh kotak yang mereka bangun.

Sekali lagi, ketidaktahuan bisa diatasi dengan melihat, mendengar, dan memperhatikan. Dengan terus belajar. Yang sungguh

sulit dan menjadi masalah adalah jika orang tidak lagi memerlukan belajar dan mencari kebenaran karena merasa sudah sempurna pengetahuannya dan menganggap diri paling benar. Siapa pun mungkin akan sepakat bahwa kebodohan adalah sesuatu yang sangat berbahaya, namun tidak setiap orang sadar akan bahaya laten kebodohan dalam dirinya sendiri.

WaLlâhu A‘lam.

Rembang, 9 Pebruari 2009

Lampiran 1

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
Nomor: 149/Kep/I.0/B/2006

Tentang:
KEBIJAKAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH MENGENAI KONSOLIDASI ORGANISASI DAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
Nomor: 149/KEP/I.0/B/2006

Tentang:

KEBIJAKAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH MENGENAI KONSOLIDASI ORGANISASI DAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH

MENIMBANG :

1. Bahwa Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam sejak kelahirannya hingga saat ini tetap istiqamah dan terus bergerak tidak mengenal lelah dalam melaksanakan dakwah dan tajdid melalui berbagai usaha (amal usaha, program, dan kegiatan) yang dilakukannya dengan maksud dan tujuan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya;
2. Bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi (persyarikatan) Islam yang memiliki prinsip-prinsip, sistem, dan kedaulatan yang mengikat bagi segenap anggotanya dan harus dihormati oleh siapapun sebagaimana hak-hak organisasi yang bersifat independen dan memiliki hak hidup di negeri ini;
3. Bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi dalam menjalankan misi dan usahanya harus bergerak dalam satu barisan yang kokoh sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran Surat Ash-Shaf (61) ayat 4, yang artinya "Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh";
4. Bahwa Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam yang cukup tua dan besar sangat menghargai ukhuwah, kerjasama, toleransi, dan sikap saling menghormati dengan seluruh kekuatan/kelompok lain dalam masyarakat, lebih-lebih dengan sesama komponen umat Islam, karena itu Muhammadiyah pun berhak untuk dihormati oleh siapapun serta memiliki hak serta keabsahan untuk bebas dari segala campur-tangan, pengaruh, dan kepentingan pihak manapun yang dapat mengganggu keutuhan serta kelangsungan gerakannya;

MENGINGAT :

1. Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber Ajaran Islam;
2. AD/ART Muhammadiyah serta aturan-aturan lainnya yang berlaku dalam Persyarikatan sebagai landasan konstitusional;
3. Keputusan Tarjih, Muqaddimah AD Muhammadiyah, Kepribadian Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, Khittah Muhammadiyah, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, dan prinsip-prinsip ideal lainnya dalam Muhammadiyah;
4. Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-45 tahun 2005;

MEMPERHATIKAN : Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Syawwal 1427 H / 13 November 2006 M

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG KEBIJAKAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH MENGENAI KONSOLIDASI ORGANISASI DAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH sebagai berikut:

1. Muhammadiyah dengan seluruh anggota, pimpinan, amal usaha, organisasi otonom, majelis dan lembaga, sekretariat/kantor, dan berbagai lini/struktur organisasi serta segala usaha yang berada di dalamnya harus bebas dari berbagai paham, misi, dan kepentingan pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung, terbuka maupun terselubung, dapat merugikan dan merusak Persyarikatan Muhammadiyah.

2. Secara khusus seluruh anggota dan lini organisasi Persyarikatan termasuk di lingkungan amal usaha Muhammadiyah harus bebas dari pengaruh, misi, infiltrasi, dan kepentingan partai politik yang selama ini mengusung misi dakwah atau partai politik bersayap dakwah, di samping bebas dari misi/kepentingan partai politik dan organisasi lainnya sebagaimana kebijakan Khittah Muhammadiyah. Hal tersebut karena selain telah menjadikan kegiatan dakwah dengan institusi/pranata umat Islam seperti masjid dan lain-lain sebagai alat/sarana politik, juga secara nyata-nyata telah menimbulkan sikap mendua di sebagian kalangan Muhammadiyah, termasuk dalam melaksanakan Hari Raya Idul Fitri/Idul Adha, serta menjadikan Muhammadiyah sebagai sarana politik partai yang bersangkutan dan lebih jauh lagi dapat menimbulkan pengeroposan dan mengganggu keutuhan organisasi.

3. Segenap anggota Muhammadiyah perlu menyadari, memahami, dan bersikap kritis bahwa seluruh partai politik di negeri ini, termasuk partai politik yang mengklaim diri atau mengembangkan sayap/kegiatan dakwah seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah benar-benar partai politik. Setiap partai politik berorientasi meraih kekuasaan politik. Karena itu, dalam menghadapi partai politik mana pun kita harus tetap berpijak pada Khittah Muhammadiyah dan harus membebaskan diri dari, serta tidak menghimpitkan diri dengan misi, kepentingan, kegiatan, dan tujuan partai politik tersebut.

4. Seluruh anggota Muhammadiyah di seluruh lini Persyarikatan, termasuk yang berada di Amal Usaha, dituntut komitmen, integritas, loyalitas, pengkhidmatan, dan kiprah yang penuh dan optimal dalam menjalankan usaha-usaha, menjaga dan berpedoman pada prinsip-prinsip, membela kepentingan, serta memajukan dan memperjuangkan Muhammadiyah menuju pada pencapaian tujuannya. Jika memiliki kelebihan materi/harta, pikiran, tenaga, relasi/hubungan, jaringan, dan rizki Allah lainnya maka kerahkan/jariyahkan secara maksimal untuk membesarkan, mengembangkan, dan menyempurnakan gerakan Muhammadiyah serta seluruh amal usaha, program, dan kegiatannya sehingga semakin mendekati pencapaian tujuan Muhammadiyah.

5. Seluruh institusi dalam Muhammadiyah termasuk amal usaha, masjid/mushalla, fasilitas milik Persyarikatan, dan kegiatan-kegiatan yang berada di dalamnya tidak boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan partai politik mana pun. Larangan tersebut berlaku untuk kegiatan-kegiatan yang diindikasikan dan memiliki kaitan dengan kegiatan/kepentingan partai politik, termasuk kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan atau mamakai simbol-simbol keagamaan/dakwah seperti pengajian dan pembinaan keumatan, yang terkait dan memiliki hubungan dengan partai politik mana pun. Maksimalkan/optimalkan seluruh institusi milik Muhammadiyah tersebut untuk sebesar-besarnya dan sebenar-benarnya bagi kepentingan Muhammadiyah.

6. Seluruh anggota Muhammadiyah diminta untuk menghormati dan menaati Keputusan Muktamar ke-45 tahun 2005 di Malang, yang menyatakan "Menolak upaya-upaya untuk mendirikan parpol yang memakai atau menggunakan nama atau simbol-simbol Persyarikatan Muhammadiyah." (Lihat Lampiran I *Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah Ke 45 di Malang*: Keputusan Muktamar ke-45 tentang Laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2000-2005, VI. Bidang Politik poin 1).

7. Seluruh media massa yang berada di lingkungan Persyarikatan diminta untuk benar-benar menyuarakan paham, misi, dan kepentingan Muhammadiyah serta menjadi wahana untuk sosialisasi paham, pandangan, keputusan, kebijakan, kegiatan, dan syiar Muhammadiyah serta menjauhkan diri dari paham, misi, dan kepentingan organisasi/gerakan lain.

8. Sebagai langkah konsolidasi sekaligus pencegahan dan penguatan gerakan, seluruh jajaran Pimpinan Persyarikatan, Majelis/Lembaga, Organisasi Otonom, dan Amal Usaha diinstruksikan untuk melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan keagamaan, kemuhammadiyahan, dan hal-hal yang menyangkut organisasi secara luas. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain sosialisasi dan pengamalan putusan-putusan Tarjih, Darul Arqam, Baitul Arqam, Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah, Up-Grading, Refreshing, pengajian-pengajian umum dan khusus, pembinaan jamaah, pengelolaan kegiatan-kegiatan masjid dan mushalla, sosialisasi dan pengamalan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, peningkatan silaturahim, dan kegiatan-kegiatan pembinaan lainnya yang dilakukan secara sistematik, intensif, berkesinambungan, dan terorganisasi dengan sebaik-baiknya. Secara khusus ditugaskan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid, Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus, dan Majelis Pendidikan Kader dengan melibatkan Majelis/Lembaga, Organisasi Otonom, dan Amal Usaha terkait untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut secara terpadu di bawah koordinasi Pimpinan Persyarikatan di masing-masing tingkatan.

9. Segenap Pimpinan Peryarikatan, Majelis dan Lembaga, Organisasi Otonom, dan Amal Usaha Muhammadiyah diinstruksikan untuk menegakkan disiplin organisasi, merapatkan barisan/langkah, dan mengokohkan ideologi serta misi Muhammadiyah sebagaimana diatur dalam AD/ART dan peraturan-peraturan organisasi serta telah menjadi prinsip-prinsip Muhammadiyah seperti keputusan Tarjih, Muqaddimah Anggaran Dasar, Kepribadian, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup, Khittah Perjuangan, dan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah serta keputusan-keputusan Muktamar Muhammadiyah.

10. Pimpinan Peryarikatan, Majelis dan Lembaga, Organisasi Otonom, dan Amal Usaha Muhammadiyah diinstruksikan untuk mengambil kebijakan dan tindakan-tindakan yang tegas dalam menegakkan misi, aturan, dan prinsip-prinsip Muhammadadiyah serta dalam mencegah dan menyelamatkan Muhammadiyah dari berbagai tindakan yang merugikan Persyarikatan sebagaimana disebutkan di atas.

Yogyakarta, 10 Zulqa'dah 1427 H
01 Desember 2006 M

Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Ketua Umum, Sekretaris Umum,

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH KANTOR YOGYAKARTA

Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin, M.A. Drs. H. A. Rosyad Sholeh

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
Nomor: 149/Kep/I.0/B/2006

Tentang:
KEBIJAKAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH MENGENAI KONSOLIDASI ORGANISASI DAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH

MENIMBANG :

1. Bahwa Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam sejak kelahirannya hingga saat ini tetap istiqamah dan terus bergerak tidak mengenal lelah dalam melaksanakan dakwah dan tajdid melalui berbagai usaha (amal usaha, program, dan kegiatan) yang dilakukannya dengan maksud dan tujuan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya;
2. Bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi (persyarikatan) Islam yang memiliki prinsip-prinsip, sistem, dan kedaulatan yang mengikat bagi segenap anggotanya dan harus dihormati siapapun sebagaimana hak-hak organisasi yang bersifat independen dan memiliki hak hidup di negeri ini;
3. Bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi dalam menjalankan misi dan usahanya harus bergerak dalam satu

barisan yang kokoh sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an surat Ash-Shaff (61) ayat 4, yang artinya: "Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh";

4. Bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang cukup tua dan besar, Muhammadiyah sangat menghargai ukhuwah, kerjasama, toleransi, dan sikap saling menghormati dengan seluruh kekuatan/kelompok lain dalam masyarakat, lebih-lebih dengan sesama komponen umat Islam. Karena itu Muhammadiyah pun berhak untuk dihormati oleh siapapun serta memiliki hak serta keabsahan untuk bebas dari segala campur-tangan, pengaruh, dan kepentingan pihak manapun yang dapat mengganggu keutuhan serta kelangsungan gerakannya.

MENGINGAT :

1. Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber ajaran Islam;
2. AD/ART Muhammadiyah serta aturan-aturan lainnya yang berlaku dalam Persyarikatan sebagai landasan konstitusional;
3. Keputusan Tarjih, Muqaddimah AD Muhammadiyah, Kepribadian Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, Khittah Muhammadiyah, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, dan prinsip-prinsip ideal lainnya dalam Muhammadiyah;
4. Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-45 tahun 2005;

MEMPERHATIKAN:

Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah

yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Syawal 1427 H / 13 November 2006 M.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:
KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG KEBIJAKAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH MENGENAI KONSOLIDASI ORGANISASI DAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH sebagai berikut:

1. Muhammadiyah dengan seluruh anggota, Pimpinan, amal usaha, organisasi otonom, majelis dan lembaga, sekretariat/kantor, dan berbagai lini/struktur organisasi serta segala usaha yang berada di dalamnya harus bebas dari berbagai paham, misi, dan kepentingan pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung, terbuka maupun terselubung, dapat merugikan dan merusak Persyarikatan Muhammadiyah.
2. Secara khusus seluruh anggota dan lini organisasi Persyarikatan termasuk di lingkungan amal usaha Muhammadiyah harus bebas dari pengaruh, misi, infiltrasi, dan kepentingan partai politik yang selama ini mengusung misi dakwah atau partai politik bersayap dakwah, di samping bebas dari misi/kepentingan partai politik dan organisasi lainnya sebagaimana kebijakan khittah Muhammadiyah. Hal tersebut karena selain telah menjadikan kegiatan dakwah dengan institusi/pranata umat Islam seperti masjid dan lain-lain sebagai alat/sarana politik, juga secara nyata-nyata telah menimbulkan sikap mendua di sebagian kalangan Muhammadiyah, termasuk

dalam melaksanakan Hari Raya Idul Fitri/Idul Adha, serta menjadikan Muhammadiyah sebagai sarana politik partai yang bersangkutan dan lebih jauh lagi dapat menimbulkan pengeroposan dan mengganggu keutuhan organisasi.

3. Segenap anggota Muhammadiyah perlu menyadari, memahami, dan bersikap kritis bahwa seluruh partai politik di negeri ini, termasuk partai politik yang mengklaim diri atau mengembangkan sayap/kegiatan dakwah seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah benar-benar partai politik. Setiap partai politik berorientasi meraih kekuasaan politik. Karena itu, dalam menghadapi partai politik manapun kita harus tetap berpijak pada Khittah Muhammadiyah dan harus membebaskan diri dari, serta tidak menghimpitkan diri dengan misi, kepentingan, kegiatan, dan tujuan partai politik tersebut.
4. Seluruh anggota Muhammadiyah di seluruh lini Persyarikatan, termasuk yang berada di amal usaha, dituntut komitmen, integritas, loyalitas, pengkhidmatan, dan kiprah yang penuh dan optimal dalam menjalankan usaha-usaha, menjaga dan berpedoman pada prinsip-prinsip, membela kepentingan, serta memajukan dan memperjuangkan Muhammadiyah menuju pada pencapaian tujuannya. Jika memiliki kelebihan materi/harta, pikiran, tenaga, relasi/hubungan, jaringan, dan rizki Allah lainnya maka kerahkan/jariyahkan secara maksimal untuk membesarkan, mengembangkan, dan menyempurnakan gerakan Muhammadiyah serta seluruh amal usaha, program, dan kegiatannya sehingga mendekati pencapaian tujuan Muhammadiyah.
5. Seluruh institusi dalam Muhammadiyah termasuk amal usaha, masjid/mushalla, fasilitas milik Persyarikatan, dan kegiatan-kegiatan yang berada di dalamnya tidak

boleh digunakan untuk kegiatan-kegiatan partai politik manapun. Larangan tersebut berlaku untuk kegiatan-kegiatan yang diindikasikan dan memiliki kaitan dengan kegiatan/kepentingan partai politik, termasuk kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan atau memakai simbol-simbol keagamaan/dakwah seperti pengajian dan pembinaan keumatan, yang terkait dan memiliki hubungan dengan partai politik manapun. Maksimalkan/optimalkan seluruh institusi milik Muhammadiyah tersebut untuk sebesar-besarnya dan sebenar-benarnya bagi kepentingan Muhammadiyah.

6. Seluruh anggota Muhammadiyah diminta untuk menghormati dan menaati Keputusan Muktamar ke-45 tahun 2005 di Malang, yang menyatakan "Menolak upaya-upaya untuk mendirikan parpol yang memakai atau menggunakan nama atau simbol-simbol Persyarikatan Muhammadiyah." (Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke 45 di Malang: Keputusan Muktamar ke-45 tentang Laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2000-2005, VI. Bidang Politik poin 1).
7. Seluruh media massa yang berada di lingkungan Persyarikatan diminta untuk benar-benar menyuarakan paham, misi, dan kepentingan Muhammadiyah serta menjadi wahana untuk sosialisasi paham, pandangan, keputusan, kebijakan, kegiatan, dan syiar Muhammadiyah serta menjauhkan diri dari paham, misi, dan kepentingan organisasi/gerakan lain.
8. Sebagai langkah konsolidasi sekaligus pencegahan dan penguatan gerakan, seluruh jajaran Pimpinan Persyarikatan, Majelis/Lembaga, Organisasi Otonom, dan Amal Usaha diinstruksikan untuk melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan keagamaan, keMuhammadiyahan, dan hal-hal yang menyangkut organisasi secara

luas. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain sosialisasi putusan-putusan Tarjih, Darul Arqam, Baitul Arqam, Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah, Up-Grading, Refreshing, pengajian-pengajian umum dan khusus, pembinaan jamaah, pengelolaan kegiatan-kegiatan masjid dan mushalla, sosialisasi dan pengamalan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, peningkatan silaturrahim, dan kegiatan-kegiatan pembinaan lainnya yang dilakukan secara sistematik, intensif, berkesinambungan, dan terorganisasi dengan sebaik-baiknya. Secara khusus ditugaskan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid, Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus, dan Majelis Pendidikan Kader dengan melibatkan Majelis/Lembaga, Organisasi Otonom, dan Amal Usaha terkait untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut secara terpadu di bawah koordinasi Pimpinan Persyarikatan di masing-masing tingkatan.

9. Segenap Pimpinan Persyarikatan, Majelis dan Lembaga, Organisasi Otonom, dan Amal Usaha Muhammadiyah diinstruksikan untuk menegakkan disiplin organisasi, merapatkan barisan/langkah, dan mengokohkan ideologi serta misi Muhammadiyah sebagaimana diatur dalam AD/ART dan peraturan-peraturan organisasi serta telah menjadi prinsip-prinsip Muhammadiyah seperti keputusan Tarjih, Muqaddimah Anggaran Dasar, Kepribadian, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup, Khittah Perjuangan, dan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah serta keputusan-keputusan Muktamar Muhammadiyah.
10. Pimpinan Persyarikatan, Majelis dan Lembaga, Organisasi Otonom, dan Amal Usaha Muhammadiyah diinstruksikan untuk mengambil kebijakan dan tindakan-tindakan yang tegas dalam menegakkan misi, aturan,

dan prinsip-prinsip Muhammadiyah serta dalam mencegah dan menyelamatkan Muhammadiyah dari berbagai tindakan yang merugikan Persyarikatan sebagaimana disebutkan di atas.

Yogyakarta, 10 Dzulqa'idah 1427 H
1 Desember 2006 M.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah,

Ketua Umum	**Sekretaris Umum**
Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin	**Drs. H. A. Rosyad Sholeh**

Lampiran 2

Dokumen Penolakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terhadap Ideologi dan Gerakan Ekstremis Transnasional

Keputusan Majelis Bahtsul Masa'il Nadhlatul Ulama Tentang Khilafah dan Formalisasi Syari'ah

3. KHILAFAH DAN FORMALISASI SYARI'AH

Deskripsi Masalah :

Wacana Islam sebagai solusi dan ideologi alternatif mengusahakan bentuk pemerintahan negara Indonesia dari negara kesatuan berformat Republik menjadi khilafah, berikut konstitusi negara sejak dari undang-undang dasar dan hukum positif diangkat dari Syari'ah Islamiyah seutuhnya. Bila mencermati fakta sejarah masa awal islam dibentuk khilafah hanya bertahan semasa Khulafa al Rasyidin dengan diwarnai tragedy pembunuhan terhadap pejabat khilafah ke 2, 3 dan 4. Hukum positif negara-negara islam masa sekarang masih mengadopsi hukum sekuler (konun maudlu'i) tatanan hukum positif di Indonesia sangat berorientasi pada keragaman agama dan budaya local serta fakta kesulitan mengganti kitab undang-undang Hukum Warisan Kolonial.

Pertanyaan :

a. Adakah tuntutan Syari'ah berbentuk dalil nash yang mengharuskan pembakuan bentuk khilafah dalam sistem ketatanegaraan islam ?

Jawaban 3 a :

Tidak ada dalil nash, karena keberadaan sistem khilafah adalah bentuk ijtihadiyyah.

Pengambilan :

1. الغيث الهامع على شرح جمع الجوامع ص : 790

قلت : مراده أنه عليه الصلاة والسلام لم يستخلف نصا أو تصريحا كما قدمته وقد قال النووى فى شرح مسلم : فيه دليل على أن النبى صلى الله عليه وسلم لم ينص على خليفة وهو إجماع أهل السنة وغيرهم.

2. المصدر السابق. ص : 17

لقد قرر القرآن تشريعا وحدودا وحلل وحرم وفرض فرائض منها ما يقوم به المرء بنفسه ومنها ما هو عمل جماعى ومنها ما يحتاج فى تنفيذه إلى من يتولى الأمر فيه وقد نص القرآن بصريح العبادة المسلمين إلى طاعة هؤلاء (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيع الرسول وأولى الأمر منكم) .... كما ندد القرآن بالإستبداد والإستكبار وأثنى على الشورى والإحسان والعدل ..... ولكنه لم ينص لا على أمة الإسلام يجب أن يتطابق معها ملك الإسلام أو دولة الإسلام ولا على من يخلف الرسول فى تدبير شؤون هذه الأمة ولا حتى على ضرورة أن يكون هناك من يخلفه فيذلك بل ترك المسئلة للمسلمين وكأنها داخلة فى قوله عليه السلام أنتم أدرى بشؤون دنياكم. إهـ

3. الدين والدولة وتطبيق الشريعة لمحمد عابد الجابري. ص : 69

وأما العنصر الثالث فهو أن الخلافة بحسب رأي أهل السنة والجماعة إنما تكون بالإختيار وليس بالنص. ذلك لأنه ما دام الصحابة قد تداولوا بعد وفاة رسول الله. واختلفوا ثم اتفقوا وبايعوا أبا بكر فإن ذلك يعنى أن رسول الله لم يعهد إلى أحد بالخلافة من بعده غير أن الإختيار فى نظرية الخلافة عند أهل السنة والجماعة لا يتجاوز تقرير أن النبى لم ينص لأي أحد من بعده. أما كيفية اختيار الخليفة فهذا موضوع تقرر فيه موازين القوى. فمن قام يطلب الخلافة لنفسه وغلب بشوكته واستطاع أن يجمع الناس حوله راضين أو مكروهين فهو الخليفة. اهـ

4. الفقه الإسلامى ج : 6 ص : 661-662

الإمامة العظمى أو الخلافة أو إمارة المؤمنين كلها تؤدى معنى واحدا وتدل على وظيفة واحدة هى السلطة الحكومية العليا وقد عرفها علماء الإسلام بتعاريف متقاربة فى ألفاظها متحدة فى معانيها تقريبا علما بأنه لا تشترط صفة الخلافة وإنما المهم وجود الدولة ممثلة بمن يتولى أمورها ويدير شؤونها ويدفع غائلة الأعداد عنها. اهـ

5. الجهاد فى الإسلام ص : 81

يلاحظ من معرفة هذه الأحكام أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ليس شرطا لاعتبار الدار دار الإسلام ولكنه حق من حقوق دار الإسلام فى أعناق المسلمين. فإذا قصر المسلمون فى إجراء الأحكام الإسلامية على اختلافها فى دارهم التى أورثهم الله إياها فإن هذا التقصير لا يخرجها عن كونها دار الإسلام ولكنه يحمل المقصرين ذنوبا وأوزارا. اهـ

b. Bagaimana hukum kelompok warga negara Indonesia yang berusaha mengubah bentuk dan dasar hukum negara ?

6

Konferensi Wilayah Jawa Timur di P.P. Zainul Hasan Genggong Probolinggo 1428 H. / 2007 M.

Jawaban 3 b :
Hukum merubah bentuk Negara Indonesia dengan bentuk yang lain maka hukumnya tidak boleh selama menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Sedangkan merubah dasar hukum negara juga tidak diperbolehkan jika menggunakan cara yang inkonstitusional dan diperbolehkan jika menggunakan cara yang konstitusional.

Pengambilan :

1. **التشريع الجنائي الاسلامي / عبد القادر عودة. ج : 2 ص : 675**
.... بعد ذكر تعريف الإمام وما يتعلق به .... ومع أن العدالة شرط من شروط الإمامة الا ان الرأى الراجح فى المذاهب الأربعة ومذهب الشيعة الزيدية هو تحريم الخروج على الإمام الفاسق الفاجر ولو كان الخروج للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لأن الخروج على الإمام يؤدي عادة إلى ما هو أنكر مما فيه وبهذا يمتنع النهى عن المنكر لأن من شروطه أن لا يؤدي الإنكار إلى ما هو أنكر من ذلك إلى الفتن وسفك الدماء وبث الفساد واضطراب البلاد وإضلال العباد وتوهين الأمن وهدم النظام. أهـ

2. **التشريع الجنائي الجزء الأول ص : 237 مؤسسة الرسالة**
(مدى بطلان ما يخالف الشريعة) قلنا إن ما يخالف الشريعة من قانون أو لائحة أو قرار بطلانا مطلقا لكن هذا البطلان لا ينصب على كل نصوص القانون أو اللائحة أو القرار وإنما ينصب فقط على النصوص المخالفة للشريعة دون غيرها لأن أساس البطلان هو مخالفة الشريعة فلا يمتد البطلان منطبقا لما يوافق الشريعة من النصوص ولو أنها أدمجت في قانون واحد أو لائحة واحدة أو قرار واحد مع غيرها من النصوص المخالفة للشريعة وتعتبر النصوص الموافقة للشريعة صحيحة ما دامت قد صدرت من هيئة تشريعية مختصة واستوفت الإجراءات الشكلية المقررة وإذا كان البطلان قاصرا على النصوص المخالفة للشريعة فإن هذه النصوص لا تعتبر باطلة في كل حالة وإنما هي باطلة فقط في الحالات التي تخالف فيها الشريعة صحيحة في الحالات التي تتفق فيها مع الشريعة وليس هذا بمستغرب ما دام أساس الصحة والبطلان راجع إلى موافقة الشريعة أو مخالفتها إذ العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما

3. **التشريع الجنائي الإسلامى الجزء الأول ص : 101**
(3) الرأى الغالب فى المذاهب الأربعة أن الإمام ينعزل بالظلم والفسق وتعطيل الحقوق ومن ثم فلا يجب الخروج عليه بقصد عزله وتولية غيره لأن إباحة الخروج عليه تدعو إلى عدم الاستقرار وكثرة الفتن والثوارت واضطراب أمور الناس

c. Apakah setrategi mengintegrasikan (Syari'ah) Islam secara substantif menyalahi prinsip tathbiq (penerapan) syari'ah menempuh pola tadrij (gradual) ?

Jawaban 3 c :
Tidak menyalahi prinsip tathbiq. Bahkan strategi secara tadrij sangat tepat bila diterapkan di Negara Indonesia.

Pengambilan :

1. **صحيح البخارى ج : 5 ص : 201**
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

2. **مفاهيم إسلامية ج : 1 ص : 30**
الإصلاح لغة : ضد الإفساد وهو من الصلاح المقابل للفسادوللسيئة .... وفى القرآن الكريم (خلطوا عملا صالحا وآخر سيأ) التوبة 102. (ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها) الأعراف 56. فالإصلاح هو التغيير إلى الأفضل فالحركات الإصلاحية هى الدعوات التى تحرك قطاعات من البشر لإصلاح ما فسد فى الميادين الإجتماعية المختلفة انتقالا بالحياة إلى درجة أرقى فى سلم التطور الإنسانى.
واصطلاحا : لا يفرق بينه وبين مصطلح الثورة فى مستوى التغيير وشموله وإنما من حيث الأسلوب فى التغيير وزمن التغيير فكلاهما - اسلاميا- يعنى التغيير الشامل والعميق لكن الثورة تسلك سبل العنف غالبا والسرعة فى التغيير بينما تتم التغييرات الإصلاحية بالتدريج وكثيرا ما تعطى الثورة الأولية لتغيير الواقع بينما تبدأ مناهج الإصلاح عادة بتغيير الإنسان : وإعادة صيانة نفسه وفق الدعوة الإصلاحية وبعد ذلك ينهض هذا الإنسان بتغيير الواقع وإقامة النموذج الإصلاحى الجديد. ولذلك وصفت رسالات الرسل عليهم الصلاة والسلام بأنها دعوات إصلاح فيقول رسول الله شعيب عليه السلام (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت) هود 88.

3. **قواعد الأحكام الجزء الأول ص : 77 دار الكتب العلمية**
المثال السادس والثلاثون التقرير على المعاصي كلها مفسدة لكن يجوز التقرير عليها عند العجز عن إنكارها باليد واللسان ومن قدر على إنكارها مع الخوف على نفسه كان إنكاره مندوبا إليه ومحثوثا عليه لأن المخاطرة بالنفوس في إعزاز الدين مأمور بها كما يعذر بها في قتال المشركين وقتال البغاة المتأولين وقتال مانعي الحقوق بحيث لا يمكن تخليصها منهم إلا بالقتال وقد قال ﷺ (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر) جعلها أفضل الجهاد لأن قائلها قد جاد بنفسه كل الجود بخلاف من يلاقي قرنه من القتال فإنه يجوز أن يقهره ويقتله فلا يكون بذله نفسه مع تجويز سلامتها كبذل المنكر نفسه مع يأسه من السلامة

Dokumen Penolakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terhadap Ideologi dan Gerakan Ekstremis Transnasional

Pengantar

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, telah mengeluarkan berbagai pernyataan resmi yang menolak kelompok-kelompok garis keras yang mengkampanyekan Khilafah Islamiyah ataupun Negara Islam. Bertempat di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Jawa Timur, pada November 2007 lalu PBNU menyelenggarakan forum Bahtsul Masa'il untuk membahas isu-isu seputar Khilafah Islamiyah, pengambil-alihan masjid-masjid NU oleh kelompok-kelompok garis keras yang mengatasnamakan gerakan dakwah, dan lain-lain.

Salah satu rekomendasi yang disampaikan PBNU dari forum Bahtsul Masa'il tersebut adalah bahwa tidak ada *nash* dalam al-Quran yang mendasari gagasan tentang Negara Islam atau perlunya mendirikan Negara Islam. Negara Islam atau Khilafah Islamiyah sepenuhnya adalah *ijtihadiyah* atau interpretasi belaka. Forum menyebut Khilafah Islamiyah sebagai ideologi transnasional yang membahayakan keutuhan NKRI, dan menghimbau warga Nahdliyin untuk mewaspadai gerakan ini.

Dokumen-dokumen yang kami lampirkan di sini merupakan sikap resmi PBNU seputar masalah di atas yang kami ambil dari situs resmi PBNU, *NU Online*.

Terima kasih
Redaksi

Dianggap Sesat, Masjid-masjid NU Diambilalih
Kamis, 25 Mei 2006 02:11

Jakarta, NU Online

Kehidupan beragama di Indonesia semakin tidak aman. Sekelompok orang yang mengatasnamakan Islam telah serampangan mengambilalih masjid-masjid milik warga (Nahdlatul Ulama) NU dengan alasan bid'ah dan beraliran sesat.

"Saya mendapat laporan, masjid-masjid milik warga NU, terutama di daerah-daerah banyak yang diambil alih oleh kelompok yang mengklaim dirinya paling Islam. Alasannya, karena NU dianggap ahli bid'ah dan beraliran sesat," demikian diungkapkan Ketua PBNU Masdar F Mas'udi kepada wartawan di Kantor Wahid Institute, Jalan Taman Amir Hamzah, Jakarta, Rabu (24/5).

Pengambilahan yang dimaksud, kata Masdar, berbentuk penggantian para takmir masjid yang selama ini diisi oleh warga nahdliiyin (sebutan untuk warga NU). Demikian juga dengan tradisi-tradisi ritual keagamaan khas NU pun diganti.

Tak tanggung-tanggung. Meski tak menyebut detil, Masdar mengatakan, jumlah masjid milik warga NU yang diambil alih mencapai ratusan. "Banyak, hampir semua. Saya kira ratusan," katanya.

Masdar menambahkan, memang tidak ada label NU pada masjid-masjid yang dimaksud. Namun, tidak sedikit masjid-masjid tersebut dibangun bersama-bersama oleh warga NU, dan itu adalah merupakan hak warga NU.

"Warga NU memang tidak pernah memberikan pelabelan terhadap masjid yang dibangun bersama. Hal itu merupakan kelongggaran warga NU terhadap warga yang lain. Tapi kelonggaran itu dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang mengklaim dirinya paling Islam," terang Masdar.

Meski tidak menjelaskan secara detil identitas kelompok di balik semuanya, namun Masdar mensinyalir hal itu dilakukan oleh

kelompok garis keras. “Saya kira kelompok-kelompok fundamentalis itu,“ tandasnya.

Masdar menyerukan kepada warga nahdliyyin untuk mengambil kembali masjid-masjid tersebut. Karena masjid-masjid tersebut merupakan hak NU. “Warga NU harus mengambil haknya,“ katanya.

Meski demikian, ia menyatakan bahwa NU tidak akan membalas aksi pengambilalihan tersebut dengan cara kekerasan. “Kita tidak akan menyerang, tidak akan menyerbu orang lain. Yang jelas kita akan ambil apa yang menjadi hak kita,“ tegasnya. (rif)

Munas dan Konbes NU
Kiai Sahal: Pancasila Sudah Final
Jumat, 28 Juli 2006 11:54

Jakarta, NU Online

Nahdlatul Ulama berkeyakinan bahwa syari'at Islam dapat diimplementasikan tanpa harus menunggu atau melalui institusi formal. NU lebih mengidealkan substansi nilai-nilai syari'ah terimplementasi di dalam masyarakat ketimbang mengidealisasikan institusi.

"NU sudah berkesimpulan bahwa NKRI dengan dasar Pancasila sudah merupakan bentuk final bagi bangsa Indonesia," Demikian diungkapkan oleh Rais Aam PBNU KH Sahal Mahfudz dalam pidato iftitah munas dan konbes NU di GOR Kertajaya Surabaya, Jum'at (27/7).

Menurut Pengasuh Ponpes Maslahul Huda Pati tersebut Kehadiran institusi formal bukan suatu jaminan untuk terwujudnya nilai-nilai syari'ah di dalam masyarakat. Apalagi Mengingat kondisi obyektif bangsa Indonesia yang ditakdirkan Allah swt, dengan penduduk dan masyarakat yang majemuk.

Karena itulah, universalitas Islam tidak mesti harus berhadap-hadapan dengan budaya lokal atau nilai-nilai yang berasal dari luar dirinya. "NU juga sejak awal mengusung ajaran Islam tanpa melalui jalan formalistik, lebih-lebih dengan cara membenturkannya dengan realitas secara formal, tetapi dengan cara lentur," tegasnya.

NU lahir dan berkembang dengan corak dan kulturnya sendiri. NU menampilkan sikap akomodatif terhadap berbagai mazhab keagamaan. Dan sebagai organisasi kemasyarakatan, NU menampilkan sikap yang tolerans terhadap nilai-nilai lokal.

Ditandaskan bahwa dalam lintasan sejarahnya, NU tidak pernah berfikir untuk menyatukan apalagi menghilangkan mazhab-mazhab keagamaan yang ada. Demikian pula NU sejak awal berdirinya tidak pernah berfikir untuk menyingkirkan nilai-nilai budaya

lokal, yang berbeda dengannya.

"NU berakulturasi dan berinteraksi secara positif dengan tradisi dan budaya masyarakat setempat. Proses akulturasi tersebut telah melahirkan Islam dengan wajah yang ramah terhadap nilai budaya setempat, serta menghargai perbedaan agama, tradisi dan kepercayaan, yang merupakan warisan budaya Nusantara," tuturnya.

Dengan sendirinya NU memiliki wawasan multikultural. Kebijakan sosialnya bukan melindungi tradisi atau budaya setempat, tetapi mengakui manifestasi tradisi dan budaya setempat yang memiliki hak hidup seperti inti dari paham keislaman NU itu sendiri.

"Karena itulah NU mampu menerapkan ajaran teks keagamaan yang bersifat sakral di dalam konteks budaya yang bersifat profan. NU dapat membuktikan bahwa universalitas Islam dapat diterapkan tanpa harus menyingkirkan budaya lokal," katanya. (mkf)

Rebut Kembali Masjid Nahdliyyin,
LDNU Kumpulkan Majelis Ta'lim se-Jabotabek
Kamis, 24 Agustus 2006

Jakarta, NU Online

Nahdlatul Ulama (NU) merasa khawatir dengan nasib masjid-masjid milik warga nahdliyyin (sebutan untuk warga NU) diambil alih oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam. Oleh karenanya, Pengurus Pusat (PP) Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) berinisiatif melakukan gerakan nyata untuk merebut kembali masjid-masjid milik warga nahdliyyin itu, dengan mengumpulkan para pemimpin majelis ta'lim se-Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi).

"Tanggal 30 (Agustus, red) nanti kita akan kumpulkan ketua-ketua majelis ta'lim se-Jabotabek. Kita harus rebut kembali masjid-masjid yang sudah dikuasai orang (kelompok, red) lain itu," kata Ketua Umum PP LDNU KH Nuril Huda kepada NU Online di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (24/8).

Seperti diberitakan NU Online beberapa waktu lalu, Ketua PBNU KH Masdar F Mas'udi mengungkapkan, sekelompok orang yang mengatasnamakan Islam telah serampangan mengambilalih masjid-masjid milik warga nahdliyyin dengan alasan syarat ajaran bid'ah dan beraliran sesat. Pengambilalihan yang dimaksud berbentuk penggantian para takmir masjid yang selama ini diisi oleh warga nahdliiyin. Demikian juga dengan tradisi-tradisi ritual keagamaan khas NU pun diganti.

Kegiatan yang merupakan hasil kerja sama PP LDNU dengan PP Muslimat NU itu, kata Kiai Nuril —demikian panggilan akrabnya— dilaksanakan setiap akhir bulan. Dalam pertemuan itu, para pemimpin majelis ta'lim tersebut diberikan pemahaman yang menyeluruh tentang paham Ahlusunnah wal Jama'ah (Aswaja).

Menurut Kiai Nuril, pemahaman tentang Aswaja yang benar dirasa sangat penting guna menghadapi gerakan-gerakan kelompok-

kelompok yang telah mengambilalih masjid-masjid NU. Pasalnya, secara umum para pemimpin majelis ta'lim itu belum memahami sepenuhnya ajaran Aswaja tersebut.

Selain itu, Kiai Nuril menambahkan, tidak sedikit pula bermunculan ajaran yang mengatasnamakan Ahlussunnah, namun yang dimaksud bukanlah Aswaja. "Sekarang kan banyak sekali aliran yang mengaku Ahlussunnah, tapi sebetulnya bukan Ahlussunnah Wal Jama'ah. Ahlussunnah saja, beda dengan Ahlussunnah Wal Jama'ah. Makanya, majelis ta'lim ini harus diberi pemahaman agar bisa membedakan antara Ahlussunnah saja, dengan Ahlussunnah Wal Jama'ah," terangnya.

"Bedanya, kalau Ahlussunnah saja, itu hanya mengikuti ajaran dan perilaku Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau Ahlussunnah Wal Jama'ah, mengikuti ajaran dan perilaku nabi sekaligus juga para Khulafaur Rosyidin (kholifah empat; Abu Bakar Assiddiq, Umar bin Khatab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Tholib, red)," imbuh Kiai Nuril.

Disadari Kiai Nuril, sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia yang berpaham Aswaja, NU merasa perlu untuk segera melakukan gerakan-gerakan nyata dalam rangka penyelamatan terhadap paham yang sudah diyakini kebenarannya selama ini. Jika tidak, katanya, tidak ada jaminan dalam waktu sepuluh tahun mendatang ajaran moderat yang terkandung dalam Aswaja akan hilang dan tergantikan oleh paham yang lain.

Diungkapkan Kiai Nuril, pada pertemuan pertama dan kedua yang diikuti 162 ketua majelis ta'lim se-Jabotabek itu, responnya cukup positif atas kegiatan tersebut. Dalam pertemuan tersebut, katanya, sekaligus terungkap bahwa sebagian besar Pimpinan majelis ta'lim belum mengerti sepenuhnya paham Aswaja sebagaiamana diterapkan NU selama ini.

"Ibaratnya, kita akan berikan pencerahan kepada para majelis ta'lim itu tentang ajaran Aswaja yang benar dan menyeluruh. Biar mereka juga bisa membedakan antara paham Ahlussunnah saja de-

ngan Ahlussunnah yang ada Wal Jama'ah-nya," tandas Kiai Nuril.

Kegiatan tersebut, kata Kiai Nuril merupakan awalan. Selanjutnya, pihaknya akan memperluas wilayah garapan dari kegiatan tersebut hingga ke daerah-daerah, terutama daerah di luar Jawa. Karena, ungkapnya, fenomena tersebut tidak hanya terjadi di wilayah Jabotabek saja, melainkan seluruh Indonesia.

Untuk pertemuan mendatang (30 Agustus), tutur Kiai Nuril, pihaknya telah mengundang seorang tokoh muslimah asal Amerika Serikat untuk menjadi penceramah, yakni Mrs. Tiye Mulazim. Menurutnya, Mrs. Tiye Mulazim juga seorang muslimah yang berpaham Aswaja. (rif)

Hasyim Muzadi: Khilafah Islamiyah bukan Gerakan Agama, tapi Gerakan Politik
Selasa, 5 September 2006

Jakarta, NU Online

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi meminta warga nahdliyyin (sebutan untuk warga NU) dan umat Islam pada umumnya untuk waspada atas munculnya wacana Khilafah Islamiyah yang kerap dihembuskan oleh kelompok-kelompok Islam radikal. Menurutnya, wacana tersebut pada dasarnya tidak lebih dari sekedar gerakan politik, bukannya gerakan keagamaan.

"Khilafah Islamiyah itu sebenarnya gerakan politik, bukan gerakan agama. Karena di situ lebih kental aspek politiknya daripada aspek agama, ibadah, ubudiyah-nya. Yang difokuskan itu kan sistem kenegaraan, bukan bagaimana membuat madrasah, masjid, menciptakan kesejahteraan umat, dan sebagainya," ungkap Hasyim saat bersilaturrahim dengan para petinggi Pimpinan Pusat (PP) Lembaga Dakwah (LD) NU di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Selasa (5/9).

Ditegaskan Hasyim, begitu panggilan akrab Pengasuh Pondok Pesantren Al Hikam, Malang, Jawa Timur itu, sistem ketatanegaraan berikut sistem kepemimpinannya, sebagaimana tertuang dalam konsep Khilafah Islamiyah, cukuplah mengacu pada sistem yang berlaku di negara masing-masing. "Siapapun yang jadi kepala negara, yang telah diproses secara sah, baik menurut ukuran agama maupun negara, ya dia itu kholifah (pemimpin, red). Nggak usah cari model-model yang lain," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Hasyim juga mencermati tumbuh-suburnya kelompok-kelompok Islam radikal berikut gerakannya di Indonesia. Padahal, katanya, hampir di sebagian besar negara-negara di Eropa dan Timur Tengah, kelompok-kelompok Islam garis keras itu tidak menemukan tempat, bahkan dilarang hidup. "Di Eropa,

Timur Tengah, seperti Yordania dan Syria, mereka (kelompok Islam radikal, red) nggak punya tempat. Tapi di Indonesia, mereka bisa hidup leluasa dan semakin merajalela," tuturnya.

Kepada para Pimpinan LDNU, mantan Ketua Pengurus Wilayah NU Jawa Timur ini mengingatkan, persoalan yang cukup mengkhawatirkan itu harus segera mendapat sikap dari NU. LDNU, katanya, sebagai sebuah wadah yang memiliki tugas mendakwahkan serta menyosoialisasikan paham Ahlussunnah Wal Jama'ah (Aswaja) ala NU, dituntut tanggungjawabnya. Jika tidak, maka NU akan terikut ke dalam arus gerakan kelompok Islam radikal itu.

Tak Mampu Bikin Masjid Sendiri

Pengamatan Hasyim juga tak luput dari fenomena diambil alihnya sejumlah masjid milik warga nahdliyyin oleh kelompok Islam ekstrim "kanan". Menurutnya, hal itu dilakukan karena kelompok yang kerap dengan mudah mem-bid'ah-kan bahkan mengkafirkan warga nahdliyyin itu tak mampu membangun masjid sendiri. Sehingga kemudian mengambilalih masjid-masjid yang selama ini dibangun dan dikelola oleh warga nahdliyyin berikut takmir masjid dan tradisi ritual peribadatannya.

"Karena mereka tidak mampu membuat masjid sendiri, kemudian mengambilalih masjid milik orang lain (masjid milik warga nahdliyyin, red), terus dipidatoin di situ untuk politisasi. Kan maksudnya begitu. Yang dirugikan akhirnya kan NU," terang Hasyim. (rif)

JANGAN KEMASUKAN ALIRAN LAIN
Hasyim Imbau Takmir Masjid NU Waspada
Selasa, 28 November 2006 12:33

Malang, NU Online

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menyatakaan, pihaknya telah menginstruksikan kepada jajaran pengurus NU di daerah untuk lebih mewaspadai munculnya kelompok lain yang masuk di masjid-masjid milik NU.

"Jadi saya sudah menginstruksikan kepada pengurus di daerah untuk menjaga masjid, jangan sampai dimasuki oleh aliran kelompok yang lain," kata Hasyim di Pondok Pesantren Al Hikam, Malang, Jawa Timur, Senin (27/11) kemarin.

Kelompok lain yang dimaksud adalah kelompok Islam yang mengutamakan formalitas dari pada substansi dalam beragama. "Kalau dulu NU sama Muhammadiyah rebutan masjid, sekarang ini sudah tidak. Capai. Justru yang ada adalah adanya kelompok lain yang masuk. Mungkin karena mereka tidak ikut jariyah, tetapi kenapa mau menduduki masjid-masjid NU. Mungkin, daripada membuat masjid, mahal harganya, lebih baik ya merebut punya orang lain" jelasnya.

Tentu, Hasyim mengingatkan agar aliran itu diwaspadi karena memang secara keyakinan sudah tidak segaris dengan NU. "Mereka adalah kelompok yang ingin mendirikan negara Islam," jelasnya.

Islam yang rahmatan lil 'alamin, adalah wajah Islam yang harus ditampilkan kepada masyarakat, tidak hanya di Indonesia tetapi juga kepada kelompok internasional. Untuk itu, pemikiran NU bakal dituangkan juga oleh Hasyim pada saat orasi ilmiah di Gelanggang Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya pada 2 Desember mendatang.

Dalam kesempatan itu, mantan Ketua Pengurus Wilayah NU Jatim itu juga bakal memperoleh gelar Doktor Honoris Causa oleh pihak IAIN Sunan Ampel Surabaya. Tema yang bakal ditampilkan

Hasyim adalah "Islam Rahmatan Lil Alamin dan Perdamaian Dunia (Perspektif Nahdlatul Ulama)". Orasi ini bakal menjadi pengantar baginya meraih gelar doktor.

Dengan berbekal roh NU itulah Hasyim terus menawarkan kepada dunia Islam yang damai. "Ada nggak sih orang yang masuk agama Islam itu karena perang. Masuk Islam itu 'kan harus tidak dengan pedang ataupun dengan pentungan yang sekarang sering muncul dengan atas nama Allah," ujarnya.

Untuk itulah, sebagai Presiden WCRP (World Conference on Religion and Peace), maka Islam bakal terus digulirkan melalui seminar, dialog, pertemuan, antarorganisasi negara Islam atau non-Islam. Tidak mengherankan bila ia giat mendirikan berbagai forum bersama umat lain. Seperti Internasional Confrence of Islam Scholars (ICIS) atau melalui Islamic Supreme Council of America yang dipimpin oleh Dr Shaykh Muhammad Hisham Kabbani an Naqshabandi. (dtm/so)

NU Layani 'Tantangan' Kelompok Islam Garis Keras
Selasa, 27 Februari 2007

Jakarta, NU Online

Genderang perang mulai ditabuh Nahdlatul Ulama (NU) untuk menghadapi gerakan dari kelompok Islam garis keras yang muncul akhir-akhir ini. Organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia ini siap melayani 'tantangan' kelompok Islam radikal yang sudah sangat meresahkan warga nahdliyin (sebutan untuk warga NU) itu.

Pada Sabtu (25/2) lalu, Pimpinan Pusat (PP) Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU) mengeluarkan maklumat yang berisi tentang peneguhan kembali terhadap ajaran dan amaliyah Ahlussunnah Wal Jamaah (Aswaja) yang selama ini dijalankan oleh warga nahdliyin. Sebanyak 8 ketua Pengurus Wilayah LDNU se-Indonesia menandatangani maklumat yang merupakan respon atas tuduhan sesat terhadap ajaran dan amaliyah NU itu.

"...kami menyadari dengan sepenuh hati, bahwa dewasa ini telah tumbuh dan berkembang gejala pemikiran dan gerakan ke-Islam-an (*al-harakah al-islamiyyah*) melalui praktek-praktek keagamaan yang dapat melunturkan nilai-nilai Ahlussunnah Wal Jamaah ala NU, maka dengan ini kami menyatakan: ...Senantiasa menjalankan amaliah ibadah Ahlussunnah wal Jama'ah ala NU, melestarikan praktek-praktek dan tradisi keagamaan salafush shalih; sepert salat-salat sunnat, salat tarawih 20 rakaat; wirid, salawat, qunut, talqin, ziarah qubur, tahlil, manaqib, ratib, maulid Nabi, haul, dan istighotsah; serta toleran terhadap tradisi budaya yang sesuai dengan nilai-nilai Islam sebagai bagian dari dakwah Ahlussunnah wal Jama'ah ala NU," demikian salah satu poin dalam maklumat tersebut.

Ketua Umum PP LDNU KH Nuril Huda kepada NU Online menyatakan, gerakan kelompok garis keras itu sudah melewati batas toleransi. Karena mereka tidak lagi sebatas mengambilalih mas-

jid-masjid milik warga nahdliyin, melainkan sudah berani menghasut dan menuduh NU adalah sesat.

"Masjid-masjid NU mulai diambil alih. Muncul banyak buku-buku yang menghujat ajaran Ahlussunnah Wal Jamaah ala NU. Salat tarawih 20 rakaat; wirid, salawat, qunut, talqin, ziarah qubur, tahlil, maulid Nabi, istighotsah dan lain-lain dianggap ajaran sesat. Ini sudah tidak bisa ditoleransi lagi," terang Kiai Nuril di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Selasa (27/2).

Apalagi, lanjut Kiai Nuril, gerakan mereka sudah sangat luas dan hampir merata di seluruh daerah, tidak hanya daerah yang berbasis nahdliyin. Jika NU tak segera mengambil sikap tegas, maka bukan mustahil tradisi keagamaan yang dijalankan warga nahdliyin selama ini akan hilang.

Tak hanya itu. Hal yang paling dikhawatirkan NU, menurut Kiai Nuril, adalah keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 pun ikut terancam. Pasalnya, kuat disinyalir, kelompok Islam garis keras tersebut berkeinginan menjadi Indonesia sebagai negara Islam.

Karenanya, selain peneguhan kembali terhadap ajaran dan amaliyah Aswaja ala NU, dalam maklumat tersebut juga ditegaskan bahwa NU tetap pada komitmennya untuk setia menjaga keutuhan NKRI. NU tak ingin ada pihak-pihak tertentu yang mencoba mengusik keberadaan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Ditambahkan Kiai Nuril, sebagai tindak lanjut atas maklumat tersebut, setiap PW LDNU se-Indonesia akan menguatkan barisan dalam rangka menghadapi gerakan kelompok Islam garis keras tersebut. "Kita sudah tetapkan ada lima zona konsolidasi NU. Antara lain, zona Sumatera, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan. Masing-masing zona ini akan menghimpun dan mengkonsolidasikan seluruh PW LDNU di provinsi yang berada di wilayahnya," jelasnya.

Keberadaan zona-zona tersebut, kata Kiai Nuril, diharapkan dapat menata dengan rapih gerakan dakwah NU di daerah-dae-

rah. Dengan demikian, masjid-masjid NU serta ajaran dan amaliyah NU dapat terjaga. “Walaupun berbeda prinsip, tapi kita ingin sama-sama saling menghormati dan menghargai keyakinan masing-masing. Tidak ada lagi tuduhan bahwa NU adalah sesat dan sebagainya,” pungkasnya. (rif)

PBNU Desak Pemerintah Cegah Ideologi Transnasional
Ahad, 29 April 2007

Surabaya, NU Online

Ketua Umum PBNU KHA Hasyim Muzadi mendesak pemerintah untuk mencegah masuknya ideologi transnasional ke Indonesia, baik ideologi transnasional dari Barat maupun dari Timur.

"Almarhum Pak Ud (sapaan pengasuh Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, KHM Yusuf Hasyim) pernah meminta saya untuk memotong masuknya ideologi transnasional itu, karena sama-sama merusak NU dan Indonesia," ujarnya di Surabaya, Minggu.

Ia mengemukakan hal itu saat berpidato dalam peringatan 100 hari wafatnya KHM Yusuf Hasyim di kantor PWNU Jatim yang dihadiri Ir KH Solahuddin Wahid (pengasuh Tebuireng), KH Tholchah Hasan (mantan Menag), dan Slamet Effendy Yusuf (Golkar/mantan Ketua Umum PP Ansor).

Menurut Hasyim yang juga pengasuh Pesantren Mahasiswa Al-Hikam, Malang, Jawa Timur itu, pemerintah harus 'memotong' masuknya ideologi transnasional itu, sebab liberalisme dari Barat maupun Islam ideologis dari Timur sama-sama merusak.

"Pemerintah harus menggunakan Pancasila sebagai ideologi yang membatasi masuknya ideologi transnasional itu, sedang saya sudah berupaya memenuhi 'wasiat' Pak Ud dengan berkeliling ke Barat dan Timur," tegasnya.

Mantan Ketua PWNU Jatim itu menyatakan dirinya telah berkunjung ke Amerika, Eropa, Timur Tengah, dan sebagainya untuk mengkampanyekan NU sebagai ideologi alternatif seperti yang telah dilakukan pendiri NU. "Pendiri NU seperti ayahanda Pak Ud merupakan pengekspor ideologi, bukan pengimpor ideologi. Saya merupakan pemimpin Islam yang pertama kali datang ke 'ground zerro' di New York, AS (lokasi pengeboman WTC pada 9-11-2001) untuk menolak 'kekerasan' dari Islam ideologis," paparnya.

Namun, katanya, dirinya juga datang ke Irak, Iran, dan Palestina untuk menolak 'kekerasan' dari liberalisme ala Barat yang menancapkan 'penjajahan' cukup lama di Timur Tengah.

"Saya datang ke Irak, Iran, dan Palestina untuk mendamaikan mereka. Mereka selama ini hanya menjadi 'jangkrik' (hewan aduan) yang diadu domba intelijen asing, agar 'penjajah' dapat menang secara gratis," ungkapnya.

Di luar kunjungan ke Barat dan Timur itu, katanya, dirinya juga ingin mengkampanyekan Islam ala NU kepada dunia bahwa NU melihat Islam adalah agama, bukan ideologi, karena itu apa yang terjadi di Timur Tengah selama ini bukan Islam sebagai agama, tapi ideologi Islam.

"Ideologi Islam di Timur Tengah antara lain Ikhwanul Muslimin, Majelis Mujahidin, Al-Qaeda, dan sebagainya, tapi ideologi Islam itu bukan Islam, karena Islam sebagai agama bukan bersifat gerakan kepentingan, apalagi politis," ucapnya.

Ia menambahkan dirinya juga mencoba melakukan pertemuan ulama-ulama muslim se-dunia dengan berbagai konferensi Islam internasional di Indonesia. "Alhamdulillah, apa yang dilakukan NU mendapat sambutan antusias, karena terbukti 85 persen muslim dunia setuju dengan sikap-sikap NU yang tawassuth dan tasammuh (di tengah-tengah, adil, dan konsisten), kecuali 15 persen yang masih idelogis," ungkapnya.

Peringatan 100 hari wafatnya Pak Ud di kantor PWNU Jatim itu antara lain dihadiri KH Tholchah Hasan (mantan Menag), Slamet Effendy Yusuf (politisi Golkar/mantan Ketua Umum PP Ansor), Imam Nahrawi (PKB Jatim), Farid Al-Fauzy (PPP Jatim), dan KHM Masduqi Mahfudz (NU).

Acara yang diawali dengan bacaan tahlil itu dimarakkan dengan penyerahkan buku dari pengasuh Pesantren Tebuireng Ir KH Solahuddin Wahid (Gus Solah) kepada isteri Pak Ud yakni Nyai Hj Bariyah Yusuf Hasyim serta pembacaan puisi tentang kenangan

terhadap Pak Ud oleh Fairuz Febiyanda (cucu pertama Pak Ud) dan Taufik Ismail (budayawan nasional). (ant/eko).

PBNU Minta Bangsa Indonesia Tak Ikuti Ideologi Transnasional
Selasa, 15 Mei 2007

Jakarta, NU Online

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta kepada bangsa Indonesia agar tak mengikuti gerakan keagamaan yang berideologi transnasional (antar-negara). Pasalnya, kebanyakan gerakan dari ideologi tersebut tidak sesuai dengan kondisi masyarakat dan budaya setempat.

Ketua Umum PBNU KH Hasyim menjelaskan, banyak di antara kelompok-kelompok Islam yang berideologi transnasional itu, di negara asalnya sendiri kerap terjadi konflik. Sehingga, jika bangsa Indonesia mengikutinya, maka akan ikut menjadi bagian dari masalah mereka, selain pula karena memang tidak sesuai dengan budaya setempat.

"Seperti Jaulah, Hizbut Tahrir, Al-Qaeda, Ikhwanul Muslimin, Mujahidin, dan lain-lain, mereka itu, menurut saya adalah gerakan politik dengan ideologi tertentu, bukan gerakan agama," terang Hasyim saat menjadi pembicara utama pada Sosialisasi Peraturan Bersama Menag-Mendagri No 9 dan 8 Tahun 2006, di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Selasa (15/5)

Presiden World Conference of Religions for Peace itu menambahkan, kelompok-kelompok politik yang 'berbungkus' agama itu lahir dari situasi politik, sistem pemerintahan dan sistem kenegaraan yang berbeda dengan Indonesia. Maka, jelas akan ada perbedaan jika diterapkan di Indonesia.

Pada acara yang digelar Pimpinan Pusat (PP) Lembaga Dakwah NU bekerja sama dengan Departemen Agama itu, ia juga mengatakan, kelompok Islam dengan ideologi transnasional itu umumnya menolak toleransi atau sikap saling menghormati. Hal itulah yang kemudian bisa memicu terjadinya konflik antar-umat beragama.

"Tolakan-tolakan toleransi itulah yang kemudian kerap men-

jadi masalah. Maka, muncullah pelecehan terhadap Islam seperti di Batu (Malang), penyisipan Injil di dalam Al-Quran di Jombang, beredar gambar-gambar Nabi Muhammad di Cirebon," terang Hasyim yang juga Sekretaris Jenderal International Conference of Islamic Scholars.

Gerakan kelompok berideologi transnasional itu, tambah Hasyim, tidak hanya terjadi pada agama Islam saja, melainkan juga pada agama lain, termasuk Kristen. Ia menceritakan saat dirinya diundang pada forum World Council of Churches (Dewan Gereja se-Dunia - WCC), di Porto Alegre, Brazil, pada Februari 2006 silam.

Dalam pertemuan besar para pemuka agama Kristen sedunia itu, ditemui beberapa delegasi yang berusaha mendesakkan kepada forum untuk membuat keputusan agar Papua lepas dari negara Indonsia. "Nah, itu berarti sudah bukan lagi gerakan agama, tapi gerakan politik, sekalipun berbungkus agama," tandasnya.

Fenomena tersebut, lanjut Hasyim, menunjukkan bahwa gerakan berideologi transnasional itu tidak hanya dimonopoli agama Islam saja, tapi juga agama lain. Oleh karena itu, tegasnya, bangsa Indonesia, apapun agamanya, harus meningkatkan kewaspadaan terhadap gerakan tersebut. (rif).

RMI Kumpulkan Pimpinan Ponpes se-Indonesia Bahas 'Ancaman' Ideologi Transnasional
Rabu, 16 Mei 2007

Jakarta, NU Online

Rabithath al-Ma'ahid al-Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) akan mengumpulkan para Pimpinan pondok pesantren (ponpes) se-Indonesia di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, pada 18-21 Mei mendatang. Salah satu agenda pertemuan asosiasi ponpes NU se-Indonesia itu adalah membahas munculnya ideologi transnasional (antar-negara) yang dinilai juga 'mengancam' keberadaan ponpes.

Wakil Ketua Pimpinan Pusat RMI NU Abdul Adhim kepada wartawan mengatakan, ideologi transnasional atau ideologi 'impor' dari luar negeri itu dinilai telah mengancam keutuhan bangsa dan pesantren. Karena, ideologi tersebut kebanyakan tidak sesuai dengan kondisi sosial dan budaya setempat. "Islam Indonesia yang didakwahkan Walisongo itu 'kan penuh semangat toleransi dan santun. Nah, ideologi Islam transnasional itu datang dengan tidak santun, dengan teriak Allahu Akbar sambil pecahkan kaca," terang Adhim yang juga Ketua Panitia Pelaksana acara tersebut di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Rabu (16/5).

Karena itu, menurut Adhim, organisasi yang menghimpun 14 ribu ponpes NU se-Indonesia itu merasa turut bertanggung jawab atas masuknya ideologi impor yang akan mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu.

Adhim menambahkan, selain soal ancaman ideologi transnasional, pertemuan yang bakal dibuka Wakil Presiden Jusuf Kalla itu juga akan membahas nasib ponpes yang dinilai masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Pertemuan yang akan diikuti 300 Pimpinan ponpes dan 32 pengurus wilayah RMI NU se-Indonesia itu akan menuntut kepada pemerintah agar lebih memerhatikan ponpes.

Selama ini, ujarnya, ponpes diperlakukan diskriminatif oleh

pemerintah. Padahal, ponpes yang juga menjadi bagian dari sistem pendidikan di Indonesia memiliki hak yang sama seperti layaknya lembaga pendidikan yang lainnya. Lulusan pondok pesantren, selama ini, belum diakui keberadaannya oleh pemerintah. "Pondok pesantren yang berada di bawah naungan RMI NU, hanya Sidogiri (Pasuruan) dan Lirboyo (Kediri) yang lulusannya atau ijazahnya diakui oleh pemerintah. Sementara, pondok pesantren lain, tidak. Padahal, kalau bicara kualitas, lulusan pesantren juga tidak kalah dengan lulusan lembaga pendidikan lainnya," terang Adhim.

Tidak hanya itu. Menurut Adhim, ponpes yang umumnya berada di pinggiran kota, kurang mendapat perhatian dari pemerintah, terutama dari segi fisik. "Bantuan materi dari pemerintah untuk pesantren selama ini masih sedikit, seperti bantuan pengadaan laboratorium, dan sebagainya. Kalau pun ada, hal itu setelah era reformasi, sebelumnya tidak pernah ada," paparnya.

Untuk itu, dalam pertemuan yang dirangkai dengan Rapat Kerja RMI NU tersebut, telah diagendakan beberapa penandatanganan Naskah Kesepahaman Kerja Sama (Memorandum of Understanding/MoU) antara PP RMI NU dengan Pemerintah yang akan diwakili menteri-menteri terkait. (rif).

Ideologi Transansional Sukses, Indonesia Berubah Total
Jumat, 22 Juni 2007

Jakarta, NU Online

Gerakan politik dalam bentuk ideologi transnasional (antar-negara) harus semakin diwaspadai. Gerakan tersebut mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan berupaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

"Saya kira kalau gerakan mereka sukses, ya otomatis negara ini diubah, otomatis tidak negara kesatuan, tidak UUD 1945, mesti diubah karena memang sudah begitu programnya," kata Ketua Pengurus Pusat Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU) Ghozalie Said, di Jakarta, Kamis (21/6).

Menurutnya, jika ancaman ini menjadi kenyataan, maka Indonesia bisa bubar karena memang tujuan ideologi tersebut salah satunya adalah membentuk pemerintahan Islam (khilafah islamiyah). Konsep pemerintahan itu meniadakan keberadaan negara saat ini dan diganti pemerintahan tunggal yang membawahi seluruh umat Islam di dunia.

Penulis buku "Ideologi Kaum Fundamentalis Trans Pakistan Mesir" itu mendefinisikan ideologi transnasional sebagai gerakan Islam yang berada di Tanah Air tapi dikendalikan dari luar. Ia menyebut, misalnya, Ikhwanul Muslimin kedudukan al Mursyidul Aam-nya di Mesir dan Hizbut Tahrir yang pemimpinnya di Yordania atau Syiah dari Iran.

Pengasuh Pondok Pesantren An-Nur, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur, itu berharap kepada pemerintah mampu membuat kebijakan yang jelas terhadap gerakan-gerakan tersebut agar tidak mengancam keberadaan negera. Di negara-negara di Timur Tengah sendiri, gerakan-gerakan itu dilarang karena memang tujuannya untuk menghancurkan negara dan diganti dengan pemerintahan Islam sebagaimana ide yang dikembangkan Hizbut Tahrir.

Indonesia tentunya bisa juga bubar jika ide pemerintahan Islam ini terlaksana.

"Saya kira, pemerintah itu mestinya jelas ada kebijakan, tidak dibiarkan begitu saja. Atau memang disengaja oleh pemerintah di samping ada gerakan Islam, ada gerakan kiri sebagai pengimbang," imbuhnya.

Dosen Institut Agama Islam Negeri Surabaya Surabaya itu menjelaskan, salah satu perkembangan kelompok tersebut adalah rencana konferensi tentang pemerintahan Islam sedunia yang akan diselenggarakan di Jakarta. Rencananya, konferensi itu mengundang para pengikut Hizbut Tahrir dari berbagai negara.

Berkaitan dengan aspek peribadatan dan syariat, Ghozalie menjelaskan, mereka hampir rata merupakan penganut paham Wahabi baru. Kelompok-kelompok ini tidak suka dengan tradisi yang dijalankan oleh NU, seperti tahlil.

Sementara itu, pandangan politik dari kelompok-kelompok ini adalah hadist nabi "man maata, walaisa biunukhihi baiah mata mitaatan jahiliyyah" yang artinya "Barangsiapa yang meninggal dan tidak pernah berbaiat khalifah, maka ia mati jahiliyyah", dianggap mati kafir.

Kelompok Ikhwanul Muslimin sendiri juga menggunakan dalil yang senada, yaitu "waman la yahkum bima anzalallah, faulaaika humul kaafiruun". Artinya, "Dan barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka termasuk golongan orang yang kafir"

"Ini kan berat secara teologis. Kita ini dianggap tidak Islam lagi karena tidak ikut paham mereka. Saya lihat khutbah-khutbahnya begitu, saya denger begitu," paparnya.

Ghozali menjelaskan, gerakan Ikhwanul Muslimin doktrinnya berasal dari Sayyid Qutb yang ditulis dalam bukunya yang terkenal, yaitu Pelita Jalan yang menyatakan di antaranya, suatu negara yang tidak memberlakukan syariat Islam, berarti negera itu jahiliyah.

"Maka musuh utamanya adalah pemimpin negera itu. Sebe-

lum memusuhi Israel, memusuhi negaranya sendiri saja. Kedua, negara yang tidak memberlakukan syariat Islam ya negera jahiliyah, karena negera jahiliyah, fikih menjadi tidak penting," imbuhnya.

Menurutnya peran NU dan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang turut menjadi founding father Indonesia menyebabkan mereka memiliki suasana batin yang berbeda dengan gerakan-gerakan Islam baru tersebut. "Disitu bedanya, karena NU dan Muhammadiyah sebagai founding fathers yang ikut meletakkan Pancasila. Artinya ada suasana keterikatan secara kebatinan dalam kontinyuitas negera. Jadi history continuity. Kita punya beban moral untuk mempertahankan NKRI," tandasnya.

Karena itulah antara Islam dan nasionalisme orang Indonesia bagi orang NU adalah adalah sesuatu yang tidak bisa dipisah. "Seperti orang Melayu pasti Islam, Islam adalah orang Melayu, sudah menyatu seperti itulah, otomatis merekalah yang membuat budaya, diantaranya budaya masjid, tradisinya, yang sudah terbentuk karena sudah lama," tuturnya. (mkf).

Kolom Halaqoh
Ideologi Transnasional Sukses, Indonesia Berubah Total
02/07/2007

Keberadaan idologi transnasional belakangan ini menjadi perbincangan yang cukup mengemuka, khususnya di kalangan umat Islam akibat gerakan-gerakan yang mereka lakukan dan kaum nasionalis yang merasa terancam akan kelangsungan NKRI terkait dengan upaya formalisasi syariah di Indonesia. Sebenarnya apa dan bagaimanakah ideologi transnasional ini. Bagaimana sejarah dan apa akibatnya jika ideologi ini terus berkembang di Indonesia, berikut ini pandangan Dr. KH Ghozalie Said, penulis buku "Ideologi Kaum Fundamentalis Trans Pakistan Mesir," dengan NU Online saat berkunjung di kantor PBNU pertengahan Juni lalu

Islam transnasional ini sebenarnya apa?
Saya memang menulis buku "Ideologi Kaum Fundamentalis Trans Pakistan Mesir," itu istilah, tapi akhir-akhir ini, sebetulnya istilah badan intelejen dan rupanya berdasarkan laporan-laporan anggota BIN, yang dimaksud adalah gerakan Islam yang berada di tanah air tapi yang mengendalikan dari luar, misalnya Ikhwanul Muslimin, suatu contoh, ini pengendali utamanya dari Mesir. Jadi kedudukan *al-Mursyid al-Aam* di Mesir.

Kemudian menuju ke Indonesia dalam sejarah penjangnya menjadi dua faksi. Faksi pertama faksi resmi, namanya ikhwan juga. Di masing-masing negara lain, namanya lain-lain. Di Sudan namanya Jamaah Islamiyah, menjadi partai politik karena menerima negara demokrasi dan menerima negera nasional, tetapi penerimaan ini sebagai sarana membentuk pemerintahan Islam dengan syariah. Namanya macem-macem, di Aljazair menjadi FIS, di Syiria dulu ada partai sendiri, saya lupa, di Palestina menjadi Hamas dan kemudian di Indonesia menjadi PKS. Ini jalur resmi dan *al-Musryid*

al-Amnya ada di Mesir.

Kemudian ada faksi jihad, istilah BIN-nya itu Hudaibiyah. Yang saya tahu itu Hadibi karena musryid aamnya yang kedua itu Hassan Hadibi. Nah, ketika Hassan Hadibi menjadi *mursyid am*, ada faksi *tandim al-khosnya*, walaupun sudah ada sejak zaman Hassan al Banna, tetapi lebih radikal ketika tokoh *tandimul khosnya* itu dipegang oleh Sayyid Qutb. *Tandimul khos* itu kalau bahasa NU-nya Banser, para militer. Kalau Bansernya sini kan tidak punya senjata, di sana punya senjata.

Doktrinya itu dari Sayyid Qutb. Bukunya yang sangat terkenal itu *Maali fit Thorieq* atau Pelita Jalan yang menyatakan, di antaranya, suatu negara yang tidak memberlakukan syariah, berarti negera itu jahiliyah. Maka musuh utamanya adalah pemimpin negera itu. Sebelum memusuhi Israel, memusuhi negaranya sendiri saja. Kedua, negara yang tidak memberlakukan syariat Islam ya negera jahiliyah, karena negera jahiliyah, fikih menjadi tidak penting. Itu nanti berbeda dengan Wahbah Zuhaili, yang waktu itu masih muda.

Faksinya Sayyid Qutb ini membentuk Islam radikal yang non negara, non resmi dan keras yang melahirkan Jamaah Islamiyah, Al Jamaat al Islamiyyah di Mesir. Itu anti negera, ini juga trans ke seluruh negara yang kemudian ketemu, ketika Soviet menduduki Afganistan, dibantu oleh kaum Salafy Saudi, yang tokohnya Osama bin Laden, ketemulah faksi ikhwan dengan faksi yang Wahabi, di Afganistan.

Dari Afganistan, ada yang mengirim kelompok-kelompok sukarelawan dari Indonesia, ada Amrozi, masih anak-anak ketika di sana, tapi sudah latihan perang. Akhirnya jamaah Islamiyah yang muncul di sana itu. Ini yang suka ngebom-ngebom. Kalau faksi yang resmi itu ya ikhwan yang menganggap sebagai haraqah ustadziyah

atau gerakan guru. Guru gerakan Islamiyah, jadi harus ditiru. Lha ketemu juga dengan kelompok lain yang mungkin non ikhwan sama-sama anti negera.

Gerakan model kedua dulu juga ikhwan yaitu Hizbut Tahrir (HT). Dulu Syeikh Taqiyuddin an Nabhani bergabung dengan ikhwan ketika perang melawan Israel tahun 1948, kalah, kemudian ia mendirikan sendiri gerakan Islam karena setelah dievaluasi tidak memiliki khilafah Islamiyah sehingga membuat umat Islam kalah. Maka ia mendirikan ini. Dan ini pengendalinya juga dari Yordania. Baik Ikhwanul Muslimin di Mesir dilarang, HT di Yordania juga dilarang. Di tiga negara kan, di Lebanon, Syiria dan Jordania kan dilarang. Itu dirahasiakan, pemimpin sekarang namanya Abu Rosta. Di Indonesia itu kan nggak pernah muncul itu, ketua HTI itu, namanya Habib Abdurahman, yang muncul kan Ismail Yusanto, itu sebenarnya kan krucuknya sebetulnya, terus di Surabaya ada dokter Usman. Pokoknya Jubirnya.

Nah HT ini ciri khasanya itu taat pada kebijakan internasional ini, itu tidak mau menerima negera. Jadi dia tidak akan mau menjadi partai politik, tidak akan mau karena negera itu sistem yang kufur, demokrasi itu sistem yang kufur. Konsekuensinya, ia bisa mentakfir pada orang lain, walaupun disembunyikan. Karena sudah kufur, berarti ini.... Ada tahapan-tahapannya. Ini yang HT.

Konflik itu timbul ketika gerakan transnasional ini menggerogoti asset-asset milik NU atau Muhammadiyah atau organisasi lainnya?
Kayak NU atau Muhammadiyah kan ikut ambil bagian dalam mendirikan negera ini. Jadi antara Islam dan nasionalisme orang Indonesia yang menjadi *the founding fathers* adalah adalah sesuatu yang tidak bisa dipisah. Seperti orang Melayu pasti Islam, Islam adalah orang Melayu, sudah menyatu seperti itulah, otomatis merekalah yang membuat budaya, di antaranya budaya masjid, tradisi-

nya, yang sudah terbentuk karena sudah lama. Nah, gerakan-gerakan baru ini kan belum punya tradisi, nah paling cepat ngambilin masjid yang tak terawat, mereka masuk. Tapi saya kira kita ambil manfaatnya saja. Kalau tidak gitu, NU kan tidur terus. Menurut saya begitu. Memang programnya masjid-masjid di tingkat kabupaten akan dikuasai, terutama HTI. Kalau Ikhwanul Muslimin, partai politiknya jadi PKS yang berasal dari usroh, tarbiyah Islamiyah di kampus-kampus itu, yang digerogoti kan Muhammadiyah karena banyak kader Muhammdiyahnya. Tapi banyak juga yang membuat masjid. Tapi kalau HTI tidak, nggak buat masjid, kalau PKS membuat masjid yang memang disediakan untuk kegiatan mereka.

HTI kan juga berusaha masuk ke pesantren-pesantren?
Oh ya, mereka aktif, jam lima pagi itu sudah datang ke mana-mana dan mereka umumnya tidak faham, hanya didoktrin saja, khilafah Islamiyah, wong saya diparani tak bilangin, kapan sih khilafah Islamiyah ini berdiri. Kan Syeikh Taqiuddin an Nabhani kan bilang 30 tahun, mulai tahun 1952. Sekarang kan sudah 50 tahun lebih, mana yang ada khalifahnya. Saya kira itu romantisme masa silam, bukan masa depan. Kalau NU dan Muhammadiyah kan masa depan, mereka kan ingin kembali ke masa silam.

Ketika gerakan-gerakan ini pemimpin pusatnya berada di luar negeri, apakah ini akan mengancam integritas Indonesia?
Saya kira kalau ini sukses, ya otomatis diubah negera ini, menjadi negera Islam, otomatis tidak negera kesatuan, tidak UUD 1945, mesti diubah karena memang sudah begitu programnya. Saya kira pemerintah itu mestinya jelas ada kebijakan, tidak dibiarkan begitu saja. Atau memang disengaja oleh pemerintah di samping ada gerakan Islam, ada gerakan kiri sebagai pengimbang. Katanya 27 Juni ini ada Kongres Khilafah di Senayan. Dan bukan main mereka, suplai dananya, disamping dari anggota di sini, itu dari orang-orang kaya Saudi. Itu kan kelompok ahlusunnah yang seperti itu, ahlusunnah

sendiri kan macem-macem. Lain pula yang syiah. Ada dua syiah di Indonesia, ada Ijabi, itu moderat, plural, ada pula Elkap, koordinasi ahlul bait pokoknya, ya itu yang agak fundamentalis.

Kalau dilihat dari aspek ajaran, itu sebenarnya ada ajaran yang signifikan tidak, atau sekedar ideologi politiknya?
Sebenarnya kalau dalam bidang peribadatan, hampir rata, Wahabi semua. Mereka tidak seneng tahlil, paling moderat, tidak anti tetapi tidak melaksanakan. Lha yang paling ekstrim itu anti, itu di bidang tradisi keagamaan. Tradisi pemahaman politiknya adalah hadist nabi "*man mata, walaisa biunukhihi baiah mata mitatal jahiliyyah*," barangsiapa yang meninggal dan tidak pernah berbaiat khalifah, maka ia mati jahiliyyah, dianggap mati kafir. Ini kan berat secara teologis. Kita ini dianggap tidak Islam lagi karena tidak ikut faham mereka. Itu hampir sama. Jadi kalau Ikhwanul Muslimin, *waman la yahkum bima anzalallah, faulaaika humul kaafiruun*. Itu dalilnya dan saya lihat khutbah-khutbahnya begitu, saya denger begitu. Ya otomatis berbeda dengan NU.

Lha, NU itu harus membuat cara berfikir tandingan yang mengimbangi cara fikir. Ini harus diputuskan dalam forum tertinggi. Jadi kalau di HTI itu ada namanya taqwim assakhsiyah islamiyyah atau pembentukan kepribadian Islam, itu perlu perbedaan. Kalau di HTI itu bagaimana mengamalkan syariah, tapi yang tak ada tahlilannya, kan beda dengan NU. Kemudian kedua, tafkih, intelektualitasi, beda itu. Kalau NU kan tak suka berdebat, kalau mereka, masalah harus diperdebatkan, namanya syiraul fikr atau pertarungan pemikiran.

Kedua itu ada *ta'amul maklumah* atau gerakan sosial. Jadi ada dua tangga, satu namanya *syiraul fikr*. Kedua *ta'amul maklumah*, dan yang terakhir *istilamul hukm* atau merebut kekuasaan. Lha, di NU, supaya begitu gimana, kan jelas. Makanya harus ada fikrah nah-

dliyyah harus jelas apa yang harus dituju.

Mereka berhasil menarik kalangan muda dan intelektual kampus sehingga dalam pemilu berhasil menarik suara yang cukup besar, apa yang menjadi kunci keberhasilannya?
Karena kecenderungan masyarakat sekarang cenderung berfikir *istidlali*. Itulah yang paling benar, berfikir normatif, dari Qur'an, Hadist, kalau ngga ada, ya salah lah. Lha ini paling gampang, sementara kelompok lain terbiasa cara berfikir *istiqroi*. Ini sebenarnya applied, eksperimen. Lha cara berfikir seperti ini lamban, butuh intelektualitas yang tinggi, sedangkan yang satunya tidak butuh. Lho, ngga ada di Qur'an, bid'ah, lha gitu kan gampang. Tapi kalau ini kan butuh penalaran yang dalam.

Sebab kedua, orang Islam yang lama itu kayak NU dan Muhammadiyah cenderung korup menurut saya, sudah menikmati singgasananya, ngga bisa melakukan mobilisasi ekonomi yang baik. NU kan sudah berumur 80 tahun lebih, tapi kan kalau lihat proposalnya, 90 persen kan permohonan bantuan. Lha kok begini, melihat pemimpinnya kok tengkar, korup, lha otomatis ini kan tidak menarik bagi kalangan muda, tidak ideal.

Sebab ketiga, konstitusi kita itu dianggap dalam perjalanannya tidak pernah stabil, tergantung yang mimpin. Waktu dipimpin Soekarno, ya presiden seumur hidup. Setelah Soeharto ya P4. reformasi ya ganti lagi, kan ruwet ini, ganti lagi. Nah ini menimbulkan kekecewaan pada generasi muda, apa tidak lebih baik Islam sebagai solusi. Di mana-mana ya begitu kampanyenya, di samping tekanan internasional seperti Islam selalau dirugikan yang memunculkan perlawanan.

Ke depan gimana? Apa bisa berkembang semakin besar, stagnan atau malah mengalami penyusutan?

Tergantung pada sparring partnernya. Kalau NU masih seperti sekarang dan tidak ada peningkatan, baik dari sisi kegiatan, pengaturan organisasi, mereka akan berkembang. Tetapi kalau ada semangat melakukan perbaikan ke dalam, pemimpinnya menjadi bersih, saya kira tidak bisa itu. Tapi kita lihat saja karena programnya ini, tahun 2009, yang partai politik targetnya merebut RI 2, tahun 2014 RI 1. Kita lihat dan ini test casenya pemilu DKI. Kemarin di Banten kalah pemimpinnya, sekarang DKI bagaimana, kalau menang ya tambah dekat. Harus siap-siap konstitusi ini diganti. Saya kira itu.

Di situ bedanya, karena NU dan Muhammadiyah sebagai founding fathers yang ikut meletakkan Pancasila. Artinya ada suasana keterikatan secara kebatinan dalam kontinuitas negera. Kita punya beban moral. Tapi kalau istilahnya Anis Matta ketika kampanye waktu saya datang: "Kami akan datang sebagai partai yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang pendahulu kita," dia menyitir sebuah syair. Jadi kalau PKB kan masih terbayang-bayang kebesaran NU, PAN masih terbayang-bayang kebesaran orang Muhammadiyah. Kalau PKS datang tanpa bayang-bayang orang tua. "Kami orang muda dan tak mengatakan siapa pendahulu kita. Pendahulu kita adalah kita sendiri." He he he.......... (mkf). [Beberapa kesalahan tulisan di artikel ini diperbaiki—*red*.]

Taushiyah
Saatnya Dibentuk Front Pancasila Sebagai Penegak NKRI

Setiap gerakan yang menjurus kepada separatisme, baik simbol maupun tindakan, wajib dicegah oleh negara. Apabila sampai ke tingkat pemberontakan atau pemisahan diri, maka negara berhak, bahkan berkewajiban untuk memaklumkan perang. Pemerintah sebagai wakil eksekutif negara harus bertanggung jawab atas kedaulatan negara.

Perihal Aceh, semenjak perjanjian Helsinki telah banyak yang mengingatkan, bahwa banyak mengandung kelemahan, tetapi pemerintah sulit diberitahu. Sekarang disalahgunakan oleh GAM. Perihal Maluku, sejak awal PBNU telah menyimpulkan bahwa konflik SARA di Ambon/Maluku berintikan separatisme, bukan sebenarnya konflik agama. Perihal Papua, pemerintah terlalu longgar membiarkan multi intervensi asing di sana.

Saat ini tiga daerah bergolak bersama-sama, berarti ada tangan-tangan asing di mana-mana. Saat ini, waktunya pemerintah bertindak dan tidak bisa "Nguler Kambang" (berbelit-belit) lagi. Semua rakyat harus membantu pemerintah dalam menegakkan kedaulatan, dan sudah waktunya kita menggalang "Front Pancasila dan Penegak NKRI", guna mendorong ketegasan pemerintahan negara, serta memberikan pencerahan kepada rakyat Indonesia secara konfrehensif. Karena ancaman terhadap Pancasila/NKRI sekarang ini bukan hanya datang menyerang kedaulatan teritorial politis, tapi juga ideologi, ekonomi dan budaya (integritas bangsa). Front ini mendesak diselenggarakan bersama penataan payung hukum (*law arrangement*) agar kedaulatan negara terjamin.

Jakarta, 10 Juli 2007
Ketua Umum PBNU
KH Hasyim Muzadi

PBNU:
Khilafah Islamiyah Celakakan Muslim Minoritas di Negara Lain
Kamis, 26 Juli 2007 20:04

Jakarta, NU Online

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menilai, konsep atas kewajiban pendirian Pemerintahan Islam (Khilafah Islamiyah) bagi setiap Muslim, merupakan gagasan yang tidak rasional. Menurutnya, hal itu jelas akan mencelakakan kaum Muslim minoritas yang berada di negara lain.

"Ambil contoh saja Jepang. Di sana itu, orang Islam, untuk salat Jumat saja tidak memenuhi quorum (syarat minimal). Lantas, bagaimana kalau mereka diwajibkan mendirikan Khilafah Islamiyah? Pasti tidak bisa. Kalau tidak bisa berarti dosa dan masuk neraka," ujarnya pada Dialog Islam dan Negara di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta, Kamis (26/7).

Presiden World Conference on Religions for Peace itu mengatakan, terdapat kesalahan penafsiran atas pemahaman istilah Islam kaffah (menyeluruh) yang kemudian diterjemahkan lagi dalam bentuk kewajiban pendirian Pemerintahan Islam. Menurutnya, syariat atau hukum Islam memang harus ditegakkan, tapi tak perlu melalui pemerintahan Islam.

Kaum Muslim di sebuah negara, lanjutnya, berkewajiban menjalankan setiap ajaran Islam. Namun demikian, kewajiban itu tak berlaku bagi upaya pendirian pemerintahan Islam. "Ber-Islam dengan sungguh-sungguh tak harus dengan Khilafah Islamiyah. Mengakui dan taat pada pemerintahan yang sah dan berdaulat adalah wajib," pungkasnya.

Menurutnya, dua kekuatan Islam moderat terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah, hingga saat ini tak pernah menghendaki negeri ini dibangun dengan dasar sebuah agama tertentu, termasuk agama Islam.

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam, Malang, Jawa Timur, itu, menilai bahwa saat ini mulai bermunculan tanda-tanda potensi disintegrasi bangsa sebagai akibat dari upaya penerapan hukum agama yang cenderung dipaksakan. Kasus paling mutakhir adalah munculnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Injil di Manokwari, Papua.

"Kalau di Tangerang ada Perda Syariat, di Manokwari ada Raperda Kota Injil. Ini merupakan bentuk balas membalas," jelas Hasyim yang juga mantan Ketua Pengurus Wilayah NU Jawa Timur.

Dialog dengan tema "Spirit Keagamaan dalam Politik Kebangsaan" tersebut dihadiri Rais Syuriah KH Ma'ruf Amin, Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Yunahar Ilyas, Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) As'ad Said Ali, pimpinan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia Pdt Andreas A Yewangoe (Ketua Umum) dan Pdt Richard M Daulay Sekretaris Umum) dan Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Rm Benny Susetyo. (rif)

PBNU: Konsep Khilafah Islamiyah Tidak Pernah Jelas
Senin, 13 Agustus 2007

Jakarta, NU Online

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan, konsep pemerintahan Islam (Khilafah Islamiyah) tidak pernah jelas bagaimana bentuk dan mekanisme pendiriannya. Kejelasan konsep tersebut hanyalah selalu mengganggu dan mempersoalkan keabsahan sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. "Kalau seperti itu (ketidakjelasan konsep Khilafah Islamiyah, Red), saya sama sekali tidak heran. Karena demikianlah yang dilakukan di Eropa sehingga negara yang ditempati marah karena filosofi dan konstitusi negara setempat dipersoalkan," ujar Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi kepada wartawan di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta (13/8).

Hasyim menjelaskan, hingga saat ini tidak ada satu pun negara di dunia yang menerapkan sistem kenegaraan dan sistem pemerintahan berdasarkan agama Islam. Bahkan, di negara-negara berpenduduk sebagian besar Muslim sekalipun, sangat beragam bentuk negara dan sistem pemerintahannya.

"Di Timur Tengah pun tidak ada negara yang berdasar khilafah, yang ada kerajaan, seperti Saudi Arabia, Yordania, atau Republik Islam, seperti Iran, Syria, Mesir dan Uni Emirat Arab atau negara-negara Teluk. Sehingga, di Timteng sendiri, Hizbut Tahrir menjadi persoalan, juga di Australia," terang Hasyim.

Dengan demikian, menurut Presiden World Conference on Religions for Peace itu, keberadaan Hizbut Tahrir Indonesia di negeri ini harus diwaspadai. Pasalnya, kelompok tersebut pasti akan melakukan hal serupa seperti yang dilakukan pada negara-negara lain, yakni mempersoalkan sistem Republik Proklamasi Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Hasyim juga mempertanyakan sikap pemerintah sebagai penyelenggara negara yang tidak tegas terha-

dap gerakan tersebut. Padahal, katanya, ancaman bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah sangat jelas. Fundamentalisme dan liberalisme seolah-olah dibiarkan begitu saja.

"Ini semua (pembiaran terhadap fundamentalisme dan liberalisme, Red) mengakibatkan rontoknya kedaulatan politik, ekonomi, budaya, serta sikap kapitulasi terhadap bangsa asing di hampir segala bidang," pungkas Hasyim yang juga Sekretaris Jenderal International Conference of Islamic Scholars. (rif)

Mbah Muchith: Khittah Tidak Sekedar Persoalan Politik
Ahad, 17 Agustus 2008 09:14

Jember, NU Online

Setiap memasuki masa pemilu, baik Pilpres maupun Pilkada, Khittah selalu dipersoalkan, itupun konteks pembicaraan hanya seputar hubungan NU dan politik, padahal Khittah tidaklah sesempit itu.

"Khittah mencakup banyak hal, yang jauh lebih penting daripada sekadar persoalan politik," kata KH Abdul Muchith Muzadi (Mbah Muchith) kepada NU Online di kediamannya, kompleks Masjid Sunan Kalijaga, Jember, Jumat (15/8).

Khittah dirumuskan dalam Muktamar NU ke-27 melalui proses panjang, dengan maksud supaya NU tetap berjalan dalam trayek dan relnya yang benar, supaya cita-cita dan tujuan NU tercapai. Tidak ribut terus sedang tugas perjuangannya terbengkalai.

Namun anehnya, setelah Khittah NU berhasil dirumuskan, ternyata kaum nahdliyin (warga NU), terutama para tokoh dan pemimpinnya, malah ribut tentang penerapannya. Tidak heran kalau ada yang menyebut Khittah NU seringkali malah menghambat NU.

Hal itu tidak ditampik oleh Mbah Muchith. "Sebab orang NU sendiri tidak mempelajari Khittah NU dengan serius, cenderung merasa sudah mengerti, padahal belum pernah membacanya dengan baik dan lengkap," jelas Mbah Muchith.

"Sebagian besar hanya dengar-dengar saja, tidak membacanya, apalagi mempelajarinya dengan seksama," papar kiai yang dikenal sebagai Pakar Khittah itu.

Hal-hal lain yang menyebabkan orang NU salah paham tentang Khittah, karena mereka tahunya Khittah NU "hanya" mengatur hubungan NU dengan politik praktis dan partai-partai. Padahal cakupan Khittah tidaklah sesempit itu.

Khittah NU mengatur NU seluruhnya, mencakup karak-

ter dasar tawassuth, i'tidal, tawazun, amar makruf nahi munkar, dasar-dasar memahami al-Quran dan al-Hadits dengan pendekatan bermadzhab, dasar-dasar akhlak khas NU, sikap kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan NU, sikap terhadap ulama dan keulamaan, dan lainnya. Sedangkan urusan politik dan kepartaian hanya sedikit disebutkan dalam Khittah NU tersebut.

"Yang paling pokok, NU adalah jamiyah diniyah. Segala sikap dan langkahnya selalu bersumber dari jatidiri diniyah ini," tegas Mbah Muchith.

Hingga kini, menurut kiai yang murid langsung dari Hadratus Syeikh Hasyim Asy'ari itu, pemahaman Khittah tentang hubungan dengan politik juga masih disalahartikan. Kebanyakan mereka mengartikan NU lepas sama sekali dari urusan politik, atau menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik. Padahal sejatinya Khittah NU tidaklah sesempit itu. "Memahami Khittah NU juga harus dilihat dari konteks waktunya," kata Mbah Muchith.

Pemahaman yang umum itu, menurut Sekretaris Pribadi KH Achmad Siddiq (pencetus konsep dasar-dasar Khittah) tersebut, adalah pola pikir yang dikembangkan oleh Golkar pada masa itu. Golkar sangat berkepentingan dengan pemahaman seperti itu demi merebut kemenangan dalam pemilu. Sampai-sampai muncul jargon kala itu, Khittah diartikan orang NU tidak wajib pilih PPP dan tidak haram memilih Golkar.

"Orang NU lebih banyak ikut arus pemikiran Golkar, karena sebelum NU mensosialisasikan keputusan itu kepada warganya, Golkar sudah melakukan lebih dulu, bahkan sampai ke tingkat paling bawah," jelas Mbah Muchith.

Apalagi kala itu banyak tokoh NU yang sedang bermasalah dengan partai tersebut, sampai akhirnya terjadilah apa yang dikenal dengan istilah "penggembosan PPP" secara besar-besaran. Menurutnya, Khittah tidak melarang warga NU untuk tetap berpolitik praktis sesuai yang diinginkan. Sebab kata "tidak terikat" itu bisa diartikan elastis, kadang bisa lebih dekat kepada partai tertentu,

kadang juga menjauh, tidak harus dalam jarak yang sama. Tapi kalau pada suatu ketika menjaga jarak yang sama juga tidak apa-apa.

"Sebenarnya kalimat dalam naskah Khittah NU itu sudah sangat bagus kalau mau dipahami," tegas Mbah Muchith, yang juga Ketua Komisi tentang Penjelasan Khittah NU dalam Munas Bandar lLmpung pada 23 Januari 1992.

Di akhir pembicaraan, Mbah Muchith meminta dengan sangat kepada nahdliyin, lebih khusus para tokohnya, agar mau membaca kembali dan memahami arti Khittah NU yang sebenarnya. Sesudah itu mereka diharuskan untuk berusaha agar bisa berkepribadian Khittah, di manapun dia berada dan bertugas. "Tidak boleh "lebur" dalam situasi baru di tempat ia berada," Mbah Muchith menaruh harap. (sbh)

SILATURRAHMI LINTAS ULAMA
Bendung Paham Transnasional
dengan Penguatan Tradisi Aswaja
Rabu, 8 Oktober 2008 11:07

Bogor, NU Online

Maraknya penyebaran paham transnasional di Indonesia, mendapatkan perhatian khusus dari kalangan ulama dan habaib d Kota Bogor. Menurut mereka paham tersebut tidak cocok dengan akar budaya umat Islam Indonesia yang mayoritas menganut paham ahlusunnah wal jamaah (Aswaja).

Demikian wacana yang mengemuka dalam Halal Bihalal dan Silaturrahim Lintas Ulama Bogor Barat Kota Bogor, yang dilangsungkan di Kampung Pilar, Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Selasa (7/10).

Pertemuan ini dihadiri puluhan ulama dari berbagai penjuru Kota Bogor. Antara lain Habib Ahmad Fahmi Al-Aydrus yang juga Pimpinan Majelis Taklim Al-Adni Ciawi Bogor, KH Asep Abdul Wadud yang juga da'i kondang di Kota Bogor, KH Ahmad Miftahuddin —pengasuh Pesantren Arfah— dan KH Yusuf Syafi'i, Rais Syuriah PCNU Kota Bogor.

Dalam kesempatan tersebut hadir pula mantan Sekda Kota Bogor yang juga Calon Walikota Bogor H Dody Rosadi, serta ribuan jamaah dari berbagai pesantren dan majelis ta'lim di Kota Bogor.

Habib Fahmi mengatakan, saat ini paham transnasional dengan berbagai corak tengah berkembang di Indonesia. Paham-paham tersebut antara lain berkedok fundamentalisme Islam, wahabisme hingga liberalisme.

Menurut habib kharismatis Kota Bogor ini, paham-paham tersebut tidak cocok dengan akar tradisi umat Islam di Kota Bogor maupun di Indonesia yang notabene berbasis pada ajaran ahlusunnah waljamaah yang selama ini ala NU.

Karena itu, tradisi Aswaja perlu diperkuat dan dilestarikan kembali, agar paham-paham baru yang muncul dari luar negeri tidak dapat berkembang dan mendapatkan tempat di tengah masyarakat.

Ritual seperti maulid Nabi, tahlil, isra mi'raj hingga upacara kematian (haul), belakangan mulai memudar, perlu dikuatkan kembali, karena ia sudah mengakar dengan budaya masyarakat Indonesia.

"Tradisi-tradisi yang selama ini dikembangkan oleh ulama ahlusunnah waljamaah terbukti mampu menyebarkan Islam di Indonesia dengan damai. Dengan memperkuat tradisi, kita dapat membendung gerakan transnasional," katanya.

Hal senada diutarakan oleh KH Asep Abdul Wadud. Mantan Ketua PCNU Kota Bogor ini mengatakan, belakangan kelompok-kelompok transnasional terutama yang menyebarkan paham wahabiyah, melakukan berbagai cara dalam menarik jamaah. Bahkan guna menyebarkan ajarannya mereka tak segan membid'ahkan semua praktik ibadah yang selama ini dijalankan masyarakat.

"Cara-cara yang mereka kembangkan sangat tidak mencerminkan perilaku dalam berdakwah dan menganggap tradisi yang dikembangkan mayoritas ulama di Indonesia salah," tegasnya.

Pandangan senada diutarakan oleh H Dody Rosadi. Tokoh masyarakat Kota Bogor yang masih kerabat mantan Rais Am PBNU almarum KH Ilyas Ruchiyat ini mengatakan, masyarakat perlu merespons perkembangan tersebut melaui aksi positif, seperti penguatan kembali tradisi aswaja di tengah umat.

"Cara-cara kurang positif tidak perlu ditiru. Kita ambil hikmahnya, dengan maraknya paham baru, kita perlu sadar dan selalu waspada agar tradisi yang diwariskan ulama dapat terus dilestarikan pada generasi berikutnya," ujarnya. (hir)

IPNU-IPPNU Diminta Waspadai Islam Transnasional
Rabu, 22 Oktober 2008 05:34

Brebes, NU Online

Sebagai benteng kekuatan kaum muda di pedesaan, organisasi pelajar NU, IPNU-IPPNU dimintai mewaspadai gerakan Islam transnasional yang berupaya mengobok-obok ajaran Islam ahlusunnah wal jamaah. Pasalnya, gerakan mereka bagai cacing yang menembus tanah basah.

"Dimana ada NU, justru di situ malah dijadikan ladang penggarapan dengan cara menyusup bagai cacing di ladang yang basah menghisap saripati tanah," ungkap Dosen IAIN Walisongo Semarang Imam Fadillah saat menjadi pembicara dalam dialog bersama Pengurus Cabang IPNU-IPPNU Kab. Brebes sekaligus halalbihalal di Aula Kantor Depag Kab. Brebes, Selasa (21/10).

Dengan menggerogoti para kader muda NU, mereka berupaya menghapus ajaran NU yang ahlussunah wal jamaah. Maka dia berharap kader IPNU-IPPNU jangan sampai tergoyahkan. Dalam dakwahnya juga terselubung. Kadang dibarengkan dengan aktivitas kepartaian tertentu.

"Kader mereka (Islam trans), juga tak segan-segan mengikuti jamiyahan NU. Namun di dalammnya sambil menggerogoti dan menebar diskusi kusir persoalan bidah dan lain sebagainya," ujarnya.

Sementara pembicara lain, Ketua Pengurus Cabang Lembaga Pendidikan Maarif Kab. Brebes Syamsul Maarif, S.Pd. Memberi solusi agar tidak semakin berkembang gerakan Islam trans nasional, disetiap sekolah di bawah LP Maarif akan didirikan Komisariat IPNU-IPNU.Menurut Ketua Pengurus Cabang IPPNU Nur Imah, selaku panitia, dalam kesempatan tersebut juga dibedah Majalah Justisia edisi 32 tahun ke-XVII 2008 milik IAIN Semarang. Hadir dalam kesempatan tersebut pemimpin umumnya, Moh. Nasrudin.

Sebanyak lebih kurang 150 peserta diskusi dan halalbihalal saling memberikan penilaian dan sikap sesuai dengan daya nalarnya masing-masing sesuai taraf pelajar. Namun pada kesimpullannya, menurut Nasrudin pelajar sekarang untuk lebih waspada dalam pergaulan dan memilih teman sepergaulan dalam mengembangkan Islam di Bumi Pertiwi ini. (was)

Anak Muda NU Protes PKS Terkait Iklan Mbah Hasyim
Rabu, 29 Oktober 2008 19:41

Jakarta, NU Online

Anak-anak muda Nahdlatul Ulama (NU) yang tergabung dalam Generasi Muda NU menggugat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menampilkan pendiri NU Hadratus Syeikh KH Hasyim Asy'ary (Mbah Hasyim) dalam iklan politik partai tersebut.

Dalam pernyataan sikap di kantor PBNU, Jakarta, Rabu (29/10), Generasi Muda NU yang merupakan gabungan dari beberapa organisasi kepemudaan NU yakni PMII, IPNU, IPPNU, Ansor, dan Fatayat NU, GMNU menyatakan keberatan atas pencatutan nama tokoh yang sangat dihormati warga NU itu, bahkan PKS dikatakan telah melakukan 'pembohongan publik."

Dikatakan, pemakaian para tokoh pergerakan nasional sebagai iklan politik justru mengecilkan kiprah para tokoh besar itu, di tengah kondisi politik di Indonesia yang tidak sehat. "Malah kemungkinan akan menghilangkan ketokohan dari figur yang diangkat," kata Adien Jauharudin, salah satu Ketua PB PMII.

Tokoh dan pahlawan nasional lainnya yang dipakai PKS untuk iklan politik adalah proklamator kemerdekaan RI Soekarno dan pendiri Muhammadiyah KH Ahmad Dahlan. Generasi Muda NU meminta PKS segera menghentikan iklan politik yang tidak sehat itu.

Ketua Umum PP IPNU Idi Muzayyad menyatakan, pihaknya telah akan segera mengirimkan surat keberatan kepada DPP PKS dan meminta iklan politik itu segera dihentikan.

"Padahal jelas bahwa aliran PKS adalah Wahabi, sedangkan Mbah Hasyim Asyhari adalah Sunni. Saya kira ada unsur kesengajaan untuk membiaskan penokohan ini oleh PKS," ujarnya. (min/nam)

Kang Said: Aswaja Tak Mengenal Terorisme
Sabtu, 8 November 2008 05:31

Jakarta, NU Online

Ahlussunnah wal jamaah (Aswaja) sebagai paham dan ajaran keislaman yang dianut oleh organisasi NU mengajarkan umat untuk berlaku toleran dan meninggalkan cara-cara kekerasan dalam menyelesaikan persoalan.

"Ahlussunnah tidak mengenal kekerasan dan terorisme. Kita ini adalah umat yang modern, yang penuh toleran, dan moderat, agar menjadi contoh bagi umat yang lain," katanya dalam acara silaturrahim IPPNU dengan Ibu Negara Ani Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Jum'at (7/11).

Dikatakan Kang Said, panggilan akrab KH Said Aqil Siradj, para ulama yang yang tergabung dalam NU berjuang membela tanah air sebagai bagian dari tugas agama. Maka tugas membangun Indonesia adalah tugas agama.

"Dulu ulama yang bersarung bercita-cita mendirikan negara darus salam (negara yang menyejahterakan), negara Indonesia, bukan darul Islam (negara Islam). Pada tanggal 22 oktober 1945 dikeluarkanlah fatwa Resolusi Jihad, bahwa membela tanah air sama dengan membela agama," kata Kang Said.

Acara silaturrahim dengan Ibu negara yang dihadiri Kang Said itu merupakan bagian dari agenda Halaqoh Pelajar dan Kenferensi Besar (Konbes) IPPNU yang diadakan di Jakarta selama empat hari, 6-9 November 2008. (nam)

PMII Diminta Ikut Waspadai Islam Transnasional
Selasa, 9 Desember 2008 07:22

Brebes, NU Online

Terhadap gerakan yang merongrong paham Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) diminta untuk ikut waspada. Pasalnya Islam Transnasional yang datang dari Timur Tengah itu pergerakannya sangat sistematis dan terstruktur dengan baik.

"Sebagai kader Nahdlatul Ulama, PMII harus ikut waspada," pinta pengasuh Ponpes Modern Al Falah Desa Jatirokeh Kec. Songgom Brebes HM Nasrudin saat diskusi dengan tema mewaspadai gerakan Islam Transnasional di Aula RSPD Kab. Brebes Jateng, Sabtu (6/12) lalu.

Nasrudin mengakui, akidah Aswaja yang menjadi keyakinan sebagian besar umat Islam di Indonesia, saat ini mulai mendapat perlawanan yang serius dari paham lain. Maka NU yang memegang teguh prinsip Aswaja harus mewaspadai gerakan tersebut.

Melaui metode yang sistematis dan terstruktur, mereka mudah merasuk dalam struktur masyarakat, termasuk di lingkungan NU. Tidak mustahil, lambat laun para penganut Aswaja di kalangan NU sendiri akan terjebak dan justru memusuhi NU.

"Orang NU harus waspada, termasuk PMII," ungkapnya. Pergerakan mereka terlihat begitu sempurna dan baik. Karena memang jumlahnya mereka masih sedikit. Sehingga kesan baik dan sempurna masih dimilikinya.

"Yang jelas, apapun mereka, kalau sudah menyangkut aqidah, harus kita pertahankan," ajak Nasrudin pada peserta diskusi.

Munculnya NU pada 1926 oleh sejumlah Ulama Besar Indonesia, adalah langkah nyata untuk menyelamatkan aqidah Aswaja. Sehingga masuknya gerakan Islam transnasional tersebut, diantaranya gerakan Wahabi sampai kini bisa dicegah. "PMII harus di garda depan untuk menyelamatkan Aswaja," tandasnya.

Diskusi itu, kata Ketua PMII Cabang Brebes Afifudin El Jupri, merupakan salah satu upaya untuk mengingatkan kembali tentang aqidah Aswaja. PMII sebagai bagian dari penganut dan pengamal Aswaja, mempunyai kewajiban untuk mempertahankan Aqidah tersebut.

"Salah satu ciri dari gerakan Islam transnasional itu antara lain anti tahlil, anti ziarah, anti barzanzi dan menganggap aqidah yang kita pegang selama ini salah," pungkas Jupri. (was)

Kang Said: Kelompok Anti Tahlil Tak Akan Laku
Ahad, 11 Januari 2009 06:49

Jakarta, NU Online

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Agil Siradj menyatakan, ajaran Islam tidak akan diterima oleh masyarakat jika tidak berakar pada budaya masyarakat setempat.

Dikatakannya, Islam bukan sekedar doktrin. Para ulama dan wali menanamkan ajaran Islam ke dalam budaya masyarakat Nusantara. Cara ini kemudian diwariskan kepada para santri dan kalangan pesantren serta diorganisir oleh Nahdlatul Ulma (NU).

”Sebuah Ideologi kalau tidak diperkuat dengan budaya tidak akan langgeng. Kalau dokrin saja, maka ideologi atau ajaran itu akan hilang, bahkan menjadi kecil sekali. Maka doktrin harus diimbangi kreatifitas manusia atau kita biasa menyebutnya sebagai budaya,” kata Kang Said –panggilan akrabnya, ketika berbincang dengan NU Online di rumahnya, Ciganjur, Jakarta Selatan, Jum’at (9/1).

Kekuatan Islam di Indonesia, kata Kang Said, ada pada tradisi keislaman seperti tahlil, haul para pendahulu, ziarah kubur, selamatan, maulid Nabi Muhammad SAW. ”Kalau tidak ada seperti itu maka akan sepi. Lama-lama Islam hanya dilakukan oleh sekelompok kecil, tidak membudaya, tidak manusiawi,” katanya.

Dikatakan, kelompok Islam di Indonesia yang menentang beberapa tradisi keislaman yang telah diamalkan itu tidak akan diminati oleh umat Islam di Indonesia. ”Kelompok yang anti tahil, anti maulid Nabi, dan anti ziarah kubur tidak akan laku,” katanya.

Ditambahkan, sebenarnya perdebatan mengenai tradisi keislaman di Indonesia sudah selesai dibahas. Namun perdebatan ini kembali muncul ketika beberapa kelompok muslim yang mengadopsi gerakan-gerakan di Timur Tengah gencar melakukan ’serangan’ dengan menganggap tradisi-tradisi ini sebagai bid’ah dan sesat.

”Karena ada yang mengganggu, dipersoalkan lagi, maka kita

terpaksa balik lagi mengurusi itu lagi. Waktu itu sudah selesai, sama seperti ketika Sukarno, Hatta, Wahid Hasyim, Maramis dan para tokoh lainnya menyepakati di bentuknya negara Indonesia. Namun ketika sekelompok muslim memunculkan isu berdirinya negara Islam, maka persoalan hubungan agama dan negara diperdebatkan lagi," katanya. (nam)

Hasyim: Agama Kerap Disalahgunakan sebagai Alat Provokasi
Kamis, 5 Maret 2009 20:01

Roma, NU Online

Perbincangan tentang agama dan masyarakat memang tidak akan pernah selesai, seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Kehadiran agama-agama di dunia bahkan seringkali dijadikan sebagai alat untuk memprovokasi.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menyatakan, karena agama sering kali disalahgunakan, maka agama juga kerap kali disalahpahami bahkan disalahpahamkan.

"Kita hidup di dunia di mana agama sering kali disalahgunakan sebagai alat provokasi. Akibatnya, agama sering kali di salahpahami, tidak terkecuali Islam," kata Hasyim dalam sambutannya pada forum dialog lintas agama di Roma, Italia, Rabu (4/3).

Hasyim mengatakan bahwa Islam sering disalahpahami akibat beberapa faktor yang muncul baik dari dalam komunitas Islam sendiri maupun dari komunitas lain di luar Islam.

Di antara faktor yang berasal dari dalam komunitas Islam itu, menurutnya, adalah adanya sebagian umat Islam "yang belum bisa menunjukkan diri sebagai representasi dari kesucian dan moralitas Islam."

"Secara eksternal, komunitas lain (di luar Islam) sudah meganggap perilaku umat Islam saat ini sebagai refleksi dari ajaran Islam," katanya.

Presiden World Conference of Religions for Peace itu juga mengingatkan pentingnya menempatkan agama sebagai sumber ajaran. Terlebih dalam dunia yang multi kultural, agama harus bisa sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Dalam kesempatan itu, Hasyim juga mengatakan bahwa sepanjang perjalanannya yang ke-82 tahun, Nahdlatul Ulama (NU), masih tetap dan akan terus menyemaikan ajaran-ajaran Islam Ah-

lussunah wal Jamaah sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia. (dar)

Hati-hati dengan Propaganda Anti Maulid
Senin, 9 Maret 2009 09:01

Jombang, NU Online

Umat Islam diharapkan berhati-hati dan waspada dengan propaganda yang mengajak untuk meninggalkan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Propaganda yang dimuat dalam berbagai artikel di situs internet itu menyatakan Maulid Nabi sebagai bid'ah yang dilarang dalam agama Islam.

Demikian dalam sarasehan bertajuk "Telaah Shalawat Diba' Kampung" dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di Pondok Pesantren As-Salam Peterongan Jombang, Ahad (8/3).

Berbicara di depan para santri As salam, para ustadz dan masyarakat sekitar pesantren, pembicara Yusuf Suharto yang juga pengurus Lajnah Ta'lif wan Nasyr Nahdlatul Ulama (LTN-NU) Cabang Jombang mengingatkan kaum muslimin untuk berhati- hati terhadap beberapa situs sekelompok muslim yang mendiskreditkan amaliyah warga mayoritas muslim Indonesia, seperti peringatan maulid nabi atau hari kelahiran Nabi Muhammad SAW.

"Membaca artikel hukum merayakan Maulid Nabi, seolah kita akan mendapatkan referensi tambahan penting tentang peringatan maulid Nabi, namun yang terjadi adalah sebaliknya, di sana ternyata memperingati Maulid Nabi dikategorikan bidah yang jelek," paparnnya.

Pengajar di Pondok Pesantren Denanyar ini menyatakan, peringatan Maulid Nabi termasuk tadisi baru, yang belum pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad masih hidup, bahkan juga belum dikenal pada masa ulama salaf pada abad III Hijriyah.

"Jika dilihat dari bentuk peringatannya, maka Maulid Nabi dapat dikategorikan sebagai adalah hal baru yang baik, atau bid'ah hasanah. Jika dilihat dari kandungan di dalam perayaannya, peringatan maulid bernilai positif (hasanah). Maka para ulama kita

bersepakat untuk mengatakan bahwa peringatan Maulid Nabi hukumnya adalah mubah (boleh), bahkan bisa berubah menjadi sunnah (dianjurkan)," katanya.

Dikatakannya, peringatan maulid nabi dapat meneguhkan hati umat Islam, yakni saat disampaikan kisah hidup Nabi dalam acara peringatan Maulid. Sebab beliau adalah rahmat a'dlam (rahmat paling agung) bagi umat manusia.

Kedua, Memperbanyak bacaan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad yang dilakukan pada acara [eringatan maulid itu sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 58: "Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." (nam/shof)

NU Memandang Budaya secara Selektif dan Inovatif
Selasa, 10 Maret 2009 06:21

Roma, NU Online

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi mengatakan bahwa Nahdlatul Ulama selalu melihat nilai-nilai budaya secara selektif dan inovatif.

Menurutnya, secara historis masuknya Islam di Indonesia juga dibarengai dengan jalur seleksi budaya ketika budaya-budaya Hindu, Budha dan sistem-sistem kepercayaan pribumi sudah muncul selama berabad-abad.

Diakuinya, ada nilai-nilai budaya yang sudah sejalan dengan ajaran-ajaran agama dan bahkan berfungsi sebagai faktor pendukung dalam penyebaran agama.

"Ini berarti agama sejatinya dapat mencerahkan suatu komunitas tanpa perlu mengubah budayanya yang asli," kata Hasyim saat berbicara dalam sebuah pertemuan di Roma, belum lama ini.

Dalam kesempatan itu, sekjen International Conference of Islamic Scholars (ICIS) menyatakan, realitas Indonesia yang multi kultural itu juga turut berperan telah membentuk karakter Nahdlatul Ulama.

Hasyim menegaskan, sikap NU yang secara relatif lebih lentur dan adaptif terhadap berbagai nilai budaya menunjukkan bahwa NU bisa menjalin hubungan baik dengan ormas dan agama apapun juga.

Pihaknya juga mengatakan, sebagai tempat bernaungnya NU, Indonesia adalah sebuah mozaik dengan lebih dari 200 budaya, sementara di Timur Tengah, satu budaya itu terbagi di 32 negara. (dar)

Daftar Bibliografi

A. Buku

‘Abdul Wahhab, Sulaiman ibn (2006). *Al-Shwâ‘iq al-Ilâhiyyah fî al-radd ‘alâ al-Wahhâbiyyah* (Peringatan Keras Ilahi dalam Menolak Paham Wahabi, beredar untuk pertama kalinya pada masa formatif gerakan Wahabi), dicetak bersama *Al-Tsaurat al-Wahhabiyah* (‘Abdullah al-Qasimi, 2006). Köln, Germany: Al-Makel Verlag.

A‘la, Abdul (2008). *Genealogi Radikalisme Muslim Nusantara: Akar dan Karakter Pemikiran dan Gerakan Padri dalam Perspektif Hubungan Agama dan Politik Kekuasaan* (Pidato Pengukuhan Guru Besar IAIN Sunan Ampel Surabaya, tidak dipublikasikan).

Abdullah, Taufik (1987). *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

Abdullah, Taufik dan Mohammad Hisyam (2003). *Sejarah Umat Islam Indonesia*. Jakarta: MUI dan Yayasan Pustaka Umat.

Abou El Fadl, Khaled M. (2001). *Melawan "Tentara Tuhan."* Jakarta: Serambi.

---------, (2003). *Atas Nama Tuhan: dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, diterjemahkan dari *Speaking in God's Name: Islamic Law,*

Authority and Women. Jakarta: Serambi.

Aburish, Said K. (2005). *The Rise, Corruption and Coming Fall of the House of Saud*. London: Bloomsbury.

Abuza, Zachary (2009), "Jemaah Islamiyah Adopts the Hezbollah Model" dalam *Middle East Quarterly*, Winter 2009.

Al-Darimi, Abu Muhammad 'Abdullah ibn 'Abdurrahman ibn al-Fadll ibn Bahram (tt.). *Sunan al-Dârimî*. Kairo: Mauqi' al-Wizârat al-Auqâf al-Mishriyah.

Algar, Hamid (2002). *Wahhabism: A Critical Essay*. New York: Islamic Publication International.

Al-Isbahânî, Abû Nu'ain Ahmad ibn 'Abdillah (1405). *Hilyat al-Auliyâ'*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Arabî.

Allen, Charles (2006). *God's Terrorists, The Wahhabi Cult and the Hidden Roots of Modern Jihad*. Cambridge, MA: Da Capo Press.

Almond, Gabriel A., R. Scott Appleby, dan Emmanuel Sivan (2003). *Strong Religion, The Rise of Fundamentalism Around the World*. Chicago and London: The University of Chicago Press.

Al-Rasheed, Madawi (2002). *A History of Saudy Arabia*. Cambridge: Cambridge University Press.

Al-Râzî, Fakhruddin (tt.). *Mafâtih al-Ghaib*. Cairo: Mauqi' al-Tafâsir.

Al-Syaukânî (tt.). *Fath al-Qadîr*. Cairo: Mauqi' al-Tafâsir.

Amal, Taufik Adnan dan Samsu Rizal Panggabean (2004). *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia hingga Nigeria*. Jakarta, Alvabet.

Anwar, M. Syafi'i (1995). *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*. Jakarta, Paramadina.

Asfar, M (2003). *Islam Lunak-Islam Keras*. Surabaya: JP Press.

Ausop, Asep Zainal, (2005). "*NII: Ajaran dan Gerakan (1992-2002)*" disertasi doktor, PPS, UIN Jakarta.

Azra, Azyumardi (1994). *Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Bandung: Mizan.

---------, (2000). "The Islamic Factor in Post-Soeharto Indonesia" dalam Chris Manning & Peter van Diermen (eds.). *Indonesia in Transition: Social Aspect of Reformasi and Crisis*. Canberra & Singapore: Research School of Pacific and Asian Studies, Australian National University & Institute of Southeast Asian Studies, 309-19.

---------, (2002a). "The Globalization of Indonesian Muslim Discourse: Contemporary Religio-Intellectual Connections between Indonesia and the Middle East" dalam Johan Meuleman (ed.), *Islam in the Era of Globalization: Muslim Attitudes towards Modernity and Identity*. London: Routledge Curzon, 31-50.

---------, (2002b). *Konflik Baru Antar-Peradaban: Globalisasi, Radikalisme & Pluralitas*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

---------, (2003a). "The Megawati Presidency: The Challenge of Political Islam", dalam Hadi Soesastro, Anthony L. Smith & Han Mui Ling (eds.), *Challenges Facing the Megawati Presidency*. Singapore: ISEAS.

---------, (2003b). "Bali and Southeast Asian Islam: Debunking the Myths", dalam Kumar Ramakrishna & See Seng Tan (eds.), *After Bali: The Threat of Terrorism in Southeast Asia*. Singapore: World Scientific & IDSS.

---------, (2004). *The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia*. Crownest, Aust., Honolulu, Leiden: AAAS & Allen & Unwin; University of Hawaii Press; KITLV Press.

---------, (2006), *Indonesia, Islam and Democracy; Dynamics in a Global Context*. Jakarta & Singapure: Solistice-Equinox, ICIP & The Asia Foundation.

--------- dan Arskal Salim (2003). *Shari'a and Politics in Modern Indonesia*. Singapore: ISEAS.

Baidhawy, Zakiyuddin dan Mutohharun Jinan (2003). *Agama dan*

Pluralitas Budaya Lokal. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Bamualim, Chaider S. et al, (2001). *Laporan Penelitian Radikalisme Agama dan Perubahan Sosial di DKI Jakarta*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya & Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

---------, Dick van der Meij dan Karlina Helmanita, eds. (2003). *Islam and the West: Dialogue of Civilizations in Search of a Peaceful Global Order*. Jakarta: PBB UIN Jakarta dan Konrad Adenauer Stiftung.

---------, ed., (2005). *A Portrait of Contemporary Indonesian Islam*. Jakarta: Center for Language and Culture UIN Jakarta and Konrad Adenauer Stiftung.

Bana, Hasan al- (1997). Pengantar Abu Ridho, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin*. Solo: Intermedia.

Baran, Zeyno (2004). *Hizb ut-Tahrir: Islam's Political Insurgency*. Washington: Nixon Center.

Barton, Greg (2005). *Jemaah Islamiyah, Radical Islamism in Indonesia*. Singapore: Ridge Books.

Benda, Harry J. (1958). *The Crescent and the Rising Sun: Indonesian Islam under the Japanese Occupation*. The Hague & Bandung: van Hoeve.

Bisri, A. Mustofa (2009). *Lautan Wahyu: Islam sebagai Rahmatan lil-'Âlamîn* (DVD), ©LibForAll Foundation 2009.

Bisyr, 'Utsman ibn 'Abdullah ibn (tt.), *Unwân al-Majd fî Târîkh al-Najd*.

Boland, B. J. (1982). *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*. Leiden: The Hague-Martinus Nijhoff.

Bukhari, Imam, *Shahih al-Bukhari*.

Burr, J. Millard and Robert O. Collins (2006). *Alms for Jihad: Charity and Terrorism in the Islamic World*. New York: Cambridge University Press.

Crouch, Harold (2002). "The Recent Resurgence of Political Islam

in Indonesia," dalam Anthony L. Smith, ed., *Islam in Southeast Asia: Analysing Recent Developments*. Singapore: ISEAS.

Dahlan, Sayyid Ahmad ibn Zaini (2006), *Al-Durar al-Sunniyyah fî al-Radd 'alâ al-Wahhâbiyyah* (Permata Sunni dalam Menolak Wahhabi, beredar untuk pertama kalinya pada masa formatif gerakan Wahabi), dicetak bersama *Al-Tsaurat al-Wahhabiyah* ('Abdullah al-Qasimi, 2006). Köln, Germany: Al-Makel Verlag.

Damanik, Ali Said (2002). *Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*. Jakarta: Teraju.

Dhume, Sadanand (2005), "Indonesian Democracy's Enemy Within: Radical Islamic party threatens Indonesia with ballots more than bullets," dalam *the Far Eastern Economic Review*, Mei 2005.

---------, (2008). *My Friend the Fanatic: Travel with an Indonesian Islamist*. Melbourne: Text Publishing Company.

Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, Ditjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Islam (2004). *Jejak-jejak Islam Politik: Sinopsis Sejumlah Studi Islam Indonesia*. Jakarta: Ditpertais.

Effendy, Bahtiar (1998). *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.

Esposito, John L. (1987). *Islam and Politics*. Syracuse: Syracuse University Press.

Fananie, Zainuddin, Atika Sabardila & Dwi Purnanto, (2002). *Radikalisme Agama & Perubahan Sosial*. Surakarta: Muhammadiyah University Press & The Asia Foundation.

Fathurrahman, Oman (2003). *Tarekat Shattariyah di Dunia Melayu-Indonesia: Kajian atas Dinamika dan Perkembangannya Melalui Naskah-naskah di Sumatera Barat* (Disertasi pada Program Studi Ilmu Susastera Program Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta 2003, tidak dipublikasikan).

Federspiel, Howard M., (1970). *Persatuan Islam: Islamic Reform in Twentieth Century Indonesia*. Ithaca, NY: Cornell University Modern Indonesia Project.

Furkon, Aay Muhammad (2004). *Partai Keadilan Sejahtera: Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer*. Bandung: Teraju.

Geertz, Clifford, 1968 (orig. 1960). *The Religion of Java*. New York: The Free Press (orig. New Haven & London: Yale University Press).

Hassan, Noorhaidi (2005). *Laskar Jihad, Islam, Militancy, and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia*. Disertasi. Leiden, Utrecht University, The Netherland.

---------, (2007), "Islamic Militancy, Sharia, and Democratic Consolidation in Post-Soeharto Indonesia," Working Paper No. 143, S. Rajaratnam School of International Studies (Singapore, 23 October 2007).

Hawwa, Sa'id (2005). Pengantar Abu Ridho, *Membina Angkatan Mujahid: Studi Analisis atas Konsep Dakwah Hasan al-Banna dalam Risalah Ta'lim*. Solo: Intermedia.

Hidayat, Komaruddin dan Ahmad Gaus AF, eds. (2006). *Menjadi Indonesia: 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara*. Jakarta, Mizan dan Yayasan Festival Istiqlal.

Hizbut Tahrir Indonesia (2006). *Selamatkan Indonesia dengan Syari'ah*. Jakarta: HTI Press.

Hourani, Albert (1983). *Arabic Thought in the Liberal Age, 1798-1939*. Cambridge: Cambridge University Press.

Husain, Ed. (2007). *The Islamist* (London: Penguin Books, 2007), (Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul: *Matinya Semangat Jihad: Catatan Perjalanan Seorang Islamis*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008).

Ibn Hanbal, Abu 'Abdillah Ahmad ibn Muhammad (tt.), *Masnad Ahmad*. Cairo: Mauqi' Wizârat al-Auqâf al-Mishriyyah.

Ibn Manzhur al-Ifriqi al-Mishri, Muhammad ibn Mukrim (tt.),

Lisân al-'Arab. Beirut: Dâr al-Shâdir.

ICG (International Crisis Group), October (2001). *Indonesia: Violence and Radical Muslims*. Jakarta/Brussels.

---------, August (2002). *Al-Qaeda in Southeast Asia: The Case of the "Ngruki Network" in Indonesia*. Jakarta/Brussels.

---------, December (2002). *Indonesia Backgrounder: How the Jemaah Islamiyah Terrorist Network Operates*. Jakarta/Brussels.

---------, September (2004). *Indonesia Backgrounder: Why Salafism and Terrorism Mostly Don't Mix*. Southeast Asia/Brussels.

Jamhari & Jahroni Jajang, eds., (2004). *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Kamil, Sukron dan Chaider S. Bamualim, eds., (2007). *Syariah Islam dan HAM: Dampak Perda Syariah terhadap Kebebasan Sipil, Hak-hak Perempuan, dan Non-Muslim*. Jakarta, CSRC-UIN Jakarta dan Konrad Adenauer Stiftung.

Kepel, Gilles (2002). *Jihad: The Trial of Political Islam*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Maarif, Ahmad Syafii (2001), "Pertimbangkan Dampak yang Akan Timbul," dalam Kurniawan Zein dan Saripuddin HA, *Syariat Islam Yes, Syariat Islam No: Dilema Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Paramadina.

Machmudi, Yon (2005). *Partai Keadilan: Wajah Baru Islam Politik Indonesia*. Bandung: Harakatuna Publishing.

Madjid, Nurcholish (1999). *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*. Jakarta, Paramadina.

---------, (2003). *Indonesia Kita*. Jakarta: Universitas Paramadina.

Mahmud, Ali Abdul Halim (2004). *Perangkat-perangkat Tarbiyah Ikhwanul Muslimin*. Solo: Intermedia.

Mahmud, Ali Abdul Halim (tt.). *Ikhwanul Muslimin: Konsep Gerakan Terpadu (Minhaju al-Tarbiyah 'inda al-Ikhwan al-Muslimin)*. Jakarta: Gema Insani Press.

Majelis Pertimbangan Pusat PKS (2007). *Platform Kebijakan Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera*. Jakarta, Majelis

Pertimbangan Pusat PKS.

Mas'udi, Masdar F. (2006). *Membangun NU Berbasis Masjid dan Umat*. Jakarta: Lajnah Takmir Masjid Nahdatul Ulama dan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M).

Mulkhan, Abdul Munir (2006). "Sendang Ayu: Pergulatan Muhammadiyah di Kaki Bukit Barisan" dalam *Suara Muhammadiyah*, 2 Januari 2006.

Muzadi, K.H. Hasyim, et al. (2004). *Gerakan Radikal Islam di Indonesia dalam Sorotan*. Jakarta: ASEAN Youth and Student Network.

Nashir, Haedar (2007). *Manifestasi Gerakan Tarbiyah: Bagaimana Sikap Muhammadiyah?*. Cet. Ke-5, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

---------, (2007). *Kristalisasi Ideologi & Komitmen Bermuhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

---------, (2007). *Gerakan Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah.

Noer, Deliar (1980). *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1990-1942*. Jakarta: LP3ES.

Nursalim, Muh., (2001). "Faksi Abdullah Sungkar dalam Gerakan NII Era Orde Baru", tesis MA, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Partai Keadilan Sejahtera (2004). *Kurikulum Tarbiyah: Panduan LIQA' Anggota Pemula PK Sejahtera*. Yogyakarta: Muliya Press.

Patmono SK (2006), "Aspirasi Islam dalam Konteks Negara Bangsa," dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF (eds.), *Menjadi Indonesia: 13 Abad Eksistensi Islam di Bumi Nusantara*. Jakarta: Mizan dan Yayasan Festival Istiqlal.

Platform Kebijakan Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera (Jakarta: Majelis Pertimbangan Pusat PKS, 2007).

Puti Reno Raudha Thaib, "Sejarah Istana Pagaruyung" dalam http"//groups.yahoo.com/group/RantauNet/message/61114

Qashîmî, 'Abdullah al- (2006). *Al-Tsaurah al-Wahhâbiyyah* (terbit pertama kali pada tahun 1936). Köln, Germany: Al-Makel Verlag.

Rahmat, M. Imdadun (2005). *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Ramli, Andi Muawiyah (ed.) (2006). *Demi Ayat Tuhan: Upaya KPPSI Menegakkan Syari'ah Islam*. Jakarta: OPSI.

Rashid, Ahmed (2000). *Taliban: Militant Islam, Oil, and Fundamentalism in Central Asia*. New Haven: Yale Nota Bene, Yale University Press.

Reid, Anthony, (1988) Vol I. *Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450-1680*. New Haven & London: Yale University Press; 1993 (Vol. II).

Reuters News Service 10 Juli 2008, "Indonesian Islamist party eyes polls and presidency".

Ricklefs, M.C., (1998). *The Seen and the Unseen Worlds in Java: History, Literature and Islam in Court of Pakubuwana II, 1726-1749*. Canberra: AAAS & Allen Unwin.

"Risalah PKS untuk Mengokohkan Ukhuwah dan Ishlah," (27 September 2007).

Robbins, Thomas (1998). *Cult, Convert, and Charisma: The Sociology of New Religious Movements*. London: Sage.

Roy, Oliver (1996). *The Failure of Political Islam, diterjemahkan oleh Carol Volk*. Harvard: Harvard University Press (diterbitkan dalam bahasa Indonesia, *Gagalnya Islam Politik*. Jakarta: Serambi).

----------, (2004). *Globalized Islam: The Search for a New Ummah*. New York: Columbia University Press.

Salim, Arskal dan Azyumardi Azra (2003), "The State and

Shari'a in the Perspective of Indonesian Legal Politics," Introduction dalam buku *Shari'a and Politics in Modern Indonesia*. Singapore: ISEAS.

Schwartz, Stephen Sulaiman (2002). *The Two Faces of Islam: Sa'ud Fundamentalism and Its Role in Terrorism*. New York: Doubleday (diterbitkan dalam bahasa Indonesia: *Dua Wajah Islam: Moderatisme vs Fundamentalisme dalam Wacana Global*, Jakarta: LibForAll Foundation, the Wahid Institute, Center for Islamic Pluralism, dan Blantika).

Setiawan, Farid (2006), "Ahmad Dahlan Menangis (Tanggapan terhadap Tulisan Abdul Munir Mulkhan)," dalam *Suara Muhammadiyah*, 20 Februari 2006.

----------, (2006), "Tiga Upaya Mu'allimin dan Mu'allimat," dalam *Suara Muhammadiyah*, 3 April 2006.

Setiawan, Zudi (2007). *Nasionalisme NU*. Semarang: CV. Aneka Ilmu.

Siba'i, Hani al- (2005). *Balada Jamaah Jihad* (terjemahan oleh Sarwedi M. Hasibuan). Solo: Jazera.

Simanjuntak, Togi (2000). *Premanisme Politik*. Jakarta: ISAI.

Simuh (1996). *Tasawuf dan Perkembangannya dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.

Smith, Anthony L., ed., (2002). *Islam in Southeast Asia: Analysing Recent Developments*. Singapore: ISEAS.

Stephens, Bret, "The Arab Invasion: Indonesia's Radicalized Muslims Aren't Homegrown," http://www.opinionjournal.com/columnists/bstephens/?id=110009951).

----------, "The Exorcist: Indonesian man seeks to create an Islam that will make people smile'," dalam http://www.opinionjournal.com/columnists/bstephens/?id=110009922

Suaedy, Ahmad dkk. "MUI Bungker Islam Radikal," http://www.wahidinstitute.org/indonesia/content/view/718/52/

----------, (2006). Kata Pengantar: "Fatwa MUI dan Problem Otoritas

Keagamaan" dalam *Kala Fatwa Jadi Penjara*. Jakarta: The Wahid Institute.

Subhani, Syaikh Ja'far (1989). *Tawassul, Tabarruk, Ziarah Kubur, Karamah Wali termasuk Ajaran Islam, Kritik atas Faham Wahabi* (terj. Zahir). Jakarta: Pustaka Hidayah.

Suratmin (1982). *Nyai Ahmad Dahlan Pahlawan Nasional: Amal dan Perjuangannya*. Yogyakarta: Penerbit PP. Aisyiyah.

Suryadi, "Kontroversi Kaum Padri: Jika Bukan Karena Tuanku Nan Renceh," dalam http://naskahkuno.blogspot.com/2007/11/kontroversi-kaum-padri-jika-bukan.html

Syadid, Muhammad (2003). *Manhaj Tarbiyah: Metode Pembinaan dalam al-Qur'an*. Jakarta: Robbani Press.

Thalibi, Abu Abdirrahman al- (2006). *Dakwah Salafiyah Dakwah Bijak: Meluruskan Sikap Keras Dai Salafi*. Jakarta: Hujjah Press.

The WAHID Institute 2008, Pluralisme Beragama/Berkeyakinan di Indonesia, "Menapaki Bangsa yang Kian Retak," dalam http://www.wahidinstitute.org/files/_docs/laporan Pluralisme 2008 WahidInstitute.pdf

Turmudi, Endang dan Riza Sihbudi (2005). *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.

US News & World Report (2003), "How Billions in Oil Money Spawned a Global Terror Network," 7 Desember 2003.

Visi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), lihat www.pk-sejahtera.org, "Visi dan Misi".

Wahid, K.H. Abdurrahman (1999). *Islam, Negara, dan Demokrasi*. Jakarta: Erlangga.

---------, (1999). *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*. Jakarta: Grasindo.

---------, (2006), *Islamku Islam Anda Islam Kita.* Jakarta: The Wahid Institute.

---------, (2006), "Kongkow bersama Gus Dur" memperingati Hari Kebangkitan Nasional di Radio Utan Kayu, Jl Utan

Kayu No. 68 H, Jakarta, 20 Mei 2006.

---------, (2006), "Penerapan Perda Syari'ah Mengkudeta Konstitusi," dalam www.gusdur.net.

Waluyo, Sapto (2005). *Kebangkitan Politik Dakwah: Konsep dan Praktik Politik Partai Keadilan Sejahtera di Masa Transisi*. Bandung: Harakatuna Publishing.

Woodward, Mark R., (1989). *Islam in Java: Normative Piety and Mysticism in the Sultanate of Yogyakarta*. Tucson: The University of Arizona Press.

---------, ed. (1999). *Jalan Baru Islam: Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia*. Bandung, Mizan

Yunanto, S. (2004). *Gerakan Militan Islam*. Jakarta: Ridep.

Zada, Khamami, (2002). *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia*. Jakarta: Teraju.

Zastrouw (2007). *Gerakan Islam Simbolik*. Yogyakarta: LKiS.

Zein, Kurniawan dan Saripuddin HA, eds. (2001). *Syariat Islam Yes, Syariat Islam No! Dilema Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945*. Jakarta, Paramadina.

B. Websites

- www.asiaNews.com (Catholic students forced to wear the Islamic veil).
- www.gatra.com (PKS Tolak Pencabutan Perda Bernuansa Islam, 14 Juni 2006).
- www.gusdur.net (Penerapan Perda Syari'ah Mengkudeta Konstitusi).
- www.nu.or.id
- www.pk-sejahtera.org
- http://www.ndi.org/indonesia
- http://www.syirah. com/syirah_ ol/online_ detail.php? id_kategori_ isi=1734, "Intervensi PKS Ke Muhammadi-yah Dilakukan Secara Sistematis."

- http://www.opinionjournal.com/columnists/bstephens/?id=110009951)
- http://www.opinionjournal.com/columnists/bstephens/?id=110009922
- http://www.wahidinstitute.org/indonesia/content/view/718/52/
- http://www.wahidinstitute.org/Dokumen/Detail/?id=22/hl=id/Laporan_Tahunan_The_WAHID_Institute_2008_Pluralisme_Beragama_Berkeyakinan_Di_Indonesia

Gerakan garis keras transnasional di Indonesia terdiri dari kelompok-kelompok di dalam dan di luar institusi pemerintahan/parlemen yang saling mendukung untuk mencapai agenda bersama mereka. Bahaya paling jelas adalah identifikasi Islam dengan ideologi Wahabi/Ikhwanul Muslimin yang sangat ampuh membodohi umat Islam. Mereka menyusup ke bidang-bidang kehidupan bangsa Indonesia, terutama ormas-ormas Islam moderat, institusi pendidikan dan pemerintahan; dan dengan dalih membela dan memperjuangkan Islam, melakukan *cultural genocide* untuk menguasai Indonesia. Formalisasi agama (baca: Islam) yang mereka lakukan hanya dalih untuk merebut kekuasaan politik.

Merespon gerakan ini, PP. Muhammadiyah menerbitkan SKPP Nomor 149/Kep/I.0/B/2006 untuk menyelamatkan Persyarikatan dari infiltrasi partai politik seperti PKS. Nahdlatul Ulama juga mengeluarkan fatwa bahwa Khilafah Islamiyah tidak mempunyai rujukan teologis baik di dalam al-Qur'an maupun Hadits. PBNU mengingatkan bahwa ideologi transnasional berpotensi memecah belah bangsa Indonesia dan merusak *amaliyah diniyah* umat Islam.

Ketegangan kelompok moderat dengan gerakan garis keras adalah manifestasi perseteruan *al-nafs al-muthmainnah* dengan hawa nafsu. Pengetahuan yang terbatas membuat hawa nafsu tidak mampu membedakan antara *washîlah* (jalan) dari *ghâyah* (tujuan), dalam memahami Islam pun kerap mempersetankan ayat-ayat lain yang tidak sejalan dengan ideologinya. Hal ini juga mencerminkan hilangnya daya nalar dalam beragama.

Buku hasil penelitian selama lebih dari dua tahun ini mengungkap asal usul, ideologi, dan agenda gerakan garis keras transnasional yang beroperasi di Indonesia, serta rekomendasi membangun gerakan untuk menghadapi dan mengatasinya secara damai dan bertanggung jawab.

ISBN 978-979-98737-7-4